



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KOTA (RPK)
LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022**



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 perlu dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 agar tidak terjadinya kekosongan dokumen perencanaan daerah sampai dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara pengalokasian Tambahan dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
25. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
26. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
27. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);
30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota untuk mencapai tujuan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Kota adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk priode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang mengacu kepada RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
11. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.

13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe.

BAB II RUANG LINGKUP RPK

Pasal 2

RPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK.

Pasal 3

- (1) RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari:
 - a. tujuan, sasaran dan visi misi RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
 - b. tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan RKPK.

BAB III DOKUMEN RPK

Pasal 4

Sistematika RPK sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum;
- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
- e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. BAB IX Penutup.

Pasal 5

Dokumen RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi:

- a. Pejabat Walikota dan Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- b. Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyusun RKPK Tahun 2023, RKPK Tahun 2024, RKPK Tahun 2025, dan RKPK Tahun 2026;
- c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD Tahun 2023-2026;
- d. Seluruh pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPK.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 8

RPK dapat dilakukan perubahan jika:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
- d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 30 Maret 2022 M
28 Sya'ban 1443 H

WALIKOTA LHOKEUMAWE,

SUWIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 1 April 2022 M
29 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 6

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1. Hubungan antara RPK Lhokseumawe dengan RPJMN	I-8
1.3.2. Hubungan antara RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026	I-8
1.3.3. Hubungan antara RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dengan RPA 2023-2026	I-9
1.3.4. Hubungan antara RPK Lhokseumawe dengan RKPK Lhokseumawe	I-10
1.3.5. Hubungan antara RPK Lhokseumawe dengan Renstra Perangkat Daerah	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-12

BAB II GAMBARAN UMUM II-1

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.1.2. Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.1.3. Kondisi Geologi	II-3
2.1.1.1.4. Kondisi Hidrologi	II-4
2.1.1.1.5. Kondisi Klimatologi	II-5
2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan	II-7
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-8
2.1.1.4. Demografi	II-9
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-11
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-11
2.1.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-11
2.1.2.1.2. Distribusi PDRB	II-14
2.1.2.1.3. Laju Inflasi	II-15
2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita	II-16
2.1.2.1.5. Indeks Rasio Gini	II-17
2.1.2.1.6. Tingkat Kemiskinan	II-18
2.1.2.1.7. Pengangguran	II-19
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-20
2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf	II-20

2.1.2.2.2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-21
2.1.2.2.3.	Angka Harapan Lama Sekolah	II-22
2.1.2.2.4.	Angka Usia Harapan Hidup	II-23
2.1.2.2.5.	Angka Kematian Ibu (AKI)	II-24
2.1.2.2.6.	Indeks Pembangunan Manusia	II-25
2.1.2.2.7.	Persentase Balita Gizi Buruk	II-25
2.1.2.2.8.	Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	II-27
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya	II-28
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-30
2.1.3.1.	Fokus Layanan Urusan Keistimewaan	
2.1.3.2.	Aceh dan Kekhususan	II-30
2.1.3.2.1.	Penyelenggaraan Kehidupan Beragama	II-30
2.1.3.2.2.	Majelis Ulama	II-34
2.1.3.3.	Fokus Layanan Urusan Wajib	II-36
2.1.3.3.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar	II-36
2.1.3.2.1.1.	Pendidikan	II-36
2.1.3.2.1.2.	Kesehatan	II-42
2.1.3.2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-81
2.1.3.2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	II-88
2.1.3.2.1.5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	II-95
2.1.3.2.1.6.	Sosial	II-104
2.1.3.3.2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-110
2.1.3.2.2.1.	Ketenagakerjaan	II-110
2.1.3.2.2.2.	Pangan	II-115
2.1.3.2.2.3.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-115
2.1.3.2.2.4.	Pertanahan	II-123
2.1.3.2.2.5.	Lingkungan Hidup	II-126
2.1.3.2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-132
2.1.3.2.2.7.	Komunikasi dan Informatika	II-136
2.1.3.2.2.8.	Penanaman Modal	II-140
2.1.3.2.2.9.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-142
2.1.3.2.2.10.	Perhubungan	II-156
2.1.3.2.2.11.	Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah	II-164
2.1.3.2.2.12.	Penanaman Modal	II-165
2.1.3.2.2.13.	Kepemudaan dan Olahraga	II-166
2.1.3.4.	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-168
2.1.3.4.1.	Pariwisata	II-168
2.1.3.4.2.	Statistik	II-169
2.1.3.4.3.	Perpustakaan	II-170
2.1.3.4.4.	Kearsipan	II-171
2.1.3.4.5.	Pertanian	II-172
2.1.3.4.6.	Perdagangan	II-173
2.1.3.4.7.	Perindustrian	II-174

2.1.3.4.8.	Kelautan dan Perikanan	II-175
2.1.3.5.	Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	II-175
2.1.3.5.1.	Perencanaan	II-175
2.1.3.5.2.	Keuangan	II-178
2.1.3.5.3.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-179
2.1.3.5.4.	Pengawasan	II-181
2.1.3.5.5.	Sekretariat DPRK	II-183
2.1.3.5.6.	Sekretariat Daerah	II-184
2.1.3.6.	Fokus Urusan Penunjang Urusan Kewilayahan	II-189
2.1.3.6.1.	Kecamatan	II-189
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-194
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-194
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-195
2.1.4.3.	Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.....	II-200
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode sebelumnya	II-202
2.2.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama.....	II-205
2.2.2.	Capaian Indikator Kinerja Terhadap Aspek Pelayanan Umum	II-236
2.3.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	II-266
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBK	III-2
3.1.2.	Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe	III-9
3.1.2.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-10
3.1.2.2.	Pendapatan Transfer	III-14
3.1.2.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	III-14
3.1.2.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah ..	III-18
3.1.2.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	III-21
3.1.3.	Belanja Daerah Kota Lhokseumawe .	III-21
3.1.3.1.	Belanja Operasi	III-23
3.1.3.2.	Belanja Modal	III-24
3.1.3.3.	Belanja Tak Terduga	III-25
3.1.3.4.	Belanja Transfer	III-25
3.1.4.	Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe	III-25
3.1.5.	Neraca Daerah	III-27

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-32
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-33
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-35
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	IV-1
4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-4
4.1.3. Aspek Pelayanan Umum	IV-7
4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	IV-16
4.2. Isu-Isu Strategis Daerah	IV-17
BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKEUMAWA	V-1
5.1. Tujuan dan Sasaran	V-1
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1. Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-4
6.3. Program Pembangunan Daerah	VI-17
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan	VII-1
7.1.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	VII-1
7.1.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe	VII-1
7.1.1.2. Proyeksi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe	VII-8
7.1.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe	VII-10
7.1.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan ...	VII-12
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-6
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2. Pedoman Transisi	IX-2
LAMPIRAN - 1 Cascading	
LAMPIRAN - 2 Metadata Tujuan dan Sasaran	
LAMPIRAN - 3 Metadata Indikator Program	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026	I-8
Tabel	1.2	Hubungan RPJPD Tahun 2005-2025 dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026	I-9
Tabel	1.3	Hubungan RPA Tahun 2023-2026 dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026	I-9
Tabel	2.1	Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-6
Tabel	2.2	Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-6
Tabel	2.3	Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-6
Tabel	2.4	Arah Angin, Kecepatan Rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-7
Tabel	2.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-10
Tabel	2.6	Laju Pertumbuhan PDRB Seri Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-13
Tabel	2.7	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-14
Tabel	2.8	Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan hKabupaten/Kota Tetangga Tahun 2017-2021	II-18
Tabel	2.9	Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-18
Tabel	2.10	Tingkat Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-24
Tabel	2.11	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-28
Tabel	2.12	Situs / Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II-29
Tabel	2.13	Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah	II-30
Tabel	2.14	Jumlah Hafiz Hafizah yang Dibina Tahun 2017-2021	II-31
Tabel	2.15	Rasio ZIS yang Disalurkan dan ZIZ yang Berkumpul Tahun 2017-2021	II-32
Tabel	2.16	Jumlah Mesjid yang Melaksanakan Sholat 5 Waktu dan Jumlah Mesjid yang ada Imam Hafiz Tahun 2017-2021	II-33
Tabel	2.17	Data Mesjid Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-33
Tabel	2.18	Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-34

Tabel	2.19	Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-35
Tabel	2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-36
Tabel	2.21	Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-37
Tabel	2.22	Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022	II-39
Tabel	2.23	Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-41
Tabel	2.24	Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-43
Tabel	2.25	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-43
Tabel	2.26	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-45
Tabel	2.27	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-46
Tabel	2.28	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-47
Tabel	2.29	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ...	II-49
Tabel	2.30	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-50
Tabel	2.31	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-51
Tabel	2.32	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-52
Tabel	2.33	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-53
Tabel	2.34	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-54
Tabel	2.35	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-56
Tabel	2.36	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-56
Tabel	2.37	Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-57

Tabel	2.38	Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ...	II-58
Tabel	2.39	Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2021	II-59
Tabel	2.40	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-60
Tabel	2.41	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	II-60
Tabel	2.42	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-61
Tabel	2.43	Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-62
Tabel	2.44	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-63
Tabel	2.45	Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-64
Tabel	2.46	Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-65
Tabel	2.47	Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-66
Tabel	2.48	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-66
Tabel	2.49	Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-67
Tabel	2.50	Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-68
Tabel	2.51	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-70
Tabel	2.52	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-71
Tabel	2.53	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ..	II-72
Tabel	2.54	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-74
Tabel	2.55	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ...	II-76

Tabel	2.56	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-77
Tabel	2.57	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-78
Tabel	2.58	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-79
Tabel	2.59	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 (Km)	II-82
Tabel	2.60	Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-84
Tabel	2.61	Rasio Panjang Jalan Dengan Per Satuan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ..	II-85
Tabel	2.62	Persentase Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-86
Tabel	2.63	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-86
Tabel	2.64	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-87
Tabel	2.65	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2020	II-89
Tabel	2.66	Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-91
Tabel	2.67	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe 2017-2021	II-92
Tabel	2.68	Rasio PSU dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-93
Tabel	2.69	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-93
Tabel	2.70	Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-94
Tabel	2.71	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-96
Tabel	2.72	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-97
Tabel	2.73	Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-98
Tabel	2.74	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-99

Tabel	2.75	Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-100
Tabel	2.76	Persentase Pembinaan Ormas Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-102
Tabel	2.77	Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-102
Tabel	2.78	Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-104
Tabel	2.79	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-105
Tabel	2.80	Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-106
Tabel	2.81	Persentase Penanganan Anak Terlantar Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-107
Tabel	2.82	Persentase Penanganan Fakir Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-108
Tabel	2.83	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-109
Tabel	2.84	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-110
Tabel	2.85	Persentase Pencari Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-111
Tabel	2.86	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-112
Tabel	2.87	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ..	II-113
Tabel	2.88	Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-115
Tabel	2.89	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-118
Tabel	2.90	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-119
Tabel	2.91	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-120
Tabel	2.92	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-121

Tabel	2.93	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2017-2021	II-122
Tabel	2.94	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-124
Tabel	2.95	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-124
Tabel	2.96	Persentase luas tanah yang Dipetakan di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-125
Tabel	2.97	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-126
Tabel	2.98	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-131
Tabel	2.99	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-131
Tabel	2.100	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2021	II-133
Tabel	2.101	Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-134
Tabel	2.102	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-135
Tabel	2.103	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-137
Tabel	2.104	Persentase Penyebarluasan Informasi Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-138
Tabel	2.104	Persentase Pelayanan Publik yang Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-138
Tabel	2.105	Persentase PD yang Melakukan Pengamanan Data dan Informasi Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-140
Tabel	2.106	Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-141
Tabel	2.107	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-141
Tabel	2.108	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-142

Tabel	2.109 Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2021	II-144
Tabel	2.110 Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021	II-146
Tabel	2.111 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-147
Tabel	2.112 Data Penyaluran Dana Ke Gampong Tahun 2017-2021	II-148
Tabel	2.113 Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 ...	II-149
Tabel	2.114 Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-150
Tabel	2.115 Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-151
Tabel	2.116 Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-152
Tabel	2.117 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-152
Tabel	2.118 Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-153
Tabel	2.119 Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-154
Tabel	2.120 Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-155
Tabel	2.121 Cakupan Pembinaan Kerjasama Antar Desa	II-156
Tabel	2.122 Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-157
Tabel	2.123 Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawem Tahun 2017-2021	II-158
Tabel	2.124 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-159
Tabel	2.125 Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-159
Tabel	2.126 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-160
Tabel	2.127 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-160
Tabel	2.128 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-161

Tabel	2.129 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-162
Tabel	2.130 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017-2021	II-162
Tabel	2.131 Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-163
Tabel	2.132 Fasilitas Keselamatan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-164
Tabel	2.133 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-164
Tabel	2.134 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-165
Tabel	2.135 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-166
Tabel	2.136 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2017 s.d 2021	II-166
Tabel	2.137 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2017 s.d 2021	II-167
Tabel	2.138 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017 s.d 2021	II-167
Tabel	2.139 Objek Wisata Kota Lhokseumawe	II-168
Tabel	2.140 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-171
Tabel	2.141 Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-172
Tabel	2.142 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHK) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-172
Tabel	2.143 Produktivitas Komoditas Pangan (Kg) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-173
Tabel	2.144 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-174
Tabel	2.145 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-174
Tabel	2.146 Produksi Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-175
Tabel	2.147 Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2021	II-180
Tabel	2.148 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-180

Tabel	2.149	Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-181
Tabel	2.150	Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-182
Tabel	2.151	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-183
Tabel	2.152	Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-187
Tabel	2.153	Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-189
Tabel	2.154	Persentase Binaan PKK Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-190
Tabel	2.155	Persentase Penertiban dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-191
Tabel	2.156	Persentase Penanganan di Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-192
Tabel	2.157	Persentase Pengawasan Dokumen Gampong Tahun 2017-2021	II-193
Tabel	2.158	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2017-2021 ..	II-196
Tabel	2.159	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-197
Tabel	2.160	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-198
Tabel	2.161	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-199
Tabel	2.162	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-199
Tabel	2.163	Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2021	II-200
Tabel	2.164	Persentase Ketaatan terhadap RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-201
Tabel	2.165	Ruang Terbuka Hijau Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-202
Tabel	2.166	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 1	II-208
Tabel	2.167	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 2	II-213
Tabel	2.168	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 3	II-218
Tabel	2.169	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 4	II-225

Tabel	2.170	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 5	II-229
Tabel	2.171	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019 Berdasarkan Misi 6	II-132
Tabel	2.172	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019 Berdasarkan Misi 7	II-235
Tabel	2.173	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022	II-237
Tabel	2.174	Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Lhokseumawe	II-267
Tabel	3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-5
Tabel	3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-9
Tabel	3.3	Anggaran dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-10
Tabel	3.4	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-11
Tabel	3.5	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-12
Tabel	3.6	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-12
Tabel	3.7	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-13
Tabel	3.8	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-15
Tabel	3.9	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-16
Tabel	3.10	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-17
Tabel	3.11	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-17
Tabel	3.12	Anggaran dan Realisasi Dana Desa (DD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-18
Tabel	3.13	Anggaran dan Realisasi DBH Pajak dari Provinsi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-19
Tabel	3.14	Anggaran dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-20

Tabel	3.15	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-21
Tabel	3.16	Realisasi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-22
Tabel	3.17	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-26
Tabel	3.18	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-27
Tabel	3.19	Tingkat Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-28
Tabel	3.20	Analisis Rasio Keuangan Kota Lhokseumawe Tahun Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-31
Tabel	3.21	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-34
Tabel	3.22	Surplus/ (Defisit) Riil Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-36
Tabel	3.23	Realisasi SilPA Tahun 2017-2021 Kota Lhokseumawe	III-36
Tabel	5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	V-3
Tabel	6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI-2
Tabel	6.2	Capaian Kinerja Tujuan 1	VI-4
Tabel	6.3	Capaian Kinerja Tujuan 2	VI-5
Tabel	6.4	Capaian Kinerja Tujuan 3	VI-6
Tabel	6.5	Capaian Kinerja Tujuan 4	VI-6
Tabel	6.6	Capaian Kinerja Tujuan 5	VI-7
Tabel	6.7	Capaian Kinerja Tujuan 6	VI-8
Tabel	6.8	Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe	VI-9
Tabel	6.9	Fokus Pembangunan	VI-9
Tabel	6.10	Tema Pembangunan	VI-10
Tabel	6.11	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	VI-11
Tabel	6.12	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VI-20
Tabel	6.13	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Kota Lhokseumawe	VI-28
Tabel	7.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VII-4
Tabel	7.2	Proyeksi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VII-9
Tabel	7.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VII-11

Tabel	7.4	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VII-13
Tabel	7.5	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VII-14
Tabel	7.6	Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VII-16
Tabel	8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VIII-2
Tabel	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kota Lhokseumawe	II-2
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe	II-4
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II-5
Gambar 2.5	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)	II-7
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-9
Gambar 2.7	Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kota Lhokseumawe 2015-2021	II-10
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe 2021	II-11
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017-2021 (%)	II-11
Gambar 2.10	Inflasi Kota Lhokseumawe 2017-2021 (%)	II-15
Gambar 2.11	PDRB Perkapita ADHB Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	II-16
Gambar 2.12	PDRB Perkapita ADHK Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)	II-17
Gambar 2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe	II-19
Gambar 2.14	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-20
Gambar 2.15	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-21
Gambar 2.16	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-22
Gambar 2.17	Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-23
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-25
Gambar 2.19	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-26
Gambar 2.20	Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-39
Gambar 2.21	Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan Tahun 2017-2022	II-41
Gambar 2.22	Nilai Kelulusan dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-42
Gambar 2.23	Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2021	II-80
Gambar 2.24	Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020	II-116
Gambar 2.25	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020	II-117
Gambar 2.26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL) Tahun 2020	II-127
Gambar 2.27	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	II-143

Gambar 2.28	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2017-2020 Kota Lhokseumawe	II-195
Gambar 2.29	Kerangka Analisis RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022	II-204
Gambar 2.30	Capaian Indikator Kinerja Utama	II-206
Gambar 2.31	Capaian Indikator Kinerja Daerah	II-236
Gambar 3.1	Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2017-2021 (dalam Milyar Rupiah)	III-8
Gambar 3.2	Kontribusi Komponen PAD Terhadap Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-14
Gambar 3.3	Realisasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-23
Gambar 3.4	Pertumbuhan Aset Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-30
Gambar 3.5	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021	III-35
Gambar 3.6	Realisasi SilPA Tahun 2017-2021 Kota Lhokseumawe	III-37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, dimana tata cara perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 akan berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada Tahun 2022. Pasal 201 poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Agar tidak terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan menengah Kota Lhokseumawe sampai dengan terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 menjadi dasar disusunnya Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dilakukan berdasarkan empat pendekatan penting. Pertama, pendekatan teknokratik yaitu proses penyusunan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPK. Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPK melalui proses Peraturan Walikota Lhokseumawe. Keempat, pendekatan *top down* dan *bottom up* yang

merupakan proses perencanaan yang berproses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sesuai hirarki pemerintahan. Untuk itu dalam perumusan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJP Kota Lhokseumawe sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Tahun 2017- 2022;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku

Dokumen RPK Lhokseumawe dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan telah memperhatikan:

- a. penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020- 2024;
- b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Perangkat Daerah (PD) masing-masing melalui evaluasi capaian RKPK atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021;
- c. evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. kebijakan nasional;
- f. regulasi yang berlaku;
- g. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
 4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
21. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
22. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;

27. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
28. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam menjaga sinergisitas, keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, maka Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJP Aceh Tahun 2012-2032 dan RPA Aceh 2023-2026 serta RPJP Kota Lhokseumawe 2005-2025. RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 juga menjadi pedoman dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
2. Rencana Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK);
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Lhokseumawe untuk periode 1 tahun.

Dengan demikian diharapkan akan terciptanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnya secara terperinci hubungan antara RPK Lhokseumawe 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Hubungan antara RPK Lhokseumawe dengan RPJMN

Penyusunan RPK Lhokseumawe 2023-2026 dilakukan dengan penyelerasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Keterkaitan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hubungan RPJMN Tahun 2020–2024 dengan RPK
Lhokseumawe Tahun 2023–2026

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	RPK Tahun 2023-2026
PROGRAM PRIORITAS		
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan dan Kesehatan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat Pelaksanaan Syariat dan Budaya
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrassi

1.3.2. Hubungan antara RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023–2026

Keterkaitan RPJP Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2026 dengan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hubungan RPJPD Tahun 2005–2025 dengan RPK
Lhokseumawe Tahun 2023–2026

No.	RPJPD Tahun 2005-2025	RPK Tahun 2023-2026
	MISI	TUJUAN
1.	Mewujudkan Masyarakat yang Islami	2. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam
2.	Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Daerah dengan Titik Berat pada Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata	5. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3.Peingkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (clean and good govermance), demokrasi dan Berlandaskan Hukum	1.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, serta sarana dan Prasarana yang memadai	6.Meningkatkan Infrastruktur Berkualitas
6.	Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Sehat, Asri dan Lestari	3.Peingkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
7.	Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Tentram, Tertib, Damai, dan Bersatu	1.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1.3.3. Hubungan antara RPK Lhokseumawe Tahun 2023–2026 dengan RPA 2023–2026

Keterkaitan RPA 2023-2026 dengan RPK Lhokseumawe 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Hubungan RPA Tahun 2023–2026 dengan RPK
Lhokseumawe Tahun 2023–2026

No.	RPA Tahun 2023-2026	RPK Tahun 2023-2026
	ISU STRATEGIS	
1.	Peningkatan Kualitas Demokrasi	2. Peningkatan Kualitas Demokrasi

No.	RPA Tahun 2023-2026	RPK Tahun 2023-2026
	ISU STRATEGIS	
2.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur	1.Reformasi Birokrasi
3.	Penguatan Adat Istiadat dan Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam	3.Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam
4.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4.Peningkatan Kualitas SDM
5.	Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	4.Peningkatan Kualitas SDM
6.	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	5.Peningkatan Kualitas Kesehatan
7.	Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	7.Pertumbuhan Ekonomi
8.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	7.Pertumbuhan Ekonomi
9.	Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan	9.Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan
10.	Optimalisasi Kemandirian Pangan	7.Pertumbuhan Ekonomi
11.	Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran	7.Pertumbuhan Ekonomi
12.	Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis	8.Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk Peningkatan Kualitas Hidup
13.	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana	6.Pengelolaan Lingkungan Hidup
14.	Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan	-

1.3.4. Hubungan antara RPK Lhokseumawe dengan RKPK Lhokseumaewe

RPK Lhokseumawe Tahun 2023–2026 nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPK, sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPK, penyusunan RKPK juga berpedoman pada RPA, program strategis nasional, dan pedoman

penyusunan RKPK. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RKPK berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.5. Hubungan anatar RPK Lhokseumawe dengan Renstra Perangkat Daerah

RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dalam rentang waktu 4 (empat) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPK yang berfungsi sebagai dokumen perencanaann teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman pembangunan Kota Lhokseumawe selama 4 (empat) tahun kedepan bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha guna mewujudkan pembangunan secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah:

1. menjabarkan visi dan misi RPJP dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;

2. menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), KU-APBK, PPAS dan APBK Tahun 2023-2026;
3. menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2023-2026;
4. mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026;
5. merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;
6. menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
7. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen Rencana Pembangunan Kota (RPK) yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 4 (empat) tahun mendatang. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan akan tercapai pada akhir masa periode RPK Tahun 2026.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB IX. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

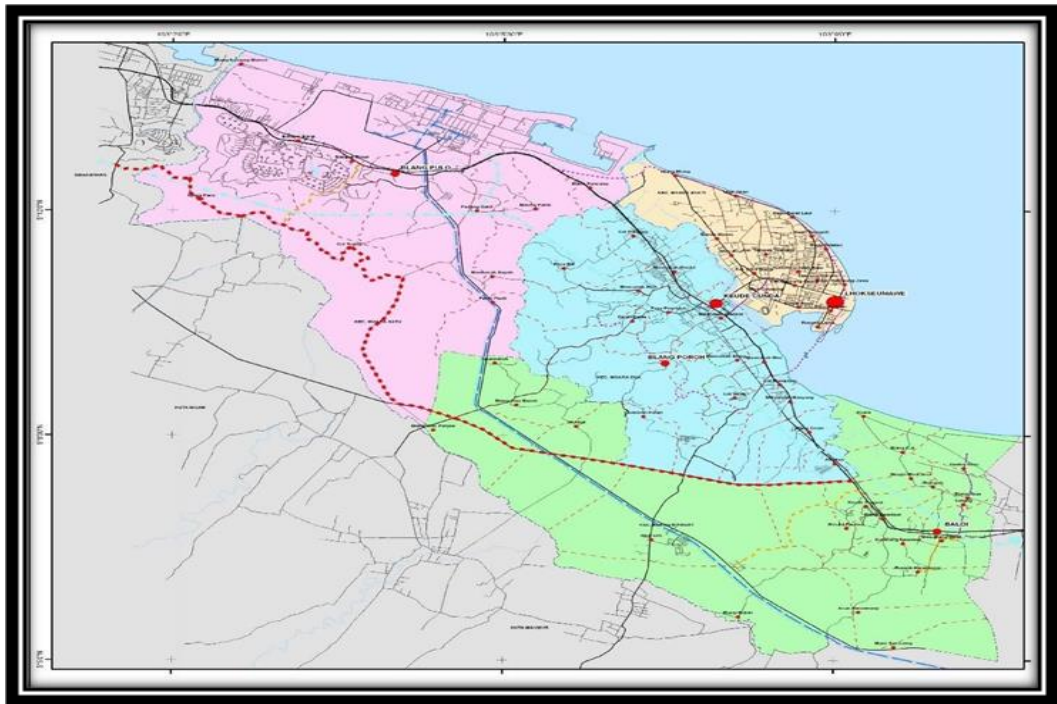
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20' –97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Basarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Lhokseumawe

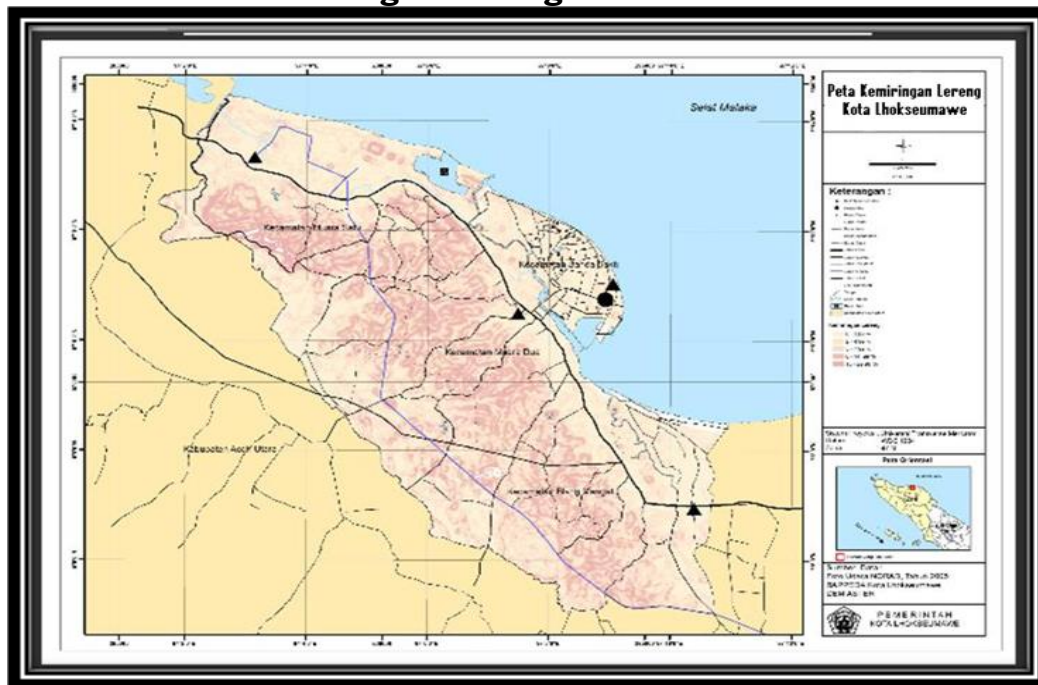


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe

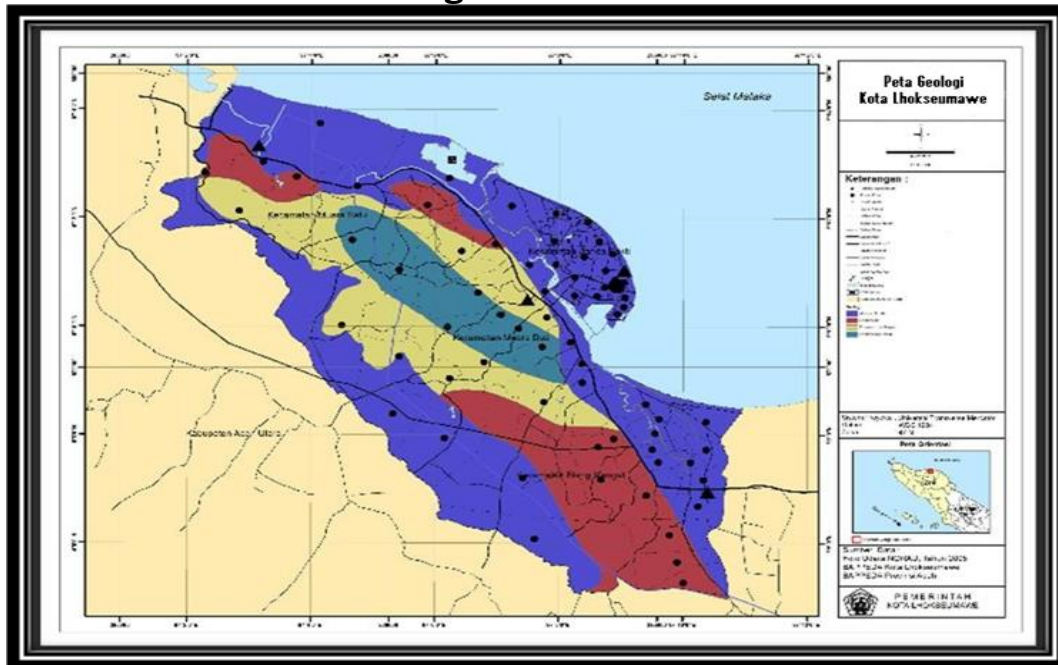


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeue dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluvial berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeue berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe

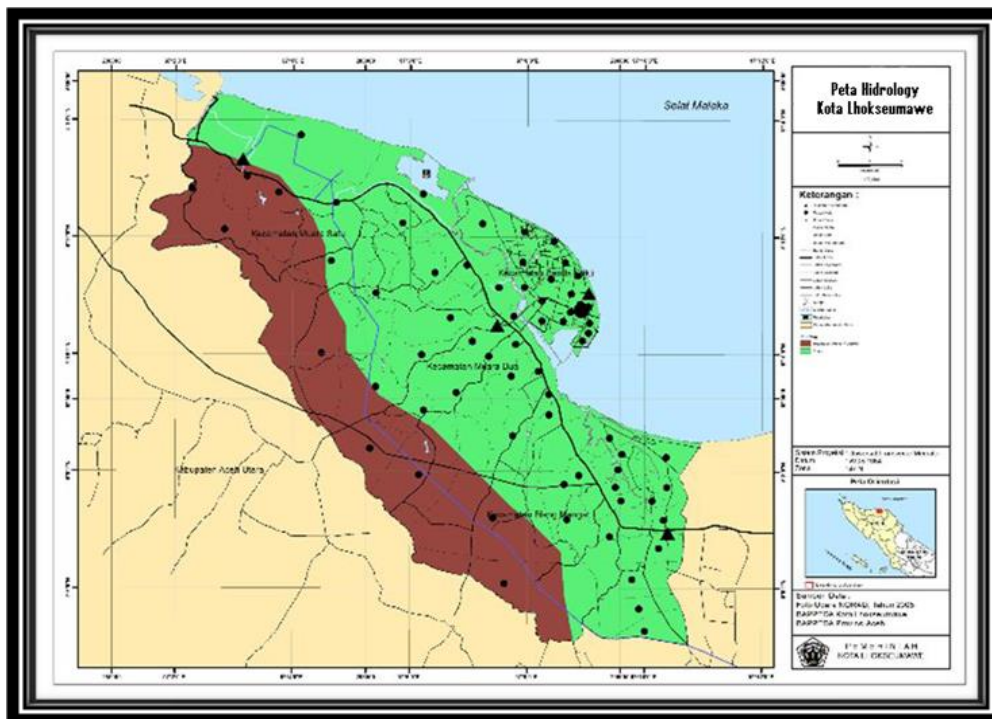


Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2021, rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe berkisar antara 21⁰C dan suhu udara maksimum 33⁰C dan rata rata kelembapan udara berkisar 81% sampai dengan 86%. Dan rata rata tekanan udara berkisar 1.009 mb sampai dengan 1011 mb. Lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Maret sebesar 77 hingga 78 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 12 dan 5 hari. Sementara itu, jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 50 persen yang terjadi pada Bulan Oktober dengan jumlah hari hujan yaitu 21 hari sedangkan rata-rata kelembapan udara tertinggi terjadi pada Bulan Mei sebesar 85 persen dan terendah terjadi pada Bulan Juli yaitu sekitar 78 persen. Berikut tabel temperatur suhu Kota Lhokseumawe Tahun 2021:

Tabel 2.1
Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Bulan	Temperatur		
	Min	Maks	Rata-rata
Januari	21.2	32.4	26.5
Februari	21.0	32.5	26.5
Maret	21.0	33.8	27.4
April	22.5	33.6	27.3
Mei	23.2	33.1	27.2
Juni	23.1	32.9	27.1
Juli	21.4	32.8	26.7
Agustus	23.2	33.5	27.4
September	23.0	34.6	26.8
Oktober	22.6	33.7	27
November	22.9	32.0	26.2
Desember	21.9	31.7	25.7

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2022.

Tabel 2.2
Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari
Januari	20.5	3	78.1
Februari	48.5	3	71.5
Maret	34.5	3	75.9
April	44.5	6	64.3
Mei	287.5	17	56.4
Juni	150.5	9	70.2
Juli	160.0	7	63.4
Agustus	6.5	2	66.7
September	83.5	5	40.2
Oktober	41.5	6	42.9
November	150.5	11	47.5
Desember	455.0	17	38.1

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2022

Tabel 2.3
Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Bulan	Rata-rata	Tekanan Udara (mb)
Januari	83	1010.7
Februari	84	1011.5
Maret	82	1009.9
April	85	1010.0
Mei	87	1008.9
Juni	85	1008.9
Juli	84	1008.5
Agustus	82	1008.5
September	84	1009.2
Oktober	83	1008.6
November	88	1009.6
Desember	89	1010.0

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2022.

Tabel 2.4

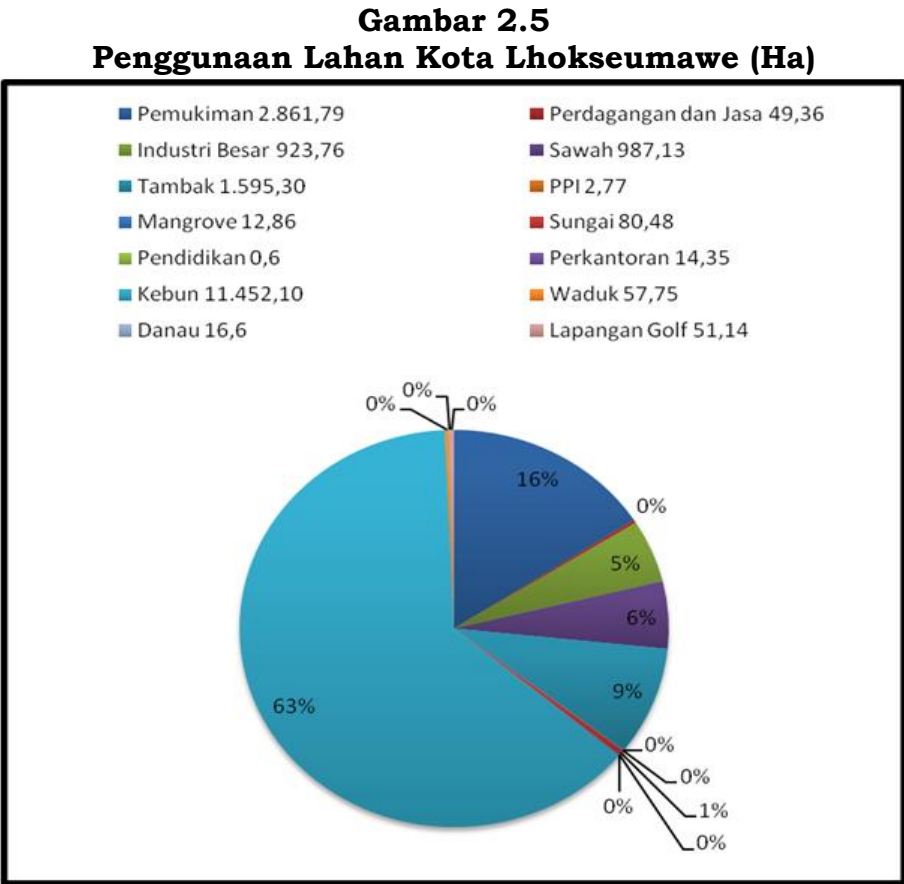
Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2021

Bulan	Arah Angin	Kecepatan Rata-rata	Kecepatan Maksimum	Arah Maksimum
Januari	E	4	14	100
Februari	NE	3	14	110
Maret	SW	4	10	080
April	SW	4	23	120
Mei	NE	4	11	060
Juni	SE	3	10	130
Juli	SW	4	12	040
Agustus	SE	4	13	290
September	SE	4	14	110
Oktober	SW	4	9	020
November	SE	4	12	060
Desember	SE	5	14	090

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2022.

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2022.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:

1. zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
 - zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
 - zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;
 - zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
3. zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

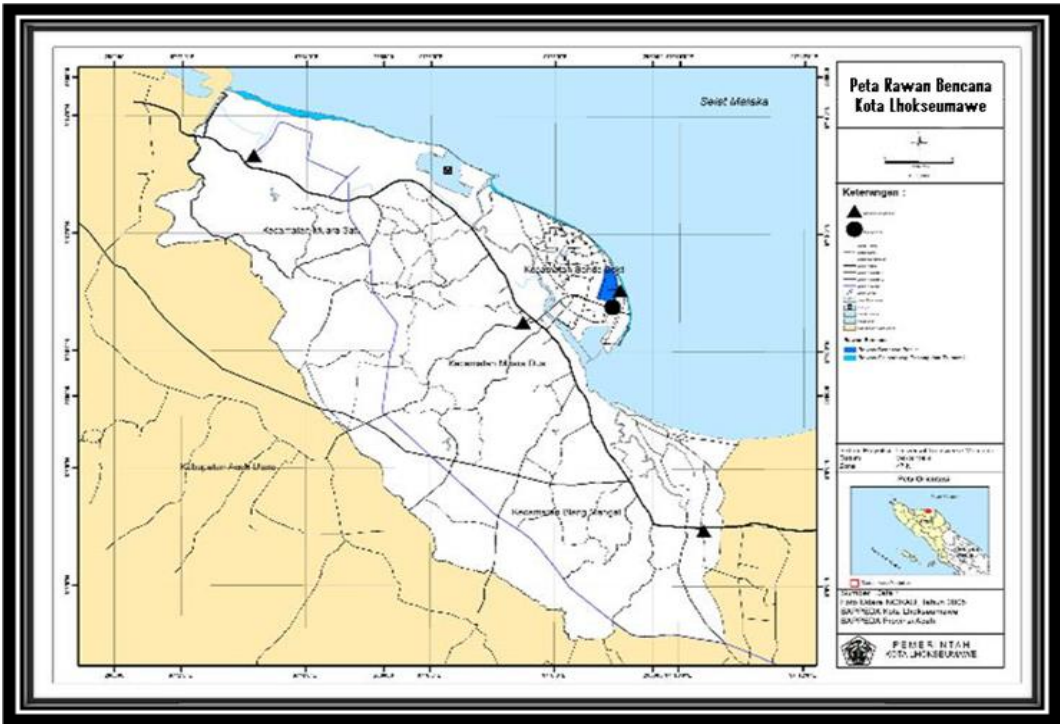
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kota Lhokseumawe juga merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe didominasi pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya,

sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam.

Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan wilayah yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan wilayah yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Berikut Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe:

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe



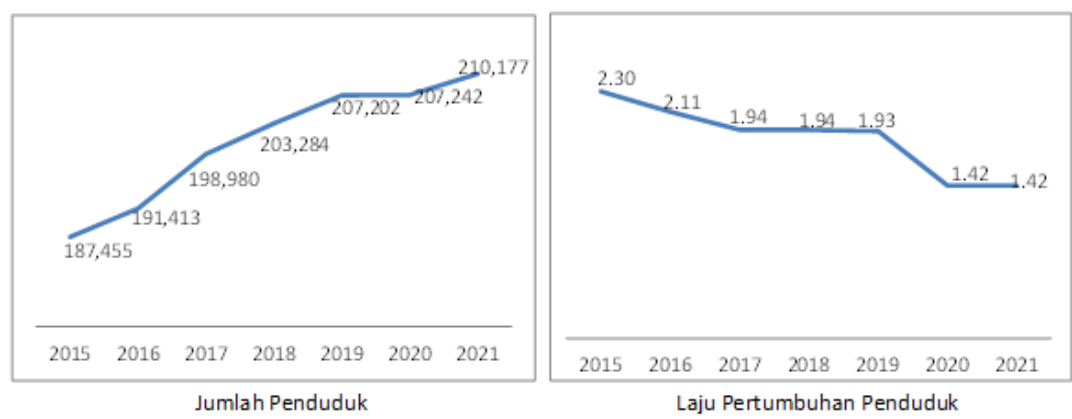
Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

2.1.1.4 Demografi

Pada Tahun 2021 penduduk Kota Lhokseumawe mencapai 210.177 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe 1.42 persen. Dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran dan migrasi.

Kendati laju pertumbuhan penduduk tidak mengalami perubahan, jumlah penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021 menurun sangat drastic dikarenakan berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.7
Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2021



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2022.

Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota
Lhokseumawe Tahun 2021

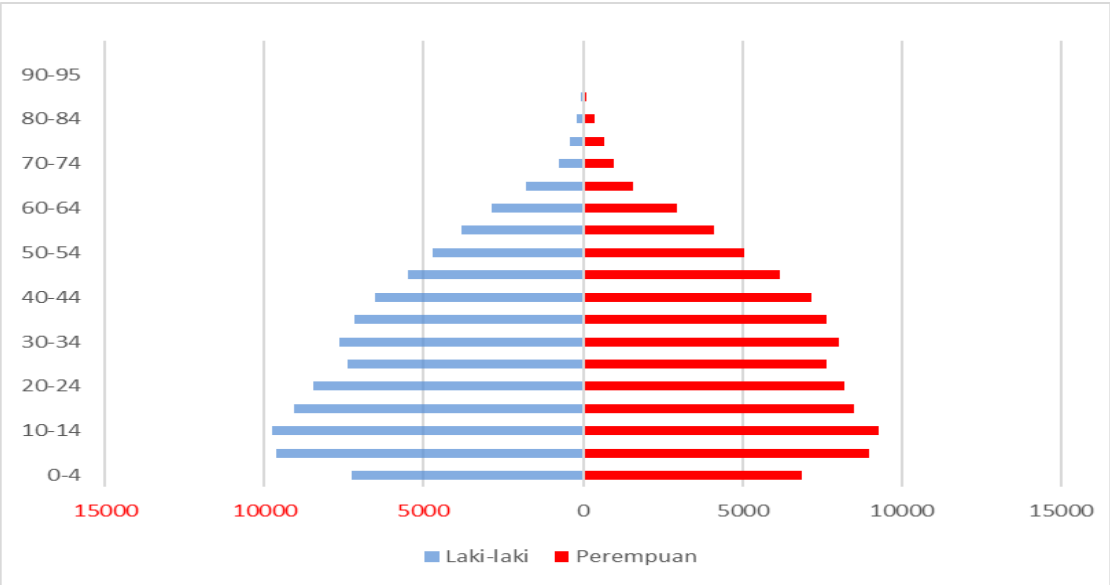
No	Kecamatan	Persentase penduduk	Kepadatan penduduk	Rasio Jenis kelamin
1	Blang Mangat	14.51	543	99
2	Muara Dua	28.68	1043	98
3	Muara Satu	16.17	608	99
4	Banda Sakti	40.64	7.599	100
Lhokseumawe		100	1.161	99

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2022.

Berdasarkan sebaran umur dan jenis kelamin, gambaran penduduk Kota Lhokseumawe disajikan pada Gambar 2.7, Piramida penduduk tersebut memperlihatkan bahwa sebagai besar penduduk Kota Lhokseumawe berada pada usia muda belum produktif, yang didominasi oleh usia sekolah yang tergolong dalam kelompok umur 0-14 Tahun yaitu sebesar 51.754 jiwa, kelompok umur 15-59 Tahun

(usia produktif) sebesar 122.849 jiwa dan kelompok umur 60 Tahun keatas (lanjut usia) sebesar 12.823 jiwa

Gambar 2.8
Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021



Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2022

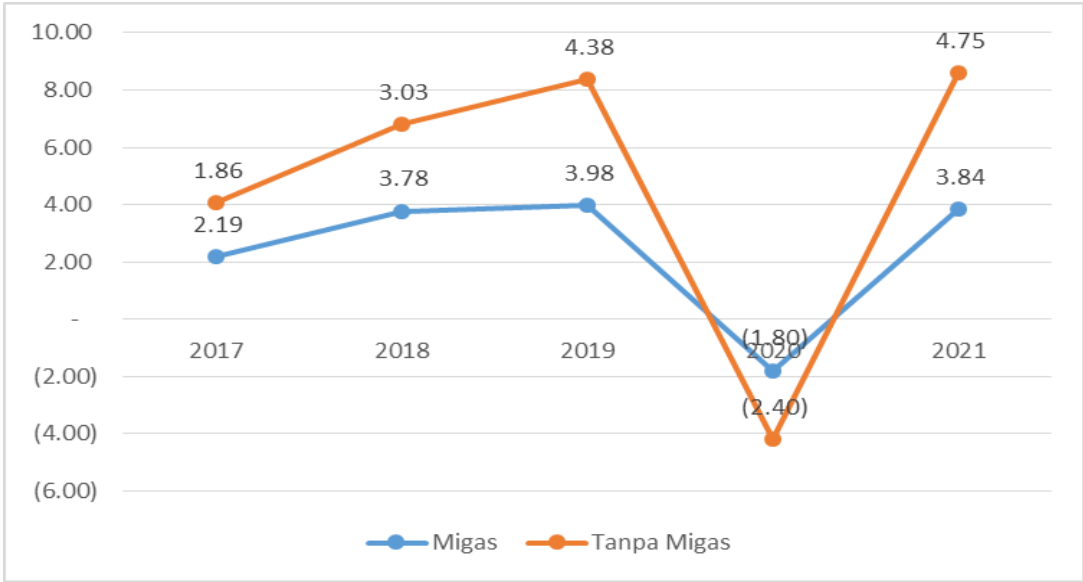
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2017-2021), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama tanpa migas, Namun, Pertumbuhan ekonomi ini sama-sama mengalami kontraksi pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 diperlihatkan oleh gambar berikut:

Gambar 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB
Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha, 2017-2022.

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan (-1.80%) akibat terjadinya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid-19 maka pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 3.84 persen. Perekonomian Kota Lhokseumawe tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021, rata-rata relative tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-2.40 persen). Pada Tahun 2021 perekonomian tanpa migas tumbuh signifikan sebesar 4.75%.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Seri Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,41	4,65	5,66	3,85	-1,65
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,13	-4,09	3,37	2,53	7,10
C	Industri Pengolahan	4,07	7,27	2,05	1,15	0,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,40	6,95	6,31	2,84	-0,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,59	6,52	18,25	3,10	2,32
F	Konstruksi	-6,21	1,69	5,94	4,08	-1,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,48	1,51	2,51	-3,85	4,17
H	Transportasi dan Pergudangan	3,51	1,96	1,88	-22,31	23,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,83	18,79	10,61	-6,91	-0,85
J	Informasi dan Komunikasi	3,02	0,55	3,30	12,35	6,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,55	1,70	9,34	0,73	-3,81
L	Real Estate	8,38	6,13	6,43	2,80	3,57
M,N	Jasa Perusahaan	6,05	6,71	5,01	0,28	0,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,94	5,63	4,18	-0,17	5,16
P	Jasa Pendidikan	6,75	7,92	7,55	3,53	1,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,80	5,51	7,17	3,63	9,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,67	6,70	8,88	2,12	2,28
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,19	3,78	3,98	-1,80	3,84
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	1,86	3,03	4,38	-2,40	4,75

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.

Berdasarkan Tabel 2.6 Perkembangan pertumbuhan PDRB Seri Menurut Lapangan Usaha dengan migas dan non migas periode 2017 -2021 (c to c) yang menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi. Pada Tahun 2017–2021 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Pada Tahun 2017, terdapat terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Pertambangan dan Kontruksi masing-masing sebesar -7.13%, dan -6.21%. Pada Tahun 2018 hanya 1 (satu) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi yaitu lapangan usaha Pertambangan sebesar -4.09%. Kemudian pada tahun 2019 perekonomian relatif membaik. Tahun 2020 lapangan usaha mengalami kontraksi untuk 3 (tiga) lapangan usaha yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran:Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pada Tahun 2021 terdapat 3 lapangan usaha yang kontraksi yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, lapangan usaha Kontruksi, dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Komunikasi

2.1.2.1.2 Distribusi PDRB

Peran dari masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,88	9,14	9,37	10,10	9,79
B	Pertambangan dan Penggalan	0,39	0,37	0,37	0,39	0,39
C	Industri Pengolahan	18,97	19,48	18,78	18,86	18,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,17	0,17	0,18	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	14,43	14,23	14,68	15,51	14,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,78	22,39	21,91	21,31	21,37
H	Transportasi dan Pergudangan	11,59	10,87	10,42	8,19	9,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,82	1,98	1,89	1,79
J	Informasi dan Komunikasi	3,39	3,18	3,14	3,53	3,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,84	2,84	2,98	3,04	2,89
L	Real Estate	4,34	4,52	4,69	4,87	4,80
M,N	Jasa Perusahaan	0,95	0,99	1,01	1,02	1,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	4,25	4,36	4,56	4,68
P	Jasa Pendidikan	1,31	1,39	1,52	1,66	1,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,05	3,10	3,28	3,49	3,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,23	1,26	1,32	1,38	1,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		83,25	82,73	83,35	83,31	83,64

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.

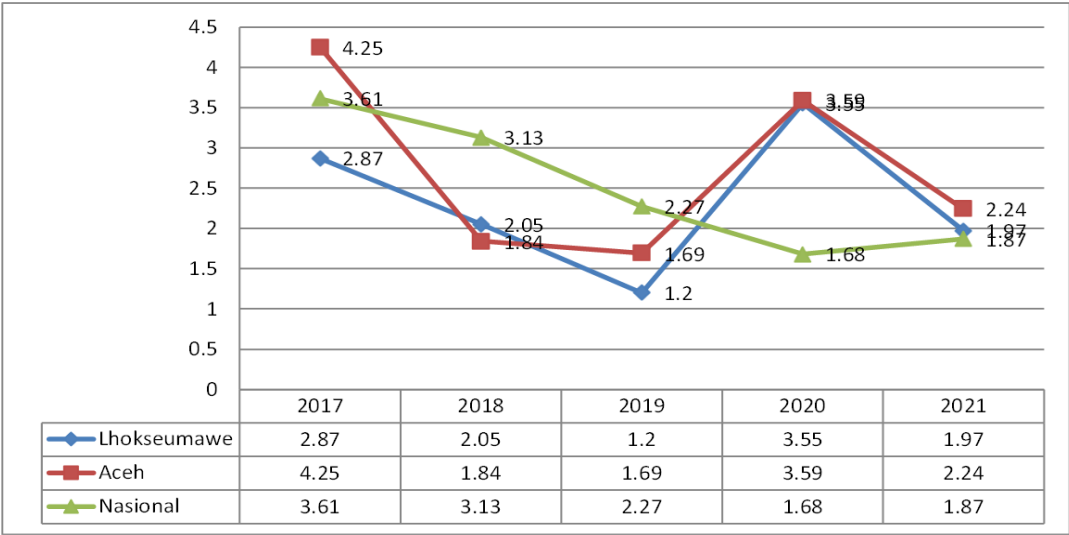
Pada Tabel 2.7 Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Ecera; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada Tahun 2017 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 22.78%, kemudian Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 22.39%, lalu menurun lagi sampai Tahun 2021 sebesar 21.37%.

Kemudian kontribusi kedua terbesar yaitu dari lapangan usaha Industri Pengolahan. Pada Tahun 2017 lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 18.97%, dan meningkat pada Tahun 2018 sebesar 19.48%, serta menurun lagi pada Tahun 2019 sebesar 18,78 dan mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2020-2021.

2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi yang terjadi di Lhokseumawe terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan ,minuman dan tembakau sebesar 1,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelompok transportasi sebesar 0,84 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Tingkat Inflasi tahun kalender Desember 2021 (Januari-Desember) 2021 untuk KotaLhokseumawe sebesar 1,97 persen, Kota Meulaboh sebesar 2,07 persen, Kota Banda Aceh sebesar 2,41 persen. Untuk Provinsi Aceh sebesar 2,24 persen dan Nasional sebesar 1,87 persen.

Gambar 2.10
Inflasi Kota Lhokseumawe 2017-2021 (%)



Sumber : BPS, Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2022.

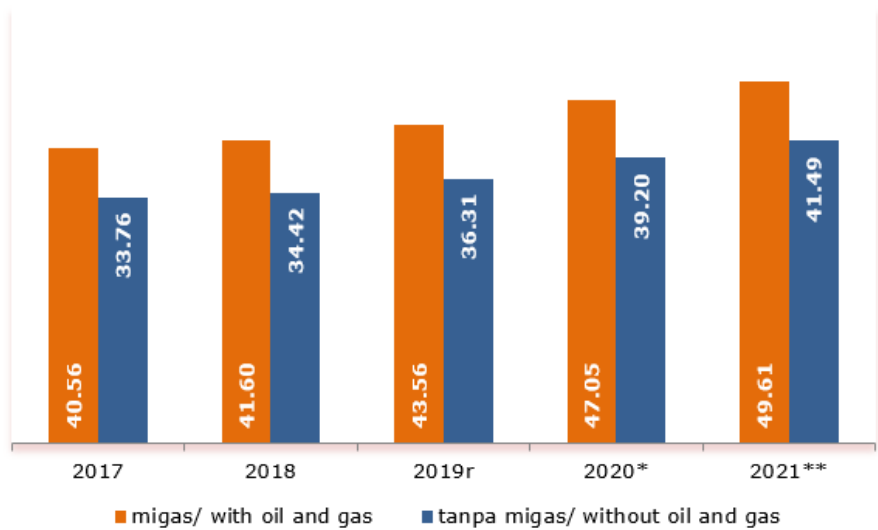
Dari gambar 2.10 diatas dapat dijelaskan bahwa Inflasi di Kota Lhokseumawe sangat fluktuatif dimana inflasi Tahunan menurun drastis dari 2.87 di Tahun 2017 menjadi 1.2 di Tahun 2019

kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2020 yaitu 3.55 dan pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu 1.97, Sedangkan Inflasi Aceh Tahun 2017 meningkat sebesar 4.25 begitu juga untuk nasional 3.61 dan sampai Tahun 2021 mengalami penurunan untuk aceh sebesar 2.24 dan untuk Nasional sebesar 1.87.

2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Berdasarkan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 dalam gambar 2.11 dibawah ini:

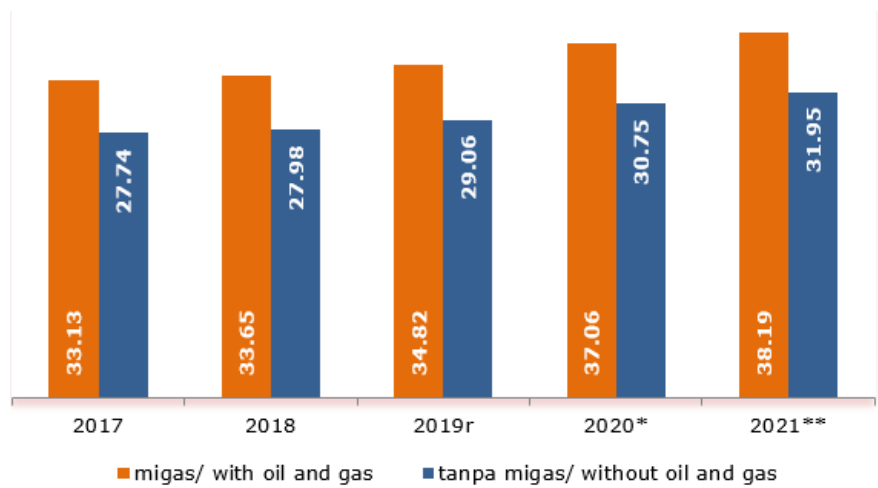
Gambar 2.11
PDRB Per Kapita ADHB, Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, 2017-2021

Dari gambar 2.11 di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan PDRB Per kapita Kota Lhokseumawe dengan ADHB memiliki tren meningkat setiap tahun, dari Tahun 2017 PDRB Per Kapita ADHB tercatat sebesar 40,56 juta dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 49,61 juta. Demikian pula dengan PDRB Per Kapita ADHB tanpa migas, pada tahun 2017 tercatat sebesar 33,76 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 41,49 juta.

Gambar 2.12
PDRB Per Kapita ADHK, Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, 2017-2021

Dari gambar 2.12 di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan PDRB Per kapita Kota Lhokseumawe dengan ADHK memiliki tren meningkat juga setiap tahun, dari Tahun 2017 PDRB Per Kapita ADHK dengan migas tercatat sebesar 33,13 juta dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 38,19 juta. Demikian pula dengan PDRB Per Kapita ADHK tanpa migas, pada Tahun 2017 tercatat sebesar 27,74 juta dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 31,95 juta.

2.1.2.1.5 Indeks Rasio Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan individu. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0-1 dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Tabel 2.8
Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi
Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Lhokseumawe	0,291	0,305	0,310	0,307	0,296
Aceh Utara	0,266	0,292	0,312	0,261	0,283
Kota Langsa	0,342	0,356	0,363	0,356	0,340
Aceh	0,329	0,325	0,319	0,323	0,324

Sumber: Analisis Indeks Gini Kab/Kota Provinsi Aceh, 2022.

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Rasio Gini Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Kota Langsa dan Provinsi Aceh masih dibawah 0,4 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah.

2.1.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.9 dibawah ini:

Tabel 2.9
Tingkat Kemiskinan Kota Lhoksemawe Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	24.440	23.880	23.050	22.690	23.380
Persentase Penduduk Miskin	12.32	11.81	11.18	10.80	11.16

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2021.

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2017-2021 bergerak secara dinamis, terlihat bahwa pada Tahun 2017 persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 12.32% dan Tahun 2021 mengalami kenaikan yakni 11.16 % atau 23.380 jiwa, hal ini sangat

dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang mempersempit aktifitas ekonomi dan pelaku usaha.

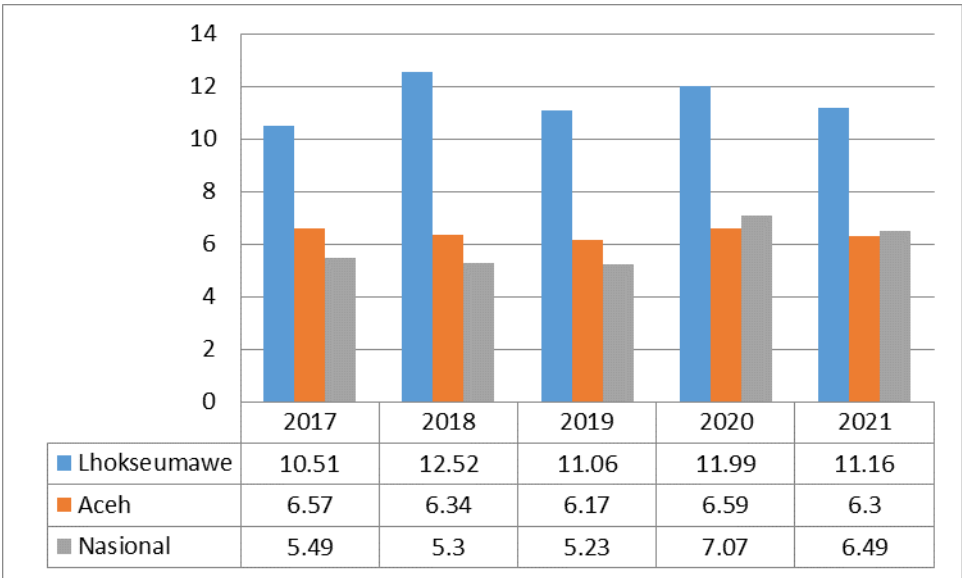
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat mengatasi dampak pandemi yang terjadi.

2.1.2.1.7 Pengangguran

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Permasalahan pengangguran umumnya lebih banyak terdapat di daerah perkotaan sebagai efek dari kecinya lapangan pekerjaan yang tercipta pada kurun waktu 2017-2021.

Gambar 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan Gambar di atas Kota Lhokseumawe Tahun 2018 memperlihatkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 12,52% sedangkan untuk Aceh 6,34% dan Nasional 5,3%, selanjutnya untuk Tahun 2021 terjadi penurunan untuk Kota Lhokseumawe yaitu 11,16%, sedangkan untuk Aceh terjadi kenaikan fluktuatif antara Tahun 2018-2021 dan untuk nasional juga mengalami fluktuatif anantara Tahun 2018-2021.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

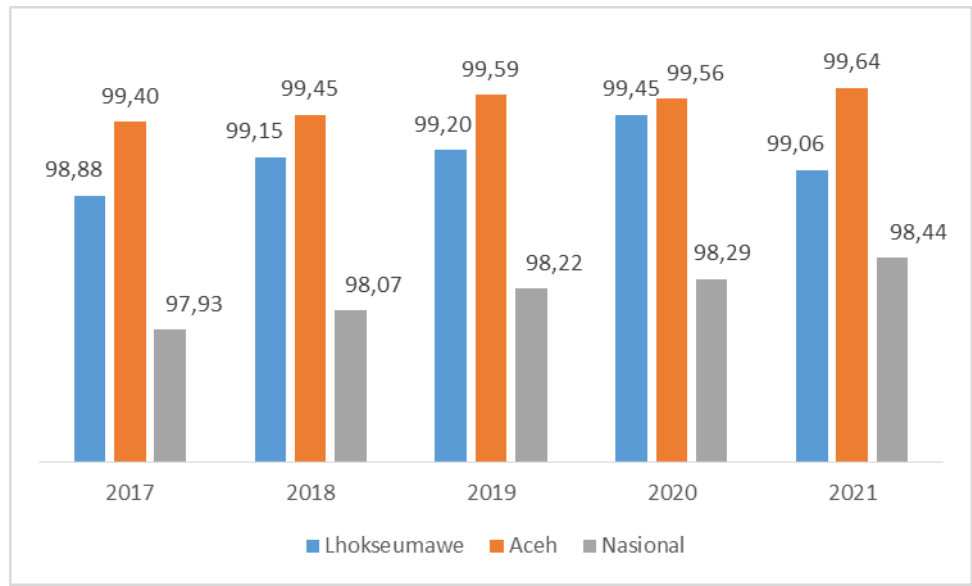
2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf

Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk:

- 1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- 2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- 3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Berikut gambar 2.14 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021:

Gambar 2.14
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas
Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2022

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Lhokseumawe selama periode ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 98,88 % pada Tahun 2017 menjadi 99,06 % pada Tahun 2021

sehingga angka buta aksara tinggal sebesar 0,94 % lagi. Hal ini menunjukkan bahwasanya perlu ditingkatkan program-program yang dapat menurunkan angka melek huruf sehingga Kota Lhokseumawe terbebas dari buta huruf.

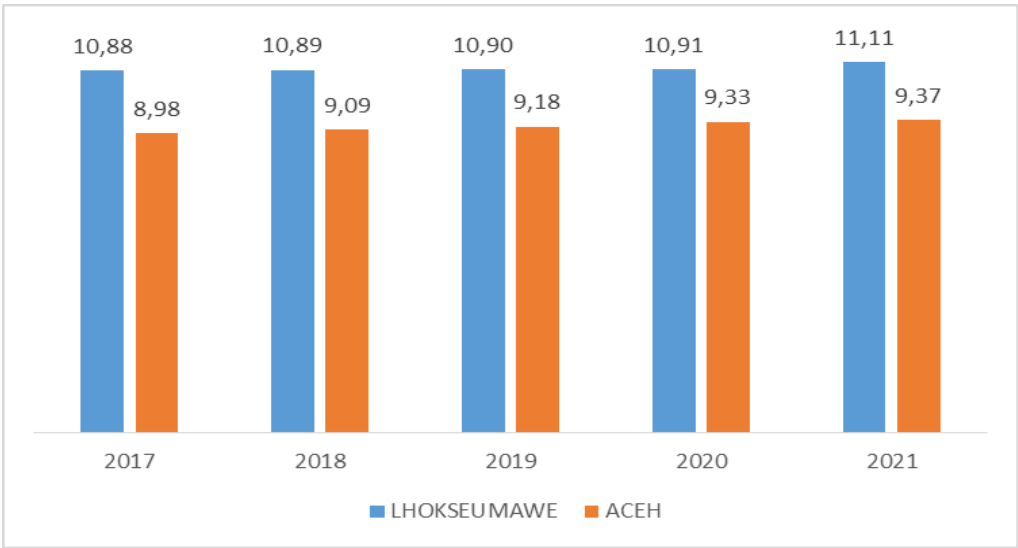
2.1.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 adalah sebesar 10,88. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,23 pada Tahun 2021 sebesar 11,11. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut ini

Gambar 2.15
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021



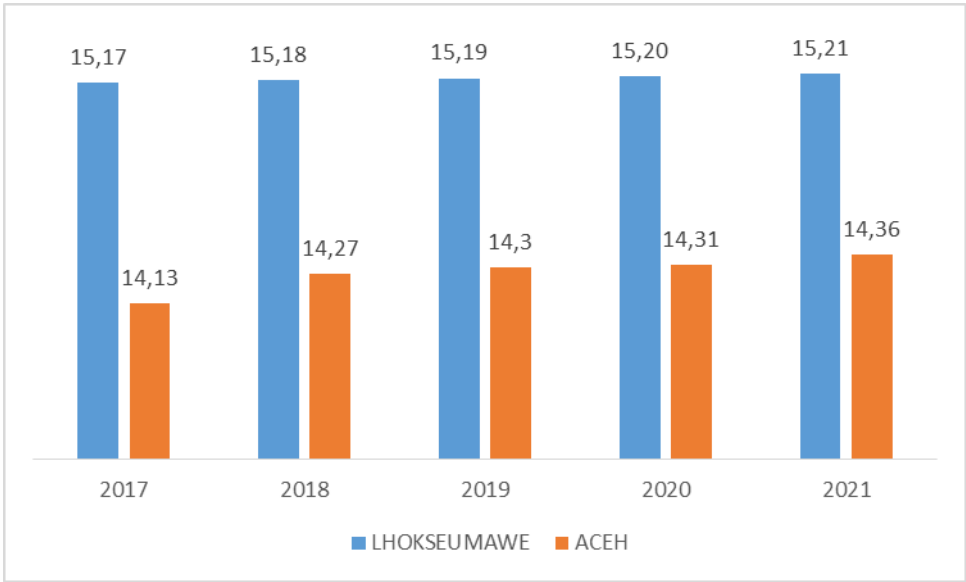
Sumber : BPS Aceh, 2022.

Dari Gambar 2.14 dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2021 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi Aceh, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 11,11% sedangkan provinsi sebesar 9,37% .

2.1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari Tahun ke Tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah sudah berada di atas rata-rata nasional (14,36). Berikut angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe dalam gambar 2.16 berikut ini:

Gambar 2.16
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Aceh, 2022.

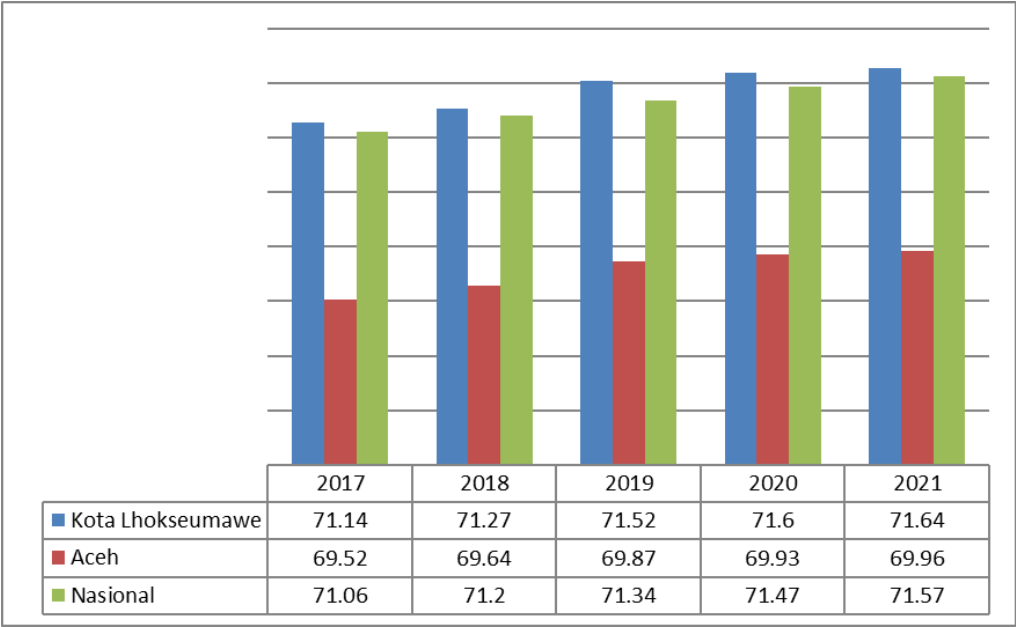
Gambar 2.16 di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 15,17% meningkat menjadi 15,21% pada akhir Tahun 2021. Angka ini juga menunjukkan bahwa bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe masih di atas angka provinsi yang hanya mencapai 14,13% pada Tahun 2017 dan 14,36% pada Tahun 2021.

2.1.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keb21erhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.

Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 Tahun merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup produktif dan mandiri. Berikut gambar angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2017 s.d 2021:

Gambar 2.17
Angka Usia Harapan Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Aceh, 2022.

Jika dilihat dari Gambar 2.17 rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 s.d 2021 terjadi

peningkatan setiap tahunnya. Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 71,14 lebih baik dari Aceh sebesar 69,52 dan Nasional sebesar 71.06. Dan pada tahun 2021 Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe sebesar 71,64 lebih baik dari Aceh sebesar 69,96 dan Nasional sebesar 71,57.

2.1.2.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2017 angka kematian ibu menjadi 23.42 dan kemudian pada Tahun 2018 tidak terjadi kasus kematian ibu sehingga pada Tahun 2019 menjadi 47.44 pada tahun 2020 meningkat mencapai 161.29 sedangkan di tahun 2021 terus meningkat mencapai 294.9. Untuk mengatasi peningkatan jumlah kematian ibu adalah meningkatkan pertolongan pasca persalinan oleh tenaga kesehatan professional di fasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

Tabel 2.10
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

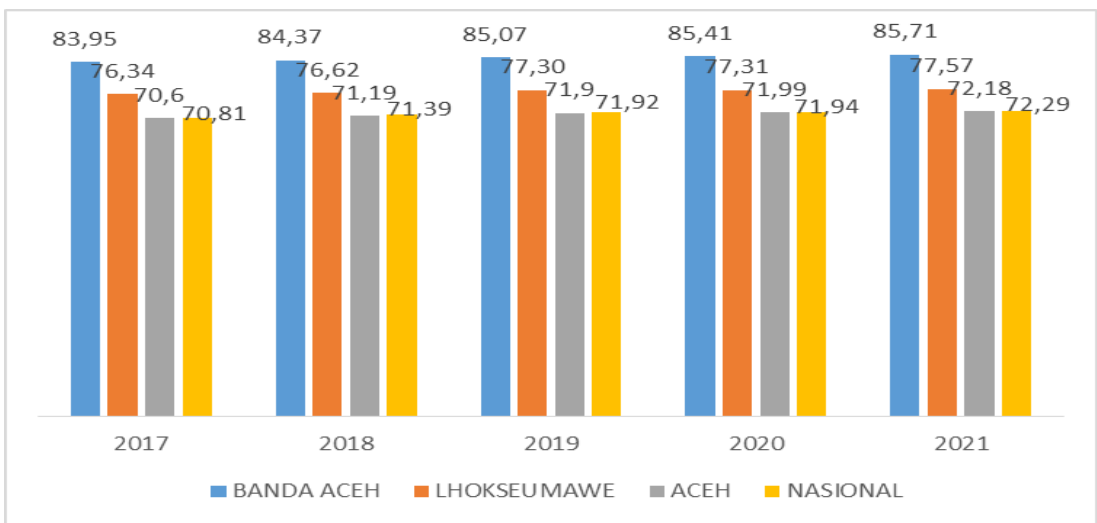
Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian Ibu Hamil	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKI
2017	Banda Sakti	0	1933	23.42
	Muara Dua	0	1097	
	Muara Satu	0	796	
	Blang Mangat	1	443	
2018	Banda Sakti	0	1941	0
	Muara Dua	0	1129	
	Muara Satu	0	697	
	Blang Mangat	0	432	
2019	Banda Sakti	1	1958	47.44
	Muara Dua	1	1144	
	Muara Satu	0	624	
	Blang Mangat	0	489	
2020	Banda Sakti	3	1945	161.29
	Muara Dua	2	1135	
	Muara Satu	1	792	
	Blang Mangat	1	468	
2021	Banda Sakti	4	1741	294.9
	Muara Dua	6	689	
	Muara Satu	1	841	
	Blang Mangat	1	257	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

2.1.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut gambar 2.18 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe antara Tahun 2017-2021:

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Aceh, 2022.

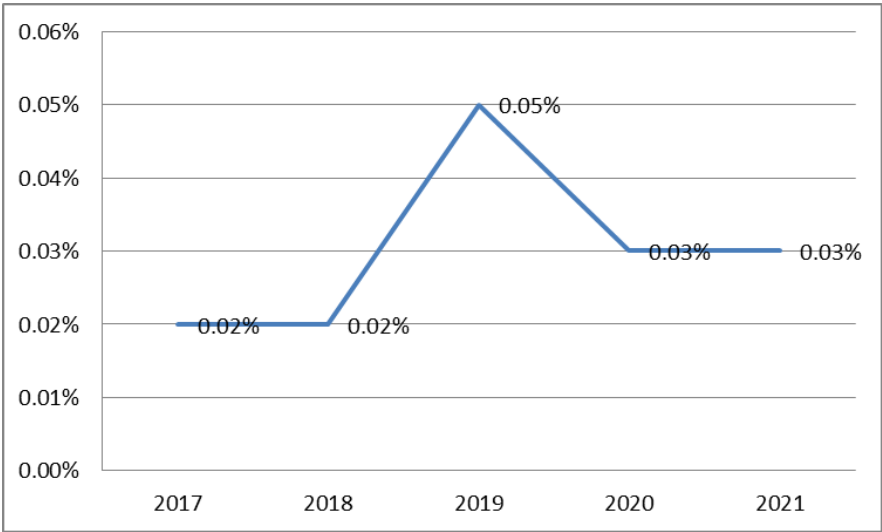
Jika dilihat dari nilainya, Provinsi Aceh memperoleh nilai IPM sebesar 72,18 pada Tahun 2021, sedangkan untuk IPM Kota Banda Aceh mempunyai nilai yang sangat tinggi sebesar 85.71 dan disusul dengan Kota Lhokseumawe sebesar 77.57 di Tahun 2021.

2.1.2.2.7 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan

adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Gagalnya anak untuk mencapai aspek akademis dan sosial akibat gizi buruk tentu saja memiliki dampak negatif yang berkelanjutan sepanjang hidupnya apabila tidak segera disembuhkan. Berikut gambar Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 :

Gambar 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022

Dari gambar 2.19 di atas dapat di lihat persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 s.d 2021 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2017 dan 2018 persentase balita gizi buruk 0.02 % dan 2019 persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 0.05 %, selanjutnya di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,03 % dan pada Tahun 2021 tidak berubah mencapai 0,03 % persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe .

2.1.2.2.8 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berdasarkan laporan harian Covid-19 Kota Lhokseumawe tanggal 20 Januari 2022 yaitu :

1. total suspek : 1.690 orang
2. suspek dalam pemantauan : 0 orang
3. suspek selesai pemantauan : 1.690 orang
4. jumlah proable meninggal hari ini : 0 orang
5. jumlah kasus konfirmasi positif : 1.694 orang
6. kasus konfirmasi positif dirawat di RS : 2 orang
7. kasus konfirmasi positif isolasi mandiri : orang
8. kasus konfirmasi positif selesai isolasi : 1612 orang
9. kasus konfirmasi positif meninggal : 80 orang

Capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Lhokseumawe, Jum'at 21 Januari 2022 pukul 07:08 WIB tercatat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama telah mencapai 3.069 orang, atau 111,3 % dari target awal yang jumlahnya sekitar 2.757 orang. Lalu Nakes yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis II sebanyak 2.812 orang atau 102,0 %. Sedangkan Nakes yang sudah mendapat dosis III sebanyak 1.872 orang atau 67,9%.

Sementara itu, vaksinasi dosis I bagi kelompok lanjut usia (Lansia) mencapai 7.197 orang, atau sekitar 66,02% dari target sebanyak 10.901. Lansia yang telah tuntas melakukan suntikan dosis II sebanyak 1.930 orang atau sekitar 17,7%. Pada kelompok Pelayanan Publik target vaksinasinya yaitu 18.397 orang. Pelayanan Publik yang sudah melakukan vaksinasi dosis I sebanyak 22.852 orang, atau setara 124,2%. Untuk Pelayanan Publik yang sudah melakukan vaksinasi dosis II sebanyak 17.632 Orang, atau 95,8%.

Kemudian Target vaksinasi pada kelompok Masyarakat umum berjumlah 91.336 orang. Sebanyak 79,183 orang telah melakukan vaksinasi dosis I, atau sekitar 86,69%. Sedangkan 24.149 orang, atau sekitar 26,4% telah mendapatkan dosis II sesuai waktu yang ditetapkan, dan sebanyak 27 orang atau 0,11% telah mendapatkan vaksin dosis ke III. Selanjutnya, sebanyak 17.746 orang remaja telah melakukan vaksinasi dosis I atau sekitar 83,73% dari target sasaran

21.194 orang. Sedangkan suntikan dosisi II telah diberikan kepada 7.312 remaja, atau setara dengan 34,5 %, serta kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosisi I sebanyak 3.760 orang atau 18,13%, dan Kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosisi II sebanyak 13 orang atau 0,1.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni di setiap daerah merupakan perayaan tahunan yang menjadi wadah untuk mempertunjukan keunikan budaya dari berbagai daerah. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa hari yang dimeriahkan dengan musik, tarian, hingga ritual dalam paradenya.

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.11
Penyelenggara Festival Seni Budaya
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

No	Kegiatan
1	Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
2	Pengirim Tim Kesenian Ke LN
3	Anugerah Budaya
4	Audisi Paduan Suara GBN
5	Festival dan Lomba Karya Seni
6	Festival Permainan Rakyat
7	Hari Kesenian Daerah
8	Festival Rapai Uroeh
9	Festival Seudati
10	Festival Cut Bang Cut Kak
11	Festival Lomba Seni Lukis
12	Festival Lomba Lagu Qasidah
13	Festival Seni Budaya Islami

No	Kegiatan
14	Festival Lomba Syiar Budaya Islam
15	Festival Seni Budaya Antar Sekolah
16	Audisi Penyanyi Cilik
17	Pelatihan Pengembangan Kesenian
	Total

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022.

Dari tabel 2.11 di atas dapat tergambarkan bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 terdapat 17 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan untuk tiap Tahunnya.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini:

Tabel 2.12
Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi	Makam	Tugu	Monumen/Museum	Benteng	Tempat Bersejarah	Jmlh
1.	Kec. Banda Sakti	- Tgk. Chik Dinunong - Tgk. Dihokseumawe - Teuku Mahadraja Abdul Hamid dan Meriam Belanda - Tgk. Sayed Muhammad Nadir - Tgk. Ulei Utan - Syaikh Al-Kalaliy	Pahlawan TNI	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	Kurok-Kurok		9
2.	Kec. Muara Satu	- Potroe Neng - Tgk. Syiah Hudam - Tgk. Chik Dipaloh - Tgk. Jrad Meuindram - Tgk. Chik Buket Bruek Krueng				- Goa Jepang - Goa Ibrahim Tapa dan Cot Bukulah	7
3.	Kec. Blang Mangat	- prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng - Mualim Taufiq Shaleh - Tgk. Batee Meutarah	Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng				4
4.	Kec. Muara Dua		Pahlawan TKR	Rumah Adat Ulee Balang			2
Jumlah		14	3	2	1	2	22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022.

Dari tabel 2.12 di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki 22 (dua puluh dua) unit situs/bangunan cagar budaya diantaranya situs makam sebanyak 9 (sembilan) makam yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, situs tugu sebanyak 2 (dua) tugu di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat , situ benteng dan goa sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat) yang terdapat di Kecamatan Muara Satu.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh dan Kekhususan

2.1.3.1.1 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

A. Syariat Islam

Indeks pembangunan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan dilaksanakan Survey Indeks Pembangunan Syariah adalah untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaanya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator indeks Pembangunan Syariah)

Tabel 2.13
Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah

Tipe	Kepemilikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Yayasan	0	0	4	4	2
	Pribadi	0	0	0	0	0
B	Yayasan	0	0	4	4	4
	Pribadi	0	0	0	0	0
C	Yayasan	0	0	23	23	8
	Pribadi	0	0	0	0	0
D	Yayasan	0	0	12	12	4
	Pribadi	0	0	0	0	0
Jumlah Type		0	0	43	43	18
Non Type		55	58	22	27	54
Jumlah Dayah Keseluruhan		55	58	65	70	72
Jumlah Guru Dayah		394	427	550	559	567

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2022.

Tabel 2.13 di atas menggambarkan kondisi jumlah dayah dan guru dayah di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2017-2021. Dayah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 berjumlah 55 dayah Non Type, dengan jumlah guru berjumlah 394 orang. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2021, jumlah dayah di Kota Lhokseumawe berjumlah 72 dayah, dengan tipe A sebanyak 2 dayah, Tipe B 4 dayah, dan Tipe C sebanyak 8 dayah, dan dayah Tipe D 4 dayah dengan jumlah guru dayah sebanyak 567 orang. Keseluruhan dayah tersebut semuanya berada di bawah kepemilikan yayasan. Penilaian Type Dayah dilakukan oleh Provinsi setiap 2 (dua) tahun sekali, maka dari itu tahun 2019 dan 2020 jumlah tipenya sama. Sementara jumlah dayah bertambah dikarenakan munculnya dayah baru dari balai pengajian naik status/grade ke dayah. Pada Tahun 2021 jumlah dayah type A, C dan D berkurang dari Tahun 2020 yang berjumlah 43 dayah menjadi 18 dayah.

Tabel 2.14
Jumlah Hafiz Hafizah yang dibina
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Hafizh hafizah	20	20	15	10	13
Jumlah Hafizh Hafizhah		20	20	15	10	13

Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2022.

Dari Tabel 2.14 diatas dapat dilihat jumlah hafiz hafizah Kota Lhokseumawe yang mendapat pembinaan Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 20 orang, Tahun 2019 sebanyak 15 orang, Tahun 2020 sebanyak 10 orang dan Tahun 2021 sebanyak 13 orang.

Pengelolaan Harta Agama menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Syariat Islam dalam masyarakat. Dengan adanya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat menegaskan komitmen pemerintahan Lhokseumawe dalam merealisasikan Syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan

kewenangan untuk mengelola Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Adapun Jumlah Zakat, Infak, Sadaqah yang disalurkan dan Jumlah Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) yang terkumpul di Kota Lhokseumawe dari periode Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Rasio ZIS yang Disalurkan dan ZIS yang Terkumpul
Tahun 2017-2021

Uraian	Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ZIS yang tersalurkan	4.864.468.500	5.366.564.920	8.929.010.000	6.611.208.400	6.815.193.600
Jumlah ZIS yang Terkumpul	7.167.082.575	7.423.041.072	7.644.838.340	7.645.219.592	6.862.029.359
Rasio	0,67	0,72	1,16	0,84	0,99

Dari tabel 2.15 diatas dapat dilihat bahwa Jumlah ZIS yang disalurkan secara rata-rata mengalami peningkatan, serta ZIS yang terkumpul juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah ZIS mencapai rasio 1,16 yang berarti jumlah ZIS yang disalurkan melebihi jumlah yang terkumpul. Hal ini terjadi karena penyaluran ZIS Tahun 2017 dan Tahun 2018 lebih kecil penyalurannya dari ZIS yang terkumpul. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 jumlah ZIS yang disalurkan lebih kecil dari ZIS yang terkumpul.

B. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi mesjid dalam Wilayah Kota Lhokseumawe yang melaksanakan sholat 5 waktu dan mesjid yang ada imam hafis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
Jumlah Mesjid yang melaksanakan Sholat 5 Waktu dan Jumlah Mesjid yang ada Imam Hafiz Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Mesjid yang ada imam hafiz	Jumlah Mesjid yang melaksanakan Sholat 5 Waktu	Jumlah Mesjid Se-Kota Lhokseumawe
2017	2	50	50
2018	2	51	51
2019	2	51	51
2020	3	51	51
2021	3	52	52

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah mesjid yang melaksanakan sholat fardhu 5 (lima) waktu di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebanyak 50 mesjid, pada Tahun 2021 terjadi 1 penambahan mesjid yaitu mesjid Teuku Muda Kuala di Gampong Blang Panyang kecamatan Muara Satu.

Tabel 2.17
Data Mesjid Kota Lhokseumawe Tahun 2021

No	Kecamatan	Mesjid Agung	Mesjid Jamik	Mesjid Kecamatan	Mesjid Gampong	Total
1.	Banda Sakti	1	1	1	15	18
2.	Muara Dua	-	1	2	8	11
3.	Muara Satu	-	1	1	8	10
4.	Blang mangat	-	2	1	10	13
Kota Lhokseumawe						52

Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2021 terbanyak di Kecamatan Banda Sakti yaitu 18 mesjid, sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Muara satu yaitu 10 mesjid.

2.1.3.1.2 Majelis Ulama

Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah Ulama dan Sosialisasi Fatwa.

A. Pendidikan Kader Ulama (PKU)

Majelis Permusyarawatan Ulama Kota Lhokseumawe telah menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) setiap tahun, dimana pada Tahun 2017 peserta yang mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak 30 orang, peserta yang ikut berpartisipasi dalam PKU semuanya laki-laki. Pada Tahun 2021 Majelis Permusyarawatan Ulama Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU), jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 20 orang laki-laki serta 20 orang perempuan. Pada tahun 2021 peserta pendidikan kader ulama tidak lagi didominasi oleh peserta laki-laki akan tetapi pada tahun tersebut peserta perempuan juga mengikuti pendidikan kader ulama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Peserta		Keterangan
		Lk	Pr	
1	2017	30 (orang)	-	
2	2018	30 (orang)	-	
3	2019	30 (orang)	-	
4	2020	20 (orang)	-	
5	2021	20 (orang)	20 (orang)	

Sumber : Sekretariat MPU 2022

B. Musyawarah Ulama

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang

mereka hadapi. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini:

Tabel 2.19
Kegiatan Musyawarah Ulama
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Kegiatan	Tahun					Total
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Sidang Paripurna Ulama	30	32	40	40	40	182
2	Rapat koordinasi MPU	3	2	2	2	2	11
4	Nadwah/Mubahasah Ilmiah/Simposium	1	1	1	1	-	4
5	Muzakarah masalah Keagamaan	1	1	1	-	1	4
6	Pengkajian Aliran Sempalan	-	1	1	-	-	2
7	Rapat Pimpinan MPU	6	7	5	5	5	28
8	Eksistensi Peran Ulama	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	41	44	50	48	49	232

Sumber : Sekretariat MPU, 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2017-2021 kegiatan musyawarah ulama di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sebanyak 232 kali, dimana pada Tahun 2017 sebanyak 41 kali, , Tahun 2018 sebanyak 44 kali, Tahun 2019 sebanyak 50 kali, Tahun 2020 sebanyak 48 kali dan pada Tahun 2021 sebanyak 49 kali. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi Sidang Paripurna Ulama dilakukan sebanyak 182 kali, Rapat Koordinasi MPU sebanyak 11 kali, Nadwah/Muhasah Ilmiah sebanyak 4 kali, Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 4 kali, dan Rapat Pimpinan MPU sebanyak 28 kali.

C. Sosialisasi Fatwa/Himbauan/Taushiah

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe hingga saat ini telah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam hasil dari MPU Aceh sebanyak 5 Fatwa/himbauan/ Taushiah, pada Tahun 2017, 8 Fatwa/ himbauan/ Taushiah Tahun 2018, 7 Fatwa/ himbauan/ Taushiah pada Tahun 2019, 13 Fatwa/ himbauan/ Taushiah pada Tahun 2020 dan 12 Fatwa/ himbauan/ Taushiah pada Tahun 2021.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.2.1.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP per jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP.

Berikut tabel Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.3	APK SD/MI	105.28	104,48	103,49	105.63	101,74
2	SMP/MS					
2.3	APK SMP/MS	102,89	99,80	110.88	101	104,24
3	SMA/MA/SMK					
3.3	APK SMA/MA/SMK	94,93	93,20	95,22	91.8	95,79

Sumber : [http:// apkapm.data.kemdikbud.go.id/](http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI tertinggi pada Tahun 2017 sebesar 105.28. Sedangkan terendah pada Tahun 2021 sebesar 101.74 artinya dari tabel diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/ MS seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah menengah pertama telah memperoleh pendidikan tertinggi terlihat pada Tahun 2021 Angka partisipasi kasar sebesar 104,24 dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 99,80. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 95,79 dan terendah sebesar 91.80 yang terjadi pada Tahun 2020.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Realisasi kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi murni SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun per jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.

Bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 Tahun (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari tabel 2.21 menunjukkan bahwa APM lebih kecil dari APK, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian. Berikut tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021.

Tabel 2.21
Angka Partisipasi Murni (APM)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1,3	APM SD/MI	93,10	93,52	96,98	93,66	90,48
2	SMP/MS					
2,3	APM SMP/MS	82,49	79,17	88,79	79,05	78,10
3	SMA/MA/SMK					
3,3	APM SMA/MA/SMK	72,43	73,86	77,38	70,5	71,19

Sumber : <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

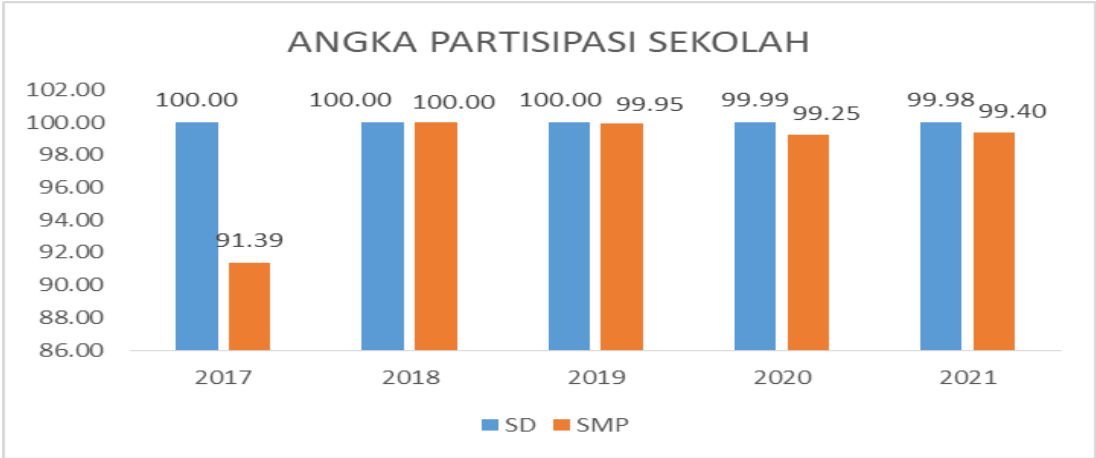
Dari tabel 2.21 diatas, menunjukkan Angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 96,98. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 90,48. Pada tingkat SMP/MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu 88,79. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 78,10. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 77,38. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 70,5.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode Tahun 2017-2021, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami fluktuatif dengan rata-rata baik. Pada Tahun 2021, APS penduduk usia 13-15 (SMP) tahun mencapai 99,40 persen, ini berarti masih terdapat 0,6 persen penduduk usia 13-15 (SMP) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/ sederajat namun tidak bersekolah lagi. APS terendah penduduk usia 13-15 (SMP) tahun terjadi pada tahun 2017 mencapai 91,39 persen sehingga terdapat 8,61 persen penduduk usia 13-15 (SMP) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/ sederajat namun tidak bersekolah lagi.

Selanjutnya APS SD pada tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 99.98 persen artinya masih terdapat 0,02 persen penduduk usia 7-12 (SD) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SD/ sederajat namun tidak bersekolah lagi. Dan tahun 2020 APS SD sebesar 99.99 persen artinya masih terdapat 0,01 persen penduduk usia 7-12 (SD) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SD/ sederajat namun tidak bersekolah lagi. Berikut Gambar Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021.

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Sekolah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2022.

D. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka Kelulusan di Kota Lhokseumawe di setiap tahunnya mengalami perubahan baik di tingkat SD/MI dan SMP/MTS, hal ini disebabkan ada murid yang pindah sekolah sebelum berakhir masa pendidikannya disekolah tersebut baik yang masuk ke Kota Lhokseumawe ataupun keluar dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten/Kota lain sehingga jumlah dan lulusan murid di Kota Lhokseumawe berubah-ubah. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini:

Tabel 2.22
Angka Kelulusan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MIN/MIS	100%	100%	100%	100%	100%
1	SMP/MTS	99.97%	99.07%	99.64%	99 %	99.50 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022.

Tabel 2.22 di atas menggambarkan Angka Kelulusan siswa sesuai kelompok jenjang pendidikan SD/MI diwilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017-2021. Kelulusan tertinggi di tingkat SD/MI sebesar 100% pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Sedangkan pada jenjang SMP/MTS, angka kelulusan belum mencapai 100%. Angka kelulusan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 dengan nilai mencapai 99,97 % sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2021 dengan nilai 99,50%.

E. Ruang Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik

Sekolah atau bangunan Pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara Gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh Gedung atau bangunan. Kondisi sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dalam wilayah Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Kondisi ruang kelas sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI Pada Tahun 2017 untuk SD/MI dengan kondisi baik terdapat 277 ruang kelas dan kondisi rusak terdapat 13 ruang kelas sedangkan SMP/MTS dengan Kondisi baik terdapat 106 ruang kelas dan kondisi rusak terdapat 4 ruang kelas. Pada Tahun 2018 terdapat 562 dengan kondisi baik dan 112 dengan kondisi rusak. Untuk Tahun 2019 terdapat 587 ruang kelas dengan kondisi baik dan 107 dengan kondisi rusak. Pada Tahun 2020 terdapat 587 ruang kelas dengan kondisi baik dan 107 dengan kondisi rusak dan pada Tahun 2021 kondisi ruang baik mencapai 270 ruang serta 427 rusak ringan.

Kondisi ruang kelas sekolah untuk jenjang Pendidikan SMP pada Tahun 2019 terdapat 365 dengan kondisi baik dan 55 dengan kondisi rusak. Untuk Tahun 2020 terdapat 194 ruang kelas dengan kondisi baik dan 123 dengan kondisi rusak. Berikut tabel Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021.

Tabel 2.23
Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak
1	SD/MI	277	13	562	112	587	107	587	107	270	427
2	SMP	106	4	-	-	365	55	194	123	173	160
3	SMA	-	-	-	-	426	15	426	15	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022.

F. Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan

Pembinaan pada siswa agar memperoleh prestasi baik di tingkat lokal, antar Kabupaten/Kota serta tingkat nasional selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pembinaan ini berupa pemberian tambahan pembelajaran maupun pelatihan khusus menyangkut keterampilan siswa tersebut. Pembinaan terhadap siswa yang ada di Kota Lhokseumawe ritin dilakukan serta telah mencakup seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina dari Sekolah yang ada di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.21
Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan
Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2022.

G. Nilai Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan

Nilai kelulusan dan ketercapaian kurikulum pada Satuan pendidikan di Kota Lhokseumawe telah memenuhi target dengan mencapai 100 persen kelulusan pada Ujian Nasional yang telah dilaksanakan selama ini.

Gambar 2.22
Nilai Kelulusan dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2022.

2.1.3.2.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang di lakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat dalam kurun waktu lima (5) Tahun terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) Pada Tahun 2017 AKB kota Lhokseumawe 3.98 % dan terjadi penurunan setiap Tahun nya menjadi 3.33 % pada Tahun 2018, namun naik pada Tahun 2019 menjadi 4,74 dan turun lagi menjadi 0.23% pada Tahun 2020 sedangkan di Tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 3.39 %.

Tabel 2.24
Angka Kematian Bayi (AKB) (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Lhokseumawe	3.98	3.33	4.74	0.23	3.93

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu Tahun pada Tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada Tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu Tahun. Angka kelangsungan hidup bayi Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 dan 2018 menjadi 996.02 hari dan 996.67 hari. Pada Tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 995.26 hari, namun pada Tahun 2020 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 999.77 hari sedangkan di Tahun 2021 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 3.93 %.

Tabel 2.25
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKB	AKHB
2017	Banda Sakti	8	1933	3.98	996.02
	Muara Dua	3	1097		
	Muara Satu	3	796		
	Blang Mangat	3	443		

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKB	AKHB
2018	Banda Sakti	8	1941	3.33	996.67
	Muara Dua	3	1129		
	Muara Satu	2	697		
	Blang Mangat	1	432		
2019	Banda Sakti	7	1958	4.74	995.26
	Muara Dua	5	1144		
	Muara Satu	5	624		
	Blang Mangat	3	489		
2020	Banda Sakti	1	1945	0.23	999.77
	Muara Dua	0	1135		
	Muara Satu	0	792		
	Blang Mangat	0	468		
2021	Banda Sakti	3	1741	0.23	999.77
	Muara Dua	6	689		
	Muara Satu	3	841		
	Blang Mangat	4	257		

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. angka kematian balita mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung angka kematian balita dan angka kematian balita di suatu negara. Upaya percepatan penurunan Angka kematian balita dan Angka kematian balita menjadi prioritas Kementerian Kesehatan RI dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan sehingga berdampak ungit besar terhadap penurunan AKB dan AKABA di Kota Lhokseumawe.

AKABA yang terendah dilaporkan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 angka kematian balita (AKABA) menjadi 3.98 orang, namun Tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan masing-masing pada

Tahun 2018 menjadi 4.30 orang dan pada Tahun 2019 menjadi 4.98 orang, sedangkan Tahun 2020 menjadi 0,92 orang dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0.24 Orang.

Tabel 2.26
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian BALITA usia 5 Tahun	Jumlah kelahiran hidup per Tahun	AKBA
2017	Banda Sakti	8	1933	3.98
	Muara Dua	3	1097	
	Muara Satu	3	796	
	Blang Mangat	3	443	
2018	Banda Sakti	8	1941	4.30
	Muara Dua	4	1129	
	Muara Satu	2	679	
	Blang Mangat	4	432	
2019	Banda Sakti	7	1958	4.98
	Muara Dua	6	1144	
	Muara Satu	5	624	
	Blang Mangat	3	489	
2020	Banda Sakti	1	1945	0.92
	Muara Dua	2	1135	
	Muara Satu	1	792	
	Blang Mangat	0	468	
2021	Banda Sakti	1	1741	0.24
	Muara Dua	0	689	
	Muara Satu	0	841	
	Blang Mangat	1	257	

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

D. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka kematian neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0–28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan infeksi. Pada Tahun 2018 angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 13 jiwa dan angka kelahiran hidup 4.199 jiwa. Pada Tahun 2019 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 12 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4..215 jiwa.

Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

E. Angka Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh masyarakat untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Rasio posyandu per satuan balita Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 yaitu dengan rasio 62.8 pada Tahun 2018 dengan rasio 6.23 pada Tahun 2019 yaitu dengan rasio 6.67. Sedangkan rasio posyandu terendah tahun 2020 dengan rasio 6.67. Rasio tahun 2021 menurun mencapai 4.99 .Posyandu per satuan balita Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dikarenakan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu.

Tabel 2.27
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Posyandu	101	101	101	101	101
2	Jumlah Balita	16208	16210	151266	21626	20231
Rasio		62.8	6.23	6.67	6.67	4.99

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan

Rasio posyandu per 1000 balita perkecamatan Tahun 2017 s.d Tahun 2021 tertinggi di Kecamatan Muara Dua dengan rasio masing-masing pada Tahun 2017, 6.23 pada Tahun 2018, 6.23 pada Tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak rasionya 6.67 pada Tahun 2020 menurun menjadi rasionya 4.67 pada Tahun 2021 naik kembali rasionya 5.06. terjadi peningkatan Kecamatan Muara Dua, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk per kecamatan dan anggota KB aktif di kecamatan tersebut.

Tabel 2.28
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2017	Muara Dua	24	3470	6.23
	Banda Sakti	33	7485	
	Blang Mangat	29	2188	
	Muara Satu	15	3065	
2018	Muara Dua	24	3333	6.23
	Banda Sakti	33	7857	
	Blang Mangat	29	2110	
	Muara Satu	15	2910	
2019	Muara Dua	24	3315	6.67
	Banda Sakti	33	6655	
	Blang Mangat	29	2260	
	Muara Satu	15	2896	
2020	Muara Dua	24	5589	4.67
	Banda Sakti	33	9292	
	Blang Mangat	29	2759	
	Muara Satu	15	3990	
2021	Muara Dua	24	5227	5.06
	Banda Sakti	33	8392	
	Blang Mangat	29	2562	
	Muara Satu	15	3750	

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Lhokseumawe 2022.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk

Puskesmas dan jaringannya, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib yang terdiri :

1. upaya promosi kesehatan
2. upaya kesehatan lingkungan

3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
4. upaya perbaikan gizi
5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. upaya pengobatan

Jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 6 Puskesmas. Pada Tahun 2020 bertambah 1 Puskesmas menjadi sebanyak 7 puskesmas. Adapun Rasio Puskesmas dari Tahun 2016-2020 semakin tinggi. Berdasarkan rasio kecukupan puskesmas secara nasional sebesar 28.000 penduduk/puskesmas. Berarti ketersediaan puskesmas di Kota Lhokseumawe belum memadai, jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan sarana kesehatan lainnya hal ini perlu mendapat perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan yang mencukupi dan memelihara kondisi fisik bangunan dan sanitasinya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari puskesmas. pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah.

Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada diwilayah kerja.

Tabel 2.29
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	7	7
2	Jumlah Poliklinik	12	12	10	10	10
3	Jumlah Pustu	22	22	22	23	23
4	Jumlah Penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
5	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0.030	0.030	0.028	0.037	0.033
6	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0.060	0.059	0.048	0.052	0.047
7	Rasio Pustu persatuan penduduk	0.111	0.108	0.106	0.121	0.109

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

H. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 11 (Sebelas) Rumah Sakit (RS), terdiri dari 1 Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 9 Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud.

Tabel 2.30
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	8	8	8	9	9
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	10	10	10
7	Jumlah Penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
Rasio		0.045	0.044	0.048	0.053	0.047

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

I. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendaya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah,jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapiian fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe

dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta.

Adapun rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan satu (1) orang dokter harus melayani pada Tahun 2017 adalah seorang dokter berjumlah 56 orang dengan jumlah penduduk 198.980 orang. pada Tahun 2018 adalah seorang dokter berjumlah 44 orang dengan jumlah penduduk 203.284 orang. pada Tahun 2019 adalah seorang dokter berjumlah 54 orang dengan jumlah penduduk meningkat menjadi 207.202 orang. pada Tahun 2020 adalah seorang dokter berjumlah meningkat 58 orang dengan jumlah penduduk meningkat menjadi 188.713 orang. pada Tahun 2021 adalah seorang dokter terus meningkat berjumlah 67 orang dengan jumlah penduduk menurun sebanyak 210.177 orang, dengan Rasio tahun 2021 meningkat menjadi 0.31.

Tabel 2.31
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter Umum	56	44	54	58	67
2	Jumlah Penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
Rasio		0.28	0.22	0.26	0.31	0.31

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

J. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2017 rasio tenaga medis 0.35 pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0.27 dan pada Tahun 2019 naik kembali menjadi 0.32 Tahun 2020 mengalami kenaikan sehingga rasio tenaga medis menjadi 0.38 serta pada Tahun 2021 rasio tenaga medis menjadi 0.42 terjadinya Penurunan karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis pada Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tenaga Medis	70	55	66	72	89
2	Jumlah Penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
	Rasio	0.35	0.27	0.32	0.38	0.42

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma kecelakaan. Komplikasi kebidanan antara lain pecah ketuban dini, pendarahan, pervaginan, hipertensi dalam kehamilan (systole>140 mmHg, diastole>90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju dan infeksi masa nifas).

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi.

Berdasarkan data bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2017 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan menjadi 0.51 % Pada Tahun 2018

cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 0.58 % dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0.56 % serta Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0.67 % sedangkan Tahun 2021 mencapai persentasenya 59.9 %, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja	496	561	549	649	499
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	971	971	989	964	833
Persentase		0.51	0.58	0.56	0.67	59.9

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), Dokter umum dan bidan serta diupayakan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan

berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program persalinan, model rumah tunggu dengan puskesmas didaerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan.

Revitalisasi bidan koordinator melalui pelaksanaan supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan. Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik.

Cakupan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/nakes dari Tahun 2017 dengan rasio 0.96 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi rasio 0.97 Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes	Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Rasio
2017	Muara Dua	1097	1198	0.96
	Banda Sakti	1930	1691	
	Blang Mangat	343	587	
	Muara Satu	795	859	
2018	Muara Dua	1127	1197	0.91
	Banda Sakti	1944	1992	
	Blang Mangat	433	587	
	Muara Satu	694	859	
2019	Muara Dua	1141	1209	0.89
	Banda Sakti	1957	2027	

Tahun	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes	Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Rasio
2020	Blang Mangat	489	598	0.94
	Muara Satu	622	875	
	Muara Dua	1133	1976	
	Banda Sakti	1943	1188	
	Blang Mangat	468	583	
	Muara Satu	796	852	
2021	Muara Dua	612	707	0.97
	Banda Sakti	1737	1791	
	Blang Mangat	498	528	
	Muara Satu	840	772	

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai umurnya. Pada kondisi ini diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat berkerja secara optimal. Namun demikian pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 1 awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut *drop out Rate* DPT/HB1 Campak.

UCI adalah gambaran suatu desa atau kelurahan dimana pada Tahun 2017 desa UCI sebanyak 38 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 0.56 dan pada Tahun 2018 desa uci sebanyak 30 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 0.44, pada Tahun 2019 terdapat 5 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe yaitu 0.07 dan pada Tahun 2020 terdapat 13 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 0.19 serta pada Tahun 2021 terdapat 13 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 16.2, dengan persentase 0.32 % Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Jumlah Desa	Desa/Kelurahan UCI%				
			Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	68	38	30	5	13	11
Persentase			55,8	44.1	7.35	19.1	16.2

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

N. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dari anak usianya. Rata-rata berat badannya hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal. Ciri-ciri klinis yang biasanya menyertainya antara lain: kenaikan berat badan berkurang bahkan terus menurun, ukuran lingkaran lengan atas menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tinggi normal atau cenderung menurun, tebal lipat kulit normal atau semakin berkurang. Seluruh balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017-2021 seluruhnya mendapat perawatan mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	10	5	4	7	8
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	10	5	4	7	8
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada Tahun 2017, di laporkan jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun sebanyak 3808 jiwa dengan persentase 31.60%, Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun tertinggi pada Tahun 2018 sebanyak 3.803 atau 31.60%, namun pada Tahun 2019 menurun menjadi sebanyak 3.499 atau 29.03%. Pada Tahun 2020 menurun lagi menjadi sebanyak 2.574 atau 22.31% dan Tahun 2021 terus meningkat persentase 55.9%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun	3808	3499	2574	2627	2406
2	Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama	11961	12050	11540	11695	4299
Persentase		0,28	0,31	0,29	0,22	55.9

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Pada umumnya

menyerang anak berusia 0-3 Tahun, ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang di duga kasus polio sampai di buktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Pada Tahun 2017 s.d 2018 kasus SFP non polio yang di laporkan di Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kasus atau 0.003% dan pada Tahun 2019 menurun menjadi 1 kasus atau 0.001% dan Tahun 2020 tidak ada kasus SFP non polio yang di laporkan di Kota Lhokseumawe sedangkan di Tahun 2021 lagi terjadinya kasus AFP, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	2	2	2	1	4
2	jumlah penduduk < 15 Tahun	59694	63208	59014	64756	144294
Persentase		3.35	1.58	1.69	0.001	0.003

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang ini disebabkan oleh kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi).

Adapun cakupan balita pneumonia dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Cakupan penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 57.77% pada Tahun 2018 sebesar 2.54% pada Tahun 2019 terus meningkat mencapai 8.23% pada Tahun 2020 menurun 0.04% sedangkan di Tahun 2021 dengan jumlah balita pneumonia sebanyak 22 orang, maka persentasenya sebanyak 24% . Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	79	55	73	1	22
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	2154	2163	886	2222	902
Persentase		3.66	2.54	8.23	0.04	24

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberculosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat di ukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pada tahun 2017 s.d 2021 terjadi penurunan jumlah penderita baru TBC BTA (+) masing- masing pada Tahun 2017 sebanyak 152 kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 480 kasus dan pada Tahun 2018 mengalami sedikit kenaikan menjadi 161 kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 328 kasus. Pada Tahun 2019 terdapat 136 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 238 perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 0.57. Sementara pada Tahun 2020 terdapat 128 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 216

kasus perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 0.59%. sedangkan tahun 2021 berjumlah 569 orang kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dengan persentasenya 51 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja elama 1 Tahun	152	161	136	128	569
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama	328	697	238	216	1115
Persentase		46.3	23,7	57,1	59,2	51

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe tertinggi pada dengan jumlah kasus penderita TBC Tahun 2021 sebanyak 569 orang dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama sebanyak 210179 orang dengan persentase 270 % dan kasus tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe terendah adalah pada Tahun 2019 sebesar 112.6% dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 230 kasus dari jumlah penduduk 204.284 pada Tahun tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	285	633	230	297	569
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	198980	203204	204284	211123	210179
Persentase		143,2	311,5	112,5	140,6	270

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

T. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000 tuberkulosis di Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 sebesar 1 % dengan tidak adanya pasien TB yang meninggal. Pada tahun 2017 dan 2018 di Kota Lhokseumawe terdapat 2 kasus pasien TB yang meninggal atau dengan tingkat kematian sebesar 1% dan 0.98%. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tingkat kematian karena tuberkulosis menurun sebesar 0.48% dengan kasus kematian hanya 1 kasus. Sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 6 kasus mencapai dengan persentasenya 2.85 % dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama berjumlah 210179 orang .Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis
(per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Paiseen TB yang meninggal	2	2	1	1	6
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	198980	203204	204284	211.123	210179
	Persentase	1	0,98	0,48	0.47	2.85

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

U. Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA(+) adalah salah satu upaya mengendalikan TB Paru yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan, Yaitu angka keberhasilan pengobatan ini di bentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap ada. Pada Tahun 2017 s.d 2021 persentase sebesar 100%. Pada Tahun 2017 dari 2021 pasien baru yang diperkirakan 201 pasien BTA mendapat pengobatan

201. Begitu juga pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 pasien baru TB paru masing-masing sebesar 161 pasien, 136 pasien dan 216 pasien pada tahun 20021 pasien baru TB paru masing-masing sebesar 277 pasien BTA mendapat pengobatan sebanyak 312 pasien dengan persentase menurun 88 % dan semuanya mendapat pengobatan melalui DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien tuberculosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	201	161	136	216	277
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	201	161	136	216	312
Persentase		100	100	100	100	88

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

V. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk keperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypty atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang Tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan prilaku masyarakat. Pada Tahun 2017-2021 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe 100%. Jumlah penderita DBD yang ditemukan semua ditangani sesuai SOP dan jumlah nya setiap Tahun menurun. Kasus DBD sedikit meningkat pada Tahun 2018. Dari 95 penderita DBD pada 2017 meningkat menjadi sebesar 111 pada Tahun 2018. pada tahun 20019 sebesar 84 orang pada tahun 2020 sebesar 79 orang dan tahun 2021 terjadinya penurunan sebesar 46 orang Kesimpulan pada dari jumlah kasus tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di

rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	95	111	84	79	46
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	95	111	84	79	46
	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

W. Penderita Diare Di Temukan Dan Ditangani

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering di sertai kematian. Seseorang di katakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya atau air besar lebih dari tiga kali dan berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah prilaku hidup sehat yang belum baik masih banyak sampah yang buang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak dijamnab serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak didahului dengan cuci tangan terlebih dahulu. Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan pada suatu wilayah.

Gambaran tabel di bawah ini menunjukan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus tertinggi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2017 sebesar 39 % dengan jumlah penderita diare 2146 kasus dari jumlah perkiraan penderita 8.022 kasus. Sedangkan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus terendah

terjadi pada Tahun 2018 sebesar 18 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 1018 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5.489 kasus. pada Tahun 2019 sebesar 46 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 2555 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5516 kasus pada Tahun 2020 sebesar 33 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 1185 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5700 kasus pada Tahun 2021 sebesar 24 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 2053 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 8638 kasus .Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun	2146	1018	2555	1885	2053
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	5372	5489	5516	5700	8638
	Persentase	39	18	46	33	24

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

X. Angka Kesakitan Malaria Per 100.000 Penduduk

Malaria adalah penyakit infeksi yang di sebabkan oleh plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, di tularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki atau pun perempuan pada semua golongan umur dari bayi,anak – anak dan orang dewasa. Pengobatan malaria harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan yang efektif adalah pemberian ACT (artemisin-basedcombination therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus di minum habis dalam 3 hari.

Pada Tahun 2017-2021 di Kota Lhokseumawe tidak ditemukan penduduk yang menderita malaria atau 0 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria
Kota Lhokseumawe Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk yang menderita malaria pada Tahun tertentu	0	0	0	0	0
2	Jumlah penduduk pada pertengahan Tahun	198980	203284	204284	211123	210179
Persentase		0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Humam Immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat di ketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan voluntary,counseling, and testing (VCT), sero survey, dan survei terpadu biologis dan prilaku (STBP).

Gambaran kasus HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 s.d 2021 mengalami naik turun. Dari Tahun 2017 terdapat 2 Kasus Pasien HIV/AIDS, pada Tahun 2018 bertambah menjadi 7 Kasus Pasien HIV/AIDS dan pada Tahun 2019 berkurang menjadi 4 kasus Pasien HIV/AIDS dan 2019 bertambah kembali masing-masing menjadi 7 kasus dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3 kasus. sedangkan Tahun 2021 Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 8 kasus 0.0003 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x	7	4	7	3	8
2	Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama	198.980	203.284	204.284	211.123	210.179
Persentase		0,003	0,001	0,003	0,003	0.003

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

Z. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2017 adalah 150% dan Tahun 2018 adalah 145%, pada Tahun 2019 adalah 121%, pada Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 83% dan pada Tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar 85%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	36.881	34.845	27.895	18.923	19.953
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	24.440	23.880	23.050	22.690	23.380
Persentase		150	145	121	83	85

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2022.

AA. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2017 Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe mencapai 87.9%. pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 83.4%, Pada Tahun 2019 Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe turun lagi menjadi 56.7% Tahun 2020 59.5%. sedangkan Tahun 2021 mencapai 22.58 dan persentasenya 52.7 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Kunjungan Bayi									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Banda Sakti	Banda Sakti	1157	88.3	1206	87.4	940	72.2	965	75.9	769	59
		Mongeuandong	521	95.2	417	74.3	449	82.7	292	55.1	377	68
2	Muara Dua	Muara Dua	1104	98.4	1088	96.4	562	50.5	783	72.3	673	68.8
3	Muara Satu	Muara Satu	613	77.2	422	60.5	285	35.9	281	36.1	311	40
4	Blang Mangat	Blang Mangat	264	71.5	245	87.8	110	29.7	86	24.0	77	21
		Blang Cut	141	78.3	125	81.7	95	52.5	87	50.6	58	33
Jumlah			3800	87.9	3503	83.4	2441	56.7	2494	59.5	2268	52.7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

BB. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas

Pada Tahun 2021 jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 7 unit yang tersebar di 4 (empat) kecamatan dan terdiri dari 68 Gampong, diantaranya Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 17 gampong, Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 18 gampong, Kecamatan Blang Mangat sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 22 gampong dan pada Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 (satu) unit dengan jumlah gampong sebanyak 11 gampong. Jika dibandingkan jumlah puskesmas dengan jumlah kecamatan dalam Kota Lhokseumawe

dapat mencapai hingga 175% kesediaan puskesmas dalam Kota Lhokseumawe.

Cakupan Pembantu Puskesmas dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sebanyak 20 (dua puluh) unit yang tersebar di 68 gampong dengan persentase sebesar 29%. Adapun jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat 2.50 berikut:

Tabel 2.50
Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Gampong	Jumlah Pembantu Puskesmas
1	Muara Dua	2	17	4
2	Banda Sakti	2	18	8
3	Blang Mangat	2	22	4
4	Muara Satu	1	11	4
Jumlah		7	68	20
Persen		175	34	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

CC. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil di wujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama (usia 0 - 12 minggu),minimal 1 kali pada trisemester kedua (usia kehamilan 12–24 minggu) dan minimal 2 kali pada trisemester ke tiga (usia kehamilan 24 minggu – lahir).

Standart waktu pelayanan tersebut di anjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin,berupa deteksi dini faktor risiko,pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal di upayakan agar memenuhi standar kualitas yaitu:

- a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
- b. pengukuran tekanan darah
- c. pengukuran lingkaran lengan atas (LILA)

- d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e. penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi
- f. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- g. penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
- h. pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)
- i. pelayanan tes laboratorium sederhana, minimaltes hemoglobin darah(HB), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah di lakukan sebelumnya) dan tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat di nilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamilyang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang di anjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan.

Dari tabel di bawah ini terlihat pada Tahun 2020 K4 meningkat menjadi sebesar 95.41% menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang di berikan oleh tenaga kesehatan. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari Tahun ke Tahun relatif tidak terlalu stabil. Tahun 2017 sebesar 93,45%, sementara pada Tahun 2018 terjadi penurunan menjadi sebesar 94.96% dan Tahun 2019 sebesar 90.45% selanjutnya Tahun 2020 sebesar 95.41%, sedangkan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 96 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	4537	4426	4472	4597	4191
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4855	4661	4944	4818	4366
Persentase		93,4	94,9	90,4	95,4	96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

DD. Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang di lakukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang di anjurkan yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan pada hari ke – 4 sampai dengan hari ke – 28 pasca persalinan pada hari ke -29 sampai dengan hari ke – 42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

- a. pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,nadi,nafas dan suhu)
- b. pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- c. pemeriksaan lokhia dan cairan pervaginam lain
- d. pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
- e. pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana
- f. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
- g. keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas di ukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan nifas (KF3) dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada Tahun 2017 sebesar 91.8 % dan Tahun 2018 turun menjadi 83.5 % pada Tahun 2019 kembali turun menjadi 83.03% dan Tahun 2020 naik menjadi 90.1%. Sedangkan Tahun

2021 terus meningkat menjadi sebesar 97.5 % Capaian indikator KF merupakan hasil yang baik dari upaya yang di lakukan oleh petugas dan juga termasuk peran masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4259	3871	3910	4146	4064
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	4635	4635	4709	4599	4167
Persentase		91,8	83,5	83,03	90,1	97.5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

EE. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini di lakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang di berikan saat kunjungan neonatal

adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum di berikan pada saat lahir.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6–48 jam,1 kali pada 3–7 hari, 1 kali pada 8–28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu Tahun. Capaian KN lengkap sesuai dengan tabel di bawah ini adalah Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 36.7 % dan Tahun 2018 naik menjadi 60.3 % dan pada Tahun 2019 turun kembali menjadi 40.8 % dan Tahun 2020 sebesar 58.5 %. Sedangkan Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 48.6 %.. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	235	380	258	381	314
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	640	630	632	651	648
Persentase		36.7	60.3	40.8	58.5	48.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

FF. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Kehidupan anak, usia di bawah lima Tahun memperoleh bagian yang sangat penting, usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga masyarakat dan kehidupan secara umum.

Kesehatan bayi dan balita harus di pantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa,

sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya lihat. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Untuk itu di pakai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan kesehatan pada anak balita di lakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh:

1. pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali seTahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam setahun)
2. pemberian vitamin A, dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus
3. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita minimal 2x kali dalam setahun.
4. pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Adapun capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan 8 kali yaitu pada Tahun 2017 persentase sebesar 91.4 % dan Tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 97.89 % dan pada Tahun 2019 menurun menjadi 97.63 % pada Tahun 2020 persentasenya menurun kembali menjadi sebesar 87.23 % sedangkan pada Tahun 2021 data yang diperoleh sebesar 85.3 % Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	15287	16939	15487	15200	13600
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	16714	17305	15863	17425	15933
Persentase		91.46	97.89	97.63	87.23	85.3

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

GG. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Usia masuk sekolah merupakan hal yang penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan,karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini di utamakan untuk siswa SD/sederajat kelas1. Pemeriksaan kesehatan di laksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil).

Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis,tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah di latih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter

kecil. Hal ini dimaksud agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya.

Kegiatan penjangkaran kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah – masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjangkaran kesehatan ini terdiri dari :

1. Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
2. Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri
3. pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut
5. pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan
6. Pengukuran kebugaran jasmani
7. Deteksi dini masalah mental emosional

Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi adalah pada Tahun 2017: 2537/2985 x 100, sebesar 84.99 persen dan di Tahun 2018 menurun sebesar 71.34%. Sementara pada Tahun 2019 sebesar 91.93 persen mengalami kenaikan disbanding Tahun 2018 sebesar 71.34 persen. Dan Tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 65.59 persen. Sedangkan Tahun 2021 sebesar persentasenya mencapai 85%. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi berarti pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat untuk mempertahankan gigi cukup baik melalui upaya pencegahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kes oleh tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Persentase
2017	Banda Sakti	1033	1305	84.99
	Muara Dua	678	806	
	Muara Satu	420	455	
	Blang Mangat	406	419	
2018	Banda Sakti	1288	1864	71.34
	Muara Dua	700	1115	
	Muara Satu	660	797	
	Blang Mangat	423	529	
2019	Banda Sakti	1817	1828	91.93
	Muara Dua	687	772	
	Muara Satu	541	762	
	Blang Mangat	610	614	
2020	Banda Sakti	2338	4200	65.59
	Muara Dua	2833	4205	
	Muara Satu	3352	4829	
	Blang Mangat	1422	1928	
2021	Banda Sakti	7022	10024	85
	Muara Dua	5835	6020	
	Muara Satu	5567	4325	
	Blang Mangat	1495	2963	

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.*

HH. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Penduduk atau masyarakat sasaran program yang telah di tetapkan oleh Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan kab/kota setempat. Seluruh penduduk umumnya di Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe terlindung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapat subsidi pemerintah dan pemda di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain: puskesmas,balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2017 sebesar 1322%,

pada Tahun 2018 menurun menjadi 463%, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 1290% kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 868%, dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 85%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1	323211	110660	297507	197068	19953
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	24.440	23.880	23.050	22.690	23.380
Cakupan pelayanan		1322	463	1290	868	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

II. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 741/VII/2008 SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dengan 18 Indikator. Salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM-K) adalah pelayanan kesehatan rujukan. Ada 2 Indikator untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu :

1. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS), Puskesmas (PKM) dan sarana kesehatan lainnya.
2. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualitas GELS (*General Emergency life support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma life support*) serta ACLS (*Advance Cardiac life support*) yang di lengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada

Tahun 2017 s/d 2018 adalah mencapai 100% dan Tahun 2019-2020 adalah 90% bertambahnya rumah sakit namun tidak memiliki Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS). Sedangkan pada Tahun 2021 mencapai 90 %.

Tabel 2.57
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	9	9	9	9	9
2	Jumlah Rumah Sakit	9	9	10	10	10
Persentase		100%	100%	90%	90%	90%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

JJ. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam

Kejadian luar biasa (KLB) adalah kejadian atau peristiwa dalam masyarakat atau wilayah dari suatu kasus penyakit tertentu yang secara nyata melebihi dari jumlah yang di perkirakan. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang berjangkit wabah sebagai daerah wabah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 949 Tahun 2004).

Kriteria KLB adalah kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 451/91, tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Menurut aturan itu suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika unsur :

1. timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal

2. peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
3. peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, Tahun)
4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam Tahun sebelumnya.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ≤ 24 jam pada tabel di bawah ini menggambarkan ada terjadi KLB tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 15 kasus dengan penanganan 100%, Tahun 2017 sebesar 5 kasus dengan penanganan 100%, Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 0 dengan penanganan 0%. Sedangkan pada Tahun 2021 mencapai 100%.

Tabel 2.58
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiolgi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun
2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu	5	15	0	0	4
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	5	15	0	0	4
Jumlah		100	100	0	0	100

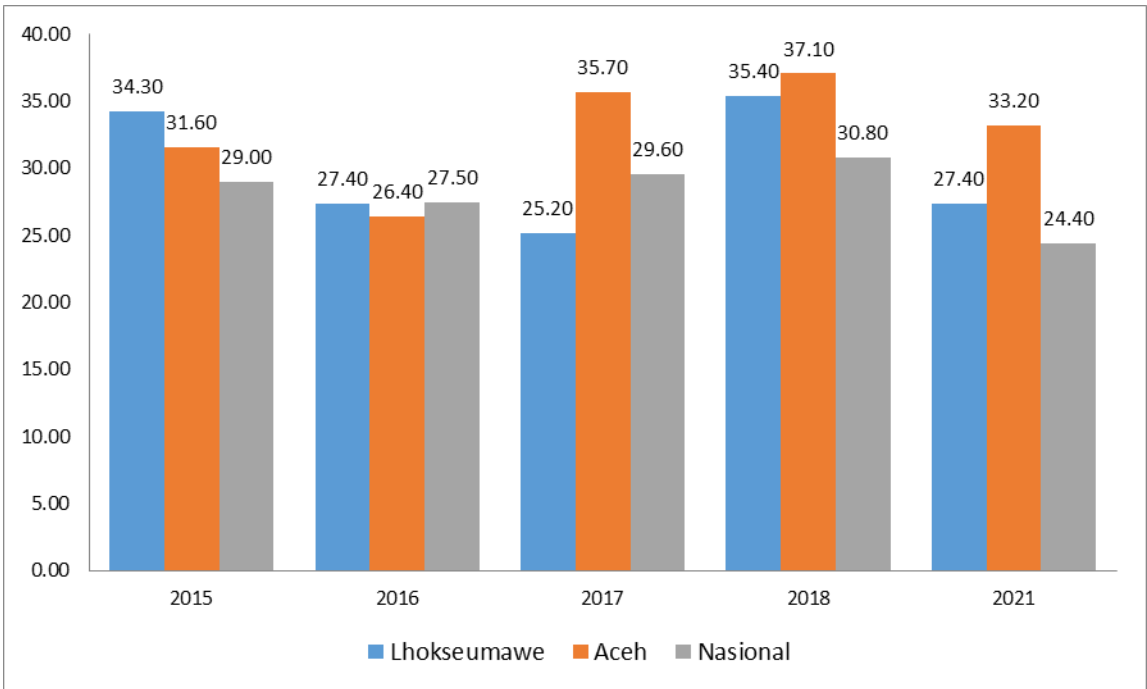
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2022.

M.M Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit

degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2.23
Prevelensi Balita Stunting
Kota Lhokseumawe Tahun 2015-2021



Sumber: Survei PSG 2015-2017, Riskedas 2019, dan SSGI 2021

Prevelensi Stunting Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2015 Stunting Kota Lhokseumawe mencapai 34,30% persen lebih tinggi dibanding Aceh sebesar 31.60 dan Nasional sebesar 29.00%. Prevelensi Stunting Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27.40% dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 25.20% dan lebih baik dari Aceh sebesar 35.70% dan nasional 29.60%. Namun pada tahun 2018 Prevelensi Stunting Lhokseumawe kembali mengalami kenaikan menjadi 35.40% dan Tahun 2021 mengalami

penurunan menjadi 27.40% lebih baik dari Aceh sebesar 33.20% tetapi lebih rendah dari nasional sebesar 24.40%.

2.1.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Jalan sebagai suatu prasarana transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan, menyatakan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah, agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Peran jalan yang sangat penting ini membawa implikasi pada upaya dan kerja keras Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang berkualitas.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesimbangan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Lhokseumawe adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang massal yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya.

Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Km dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 (Km)

Tahun	Jalan Kota		Persentase Panjang Jaringan Jalan
	Kondisi Mantap	Panjang Jalan Keseluruhan	
2017	242,996	412,468	58,91
2018	239,574	412,468	58,08
2019	239,572	412,468	58,08
2020	239,752	412,468	58,13
2021*	321,789	412,468	78,02

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan diolah

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Proporsi panjang jaringan jalan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 58,91 dari kondisi jalan mantap sepanjang pada tahun 2017 sepanjang 242,996 Km, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 persentase panjang jaringan jalan sebesar 58,08 dan Tahun 2020 kondisi mantap jalan sepanjang 239,752 Km terhadap total panjang

jalan keseluruhan 412,468 Km yang terdapat pada 4 (empat) kecamatan dan memerlukan penanganan yang serius. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang terjadi karena kondisi *drain hole* (lubang pembuangan) yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan *tonase* dari truck yang melintasi jalanan tersebut.

Kondisi jalan adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menentukan program pemeliharaan jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga 1992, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan;
2. jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai dari gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan;
3. jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20 dari luas jalan yang ditinjau;
4. jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60 dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Pada tabel berikut terdapat jenis, kondisi, kelas dan panjang jalan Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.60
Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Jenis, Kondisi, Kelas	Status														
	Jalan Negara					Jalan Provinsi					Jalan Kabupaten/Kota				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan Permukaan															
Aspal	23.20	23.20	23.20	40.45	40.45	4.60	4.60	4.60	2.80	2.80	288.619	288.629	288.630	288.630	297.943
Paklah (Kerikil)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.987	71.988	71.985	71.985	48.412
Perkerasan Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.860	51.849	51.851	51.851	66.113
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	2.39	2.240	2.240	-
Jumlah	23.20	23.20	23.20	40.45	40.45	4.60	4.60	4.60	2.80	2.80	412.468	412.468	412.468	412.468	412.468
Kondisi Jalan															
.Baik	23.20	23.20	23.20	40.45	40.45	4.60	4.60	4.60	2.80	2.80	108.998	108.089	108.157	108.157	225.342
Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.998	131.485	131.595	131.595	96.447
Rusak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.987	108.800	107.545	107.545	90.641
Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.485	64.094	65.122	65.122	38.02
Jumlah	23.20	23.20	23.20	40.45	40.45	4.60	4.60	4.60	2.80	2.80	412.468	412.468	412.468	412.468	412.468
Kelas Jalan															
Kelas I	23.20	23.20	23.20	40.45	40.45	4.60	4.60	4.60	2.80	2.80	288.619	288.629	286.389	286.389	290.386
Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.987	71.988	71.988	71.988	73.900
Kelas III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.860	51.849	51.851	51.851	55.851
Tidak Terperinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	2.39	2.240	2.240	2.780
Jumlah	23.20	23.20	23.20	40.45	40.45	4.60	4.60	4.60	2.80	2.80	412.468	412.468	412.468	412.468	412.468

Sumber : Aceh Dalam Angka Tahun 2021 dan Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pengelompokkan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Pengelompokkan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe disebutkan bahwa panjang jalan Kota Lhokseumawe sepanjang 412,468 Km. Berikut tabel rasio panjang jalan per satuan jumlah penduduk:

Tabel 2.61
Rasio Panjang Jalan Dengan Per Satuan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	URAIAN	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Panjang Jalan (Km)	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
Rasio		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih sama yaitu 0,002.

C. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan <10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang

(40-80 Km/Jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/Jam).

Tabel 2.62
Persentase Panjang Jalan Dilalui Roda 4
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (> 40 Km/Jam)	63,5	64,46	58,14	75,41	75,41
2	Panjang Jalan Kota Lhokseumawe (Km)	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
Persentase		15.40	15.63	14.10	18.28	18.28

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kota Lhokseumawe semakin tahun semakin meningkat kondisi baiknya. Pada tahun 2021 tidak ada peningkatan kondisi jalan disebabkan oleh adanya *refocushing* anggaran untuk keperluan covid 19. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan kondisi jalan dari 64,46 km menjadi 58,14 km, ini disebabkan oleh kondisi jalan yang sudah tidak memadai lagi.

D. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.63
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

No	URAIAN	2021		
		Jumlah	Luas	Daya Tampung
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	74	62.520	24.000
2	Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)	205	10.320	2.040
3	Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	2	2.500	1.000
4	Lain-Lain	-	-	-
5	Jumlah Tempat Pemakaman	281	75.340	27.040
6	Jumlah Penduduk (Jiwa)			210.177
Rasio TPU Per Satuan Penduduk (6/5)				128,7

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2021 jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 281 tempat dengan rincian 74 Tempat Pemakaman Umum, 205 Tempat Pemakaman Bukan Umum dan 2 Tempat Pemakaman Khusus dengan rasio TPU per satuan penduduk sebesar 0,007.

E. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.223 jiwa/Km2, Blang Mangat 479 jiwa/Km2, Muara Satu 930 jiwa/Km2, Muara Dua 597 jiwa/Km2. Jumlah ibadah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 8 unit Mesjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 13 unit Mesjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Mesjid	50	50	50	50	50
2	Mushalla	93	93	93	93	93
3	Meunasah	68	68	68	68	68
4	Gereja	3	3	3	3	3
5	Vihara	1	1	1	1	1
a	Jumlah Rumah Ibadah	215	215	215	215	215
b	Jumlah Penduduk (Jiwa)	198.980	203.264	207.202	188.713	210.177
b/a	Rasio	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2021

Dari tabel 2.64 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat sebanyak 215 unit Rumah Ibadah yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Jumlah mesjid sebanyak 50 unit, Mushalla sebanyak

93 unit, Meunasah sebanyak 68 unit, Gereja 3 unit, dan Vihara sebanyak 1 Unit.

2.1.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Rasio Permukiman Layak Huni

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, komplek perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG), perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save The Children*, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya Komplek PT. PAG saja yang memiliki pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, kuliner serta sarana olah raga seperti stadion bola kaki, kolam renang, tenis *outdoor*, *volleyball*, basket, badminton, *jogging track* dan golf. Sedangkan Asrama TNI yang berlokasi di Kecamatan Banda Sakti hanya mempunyai pusat pelayanan kesehatan dan lapangan *volleyball*, basket, dan *jogging track* saja.

B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, *pertama*, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. *Ketiga*, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber

penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Peningkatan permukiman kumuh lebih banyak disebabkan adanya urbanisasi yang terus menerus terjadi. Urbanisasi yang tidak terkontrol ini mengakibatkan kurangnya lokasi hunian di perkotaan. Sehingga untuk keberlanjutan hidup para urban (penduduk kota) tinggal di daerah-daerah yang tidak layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pada Surat Keputusan tersebut terdapat 2 (dua) penanganan, yaitu skala kawasan dan skala gampong seluas 78,46 ha. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:

Tabel 2.65
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2020

No.	Uraian	Luas Kumuh (Ha)	Gampong	Kecamatan	Tingkat Kekumuhan
	Kawasan Prioritas Penanganan				
1.	Kampung Jawa-Hagu (JAGU)	22,51	Kampung Jawa	Banda Sakti	Kumuh Sedang
			Hagu Selatan		
2.	Pusong	32,56	Pusong Lama	Banda Sakti	Kumuh Ringan
			Pusong Baru		
	Total Luas	55,07			
	Gampong Prioritas Penanganan				
1.	Kuta Blang	7,56	Kuta Blang	Banda Sakti	Kumuh Ringan
2.	Simpang Empat	8,32	Simpang Empat	Banda Sakti	Kumuh Ringan
3.	Blang Naleung Mameh	7,51	Blang Naleung Mameh	Muara Satu	Kumuh Ringan
	Total Luas	23,39			

Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Tujuan Pendataan Permukiman Kumuh ini ditujukan untuk:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dan menyusun data dan profil permukiman kumuh di wilayahnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Menjadi panduan operasional bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pendataan dan penyusunan profil permukiman kumuh;
3. Memastikan hasil pendataan permukiman kumuh menjadi basis penetapan SK Kumuh Bupati/Walikota.

Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berikut dibawah ini terdapat tabel persentase penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021;

Tabel 2.66
Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Kumuh (Ha)	81,3	163,86	29,59	78,46	78,46
2	Luas Wilayah (Ha)	18,106	18,106	18,106	18,106	18,106
Persentase		22,3	11,05	61,29	23,18	23,18

Sumber :

1. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 442 Tahun 2016
2. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 455 Tahun 2018
3. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019
4. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2017 luas kumuh Kota Lhokseumawe sebesar 81,3 ha. Pada tahun ini hanya skala kawasan saja yang dihitung delinasinya, yaitu Pusong yang terdiri dari Pusong Baru dan Pusong Lama; Gampong Kampung Jawa dan Hagu Selatan yang disingkat menjadi JAGU; Gampong Keude Aceh; Gampong Mongeudong; dan Batuphat yang terdiri dari Gampong Batuphat Timur dan Gampong Batuphat Barat. Untuk Tahun 2018 terdapat 17 gampong yang masuk dalam delinasi kumuh dengan luas 163,86 ha. Delinasi kumuh untuk Tahun 2017 merujuk Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016 dikarenakan pada Tahun 2017 Kota Lhokseumawe menangani kumuh yang masuk dalam prioritas 1 skala kawasan yaitu Kampung Jawa dan Hagu Selatan (JAGU), begitu juga dengan Tahun 2020 dan Tahun 2021 jumlah luasan kumuhnya 78,46 ha karena masih menangani kegiatan skala kawasan.

C. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Dulu rumah dikatakan layak huni jika memenuhi satu faktor saja. Sedangkan saat ini berdasarkan *Suistainable Development Goals* (SDGs), ada empat faktor atau kriteria dan semuanya harus terpenuhi. yakni mulai dari

strukturnya, luasannya, sanitasinya, juga air bersihnya. Beberapa alasannya adalah jumlah pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang masih rendah, sehingga mereka mencari tempat tinggal atau membangun rumah tidak layak huni.

Berikut dibawah ini adalah tabel persentase ketersediaan rumah layak huni Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021;

Tabel 2.67
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah layak huni	35.518	35.518	35.610	35.678	35.858
2	Jumlah rumah tinggal	43.331	43.331	43.331	43.331	51.827
Persentase		81,97	81,97	82,18	82,34	69,19

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan rumah layak dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan tidak signifikan yaitu 0,37%. Pada Tahun 2021 persentase ketersediaan rumah layak huni mengalami penurunan 13,15% dari Tahun 2020 sebesar 82,34% menjadi 69,19%.

D. Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

Rasio prasarana, sarasa dan utilitas umum dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu antara 0,01 sampai 0,02. Jumlah PSU yang tersedia setiap tahunnya tidak ada peningkatan, kecuali pada Tahun 2021 mengalami penambahan 38 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.68
Rasio PSU dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PSU yang dibangun/rehab dalam kurun waktu 4 tahun	54	74	94	117	140
2	Jumlah PSU yang tersedia	1.474	1.474	1.474	1.474	1.512
Rasio		0,04	0,05	0,06	0,08	0,09

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

D. Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah

Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya.

Bangunan gedung untuk kepentingan strategi daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari bangunan sosial, keagamaan, kesehatan dan bangunan publik lainnya.

Tabel 2.69
Persentase Penataan Bangunan Gedung
untuk kepentingan strategis Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bangunan gedung yang ditata	1	1	2	1	1
2	Jumlah keseluruhan bangunan gedung	17	18	21	25	25
Persentase		5,88	5,56	9,52	4,00	4,00

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

E. Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun

Pertumbuhan dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan yang sangat pesat dari

populasi perkotaan berdampak terhadap kebutuhan ruang dan lahan yang semakin meningkat. Kebutuhan ruang dan lahan yang meningkat terutama untuk kebutuhan permukiman, perekonomian, pemerintahan, sosial dan lainnya. Disisi lain, lahan perkotaan yang tersedia sangat terbatas sehingga mengakibatkan pengalihfungsian guna lahan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan ruang dan lahan kegiatan perkotaan tersebut. Pengembangan lahan terbangun dari proses pengalihfungsian lahan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan aliran permukaan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan atau banjir di kawasan perkotaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal sistem jaringan drainase skala kota adalah tidak terjadinya genangan lebih dari 2 kali setahun dengan ketinggian genangan lebih dari 30 cm selama 6 jam. Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air buangan ataupun air hujan yang tidak dapat mengalir ke badan air terdekat sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang lebih rendah dalam suatu kawasan. Genangan terjadi karena banyak faktor, salah satu penyebabnya adalah kurang berfungsinya drainase perkotaan.

Tabel 2.70
Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan daerah yang tergenang (ha)	8,00	7,80	7,00	6,50	6,46
2	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (ha)	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00
Persentase		100	97,50	87,50	81,25	92,29

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa luasan daerah yang tergenang setiap tahunnya berkurang, begitu juga dengan luasan daerah rawan genangan yang berpotensi tergenang. Luasan daerah tergenang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pengurangan 7,71% terhadap luasan daerah genangan atau berpotensi tergenang.

Daerah yang tergenang akibat curah hujan yang tinggi dan terjadi genangan selama ± 6 jam adalah Gampong Hagu Teungoh (Komplek Pemda), Gampong Hagu Barat Laut, Gampong Tumpok Teungoh dan sebagian daerah Kota Lhokseumawe (Jalan Perdagangan Ujung sampai Jalan Sukaramai). Untuk Kecamatan Muara Satu pada Gampong Blang Pulo sepanjang Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Trieng, Batuphat dan untuk Kecamatan Muara Dua terdapat pada Gampong Blang Poroh, dan Cunda.

2.1.3.2.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri

pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe memiliki rasio sebesar 10,10 untuk Tahun 2017, 10,00 di Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 dengan rasio 10,27 persatuan penduduk. Sedangkan Tahun 2020 terjadi kenaikan rasio jumlah polisi pamong praja sebesar 12,34 persatuan penduduk. Dan pada tahun 2021 rasio jumlah Polisi Pamong Praja sebesar 11.56 persatuan penduduk.

Rasio Jumlah Linmas Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 26,53 persatuan penduduk. Tahun 2018 meningkat menjadi 51,15 persatuan penduduk. Selanjutnya di tahun 2019 rasio jumlah Linmas sebesar 50,19 dan kembali terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 55,11 persatuan penduduk. Sedangkan pada tahun 2021 rasio jumlah Linmas sebesar 49.48 persatuan penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.71 berikut ini:

Tabel 2.71
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	201	205	213	233	243
2.	Jumlah Linmas	528	1040	1040	1040	1040
3.	Jumlah Penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
Rasio Polisi Pamong Praja		10.10	10.00	10.27	12.34	11.56
Rasio Jumlah Linmas		26.53	51.15	50.19	55.11	49.48

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2022.

B. Penegakan PERDA/QANUN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang

mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan Represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.72
Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penegakan Perda/Qanun	15	15	15	12	12
2.	Jumlah Pelanggaran Perda/Qanun	141	133	862	2129	4584
Persentase		10,64	11,28	1.74	0.56	0.26

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2022.

Pada tabel 2.72 dapat dilihat jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun di Tahun 2017 sebesar 10 persen atau sebanyak 15 penegakan Perda/Qanun dari jumlah pelanggaran sebanyak 141 pelanggaran. Tahun 2018 menjadi 11 persen dengan 15 jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan 133 pelanggaran. Selanjutnya di tahun 2019 jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun masih sebanyak 15 penegakan yang dilakukan namun jumlah pelanggaran mengalami peningkatan sebanyak 862 pelanggaran atau 1.7 persen. Di Tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 12 Penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang telah dilakukan namun jumlah pelanggaran di tahun 2020 sebanyak 2129 pelanggaran dan sebanyak 4584 pelanggaran di tahun 2021 dengan persentase 0.56 persen untuk Tahun 2020 dan 0.26 persen di Tahun 2021.

C. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan aman.

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tetap dilakukan dalam proporsi yang sama. Patroli ini merupakan kegiatan rutin guna melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut ini.

Tabel 2.73
Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Waktu Patroli	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam	2 Jam
2.	Jumlah Kegiatan Patroli	3 x Sehari	3 x Sehari	3 x Sehari	4 x Sehari	4 x Sehari
Persentase		0,67	0,67	0,67	0,50	0,50

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2022.*

Dari tabel 2.77 dapat dilihat bahwa patroli penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan rutin oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe berdurasi 2 jam dengan jumlah kegiatan patroli dilakukan sebanyak 3 kali sehari namun mengalami peningkatan menjadi 4 kali sehari di Tahun 2020 dan 2021. Patroli ini sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan nyaman ketertiban umum. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe perlu adanya dukungan dan komitmen bersama dari semua pihak.

D. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari’at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari’at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari’at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.77 berikut:

Tabel 2.74
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pasal 15 tentang Khamar	-	-	-	13	-
2.	Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar	-	2	-	-	2
3.	Pasal 18 tentang Maisir	6	4	-	22	-
4.	Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir	-	7	9	1	4
5.	Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir	-	12	3	-	-
6.	Pasal 23 tentang Khalwat	104	61	47	49	31
7.	Pasal 25 tentang Ikhtilath	24	48	48	90	45
8.	Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya	46	26	-	-	-
9.	Pasal 33 tentang Zina	10	3	3	1	10
10.	Pasal 46 tentang Pelecahan Seksual	-	-	-	2	-
11.	Pasal 47 Pelecehan seksual terhadap anak	-	2	-	-	-
12.	Pasal 50 tentang melakukan Pemerkosaan terhadap Anak	-	-	-	1	-
13.	Pasal 64 tentang Musahaqah	-	-	4	-	-
	Jumlah Kasus	190	165	114	179	92

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2022.*

Dari tabel 2.74 di atas Pelanggaran Syariat Islam pada Tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang menurun walaupun pada tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2017 jumlah kasus pelanggaran syariat islam sebanyak 190 kasus dan menjadi 92 kasus pada tahun 2021. Kasus Pelanggaran Khalwat menjadi kasus tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 104 kasus dan mengalami penurunan menjadi 31 kasus pada tahun 2021. Kasus Ikhtilath mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 24 kasus dan menjadi 45 kasus pada Tahun 2021.

E. Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Data Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe sebagi berikut :

Tabel 2.75
Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Jenis Penertiban	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penertiban Pasar	2	3	9	249	249
2.	Penertiban IMB dan HO	5	14	1	2	-
3.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	43	68	93	249	249
4.	Penertiban Spanduk	32	12	8	5	-

No	Jenis Penertiban	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
5.	Penertiban Pelajar Bolos Sekolah	5	7	4	5	1
6.	Penertiban Café dan Tempat Hiburan Malam	1	-	-	-	-
7.	Penertiban Keramaian Umum	4	6	7	1	-
8.	Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	2	1	-	1	-
9.	Pengamanan Demo	1	-	-	-	-
10.	Pengamanan Upacara dan Hari Besar Lainnya	46	-	-	-	-
11.	Penertiban Pengelolaan Air Kotor/Limbah	-	2	-	-	-
12.	Penertiban Penindakan PNS	-	1	1	-	-
13.	Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis	-	5	2	40	2
14.	Penertiban Izin Milik Ruang Jalan (Galian C dll)	-	6	-	3	-
Jumlah Kasus		141	125	125	555	501

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2022.*

Penertiban untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman yang dilakukan Tahun 2017 pada penertiban pasar sebanyak 2 penertiban dan tahun 2021 meningkat menjadi 249 penertiban. Pada Tahun 2017 Penertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 43 penertiban dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 249 penertiban. Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis pada tahun 2018 sebanyak 5 penertiban dan pada tahun 2021 menurun menjadi 2 penertiban.

F. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bukan membatasi gerak Ormas dan LSM, tapi dalam rangka penguatan dan penyehatan bagi Ormas dan LSM itu sendiri. Pengawasan dan pembinaan ini, mempunyai arti penting karena Ormas dan LSM adalah bagian dari lembaga non-pemerintahan dan sebagai mitra bagi pemerintah dalam turut serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Ormas dan LSM dituntut untuk terus melakukan peningkatan kualitas lembaga, baik dari sisi tertib administrasi, tertib anggota maupun dalam peningkatan SDM yang ada, serta peningkatan kualitas program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART masing-masing ormas. Persentase pembinaan ormas yang

ada di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun bergerak secara dinamis, terlihat pada tahun 2017 sebesar 17% pembinaan terhadap ormas yang telah dilakukan dan mengalami peningkatan menjadi 33% di Tahun 2018. Namun di Tahun 2019 dan 2020 persentase pembinaan ormas sebesar 20% dan 8% hingga di Tahun 2021 menjadi 11% untuk persentase pembinaan ormas yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Persentase Pembinaan Ormas
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ormas yang mendapat bantuan	2	4	4	4	6
2	Jumlah Ormas yang terdaftar	12	12	20	50	54
	PERSEN	17%	33%	20%	8%	11%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

G. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstim/abrasi. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD menunjukkan terjadi penurunan jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga 2021. Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.77 berikut:

Tabel 2.77
Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

Jenis Bencana	Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	1	1	-	1	1
Puting Beliung	7	1	1	1	1

Jenis Bencana	Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Longsor	5	1	1	-	-
Gempa Bumi	-	-	-	-	-
Gelombang Ekstrim/Abrasi	-	-	-	1	-
Jumlah	13	3	2	3	2

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022.

F. Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Api dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas

Metode pencegahan kebakaran pada dasarnya meliputi pengurangan atau penghapusan salah satu unsur diatas. Dalam hampir semua situasi, dua dari ketiga unsur yang ada yaitu oksigen dan bahan yang mudah terbakar. Karena itu penting dijaga agar komponen ketiga yaitu panas jangan sampai cukup tinggi untuk menyalakan api.

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain : permukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi

dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2.78
Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi	57	83	97	196	75
2	Jumlah kejadian kebakaran yg terjadi	57	83	97	196	75
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe selalu dapat ditangani 100%. Pada Tahun 2021 kejadian kebakaran yang terjadi 52 kasus, dapat ditangani seluruhnya.

2.1.3.2.1.6 Sosial

A. Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu.

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat,

kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar. Dari Tabel.1 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu di Tahun 2021 Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial terjadi peningkatan sebanyak 17.828 orang dan jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS sebanyak 25.000 orang dengan persentase 71 %.

Tabel.2.79
Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Bagi Keluarga Kurang Mampu
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial	7498	7498	7498	9598	17828	KK
2.	Jumlah Masyarakat yang terdata dalam DTKS	7920	17104	17654	18516	25000	KK
Pesentase		95	44	42	52	71	

Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2022

1. Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Sosial. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari Tabel.2 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani di Tahun 2021 Jumlah jenis PMKS yang tertangani 4 Jenis dan jumlah PMKS 4 Jenis tidak ada perubahan dari Tahun 2017 s/d 2021 dengan persentase 100%.

Tabel.2.80
Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	Jumlah Jenis PMKS yang tertangani	4	4	4	4	4	Jenis PMKS
2.	Jumlah PMKS	4	4	4	4	4	Jenis PMKS
Pesentase		100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2022.

2. Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Persentase Penanganan Anak Terlantar

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dimana Kriterianya berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah anak telantar yang tertangani di Tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 40 orang, Jumlah anak telantar yang terdata sebanyak 65 orang, Tahun 2021 dengan persentase terjadi penurunan sebanyak 62 %.

Tabel.2.81
Persentase Penanganan Anak Terlantar
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	Jumlah Anak terlantar yang tertangani	-	18	25	7	40	Orang
2.	Jumlah Anak terlantar yang terdata	-	18	40	7	65	Orang
Pesentase		-	100	63	100	62	

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, *Tahun 2022*.

b. Persentase Penanganan Fakir Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, baik dari aspek penyebab, maupun dampaknya sehingga diperlukan langkah penanggulangan dari berbagai perspektif dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan proses ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota. Hal ini setidaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang pembagian

kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam berbagai bidang termasuk bidang sosial.

Dinas Sosial provinsi merupakan bagian stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dalam tingkat regional. Salah satu tugas pokoknya adalah mengsinergikan penanganan kemiskinan pada tingkat pusat dengan pihak kabupaten/kota sebagai pelaksana langsung program kemiskinan. Dengan posisi tersebut, maka dinas sosial provinsi harus mampu menciptakan kondisi agar komunikasi antara berbagai pihak tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Tabel.2.82 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data jumlah fakir miskin berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tertangani di Tahun 2021 menjadi sebanyak 17.828 jiwa, jumlah fakir miskin yang terdata terjadi peningkatan menjadi 113.755 jiwa, dengan persentase penanganan sebesar 15,67 %.

Tabel.2.82
Persentase Penanganan Fakir Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	Jumlah Fakir Miskin yang tertangani	7498	7498	7498	9598	17828	Jiwa
2.	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	7920	17104	17654	18516	113755	Jiwa
Pesentase		95	44	42	52	15,67	

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2022.

3. Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan masa tanggap darurat

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam memenuhi bahan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan penanggulangan bencana, Dinas Sosial dibantu Relawan Sosial (Tagana, Pelopor dan TKSK) dalam mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan bencana. Dari Tabel dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun di Tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 60 jiwa, Jumlah Korban Bencana yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun terjadi penurunan sebanyak 60 jiwa, Tahun 2021 dengan persentase mencapai 100%.

Tabel. 2.83
Persentase Korban Bencana yang menerima
Bantuan masa tanggap darurat
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun	50	65	55	65	60	Jiwa
2.	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun	50	65	55	65	60	Jiwa
Pesentase		100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, *Tahun 2022*.

4. Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola

Taman Makam Pahlawan sendiri secara luas diartikan sebagai lokasi pemakaman khusus bagi para pejuang yang berjasa pada

Negara Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah makam di luar Taman Makam Nasional di mana jenazah Pahlawan Nasioal dimakamkan. Dari Tabel 2.88 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah TMPN yang dikelola sebanyak 1 buah dan Jumlah TMP yang terdata sebanyak 1 buah di Tahun 2017 s/d 2021 tidak ada perubahan dengan persentase mencapai 100%.

Tabel. 2.84
Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1.	Jumlah TMP yang dikelola	1	1	1	1	1	
2.	Jumlah TMP yang terdata	1	1	1	1	1	
Pesentase		100	100	100	100	100	

Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2022.

2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

2.1.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

A. Persentase Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja yang dilatih akan ditempatkan menyesuaikan dengan lowongan kerja yang terdaftar, khususnya di lapangan usaha yang bersifat formal. Selebihnya pencari kerja akan terdistribusi ke dalam lapangan usaha mandiri, yang bersifat tersier dan sebagian primer, seperti perdagangan dan *home industry*. Selama 5 tahun terakhir, Kota Lhokseumawe belum pernah memfasilitasi pihak lapangan usaha khususnya swasta untuk mengadakan bursa kerja swasta. Hal ini mungkin juga dikarenakan minimnya lowongan pekerjaan yang tersedia di sektor formal.

Tabel 2.85
Persentase Pencari Kerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pencari kerja yang dilatih	150	101	94	40	95
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1303	341	189	695	482
Persentase		11,51	29,6	49,7	5,76	19,7

Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2022

Dari tabel tersebut diatas dilihat bahwa jumlah pencari kerja yang dilatih pada Tahun 2017 berjumlah 150 orang dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 1303, sehingga diperoleh persentase 11,51 persen. Pada Tahun 2018 diperoleh jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 101 orang dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 341, sehingga diperoleh persentase 29,6 persen.

Adapun pada Tahun 2019, jumlah pencari kerja yang dilatih berjumlah 94 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 189 orang, sehingga diperoleh persentase 49,7 persen. Pada Tahun 2020 pencari kerja berjumlah 40 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 695, sehingga diperoleh persentase 5,76 persen. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang dilatih berjumlah 95 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 482 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 19.7 persen.

B. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Penempatan Tenaga Kerja diukur berdasarkan beberapa komponen, yakni adanya lowongan kerja terdaftar, pencari kerja terdaftar, dan pencari kerja ditempatkan.

Dibawah ini dapat kita lihat persentase pencari kerja yang ditempatkan mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 2.86
Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	218	29	93	331	189
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	1303	341	189	695	482
Persentase		16,73	8,50	49,21	47,63	39,21

Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2017 jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 218 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 1303, sehingga diperoleh persentase 16,73 persen. Pada Tahun 2018 jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 29 orang dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 341, dengan persentase 8,50 persen.

Adapun pada Tahun 2019, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 93 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 189 orang, sehingga diperoleh persentase 49,21 persen. Pada Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 331 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 695, sehingga diperoleh persentase 47,63 persen. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 189 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 482 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 39,21 persen.

C. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada awalnya dianggap merupakan hubungan perburuhan yang hanya membahas masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek lain yang luas.

Demikian hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara pekerja dan buruh dan pengusaha tetapi perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe, apalagi di kota Lhokseumawe hanya ada 1 orang mediator khusus hubungan industrial. Dibawah ini dapat kita lihat persentase perselisihan hubungan industrial mulai dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dan perkiraan untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Tabel 2.87
Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perkara PPHI selesai dengan PB	51	40	25	47	46
2	Perkara PPHI yang dicatatkan	51	40	25	50	46
Persentase		100	100	100	94	100

Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2017, jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 51 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 40, sehingga diperoleh persentase 100 persen. Pada Tahun 2018 jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 40 orang dan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan sebanyak 40, dengan persentase 100 persen.

Adapun pada Tahun 2019, jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 25 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 25 orang, sehingga diperoleh persentase 100 persen. Pada Tahun 2020 jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 47 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 50, sehingga diperoleh persentase 94 persen. Pada Tahun 2021, jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 46 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 46 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 100 persen.

D. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk mempersingkat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor dengan membuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa :

- a. pengurangan pajak daerah.
- b. pengurangan retribusi daerah.
- c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan /atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah.
- e. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal.
- f. penyediaan sarana dan prasarana.
- g. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
- h. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- i. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
- j. kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
- k. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
- l. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan dan pelaporan lowongan pekerjaan dari perusahaan.
- n. kemudahan akses pasokan bahan baku, dan
- o. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

2.1.3.2.2.2 Pangan

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras (padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi). Sampai saat ini Kota Lhokseumawe tidak memiliki permasalahan ketahanan pangan.

Tabel 2.88
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan Utama (%)
2017	0,074	198.980	0.0000372
2018	0,074	203.280	0.0000364
2019	0,075	207.200	0.0000362
2020	0,078	188.710	0.0000413
2021	0,072	210.180	0.0000343

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2022.

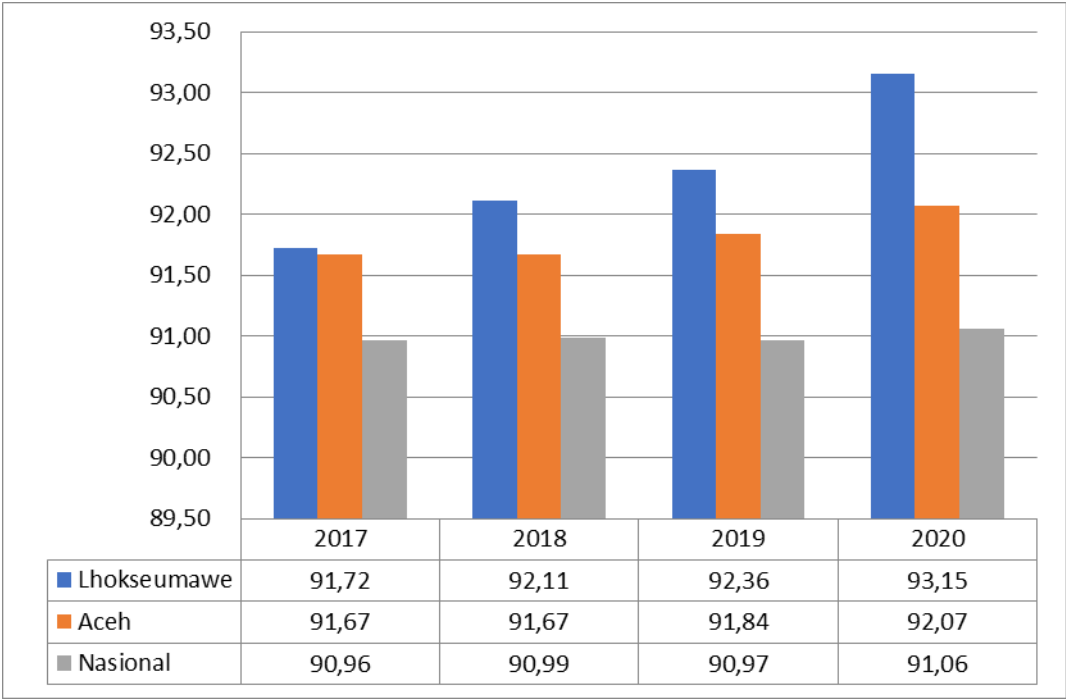
2.1.3.2.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indek Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi

mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2020



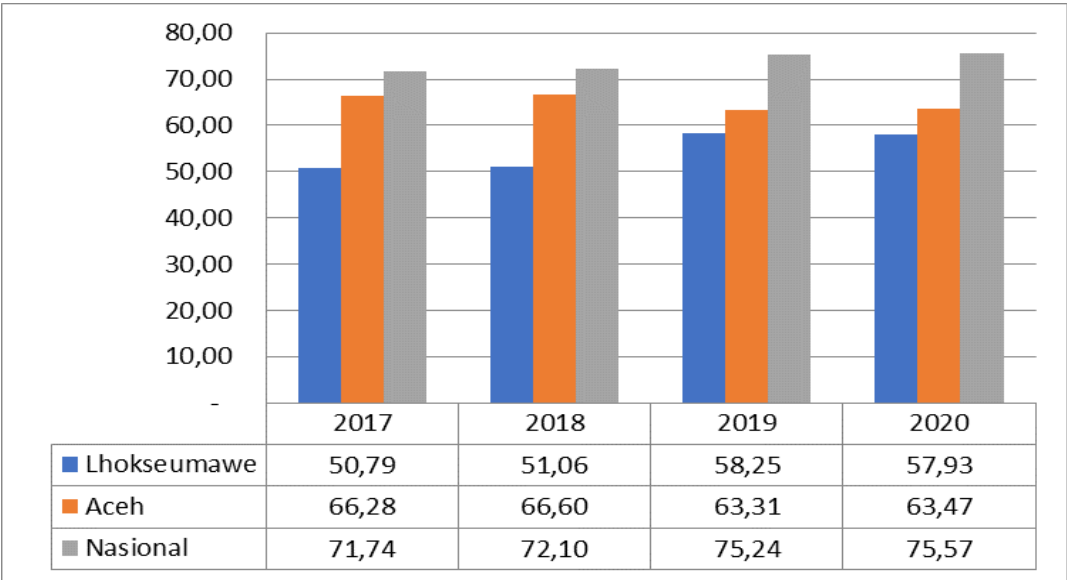
Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe 2022

B. Indek Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai

bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.25
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2020



Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe 2022

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe dari tahun 2017-2020 semakin membaik walaupun pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe mengalami penurunan. Pada tahun 2017 IDG Lhokseumawe sebesar 50,79 lebih rendah dari Aceh sebesar 66.28 dan Nasional sebesar 71.57. Pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe 57.93 masih lebih rendah dari Aceh sebesar 63.47 dan Nasional sebesar 75.57.

C. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Peran perempuan menjadi semakin publik, perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting. baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Meski demikian ada banyak kerangka peraturan yang berpihak kepada perempuan, reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, pemilihan dan kelembagaan dapat membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sensitif terhadap gender. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel persentase partisipasi perempuan di lembaga berikut ini:

Tabel 2.89
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pekerja perempuan di Instansi Pemerintah	2.844	3.100	3.400	3.421	3.475
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	70.875	71.645	72.891	73.412	72.345
Persentase		4.01	4.32	4.66	4.66	4.73

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan data tabel 2.89 diatas dapat dilihat jumlah pekerja perempuan di Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 sebanyak 2.844 orang, pada tahun 2018 sebanyak 3.100 orang, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 3.400 orang, tahun 2020 sebanyak 3.421 orang dan pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 3.475, sedangkan untuk jumlah pekerja perempuan untuk tahun 2017 sebanyak 70.875 orang, tahun 2018 sebanyak 71.645 orang, tahun 2019 sebanyak 72.891, tahun 2020 terus meningkat menjadi sebanyak 73.412 orang sedangkan di tahun 2021 menurun

menjadi sebanyak 72.345 orang. Dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

A. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.90
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki-laki	23	23	21	21	21
2.	Perempuan	2	2	4	4	4
Jumlah		25	25	25	25	25
Persentase		8%	8%	16%	16%	16%

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan data tabel 2.90 diatas proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sebanyak 2 orang atau 8% dan pada periode tahun 2019 sampai dengan 2021 naik dua kali lipat proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR meningkat menjadi 4 orang atau 16%. Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Lhokseumawe masih rendah selain belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat

undang-undang ini terlihat dari tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berikut data dapat dilihat pada tabel 2.91 berikut ini:

Tabel 2.91
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pekerja Perempuan di instansi Swasta	1.021	1.085	1.366	1.542	1.215
2.	Jumlah Pekerja Perempuan	70.875	71.645	72.891	73.412	72.345
Persentase		1.44	1.51	1.87	2.1	1.67

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan data tabel 2.91 diatas dapat dilihat partisipasi jumlah pekerja perempuan di instasi swasta pada tahun 2017 sebanyak 1.021 orang Tahun 2018 sebanyak 1.085 orang, tahun 2019 sebanyak 1.366 orang, Tahun 2020 meningkat sebanyak 1.542 orang, tahun 2021 menurun menjadi 1.215 orang dan jumlah pekerja perempuan tahun 2017 sebanyak 70.875 orang pada tahun 2018 sebanyak 71.645 Orang Tahun 2019 sebanyak 72.891 orang di Tahun 2020 terus meningkat menjadi 73.412 orang sedangkan Tahun 2021 menurun jumlah pekerja perempuan 73.421 menjadi 72.345 pekerja perempuan Persentasenya 1.67%.

C. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) Tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio KDRT tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.92
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KDRT	6	7	37	49	18
2.	Jumlah RT	53.068	53.600	53.535	54.735	55.154
Rasio KDRT		0.011%	0.013%	0.067%	0.089%	0.032%

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan data Tabel 2.92 Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Lhokseumawe menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari Rasio KDRT yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada tahun 2017 angka Rasio KDRT 0.011%, tahun 2018 angka Rasio KDRT 0,13%, tahun 2019 naik sedikit angka Rasio KDRT 0,067% sedangkan tahun 2020 meningkat angka Rasio KDRT sebanyak 0.089% dan tahun 2021 angka Rasio KDRT menurun menjadi 0,032% di Kota Lhokseumawe.

D. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap Tahun jumlahnya terus meningkat, yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.93 berikut:

Tabel 2.93
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan	24	19	22	86	56
2.	Jumlah Pengaduan	24	19	22	86	56
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2021.

Berdasarkan data tabel 2.93 di atas terlihat bahwa jumlah pengaduan yang diselesaikan di Kota Lhokseumawe tahun 2017 sebanyak 24 orang, tahun 2018 sebanyak 19 orang, tahun 2019 sebanyak 22 orang, tahun 2020 meningkat sebanyak 86 orang dan di tahun 2021 menurun sebanyak 56 orang, sedangkan Jumlah Pengaduan di Kota Lhokseumawe tahun 2017 sebanyak 24 orang, tahun 2018 sebanyak 19 orang, tahun 2019 Rasio penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Lhokseumawe sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seluruh pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2017-2021 semuanya dapat diselesaikan.

2.1.3.2.2.4 Pertanahan

Pertanahan merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam urusan pertanahan terdapat beberapa elemen, diantaranya adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

A. Sertifikat Hak Milik

Hak Milik (HM) adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dari luas lahan wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 129.067.057 m², Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki lahan bersertifikat hak milik sebesar 660.058 m² sedangkan lahan bersertifikat hak milik masyarakat sebesar 17.520.000 m², kondisi tersebut merupakan kondisi sampai dengan tahun 2021. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.94
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017–2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah (m2)	21,519	4,397	108,363	68,243	143,222
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000
	Persentase	0.012%	0.002%	0.060%	0.038%	0.079%

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2022.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2017 lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluas 21.519 m2 atau 0,012% dari total luas wilayah Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2021 luas lahan bersertifikat milik pemerintah seluas 143.222 m2 yaitu sebesar 0,079% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.95
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di
Kota Lhokseumawe Tahun 2017–2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat (m2)	1,449,141	2,552,630	5,459,640	1,713,953	2,932,830
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000
	Persentase	0.80%	1.41%	3.02%	0.95%	1.62%

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2022.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik masyarakat di Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2021 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 2.932.830 m2 yaitu sebesar 1,62% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

B. Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang,

sampai dengan tahun 2021 luas lahan yang digunakan untuk Hak Guna Bangunan (HGB) Kota Lhokseumawe seluas 325.700 m².

Hak Guna usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 Tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Tabel 2.96
Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Hak Guna Bangunan (m2)	29,292	2,518	81,976	63,387	20,399
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000
	Persentase	0.016%	0.001%	0.045%	0.035%	0.011%

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2022.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 29.292 m2 atau 0,016% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2021 Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe menjadi 20.399 m2 atau 0,011% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

C. Penyelesaian kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan

Pengertian sengketa tanah tertera dalam Undang-Undang Sengketa Tanah yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis bahwa sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas.

Singkatnya, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana mereka saling berebut

untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tanah sengketa adalah kasus yang bisa dibilang sering terjadi di Indonesia.

Tabel 2.97
Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2017–2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	-	-	1	1	1
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar	-	-	1	1	1
Persentase		-	-	100%	100%	100%

Sumber : Kantor Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2022.

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan di Kota Lhokseumawe semuanya dapat diselesaikan. Dimana pada tahun 2021 terjadi 1 kasus dan yang diselesaikan 1 kasus.

2.1.3.2.2.5 Lingkungan Hidup

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

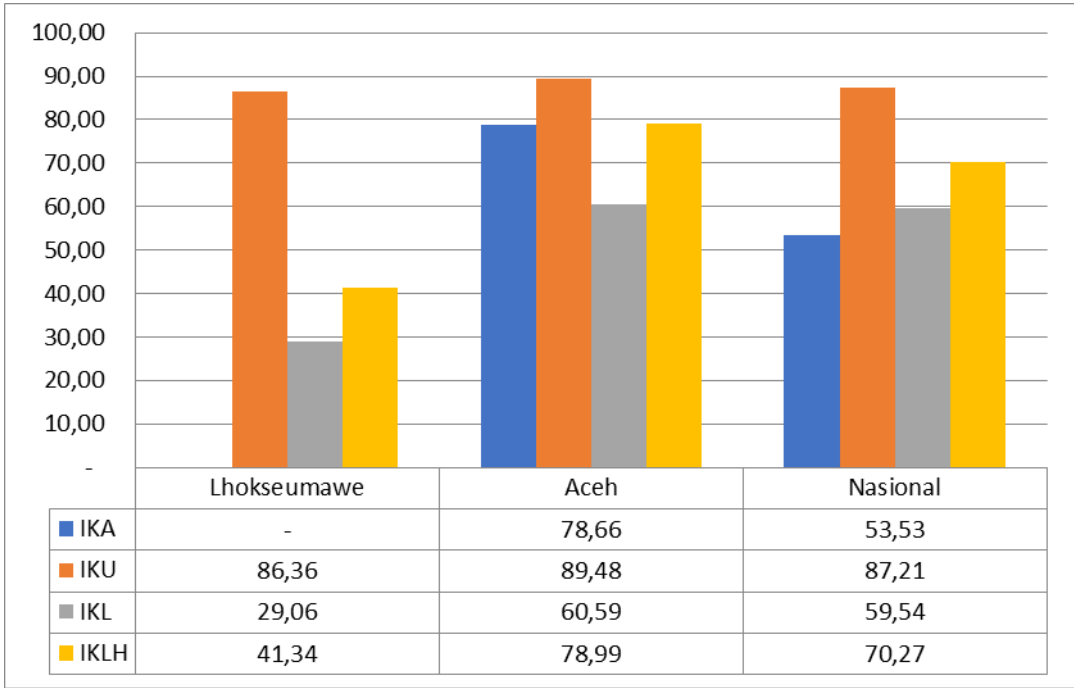
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas

Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan didasarkan pada target nilai indeks yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2020, baik untuk nilai IKLH (68,71), IKA (55,10), IKU (84,10), IKL (61,66), dan IKAL (58,5). Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah:

Gambar 2.26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL)
Tahun 2020



Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2022

Dari Gambar di atas Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk dibanding Aceh sebesar 78.99 dengan predikat baik dan Nasional sebesar 70.27 dengan predikat baik. Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36 dengan predikat baik namun tetap lebih rendah dari Aceh sebesar 89.48 dan Nasional sebesar 87.21. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 29.06 dengan predikat waspada dibanding Aceh sebesar 60.59 dan Nasioanal sebesar 59.54.

B. Tersedianya Dokumen RPPLH dan KLHS

1. Dokumen RPPLH

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan kewajiban membuat perencanaan lingkungan yang berkekuatan hukum untuk melengkapi perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM) dan perencanaan spasial (RTRW). Dokumen yang berisi rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

Dokumen RPPLH Lhokseumawe masih dalam proses penyusunan. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencan Pembangunan Jangka Panjang Lhokseumawe (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

2. Dokumen KLHS Kota

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMK 2017-2022, dan KLHS RTRW 2012- 2032.

C. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani

Lingkungan hidup hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kendaraan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi.

Kota Lhokseumawe mempunyai masalah dengan lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah cair. Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya masih sangat minim sekali.

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Semua sampah dari sumber masing-masing akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Alue Lim.

Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu :

1. sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga;
2. sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah

atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga misalnya limbah dari proses industri.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan/dibuang sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis.. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penanganan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe setiap tahun mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Tahun 2017 dan Tahun 2018 sampah yang ditangani sama persentasenya yaitu dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 32.419 ton yang ditangani sebanyak 24.572 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 75,80%. Pada Tahun 2019 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.067 ton yang ditangani sebanyak 25.604 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 77,43%. Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.729 ton sampah yang tertangani meningkat menjadi 27.396 ton, capaian penanganan menjadi 81,22% dan meningkat lagi pada tahun 2021 dengan jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, sehingga mencapai 86,25% sampah tertangani ditahun 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.98
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	24.572	24.572	25.604	27.396	29.672
2	Total jumlah timbunan sampah di Kota (ton)	32.419	32.419	33.067	33.729	34.403
Persentase		75,80	75,80	77,43	81,22	86,25

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2022

D. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman sebagian besar diselesaikan di lokasi sumber sampah dengan cara dibakar dan hanya sebagian yang dikumpulkan oleh pengumpul sampah informal untuk didaur ulang. Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe yang meliputi pertokoan dan pasar sudah mencapai 100%, artinya semua timbunan sampah setiap harinya sudah dapat diangkut ke TPA.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta memberikan pelayananan kepada masyarakat di bidang persampahan dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti tempat penampungan sampah sementara (kontainer, bin/tong, bak permanen), alat pengangkut (gerobak, dumptruck, becak sampah), dan sebagainya.

Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Cakupan pelayanan sampah di kota juga makin tahun makin luas.

Tabel 2.99
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)	120,00	130,00	150,00	160,00	165,00
2.	Luas area kabupaten/kota (km2/ha)	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06
Persentase		66.27	71.80	82.84	88,36	91,13

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2017 persentase cakupan area pelayanan sebesar 66.27%, pada Tahun 2018 persentase cakupan area pelayanan sebesar 71.80% dan pada Tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan sebesar 82.84%, pada Tahun 2020 persentase cakupan area pelayanan sebesar 88.36%, dan pada Tahun 2021 persentase cakupan area pelayanan sebesar 91.13%.

2.1.3.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara yang sudah berumur 17 Tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin wajib memilikinya. Rasio Penduduk ber KTP adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu Daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Pada Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Program KTP-elektronik atau e-KTP dengan empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Dengan adanya kewajiban perekaman KTP berbasis Elektronik, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengetahui jumlah penduduk usia 17 Tahun keatas yang telah melakukan perekaman dan pembuatan KTP. Namun jumlah warga yang membuat KTP di usia 17 naik begitu pesat dari Tahun 2017 sampai dengan 2021, di samping itu jumlah penduduk juga tidak begitu banyak terjadi penambahannya. Berikut Rasio penduduk ber KTP di Kota Lhokseumawe :

Tabel 2.100
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	107.793	116.032	122.958	125.483	126.300
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	131.931	132.038	128.230	130.141	130.633
	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0.82	0.88	0.96	0,96	0,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Berdasarkan Data tabel: 2.99 di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima Tahun terakhir 2017-2021, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,97. Sedangkan pada Tahun 2017 rasio ini mengalami penurunan menjadi 0,82.

B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Rasio Jenis kelamin waktu lahir, Para demografis mengajukan bahwa perbandingan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.

Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat bahwa pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske dinas terkait.

Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 2.101
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	18.010	18.279	18.311	18.159	18.532
2	Jumlah Bayi	20.245	20.269	20.996	20.296	18.589
Rasio		0.88	0.88	0.87	0,96	0,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Tabel 2.100 di atas menggambarkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021 rasio bayi ber akta kelahiran sangat fluktuatif. Pada Tahun 2017 rasio bayi ber akta kelahiran sebesar 0.88%, Tahun 2018 sebesar 0.88 % dan tahun 2019 menurun sebesar 0.87% sedangkan untuk tahun 2020 meningkat menjadi 0,96 dan selanjutnya pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 0,97.

C. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Program KTP-elektronik dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Sedangkan untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun 2006. Pada Tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

D. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 Tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlakunya KTP adalah 5 tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Tabel 2.102
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	107.293	116.032	122.988	125.483	126.300
2	Jumlah penduduk wajib KTP	131.931	132.038	128.230	130.141	130.633
	Persentase	82	88	96	96	97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan penerbitan KTP di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar 82%. Persentase pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2018 meningkat sebesar 88% dan untuk tahun 2019 dan 2020 meningkat sebesar 1%

yaitu menjadi 96% begitu pula pada tahun 2021 meningkat menjadi 97%. Kenaikan persentase pada cakupan penertiban KTP Kota Lhokseumawe tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

2.1.3.2.2.7 Komunikasi dan Informatika

A. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

B. Pameran/Expo

Pameran/Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri untuk tahun 2017-2021 telah melakukan sebanyak 2 (dua) kegiatan pameran yaitu pada tahun 2017 Pameran Gampong Expo Kota Lhokseumawe dan tahun 2019 Lhokseumawe Expo.

C. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan program dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. KIM dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan meghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling

memberdayakan, salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Tujuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan.

Selain dari tujuan tersebut, KIM berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota KIM , dari KIM kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, KIM sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. KIM sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat dibidang informasi dan media masa. KIM sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.103
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
Persentase		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 terdapat empat (4) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan empat (4) jumlah Kecamatan yang ada dalam Kota Lhokseumawe.

D. Penyebarluasan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, searah dengan hal tersebut hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Melalui program penyebarluasan informasi dimaksud untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan pemerataan informasi/komunikasi timbal balik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Berikut tabel di bawah ini menjelaskan presentase penyebarluasan informasi publik Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 2.104
Persentase Penyebarluasan Informasi Publik
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Informasi publik yang tercatat	NA	2	3	8	10
2	Jumlah informasi Publik yang tersedia	NA	50	52	55	60
Persentase		0%	4,0	5,8	14,5	16,7

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah informasi publik yang tercatat dan jumlah informasi publik yang tersedia persentasenya adalah 0% dikarenakan Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian baru terbentuk pada pertengahan Tahun 2017. Untuk Tahun 2018-2021 mengalami peningkatan persentase penyebarluasan informasi publik yang ada di Kota Lhokseumawe.

Melalui program penyebarluasan informasi dimaksudkan untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai.

Persentase pelayanan publik yang terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.104 berikut:

Tabel 2.104
Persentase Pelayanan Publik yang Terintegrasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang terintergrasi	NA	1	1	1	1
2	Jumlah Seluruh PD	NA	33	34	34	34
Persentase		0%	3	2,9	2,9	2,9

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2022.

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah PD yang pelayanan publik yang terintegrasi baru Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian dari 34 PD yang ada di Kota Lhokseumawe. Tahun 2018 persentase pelayanan publik yang terintegrasi sebanyak 3% disebabkan karena PD yang ada di Kota Lhokseumawe 32 PD, sedangkan pada Tahun 2019-2021 ada penambahan 1 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanahan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kini memiliki kewenangan sebagai Wali Data statistik sektoral. Kewenangan tersebut berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Tabel 2.105
Persentase PD yang Melakukan Pengamanan Data
dan Informasi Terintegrasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	NA	1	1	1	1
2	Jumlah Seluruh PD	NA	33	34	34	34
Persentase		0%	3	2,9	2,9	2,9

Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi hanya satu Perangkat Daerah saja yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Sedangkan Perangkat Daerah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 34 Perangkat Daerah. Diharapkan untuk tahun berikutnya akan bertambah jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi.

2.1.3.2.2.8 Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA).

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Jumlah seluruh investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.422 Investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor. Pada Tahun 2017 jumlah investor PMDN sebesar 265, Tahun 2018 jumlah investor PMDN sebesar 139, tahun 2019 jumlah investor PMDN sebesar 152, di Tahun 2020 jumlah investor PMDN/PMA terjadi kenaikan sebesar 434 dan di Tahun 2021 jumlah investor PMDN/PMA terjadi

penurunan sebesar 432. Berikut tabel Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021.

Tabel 2.106
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Investor	265	139	152	434	432

Sumber : DPMTSPNAKER, 2022

B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Investasi pada Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 jumlah Investasi PMDN sebesar 1.977 (milyar), tahun 2018 jumlah Investasi PMDN sebesar 618 (milyar), tahun 2019 jumlah Investasi PMDN sebesar 793 (milyar), di Tahun 2020 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.268 (milyar) dan pada Tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5.303 (milyar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.107
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	URAIAN	PMDN (Milyar)
2017	Jumlah Investasi	1.977
2018	Jumlah Investasi	618
2019	Jumlah Investasi	793
2020	Jumlah Investasi	1.268
2021	Jumlah Investasi	5.303

Sumber : DPMTSPNAKER, 2022.

2.1.3.2.2.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Indeks Desa Membangun

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Perkembangan status desa di Kota Lhokseumawe per Kecamatan pada tahun 2017-2021 dapat kita lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.108
Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

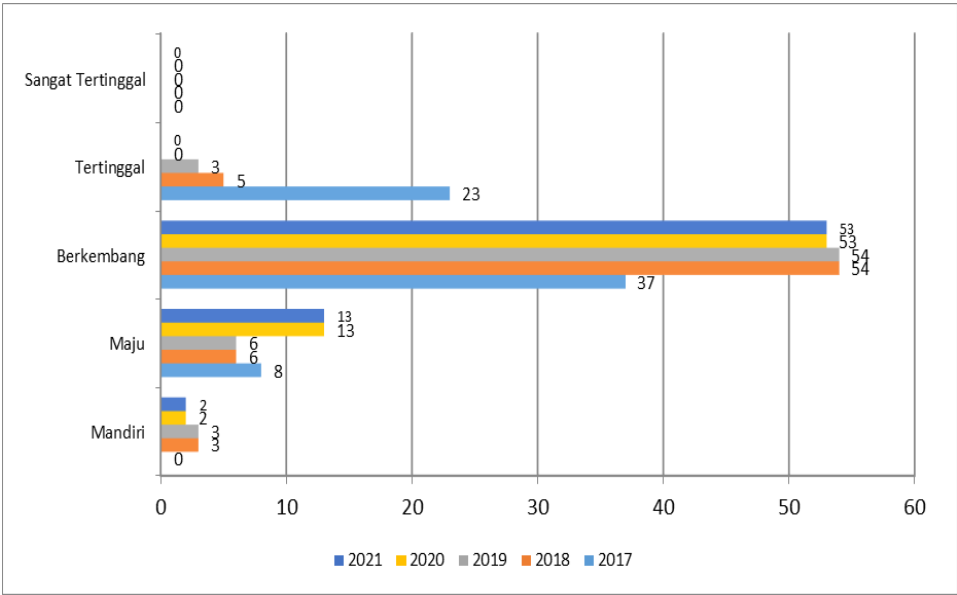
No.	Nama Desa	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Muara Dua					
	- Mandiri	0	0	0	0	0
	- Maju	0	2	2	5	5
	- Berkembang	10	13	13	12	12
	- Tertinggal	7	2	2	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
B	Banda Sakti					
	- Mandiri	0	2	2	1	1
	- Maju	5	1	1	3	3
	- Berkembang	13	15	15	14	14
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
C	Blang Mangat					
	- Mandiri	0	0	0	0	0
	- Maju	0	0	0	2	2

No.	Nama Desa	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
	- Berkembang	6	21	21	20	20
	- Tertinggal	16	1	1	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
D	Muara Satu					
	- Mandiri	0	1	1	1	1
	- Maju	3	3	3	3	3
	- Berkembang	8	5	5	7	7
	- Tertinggal	0	2	2	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
TOTAL		68	68	68	68	68

Sumber: Keputusan Dirjen PDP Kementerian Desa dan PDTT Nomor : 398.4.1 Tahun 2021

Untuk lebih jelas jumlah status desa di Kota Lhokseumawe tahun 2017-2021 dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.27
Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2022.

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal di Kota Lhokseumawe tidak ada, dan status desa tertinggal menurun dari tahun 2017 sebanyak 23 desa pada tahun 2021 menjadi tidak ada desa tertinggal. Sedangkan status desa berkembang dari tahun 2017 sebanyak 23 desa meningkat menjadi 54 desa di tahun 2018 dan 2019 dan turun menjadi 53 desa pada

tahun 2020 dan 2021, Status desa maju 8 desa pada tahun 2017 turun menjadi 6 desa pada tahun 2018 dan 2019 dan menjadi 53 desa pada tahun 2020 dan 2021, dan status desa mandiri yang pada tahun 2017 tidak ada menjadi 6 desa pada tahun 2018 dan 2019 dan menjadi 2 desa pada tahu 2020 dan 2021.

Penurunan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dikarenakan adanya factor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.109
Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2021

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS
BANDA SAKTI	BANDA MASEN	0.6121	BERKEMBANG
	HAGU BARAT LAUT	0.6238	BERKEMBANG
	HAGU SELATAN	0.6486	BERKEMBANG
	HAGU TEUNGOH	0.6298	BERKEMBANG
	JAWA BAROE	0.6754	BERKEMBANG
	KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE	0.8041	MAJU
	KEUDE ACEH	0.7032	BERKEMBANG
	KOTA LHOKSEUMAWE	0.8183	MANDIRI
	KUTA BLANG	0.7119	MAJU
	LANCANG GARAM	0.7446	MAJU
	MON GEUDONG	0.6678	BERKEMBANG
	PUSONG BARU	0.6944	BERKEMBANG
	PUSONG LHOKSEUMAWE	0.6646	BERKEMBANG
	SIMPANG EMPAT	0.6824	BERKEMBANG
	TUMPOK TEUNGOH	0.6495	BERKEMBANG
	UJONG BLANG	0.6476	BERKEMBANG
	ULEE JALAN	0.6584	BERKEMBANG
	UTEUN BAYI	0.677	BERKEMBANG
BLANG MANGAT	ALUE LIM	0.6863	BERKEMBANG
	ASAN KAREUNG	0.6368	BERKEMBANG
	BALOI	0.6041	BERKEMBANG
	BLANG BULOH	0.6841	BERKEMBANG
	BLANG CUT	0.6884	BERKEMBANG
	BLANG PUNTEUET	0.7052	BERKEMBANG
	BLANG TEUE	0.6538	BERKEMBANG
	BLANG WEU BAROH	0.6881	BERKEMBANG
	BLANG WEU PANJOE	0.6283	BERKEMBANG
	JAMBO MESJID	0.6508	BERKEMBANG
	JAMBO TIMU	0.7016	BERKEMBANG

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS
	JEULIKAT	0.68	BERKEMBANG
	KEUDE PUNTEUET	0.7341	MAJU
	KUALA	0.7067	BERKEMBANG
	KUMBANG PUNTEUET	0.6659	BERKEMBANG
	MANE KAREUNG	0.6133	BERKEMBANG
	MESJID PUNTEUET	0.8102	MAJU
	RAYEUK KAREUNG	0.6502	BERKEMBANG
	SEUNEUBOK	0.697	BERKEMBANG
	TEUNGOH	0.6954	BERKEMBANG
	TUNONG	0.6917	BERKEMBANG
	ULEE BLANG MANE	0.6398	BERKEMBANG
MUARA DUA	ALUE AWE	0.681	BERKEMBANG
	BLANG CRUM	0.6378	BERKEMBANG
	BLANG POROH	0.6778	BERKEMBANG
	COT GIREK KANDANG	0.6854	BERKEMBANG
	CUT MAMPLAM	0.6679	BERKEMBANG
	KEUDE CUNDA	0.7108	MAJU
	LHOK MON PUTEH	0.707	BERKEMBANG
	MEUNASAH ALUE	0.6429	BERKEMBANG
	MEUNASAH BLANG	0.6978	BERKEMBANG
	MEUNASAH MANYANG	0.6997	BERKEMBANG
	MEUNASAH MEE	0.7067	BERKEMBANG
	MEUNASAH MESJID	0.7783	MAJU
	MNS. PANGGOI	0.7224	MAJU
	PALOH BATEE	0.6068	BERKEMBANG
	PAYA BILI	0.701	BERKEMBANG
	PAYA PUNTEUET	0.7463	MAJU
	UTEUNKOT	0.7519	MAJU
MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	0.723	MAJU
	BATUPHAT TIMUR	0.819	MANDIRI
	BLANG NALEUNG MAMEH	0.6752	BERKEMBANG
	BLANG PANYANG	0.6886	BERKEMBANG
	BLANG PULO	0.7437	MAJU
	COT TRIENG	0.667	BERKEMBANG
	MEUNASAH DAYAH	0.696	BERKEMBANG
	MEURIA PALOH	0.7016	BERKEMBANG
	PADANG SAKTI	0.7375	MAJU
	PALOH PUNTI	0.6173	BERKEMBANG
	UJONG PACU	0.6737	BERKEMBANG

Sumber: Keputusan Dirjen PDP Kementerian Desa dan PDTT Nomor: 398.4.1 Tahun 2021

B. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menunjang kegiatan pemerintahan desa perlu tersedianya sarana prasarana kantor desa yang memadai. Termasuk ruangan untuk menunjang pelayanan dan kegiatan pemerintahan desa. Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dimana sampai dengan Tahun 2021 hanya 1 gampong saja dengan kondisi kantor yang rusak dan 3 gampong yang belum memiliki kantor untuk urusan pemerintahan gampongnya. Pemerintahan gampong yang kondisi bangunannya rusak maupun yang tidak memiliki kantor dalam menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan sarana prasarana lainnya yang ada di gampong seperti bangunan yang ada di mesjid, meunasah, gedung pertemuan maupun ruangan lain yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi Kantor Pemerintahan Desa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.110 berikut :

Tabel 2.110
Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa
Tahun 2017-2021

No	Kondisi Kantor	Jumlah Kondisi Kantor Geuchik					Keterangan (Gampong)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kantor Dalam Kondisi Baik	38	54	58	60	64	
2	Kantor Dalam Kondisi Rusak	22	5	4	3	1	Kota Lhokseumawe
3	Belum Memiliki Kantor	8	9	6	5	3	Hagu Teungoh, Jambo Timu, Batuphat Timur
Jumlah		68	68	68	68	68	

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Selanjutnya cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%. Sejak Tahun 2017-2021 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	2017		2018		2019		2020		2021	
			Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana
1	Banda Sakti	18	16	88,88%	16	88,88%	16	88,88%	16	88,88%	16	88,88%
2	Muara Satu	11	6	54,54%	7	63,63%	6	54,54%	7	63,63%	10	90,91%
3	Blang Mangat	22	17	72,72%	18	81,81%	17	72,72%	18	95,45%	21	95,45%
4	Muara Dua	17	13	76,47%	13	76,47%	13	76,47%	13	94,11%	17	100%
Jumlah		68	52	76,47%	54	79,41%	52	76,47%	54	85%	60	94,11%

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik pada tahun 2017 sebesar 76,47% menjadi 79,41% di tahun 2018, walau kembali terjadi penurunan di tahun 2019 sebesar 76,47% namun di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan sebesar 85% hingga mencapai 94,11%. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

C. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Yang Baik

Dana Desa/Gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa/Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap Tahun telah memfasilitasi dana untuk gampong dengan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong yang dilaksanakan dari APBK melalui Alokasi Dana Gampong (ADG). Sejak Tahun 2015 pemerintah pusat mulai APBN

menyalurkan Dana Desa (DD). Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyalurkan dana bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gampong. Adapun besaran dana yang disalurkan untuk gampong sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.116 berikut ini:

Tabel 2.112
Data Penyaluran Dana Ke Gampong
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Realisasi Penyaluran Dana ke Gampong				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG	54.176.102.429	47.393.135.135	49.971.344.117	40.846.685.523	44.587.713.353
2	Dana Desa (DD)	54.679.330.666	53.475.677.300	58.773.329.996	60.285.819.000	61.858.474.338
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	928.342.385	973.164.381	-	447.198.335	1.873.782.221
Jumlah		109.783.775.480	101.841.976.816	108.744.674.113	101.579.702.858	108.319.969.912

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022

Dari tabel 2.112 dapat dilihat bahwa dana yang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Tahun 2017 sebesar Rp. 109.783.775.480,- dan terus berfluktuasi hingga pada tahun 2021 menjadi Rp. 108.319.969.912. Dana APBG tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Pemerintah desa/gampong diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan gampong dan kekayaan milik gampong.

Begitu besar peran yang diterima oleh gampong, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah gampong harus bisa menerapkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan secara berkesinambungan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur gampong yang baik di bidang pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2017-2021 telah melakukan pembinaan kepada pemerintah gampong dengan melakukan penyusunan produk hukum gampong, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset gampong serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.117 berikut :

Tabel 2.113
Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah Gampong Yang Dibina				
			2017	2018	2018	2020	2021
1.	Banda Sakti	18	18	18	18	18	18
2.	Muara Satu	11	11	11	11	11	11
3.	Blang Mangat	22	22	22	22	22	22
4.	Muara Dua	17	17	17	17	17	17
	Jumlah	68	68	68	68	68	68

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan tujuan memberdayakan gampong dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG), meningkatkan kemandirian dan kapasitas gampong serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di gampong. Pada Tahun 2017 pemerintah gampong melalui APBG mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk belanja penyertaan modal gampong guna mendukung modal awal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pembinaan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap BUMG sebagai upaya

pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tumbuh kembangnya usaha guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan warga gampong dan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Selama Tahun 2017-2021 data pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.114
Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Tahun Pendirian dan Penyertaan Modal Gampong					Penyertaan Modal Gampong	BUMDESMA
		2017	2018	2019	2020	2021		
1	Banda Sakti	1.110.463.792	2.395.503.306	964.466.591	-	-	4.567.252.991	-
2	Muara Satu	1.981.842.693	884.870.269	188.000.000	-	-	2.727.410.020	-
3	Blang Mangat	2.970.748.862	1.761.707.870	431.000.000	-	-	4.918.607.810	-
4	Muara Dua	2.603.335.927	1.257.127.743	451.506.734	-	-	4.214.662.316	1.600.000.000
JUMLAH		8.666.391.274	6.299.209.189	2.034.973.325	-	-	17.000.573.788	1.600.000.000

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel 2.114 dapat dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMG di awal Tahun 2017 sebesar Rp. 8.666.391.274,-, di tahun 2018 sebesar Rp. 6.299.209.189 dan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 2.034.973.325,- sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada data yang diberikan oleh dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada BUMG sangat besar dan guna mencapai tujuan pendirian perlu adanya pembinaan BUMG tersebut dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.115
Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah BUMG					BUMDESMA
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Banda Sakti	18	7	16	18	18	18	-
2	Muara Satu	11	9	10	11	11	11	-
3	Blang Mangat	22	16	21	21	21	21	-
4	Muara Dua	17	14	17	17	17	17	1
Jumlah		68	46	64	67	67	67	1

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel 2.115 dapat dilihat bahwa jumlah BUMG yang ada di Kota Lhokseumawe terus bertumbuh, dimana pada Tahun 2017 sebanyak 46 unit BUMG dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 67 unit. Pada Tahun 2019 telah berdiri Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) di Kecamatan Muara Dua yang beranggotakan 16 gampong dan berada di Kecamatan Muara Dua.

D. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP-PKK Kecamatan sampai TP-PKK Gampong dan dilakukan secara bergantian setiap Tahunnya. Selanjutnya TP-PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan Kelompok-kelompok Masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma dan lain-lain. Jumlah kelompok Dasa Wisma adalah bagian dari jumlah Kelompok PKK Dusun yang ada di Gampong.

Tabel 2.116
Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No.	TP PKK Kecamatan	Jumlah TP-PKK Gampong	Kelompok Binaan				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Banda Sakti	18	4	3	3	7	2
2.	Muara Satu	11	2	3	1	1	1
3.	Blang Mangat	22	2	1	2	2	2
4.	Muara Dua	17	2	2	4	2	2
	Jumlah	68	10	9	10	12	7

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel 2.116 dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK berfluktuasi dan mengalami penurunan di tahun 2021. Pada Tahun 2017 jumlah yang dibina sebanyak 10 kelompok dan menjadi 7 kelompok di tahun 2021 yang tersebar di 4 Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK diperoleh dari perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Selama Tahun 2017-2021 data kelompok binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.117 berikut :

Tabel 2.117
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota
Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah TP-PKK	2017		2018		2019		2020		2021	
			Jumlah Binaan	Rata-Rata	Jumlah Binaan	Rata-Rata	Jumlah Binaan	Rata-Rata	Jumlah Binaan	Rata-Rata	Jumlah Binaan	Rata-Rata
1	Banda Sakti	18	4	0,22	3	0,16	4	0,22	7	0,38	2	0,28
2	Muara Satu	11	2	0,18	3	0,36	2	0,18	1	0,09	1	0,09
3	Blang Mangat	22	2	0,09	1	0,04	2	0,09	2	0,09	2	0,09
4	Muara Dua	17	2	0,11	2	0,11	2	0,11	2	0,11	2	0,11
	Jumlah	68	18	0,26	10	0,14	9	0,13	12	0,14	7	0,17

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

E. Persentase PKK Aktif

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya fasilitas yang bersifat noninstruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan masalahnya, tanpa atau dengan bantuan pihak lain, dengan memanfaatkan potensi keluarga dan fasilitas yang ada di masyarakat. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan.

TP-PKK Kota Lhokseumawe aktif menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Dana ADG dan Dana Desa sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini, sehingga lebih meningkatkan peran aktif TP-PKK dalam pembangunan gampong khususnya pembinaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase PKK aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah PKK dikali 100%. Pada tahun 2017 persentase PKK aktif sebesar 61,28 persen dan terus berfluktuasi hingga mencapai 41,07 persen di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya persentase PKK Aktif yang ada di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.118
Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah TP-PKK Aktif	Persentase (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Banda Sakti	18	22,23	16,66	16,66	33,34	11,12
2.	Muara Satu	11	18,19	27,28	9,09	9,09	9,09
3.	Blang Mangat	22	9,09	4,55	9,09	9,09	9,09
4.	Muara Dua	17	11,77	11,77	23,53	17,64	11,77
	Jumlah / Persentase	68	61,28	60,26	59,18	69,16	41,07

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

F. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang Kesehatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui serta wanita usia subur. Oleh karena itu kegiatan posyandu sangat penting dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.

Persentase posyandu aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu dikali 100%. Selama Tahun 2017 s/d 2021 jumlah posyandu aktif Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.119 berikut:

Tabel 2.119
Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persentase (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Banda Sakti	32	32	100	100	100	100	100
2.	Muara Satu	15	15	100	100	100	100	100
3.	Blang Mangat	29	29	100	100	100	100	100
4.	Muara Dua	24	24	100	100	100	100	100
	Jumlah / Persentase	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel 2.119 terlihat bahwa persentase posyandu aktif Kota Lhokseumawe sampai dengan saat ini adalah 100 persen dan tersebar di 4 Kecamatan. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki persentase posyandu aktif paling tinggi

dibanding kecamatan lainnya mengingat jumlah penduduk yang banyak dan padat di kecamatan tersebut.

Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri.

Posyandu yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 strata posyandu Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.120 berikut ini :

Tabel 2.120
Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No	Strata Posyandu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pratama	0	0	0	0	0
2	Madya	10	10	12	12	12
3	Purnama	78	78	87	87	87
4	Mandiri	1	1	1	1	1
	Jumlah	89	89	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

G. Kerjasama Antar Gampong

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar Desa yang bertujuan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan skala kawasan mengedapankan asas manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di kawasan perdesaan. Prioritas pembangunan dalam skala kawasan meliputi, penggalan potensi kawasan serta perumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan

tersebut. Hal ini penting agar penyepakatan keputusan dalam upaya membangun kawasan perdesaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan sekaligus untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat serta membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan antar desa dalam skala kawasan ini, perlu dibentuk lembaga antar desa yang keanggotaannya mewakili desa-desa yang melaksanakan kegiatan kerjasama. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa ini disebut Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD). BKAD merupakan kelembagaan masyarakat yang proses pembentukannya atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

Tabel 2.121
Cakupan Pembinaan Kerjasama Antar Desa

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	Target Pembentukan Kerjasama Antar Gampong				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Muara Dua	17	-	-	17	-	-
2	Banda Sakti	18	-	-	-	-	-
3	Blang Mangat	22	-	-	-	-	-
4	Muara Satu	11	-	-	-	-	-

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2022.

Dari tabel di atas dilihat bahwa pada tahun 2019, 17 Gampong di Kecamatan Muara Dua sudah membentuk kerjasama antar gampong dalam bentuk Badan Usaha Bersama Milik Gampong untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/ atau pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.3.2.2.10 Perhubungan

Permasalahan Transportasi di Kota Lhoseumawe kita hanya akan membicarakan Transporasi darat karena Kota Lhokseumae tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi

Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi.

Tabel 2.122
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Naik	Turun
2017	107.220	545.805	390.893
2018	100.853	147.352	130.589
2019	129.575	172.154	165.189
2020	13.207	27.068	26.575
2021	15.151	33.160	31.176

Sumber: Dinas Perhubungan, 2022.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah unit kendaraan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dan 2021 disebabkan terjadinya pandemic Covid-19, sehingga terjadi pembatasan mobilitasi penduduk. Adapun jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Lhokseumawe tahun 2019 sebanyak 129.575 unit dengan jumlah penumpang naik 172.154 orang dan turun 165.189 orang, Tahun 2020 turun drastis menjadi 13.207 unit dengan jumlah penumpang naik 27.068 orang dan turun 26.575 orang. Tahun 2021 mengalami kenaikan sedikit karena sudah ada kelonggaran sedikit untuk mobilisasi penduduk, jumlah kendaraan yang beroperasi 15.151 unit dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 33.160 orang dan yang turun sebanyak 31.176 orang.

A. Rasio ijin trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas Negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk

pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe rasio ijin trayek pada Tahun 2017 sebesar 0,008, Tahun 2018 sebesar 0,008, sedangkan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,007, Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,008 dan tahun 2021 turun kembali menjadi sebesar 0.007. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123
Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ijin Trayek	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
2	Jumlah Penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
Rasio Ijin Trayek		0,008	0,008	0,007	0,008	0,007

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

B. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan di operasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Di Kota Lhokseumawe rasio uji kir angkutan umum tiap tahunnya cenderung stabil yakni pada Tahun 2017 sebesar 1,05 pada Tahun 2018 sebesar 1,02, pada Tahun 2019 sebesar 1,02 sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,52 dan tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 1,04. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.124
Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kendaraan	2.350	2.381	2.558	3.845	3.195
2	Kendaraan yang di Uji	2.234	2.330	2.496	2.006	3.078
Rasio		1,05	1,02	1,02	0,52	1,04

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

C. Jumlah Pelabuhan Udara/Laut/Terminal Bis

Di Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Oleh Karena itu tidak ada penambahan fasilitas Pelabuhan Baik Udara maupun Laut di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 2.125
Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelabuhan Udara	-	-	-	-	-
2	Pelabuhan Laut	-	-	-	-	-
3	Terminal Bis/ Barang	3	3	3	3	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

D. Kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan setiap tahunnya terutama pada Tahun 2020 seperti terlihat pada tabel dibawah ini bahwa pada Tahun 2017 persentase Kir adalah 99% sedangkan pada Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 96%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.126
Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkutan Umum yang memiliki KIR	2.234	2.330	2.496	2.006	3.078
2	Jumlah Angkutan Umum	2.350	2.381	2.558	3.845	3.195
Peresentase		99	97	97	52	96

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

E. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di kota Lhokseumawe dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.127
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan	6 Bulan
2	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	20 Menit	20 Menit	20 Menit	20 Menit	30 Menit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

F. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas ataupun untuk mengetahui tempat/lokasi yang ingin dicari oleh para pendatang/wisatawan ketika berkunjung disuatu kota/kabupaten. Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen kota Lhokseumawe yaitu jumlah rambu yang seharusnya tersedia 195 namun tidak ada pemasangan rambu pada tahun 2017, pada tahun 2019 dan 2020 ada pemasangan rambu-rambu masing-masing berjumlah 60 dan 80 rambu, sedangkan tahun 2021 tidaj ada pemasangan rambu yang baru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.128
Pemasangan Rambu-Rambu
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	0	0	60	80	0
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	195	195	195	195	195
Persentase		0	0	30	41	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

G. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus truk, dan sepeda motor.

Panjang Jalan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 yaitu 412 km, jumlah kendaraan 62.235 unit tidak terjadi peningkatan ditahun 2021 panjang jalan tetap 412 km sedangkan jumlah kendaraan 55.461 unit. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan masih berkisar 0.007. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.129
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan	412	412	412	412	412
2	Jumlah Kendaraan	62.325	50.340	52.402	59.064	55.461
Rasio		0.007	0.008	0.008	0,007	0,007

Sumber : Dinas PUPR dan Samsat Kota Lhokseumawe, 2022

H. Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2017 sebesar 6,954 ton, pada Tahun 2018 sebesar 7,236 ton, pada Tahun 2019 sebesar 7,510 ton pada Tahun 2020 sebesar 5,805 ton dan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6.552 ton seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.130
Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (ton)	6.954	7.236	7.510	5.805	6.552

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

**I. Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Pertahun**

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2017 sampai Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.131
Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	845.698	277.941	337.343	53.643	64.336

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah orang yang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2017 jumlah orang yang melalui Dermaga/Bandara/Terminal sebanyak 845.698 orang, pada Tahun 2018 sebanyak 277,941 orang, pada Tahun 2019 sebanyak 337.343 orang, pada Tahun 2020 sebanyak 53.643 orang dan pada tahun 2021 bertambah kembali menjadi sebanyak 64.336 orang

J. Fasilitas Keselamatan

Keselamatan jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan jalan raya dengan memperhatikan faktor–faktor penyebab kecelakaan, seperti: prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia dan rambu atau peraturan.

Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan fasilitas pendukung dan lalu lintas

angkutan jalan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pasal 25).

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa fasilitas keselamatan yang diadakan setiap tahunnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Sementara kebutuhan fasilitas keselamatan yang harusnya ada adalah 8 fasilitas keselamatan.

Tabel 2.132
Fasilitas Keselamatan Jalan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Fasilitas keselamatan yang diadakan	3	1	6	4	4
2	Fasilitas keselamatan yang seharusnya ada	8	8	8	8	8
Persentase		37,50	12,50	75,00	50,00	50,00

Sumber : Dinas Perhubungan, 2022

2.1.3.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017 ke Tahun 2019 terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Kemudian Di Tahun 2021 koperasi aktif bertambah 51,4 % Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel 2.136 berikut ini:

Tabel 2.133
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	105	100	100	104	107
2	Jumlah Koperasi	251	251	251	205	208
Persentase		41,83	39,84	39,84	50,7	51,4

Sumber: Disperindagkop, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 persentase koperasi aktif di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 39.84 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan penurunan jumlah koperasi dari tahun-tahun sebelumnya.

2.1.3.2.2.12 Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Jumlah seluruh investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.422 Investor. Pada Tahun 2017 jumlah investor PMDN sebesar 265, Tahun 2018 jumlah investor PMDN sebesar 139, tahun 2019 jumlah investor PMDN sebesar 152, di Tahun 2020 jumlah investor PMDN/PMA terjadi kenaikan sebesar 434 dan di Tahun 2021 jumlah investor PMDN/PMA terjadi penurunan sebesar 432. Berikut tabel Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021.

Tabel 2.134
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Investor	265	139	152	434	432

Sumber : DPMTSPNAKER, 2022

C. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah Investasi pada Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 jumlah Investasi PMDN sebesar 1.977 (milyar), tahun 2018 jumlah Investasi PMDN sebesar 618 (milyar), tahun 2019 jumlah Investasi

PMDN sebesar 793 (milyar), di Tahun 2020 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.268 (milyar) dan pada Tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5.303 (milyar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.135
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	URAIAN	PMDN (Milyar)
2017	Jumlah Investasi	1.977
2018	Jumlah Investasi	618
2019	Jumlah Investasi	793
2020	Jumlah Investasi	1.268
2021	Jumlah Investasi	5.303

Sumber : DPMTSPNAKER, 2022.

2.1.3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain. Organisasi pemuda di Kota Lhokseumawe hingga Tahun 2021 berjumlah 50 namun yang tidak aktif berjumlah 10 yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Gampong. Berikut data Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.136
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	50	50	50	50	50	
2	Jumlah seluruh Organisasi Pemuda	60	60	60	60	60	
Persentase		83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	

Sumber: Disporapar, 2022

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.137
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kota Lhokseumawe Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	36	36	36	36	36	
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar	44	44	44	44	44	
Persentase		81,82%	81,82%	81,82%	81,82%	81,82%	

Sumber: Disporapar, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pembinaan cabang olahraga di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 sebesar 81,82 persen dari total cabang olahraga yang ada di Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 53 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2021 adalah 146. Berikut tabel 2.123 cakupan pelatih yang bersertifikasi:

Tabel 2.138
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	Ket
1	Jumlah pelatih bersertifikat	53	53	53	53	53	
2	Jumlah seluruh pelatih	146	146	146	146	146	
Persentase		36,3%	36,3%	36,3%	36,3%	36,3%	

Sumber: Disporapar, 2022.

2.1.3.3 **Urusan Pemerintahan Pilihan**

2.1.3.3.1 **Pariwisata**

A. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.139
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lokasi	Ket
1.	Wisata Alam		
	a. Pantai Ujon Blang	Kecamatan Banda Sakti	
	b. Pulau semadu	Kecamatan Muara Satu	
	c. Pantai pulo daruet	Kecamatan Muara Dua	
2.	Wisata		
	Budaya/Spiritual	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti)	
	a. Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang	Gp. Blang Panyang (Muara Satu)	
	b. Gua Jepang cot Panggoi	Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) Gp. Peukan Cunda (Muara Dua)	
	c. Meriam Belanda	Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat)	
	d. Tugu Pahlawan TKR		
	e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Jawa Lama (Banda Sakti)	
	f. Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong	Gp. Mesjid (Blang Mangat) Gp. Banda Masen (Banda Sakti)	
	g. Mon tujuh		
	h. Makam Tgk. Dilhokseumawe	Gp. Mon Geudong (Banda Sakti)	
	i. Makam Tgk. Chik Ditunong	Gp. Blang Buloh (Blang Mangat)	
	j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat)	
	k. Makam Mualim Taufik Shaleh	Gp. Blang Pulo (Muara Satu) Gp. Blang Pulo (Muara Satu)	
	l. Makam Putroe Neng		
	m. Makam Tgk. Syiah Hudam	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
	n. Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
	o. Makam Tgk. Jrad	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	

No	Uraian	Lokasi	Ket
	Meuindram p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng q. Museum P. Ramli	Gp. Paloh (Muara Dua)	
3.	Wisata Buatan a. Reservoir (Waduk) b. Taman Riyadah c. Taman Mangat Cerita d. Waduk Jeulikat	Gp. Pusong (Banda Sakti) Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Blang Mangat Kecamatan Blang Mangat	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2020.

2.1.3.3.2 Statistik

A. Buku “Kabupaten/Kota Dalam Angka”

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan pada setiap Tahun merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

B. Buku “PDRB Kabupaten/Kota”

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap Tahun guna memberikan gambaran mengenai

struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

2.1.3.3.3 Perpustakaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, sehingga jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Rincian data jumlah gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.140
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Perpustakaan					Total	Rasio
			PU/PD	PS	PT	PK	PONTREN		
1	2017	198980	15	120	13	14	8	170	0,085
2	2018	203284	15	163	13	14	8	213	0,105
3	2019	204.283	15	163	13	14	8	213	0,104
4	2020	207202	15	163	13	14	8	213	0,103
5	2021	190903	15	163	13	14	8	213	0,112

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022.

Tabel di atas menjelaskan bahwa sejak Tahun 2018-2021 jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe terdapat 213 perpustakaan, kecuali pada tahun 2017 jumlah pustaka hanya 170 perpustakaan. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio perpustakaan terhadap satuan penduduk mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2017 rasio sebesar 0.085, Tahun 2018 rasio sebesar 0.105, Tahun 2019 rasio sebesar 0.104, Tahun 2020 rasio sebesar 0.103 dan Tahun 2021 rasio sebesar 0.112.

2.1.3.3.4 Kearsipan

A. Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan memegang peran penting bagi kelancarannya organisasi, dimana pengelolaan arsip secara baku dapat menjadi sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Kearsipan merupakan suatu proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, bahwa dari periode 2017-2021 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku mencapai 45% dari Jumlah 34 SKPD. Berikut tabel data jumlah pengelolaan arsip secara baku di Kota Lhokseumawe:

Tabel 2.141
Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Jumlah Pengunjung				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku	1	1	1	10	15
2	Jumlah SKPD	33	33	34	34	34
Persentase		3%	3%	3%	30%	45%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2022.

2.1.3.3.5 Pertanian

A. Kontibusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian Kota Lhokseumawe dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 8.23% dengan migas dan tanpa migas sebesar 9.83%, terus meningkat sampai Tahun 2020 sebesar 8.92% dengan migas, sedangkan tanpa migas sebesar 10.75%. kemudian terjadi penurunan di Tahun 2021 sebesar 8.45% dengan migas dan tanpa migas sebesar 10.10%. Untuk lebih detail data selama 5 (lima) tahun terakhir ada pada tabel 142 berikut:

Tabel 2.142
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	542,572.70	567,783.30	599,904.70	622,995.80	612,746.70
2	Jumlah PDRB dengan Migas	6,591,663.20	6,840,710.70	7,112,684.80	6,984,713.30	7,252,904.80
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	5,520,251.70	5,687,525.60	5,936,513.60	5,794,141.20	6,069,121.60
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		8.23	8.30	8.43	8.92	8.45
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		9.83	9.98	10.11	10.75	10.10

Sumber: PDRB Lhokseumawe,.

B. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima Tahun terakhir secara keseluruhan

menunjukkan fluktuasi sejak 2017-2021. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2017 dan 2018, sementara itu, pada Tahun 2018 dan 2019 komoditi padi menurun secara signifikan hingga sebesar sepertiga dari kondisi sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.143
Produktivitas Komoditas Pangan (Kg)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	15,333,000	9,954,000	9,954,000	10,345,000	10,362,000
2	Jagung	198,000	-	-	-	-
3	Ubi Kayu	317,000	1,764,000	1,764,000	-	-
4	Ubi Jalar	-	-	-	-	-
5	Kedelai	20,000	-	-	-	-

Sumber : DKP3, 2022

2.1.3.3.6 Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2017 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 23,11% dengan migas,

sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 27,59%. Terjadi penurunan kontribusi hingga Tahun 2021 sebesar 21.89% dengan migas dan tanpa migas sebesar 26.16%, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.144
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sektor Perdagangan	1,523,096.20	1,546,120.10	1,584,878.40	1,523,878.70	1,587,445.50
2	Jumlah PDRB dengan Migas	6,591,663.20	6,840,710.70	7,112,684.80	6,984,713.30	7,252,904.80
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	5,520,251.70	5,687,525.60	5,936,513.60	5,794,141.20	6,069,121.60
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		23.11	22.60	22.28	21.82	21.89
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		27.59	27.18	26.70	26.30	26.16

Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2017-2021.

2.1.3.3.7 Perindustrian

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 21,77 % pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 21,94 pada tahun 2021. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 18,23% pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 sebesar 18,36%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.145
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sektor Industri	1,201,646.00	1,289,007.00	1,315,377.00	1,330,546.40	1,331,428.60
2	Jumlah PDRB dengan Migas	6,591,663.20	6,840,710.70	7,112,684.80	6,984,713.30	7,252,904.80
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	5,520,251.70	5,687,525.60	5,936,513.60	5,794,141.20	6,069,121.60
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		18.23	18.84	18.49	19.05	18.36
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		21.77	22.66	22.16	22.96	21.94

Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2017-2021.

2.1.3.3.8 Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, teri, selar dan tenggiri. Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel produksi perikanan:

Tabel 2.146
Produksi Perikanan Budidaya
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Ikan (ton)	3,182,490	3,703,650	3,469,500	3,350,120	3,400,000
2	Target Daerah (ton)	3,900,420	4,035,000	4,450,000	4,895,000	5,384,500
Persentase		81.59	91.79	77.97	68.44	63.14

Sumber: DKP3, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi perikanan budidaya sejak Tahun 2017-2021 terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai 91.79%, Semakin tinggi produksi budidaya ikan akan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian masyarakat. Untuk jenis ikan yang umumnya dilakukan petani tambak di wilayah Kota Lhokseumawe adalah ikan bandeng, selebihnya ikan mujair dan Sebagian kecil berbagai jenis udang.

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7 Tahun 2019.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud guna mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara

rutin dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh Organisasi perangkat daerah sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap Tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD.

Selama periode 2017 sampai dengan 2022 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), dimana RKPD tersebut merupakan penjabaran dari program RPJMD Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD merupakan bahan penyusunan RAPBD. Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. RKPD berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan OPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD.

D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang

wilayah. Dokumen RTRW digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah serta menjadi acuan lokasi investasi kota baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Disamping itu, RTWR dimaksudkan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serta arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2014.

2.1.3.4.2 Keuangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh *fraud* tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), berbeda dari Tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat permasalahan pada Tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat

perbedaan saldo utang belanja antara Neraca *unaudited* dengan data SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reviu Inspektorat.

2.1.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal

Sejak periode 2017-2021 jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari jumlah pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural di Tahun 2021 hanya mencapai 8,7% dari 513 jumlah total jabatan hanya 45 orang saja yang mengikuti diklat struktural dan di Tahun ini. Pada Tahun 2017 persentase pejabat ASN mengikuti diklat struktural mencapai 21.43% dari 532 jumlah total jabatan hanya 114 orang saja yang mengikuti diklat struktural tersebut. Pada Tahun 2018 mencapai 18.70% dari 492 jumlah total jabatan hanya 92 orang saja yang mengikuti diklat struktural dan untuk Tahun 2019 mencapai 15.64% dari 518 jumlah total jabatan hanya 81 orang saja yang mengikuti diklat struktural. Pada Tahun 2020 mencapai 11,3% yang mengikuti diklat struktural.

Berikut tabel persentase pejabat ASN mengikuti Diklat Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021;

Tabel 2.147
Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural
Kota Lhokseumawe Tahun 2017- 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti					
	- PIM II	2	2	2	1	2
	- PIM III	20	20	17	8	6
	- PIM IV	91	70	62	47	37
2	Jumlah Total Jabatan	532	492	518	495	513
	Persentase	21,43	18,7	15,64	11,3	8,7

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2022.

B. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan struktural dan struktural di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2017-2021 menunjukkan penambahan setiap Tahunnya, namun di Tahun 2019 terjadi penurunan. Total jumlah jabatan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu pada Tahun 2019 mencapai 2.105 merupakan jumlah terendah, Tahun 2017 mencapai 2.256, Tahun 2018 mencapai 2.433, pada Tahun 2020 naik Kembali hingga mencapai 2.207 orang serta kembali naik pada Tahun 2021 menjadi 2.268. Posisi dan jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kota Lhokseumawe ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut tabel Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021.

Tabel 2.148
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	31	31	31	32	32
2	Jabatan Administrasi	124	124	120	131	132
3	Jabatan Pengawas	327	330	330	358	334
4	Jabatan Fungsional Tertentu	1.774	1.948	1.624	1.686	1770
	Jumlah Jabatan	2.256	2.433	2.105	2.207	2268

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2022.

2.1.3.4.4 Pengawasan

A. Level Kapabilitas APIP

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.143, dimana pada tahun 2017 Kapabilitas Kota Lhokseumawe berada pada level 2 dengan catatan, namun di tahun 2018 naik menjadi level 3 walau masih dengan catatan. Tahun 2019 sampai dengan 2021 level Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe berada pada level 3.

Tabel 2.149
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Level Kapabilitas APIP	Level 2 dengan Catatan	Level 3 dengan Catatan	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2022

B. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern.

Jadi tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Untuk capaian Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel 2.150 berikut ini:

Tabel.2.150
Capaian Tingkat Maturitas SPIP
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Belum ada hasil dari BPKP

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2022

Tabel 2.150 memperlihatkan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2017 berada pada level 1, dan pada Tahun 2018 sampai tahun 2020 naik menjadi level 2. Peningkatan ini terus diupayakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Sedangkan untuk tahun 2021 belum adanya hasil dari BPKP yang menyebabkan tidak diketahuinya Capaian Tingkat Maturitas di tahun tersebut berada pada level berapa.

2.1.3.4.5 Sekretariat DPRK

A. Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan

Dalam proses penyusunan Qanun, Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan Rancangan Qanun selama 1 tahun periode sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRK sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program Legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Qanun yang aspiratif dan partisipatif yang dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Qanun tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Persentase Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 berfluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Tahun 2017 persentase rancangan qanun yang ditetapkan sebesar 38.46% dan mengalami kenaikan di Tahun 2018 menjadi sebesar 53.33%, namun di Tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan menjadi 47.06% dan 33.33%. Selanjutnya pada Tahun 2021 persentase rancangan qanun yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 41.18%.

Tabel 2.151
Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan	10	8	8	7	7
2	Jumlah Prolegda	26	15	17	21	17
Persentase		38.46%	53.33%	47.06%	33.33%	41.18%

Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2022

2.1.3.4.6 Sekretariat Daerah

A. Kategori Reformasi Birokrasi

Dewasa ini, pemerintahan menuntut setiap aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas profesionalitas aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik salah satunya melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan penataan ulang atau pembaharuan dalam berbagai penyelenggaraan pemerintah agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja penguatan etos kerja aparatur dalam memperbaiki tatanan birokrasi pemerintah. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Government).

Sebagai dasar kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menpan dan RB Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi disusun dalam rangka mendukung program nasional untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan dan RB, pada tahun 2020, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh nilai 41,23 atau (C/ Agak Kurang) dari target nilai 50,01 atau (CC/ Cukup Baik). Hasil tersebut menggambarkan pencapaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang diungkapkan oleh evaluator Kemenpan dan RB, yaitu:

1. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi belum dilakukan secara baik;
2. Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja;

3. Implementasi penyederhanaan birokrasi belum dilaksanakan menyeluruh;
4. Peta proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi;
5. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM;
6. Kurang pedulinya pimpinan OPD dalam perencanaan kinerja pada SAKIP;
7. Implementasi kebijakan pengawasan internal terhadap penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan berbenturan serta penerapan SPIP masih bersifat normatif; dan
8. Hasil standar pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kota akan menindaklanjuti hasil rekomendasi Kemenpan dan RB dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk tim/ penanggungjawab reformasi birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja;
3. Melakukan sosialisasi/ internalisasi road map reformasi birokrasi;
4. Melibatkan keikutsertaan pejabat struktural dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari tahap awal sampai akhir;
5. Pelaksanaan penyederhanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara menyeluruh;
6. Penguatan sistem manajemen SDM dengan pengembangan karir SDM sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, penempatan pegawai pada suatu jabatan dengan mempertimbangkan sesuai standar kompetensi jabatan;
7. Melibatkan pimpinan dengan mengadakan rapat tindaklanjut SAKIP bersama pimpinan OPD mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi; dan
8. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan.

Penyusunan dokumen road map reformasi birokrasi tahun 2020 merupakan tahun pertama dilakukan, sehingga analisis perbandingan capaian kinerja tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran dan kurangnya kompetensi SDM aparatur pada penyusunan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan, penyusunan dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dilakukan pada bulan Juli 2022 setelah ditetapkannya Penjabat Walikota Sementara sampai dengan terpilihnya Walikota Lhokseumawe definitif pada pilkada serentak tahun 2024.

B. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan good governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah

satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel.2.152
Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	CC	CC	Belum ada hasil dari Kemenpan

Sumber : Setdako Lhokseumawe, 2022

Tabel 2.152 memperlihatkan tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2017 sampai 2020 masih mendapat predikat CC, sedangkan untuk tahun 2021 belum ada hasil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan). Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi maka akan diupayakan perbaikan predikat untuk menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

C. Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik

Salah satu tuntutan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survey, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM suatu survey yang disusun berdasarkan indikator-indikator unsur pelayanan dalam suatu Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). Unsur-unsur pelayanan publik yang menjadi kriteria pelayanan adalah:

- a. Persyaratan;
- b. Prosedur;
- c. Biaya/ Tarif;
- d. Waktu Pelayanan;
- e. Produk Pelayanan;
- f. Kompetensi Pelaksana;
- g. Perilaku Pelaksana;
- h. Sarana dan Prasarana; dan
- i. Penanganan pengaduan.

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Selain hal tersebut, IKM berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil survey, nilai IKM Pemerintah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai IKM pada Tahun 2019 sebesar 80,23 (Baik), kemudian meningkat sebesar 1,63 poin dari perolehan Tahun 2020 sebesar 81,86 (Baik) dan kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 0,66 poin atau sebesar 82,52 (Baik).

D. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan kepala daerah. LPPD berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi LPPD, pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh nilai predikat Tinggi. Artinya capaian nilai hasil evaluasi LPPD untuk Tahun 2019 telah mencapai target RPJMK. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, perolehan nilai LPPD Tahun 2019 naik sebesar 0,09 poin, namun masih dalam predikat Tinggi. Hal ini didukung oleh mayoritas Perangkat Daerah telah memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan bukti pendukung pemenuhan IKK. Berikut tren capaian nilai LPPD Kota Lhokseumawe tahun 2017-2021:

Tabel 2.153
Nilai Hasil Evaluasi LPPD
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	Tinggi	2,76 (Tinggi)
2018	Tinggi	2,73 (Tinggi)
2019	Tinggi	2,82 (Tinggi)
2020	Tinggi	Dalam proses penilaian
2021	Tinggi	Dalam proses penilaian

Sumber: Bagian Pemerintahan, Setdako, 2022

Berdasarkan Tabel 2.153 di atas, tren perolehan nilai hasil evaluasi LPPD Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil yang baik. Nilai perolehan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017, nilai LPPD sebesar 2,76 (Tinggi), sedangkan pada tahun 2018 nilai LPPD turun sebesar 0,03 poin. Hal ini disebabkan karena adanya Perangkat Daerah yang kurang responsif dalam pemenuhan IKK. Selanjutnya, pada tahun 2019 nilai LPPD Kota Lhokseumawe kembali naik sebesar 0,09 poin. Untuk Tahun 2020-2021, nilai LPPD Kota Lhokseumawe menunggu penilaian dari evaluator Kementerian Dalam Negeri.

2.1.3.5 Fokus Urusan Penunjang Urusan Kewilayahan

2.1.3.5.1 Kecamatan

A. PKK Gampong

Pembinaan PKK Gampong dalam 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 terdapat binaan 15 gampong,

tahun 2018 binaan 16 gampong, tahun 2019 dan tahun 2020 binaan 21 gampong. Pada tahun 2020 tersebut tidak mengalami peningkatan pembinaan PKK gampong, hal ini disebabkan karena terjadinya *refocusing* anggaran namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan pembinaan PKK gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe sebanyak 33 binaan PKK gampong. Pesentase Binaan PKK Gampong Tahun 2017-2021 dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.154 berikut:

Tabel 2.154
Persentase Binaan PKK Gampong dalam Wilayah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Gampong
1	Blang Mangat	0	0	10	10	19	22
2	Banda Sakti	2	3	0	0	1	18
3	Muara Dua	2	2	0	0	2	17
4	Muara Satu	11	11	11	11	11	11
Jumlah		15	16	21	21	33	68
Persentase		0,22	0,24	0,31	0,31	0,49	

Sumber : Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe, 2022

B. Penertiban

Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2017-2022 dapat dihitung dengan membandingkan antar jumlah penertiban yang dilaksanakan berbanding dengan jumlah penertiban yang direncanakan dikali seratus persen. Dari data penertiban dalam masing-masing kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2017 persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe mencapai 43% dan ditahun 2018 turun 3% sehingga penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe hanya mencapai 40% dan pada tahun ini merupakan capaian terendah dari tahun sebelum dan sampai tahun 2021. Pada tahun 2019 persentase penertiban naik sebesar 26% dari tahun sebelumnya sehingga persentase penertiban mencapai 46%, namun ditahun 2020 kembali turun sebesar 23% sehingga persentase penertiban menjadi 43% hal ini

disebabkan karena tidak dilaksanakannya penertiban dalam Kecamatan Banda Sakti dari 8 kali penertiban yang direncanakan pada tahun tersebut.

Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2021 merupakan capaian tertinggi dari 4 tahun sebelumnya hingga mencapai 71%, ini menggambarkan bahwa jumlah penertiban yang dilaksanakan hampir berbanding dengan jumlah penertiban yang direncanakan. Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.155 berikut:

Tabel 2.155
Persentase Penertiban dalam Wilayah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	BLANG MANGAT					
	<i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i>	0	0	4	4	4
	<i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i>	5	5	5	5	5
	Persentase	0%	0%	80%	80%	80%
2	BANDA SAKTI					
	<i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i>	0	0	8	0	20
	<i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i>	0	0	8	8	20
	Persentase	0%	0%	100%	0%	100%
3	MUARA DUA					
	<i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i>	5	4	5	5	4
	<i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i>	17	17	17	17	17
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
4	MUARA SATU					
	<i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i>	8	8	8	7	7
	<i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i>	8	8	8	7	7
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
KOTA LHOKSEUMAWE						
	<i>Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan</i>	13	12	25	16	35
	<i>Jumlah Penertiban yang Direncanakan</i>	30	30	38	37	49
	Persentase	43%	40%	66%	43%	71%

Sumber : Kecamatan dala Wilayah Kota Lhokseumawe, 2022

C. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Forkopimcam adalah unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan. Salah satu tugasnya melaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya sehingga apa saja yang terjadi di kecamatan dapat segera ditangani. Adapun keanggotaan Forkopimcam berasal dari tiga unsur, yakni camat sebagai ketua, pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan sebagai anggota.

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa kegiatan Forkopimcam ini baru dianggarkan pada tahun 2021, sedangkan untuk proyeksi pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mengalami peningkatan sehingga permasalahan yang terjadi dalam kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditangani dengan baik demi terwujudnya masyarakat yang damai dan tentram. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.156;

Tabel 2.156
Persentase Penanganan di Kecamatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	BLANG MANGAT					
	<i>Jumlah penanganan di kecamatan</i>	0	0	0	0	0
	<i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i>	0	0	0	0	0
	Persentase	0%	0%	0%	0%	0%
2	BANDA SAKTI					
	<i>Jumlah penanganan di kecamatan</i>	0	0	0	0	3
	<i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i>	0	0	0	0	4
	Persentase	0%	0%	0%	0%	75%
3	MUARA DUA					
	<i>Jumlah penanganan di kecamatan</i>	0	0	0	0	3
	<i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i>	17	17	17	17	17
	Persentase	0%	0%	0%	0%	17,64%
4	MUARA SATU					
	<i>Jumlah penanganan di kecamatan</i>	5	7	6	6	5
	<i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i>	5	7	6	6	5
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Jumlah penanganan di kecamatan</i>	5	7	6	6	11
	<i>Jumlah permasalahan di kecamatan</i>	22	24	44	23	26
	Persentase	22,72%	29,2%	13,6%	26,1%	42,3%

Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2022

D. Pengawasan Dokumen Gampong

Kegiatan pengawasan dokumen gampong ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian penyusunan RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) dan RAPBG serta penyelesaian dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBG terhadap gampong-gampong dalam 4 (empat) Kecamatan di Wilayah Kota Lhokseumawe. Evaluasi ini bertujuan agar gampong dapat segera menyelesaikan LPJ dan menyelesaikan dokumen RKPG dan RAPBG beserta penginputannya kedalam aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk dapat di evaluasi menjadi APBG dengan lebih dulu menunggu Peraturan Walikota yang mengatur besaran sumber dana untuk dimasukkan dalam dokumen tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.157;

Tabel 2.157
Persentase Pengawasan Dokumen Gampong
Tahun 2017-2021

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	BLANG MANGAT					
	<i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i>	2	2	2	2	2
	<i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i>	2	2	2	2	2
	Persentase	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	BANDA SAKTI					
	<i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i>	0	18	18	18	18
	<i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i>	0	18	18	18	18
	Persentase	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	MUARA DUA					
	<i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i>	0	0	0	0	3
	<i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i>	17	17	17	17	17
	Persentase	0%	0%	0%	0%	17,64%
4	MUARA SATU					
	<i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i>	5	7	6	6	5
	<i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i>	5	7	6	6	5
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
	<i>Jumlah pengawasan dokumen gampong</i>	5	7	6	6	11
	<i>Jumlah gampong dalam kecamatan</i>	22	24	44	23	26
	Persentase	22,72%	29,2%	13,6%	26,1%	42,3%

Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

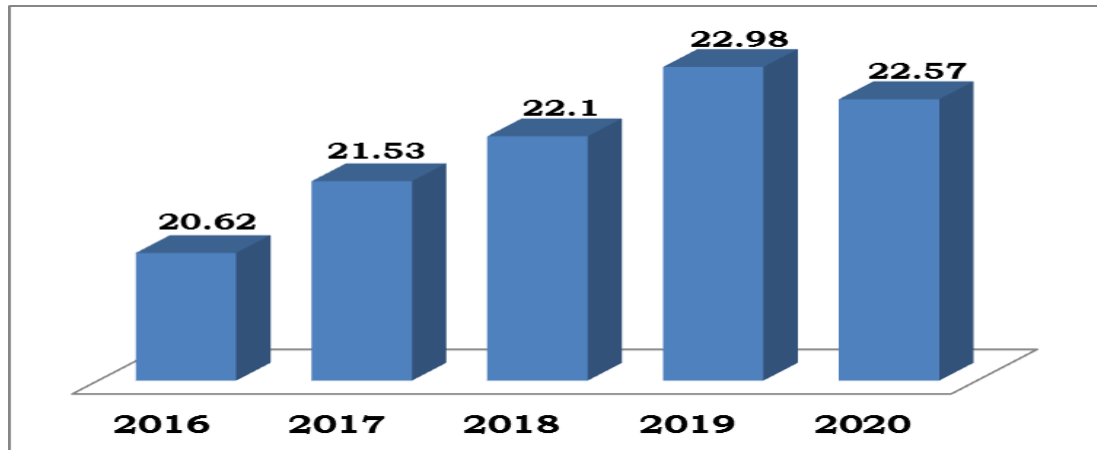
Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita. PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga. Konsumsi rumah tangga per kapita merupakan representasi mengenai gambaran tingkat pendapatan per kapita suatu masyarakat, sehingga informasi mengenai konsumsi rumah tangga per kapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.28
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB
(Juta Rupiah) Tahun 2017 s.d 2020
Kota Lhokseumawe



Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2016-2020

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe dalam kurun waktu 2016-2020 umumnya terus meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Namun, di tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2019.

Nilai konsumsi rumah tangga per-kapita meningkat sebesar 1,95 juta rupiah selama kurun waktu 5 tahun, dari 20,62 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 22,57 juta rupiah di tahun 2020. Konsumsi rumah tangga per-rumah tangga pun meningkat sebesar 8,46 juta rupiah dalam 5 tahun. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah minus 1.80 percent. tangga per-kapita Tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar minus 1.80 persen.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitas wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 1.953 rumah tangga atau sebesar 4,09%. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih ini dikarenakan jaringan pipa air PDAM baru terpasang untuk wilayah Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.158
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	-	-	1,719	1.914	1.953
2	Jumlah Rumah Tangga	40.726	43.309	44.165	47.620	47.726
Persentase		0	0	3,89	4,02	4,09

Sumber : PDAM Ie Beusare Rata Tahun 2022

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari. Perbandingan kebutuhan air secara internasional menunjukkan kebutuhan konsumsi air secara normal per orang sekitar 20 liter per hari dengan rincian 4 liter untuk konsumsi dan sisanya untuk aktivitas yang lainnya.

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2017 terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan air minum. Untuk keperluan air minum, maka sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dapat terdiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), air tanah (sumur gali, sumur bor) maupun air hujan.

Pada tahun 2017 persentase penduduk berakses air minum sebesar 12,57 %, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar 19,59 %, namun terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 18,39%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.159
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk berakses air minum	25.012	31.651	35.452	36.969	38.648
2	Jumlah penduduk	198.980	203.284	207.202	188.713	210.177
Persentase		12,57	15,57	17,11	19,59	18,39

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemauwe Tahun 2022

Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan air minum yang bersih serta pengolahan dan pembuangan sampah dan air limbah, dimana tujuannya untuk melindungi kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Lhokseumawe tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.160
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	29.052	29,565	31,651	32,709	34,969
2	Jumlah rumah tinggal	43.331	43.331	43.331	43.331	51.827
Persentase		67,05	68,23	73,04	75,49	67,47

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemauwe Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tinggal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak ada penambahan, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penambahan rumah tangga sebanyak 8.496 unit. Pada rumah tinggal berakses sanitasi dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terus terjadi penambahan.

C. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Drainase memiliki peran yang sangat penting di kawasan berpenghuni. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Sistem drainase bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik.

Identifikasi terhadap masalah-masalah drainase di perkotaan sangat penting untuk dilakukan demi menemukan solusi yang tepat. Identifikasi masalah-masalah drainase di perkotaan juga diperlukan untuk perencanaan drainase di kawasan perkotaan di masa depan supaya dapat dibuat dengan lebih baik. Berikut ini permasalahan yang kerap dihadapi sistem drainase di perkotaan.

- Bertambahnya jumlah penduduk
- Pengelolaan sampah yang tidak diperhatikan
- Tanah ambles
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan infrastruktur yang lain
- Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Lhokseumawe Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.161
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (km)	53,183	56,733	62,072	74,856	79,829
2	Panjang seluruh drainase (km)	116,408	116,408	116,408	116,408	115,408
Persentase		45,69	48,74	53,32	64,30	68,58

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemauwe Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang seluruh drainase Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 adalah 115,408 Km berkurang 1 Km dari tahun 2017-2020. Sedangkan panjang drainase yang tidak tersumbat semakin tahun semakin baik.

D. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2017 jumlah rumah tangga pengguna listrik sebesar 92,40 persen. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 104 persen atau mengalami peningkatan 11,6 persen ini disebabkan karena sebagian rumah tangga ada yang menggunakan lebih dari 1 meteran listrik.

Tabel 2.162
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe)	37.632	39.267	40.828	47.945	49.688
2	Jumlah Rumah Tangga	40.726	43.309	44.165	47.620	47.726
Persentase		92,40	90,67	92,44	100.7	104

Sumber: Publikasi PLN 2022

2.1.4.3 Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang disusun untuk kurun waktu 20 Tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain:

- a. Dalam Konteks Nasional Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
- b. Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan kota-kota *hinterland* disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi.

Dengan demikian sistem pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.163
Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2019-2021

No	Fungsi Pelayanan	Pusat Kegiatan	Keterangan
1	Pusat Kegiatan Nasional	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya	Kota Lhokseumawe dan sekitarnya (wilayah Kab. Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara dan Muara Batu)
2	Pusat Pelayanan Kota	Keude Cunda	Kecamatan Muara Dua
3	Sub Pusat Pelayanan Kota	Lhokseumawe	Pusat Kecamatan Banda Sakti
		Kandang	Pusat Kecamatan Muara Dua
		Batuphat Timur	Pusat Kecamatan Muara Satu
		Keude Peunteuet	Pusat Kecamatan Blang Mangat
4	Pusat Lingkungan	Lhokseumawe Selatan	Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan
		Lhokseumawe Utara	Pusat Mukim Lhokseumawe Utara
		Kandang	Pusat Mukim Kandang
		Cunda	Pusat Mukim Cunda
		Paloh Timur	Pusat Mukim Paloh Timur
		Paloh Barat	Pusat Mukim Paloh Barat
		Meuraksa	Pusat Mukim Meuraksa
		Peunteuet	Pusat Mukim Peunteuet
		Mangat Makmu	Pusat Mukim Mangat Makmu

Sumber : Qanun RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

A. Persentase Ketaatan terhadap RTRW

Izin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang. Untuk mendapat izin ini, kita harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.

Persentase dalam ketaatan terhadap RTRW Kota lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.164
Persentase Ketaatan terhadap RTRW
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi RTRW	121	233	350	549	717
2	Rencana peruntukkan dalam kurun waktu 4 tahun	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Persentase		8,07	15,53	23,33	36,60	47,80

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rekomendasi tata ruang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sangat meningkat. Ketaatan masyarakat dalam memperoleh rekomendasi tata ruang dalam pembangunan sangat antusias, ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang dan menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

B. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat.

Ketersediaan RTH publik di Kota Lhokseumawe sampai dengan Tahun 2021 telah mencapai sebesar 49.92 Ha.

Tabel 2.165
Ruang Terbuka Hijau
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Luasan RTH Publik 20%	25.4	27.90	30.70	33.80	49.92

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2022

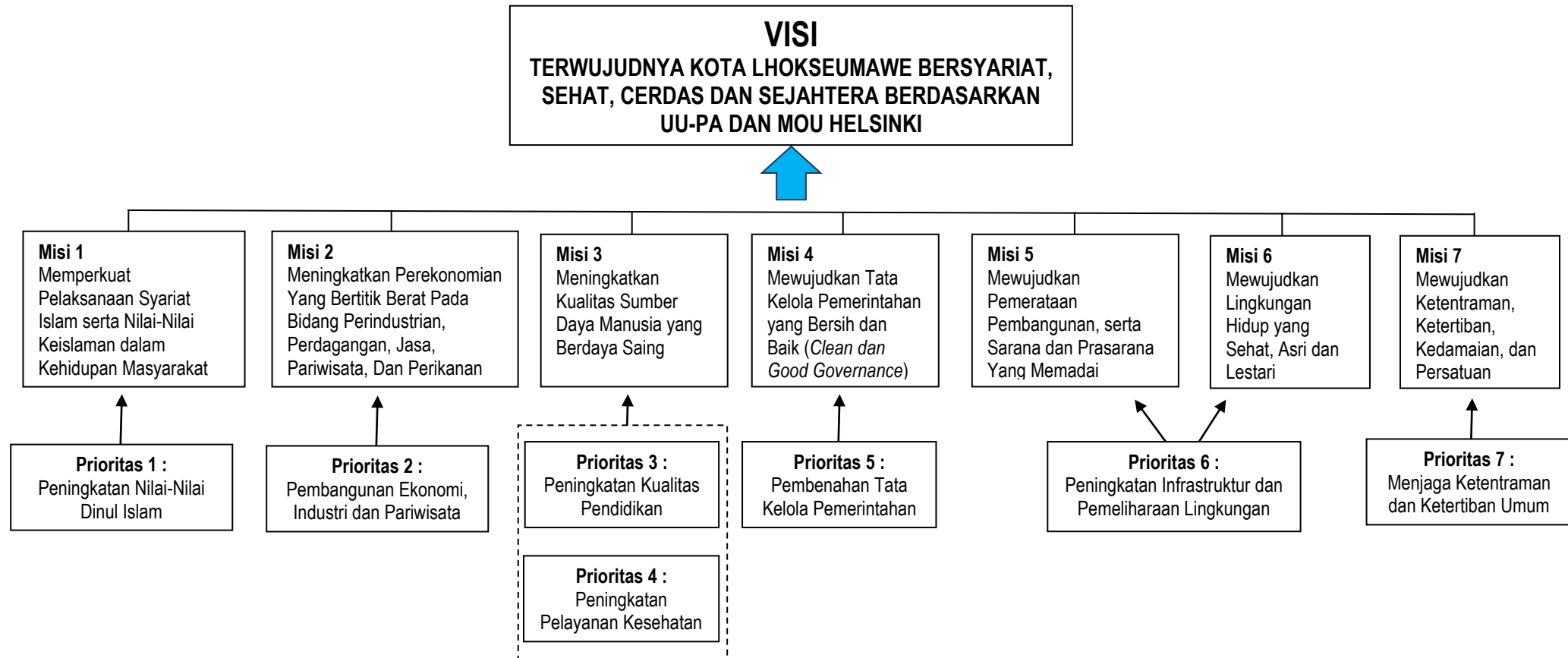
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode sebelumnya

Visi Pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki” Pelaksanaan RPJMK Lhokseumawe selama empat tahun (2018-2020) memberikan kontribusi untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kota Lhokseumawe, Namun indikator-indikator pembangunan yang menunjukkan keberhasilan pencapaian visi pembangunan belum sepenuhnya tercapai, Di sisi lain indikator makro ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan PDRB masih belum memenuhi harapan Konsekuensi logis dari hal ini adalah perlu komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk merumuskan kembali kebijakan dan program-program pembangunan yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kota Lhokseumawe.

Kerangka analisis memberikan gambaran bahwa pencapaian visi merupakan hasil dari pencapaian kinerja misi-misi yang mendukungnya pencapaian misi ditentukan dari hasil pencapaian kinerja prioritas-prioritas pembangunan, sedangkan pencapaian prioritas pembangunan merupakan hasil dari kinerja program-program dan kegiatan-kegiatan Pencapaian misi-misi dianalisis dengan mengevaluasi indikator-indikator kinerja pembangunan sesuai dengan sasaran masing-masing misi dan prioritas pembangunan yang mendukungnya. Selanjutnya, sasaran-sasaran kuantitatif yang diuraikan dalam Indikator Kinerja Pembangunan

RPJMK Lhokseumawe menjadi acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe. Untuk mengetahui pencapaian Visi, Misi dan Pembangunan Kota Lhokseumawe yang didukung oleh Prioritas Pembangunan secara menyeluruh, dilakukan evaluasi dengan kerangka analisis sebagaimana Gambar 2.29

Gambar 2.29 Kerangka Analisis RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022

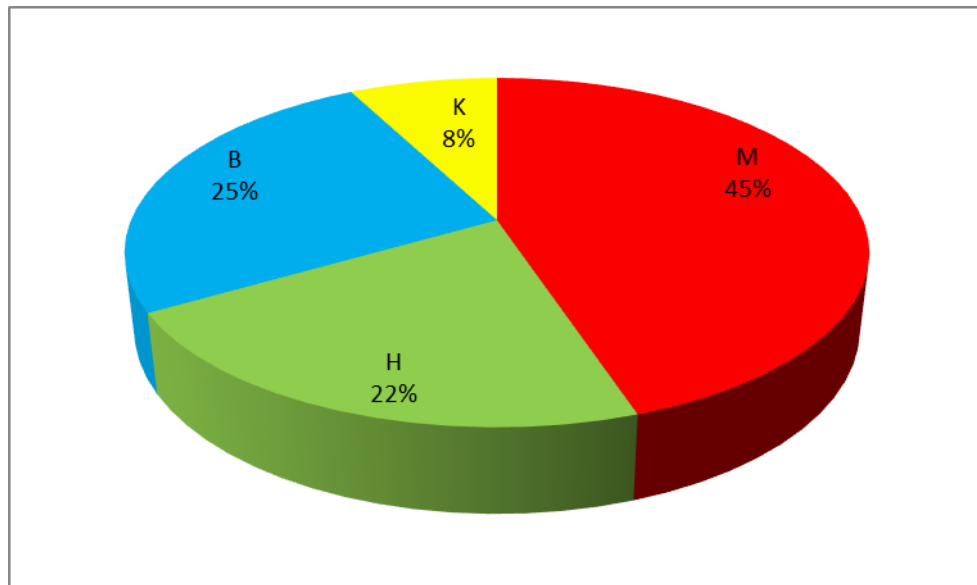


2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Kota Lhokseumawe dibawah Pemerintahan Walikota-Wakil Walikota, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad sudah berjalan selama 4 (empat) tahun. Evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah sangat dibutuhkan, untuk melihat berhasil tidaknya kinerja Pemerintah yang menjadi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMK Lhokseumawe. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe yang didalamnya terdapat 78 indikator yang merupakan Indikator Kinerja berdasarkan Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota Lhokseumawe. Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan target indikator Program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk mengetahui capaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJM Kota Lhokseumawe 2017-2022 diperlukan evaluasi pelaksanaan RPJMK dan RKPK. Hasil evaluasi RPJMK dapat dilihat pada Gambar 3. digambarkan dengan tingkatan status capaian diantaranya “belum tercapai”, “sesuai”, dan “melampaui”. status belum tercapai (<) ditandai dengan warna merah ini artinya capaian masih kurang dari target yang telah di tentukan sebesar 45%, pada Tahun 2021, kemudian status sesuai (=) ditandai dengan warna hijau artinya capaian kinerja sama dengan target yang telah ditentukan sebesar 22% pada Tahun 2021, kemudian status melampaui (>) ditandai dengan warna biru ini artinya capaian melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 25% pada Tahun 2021, selain dari status diatas terdapat 8% capaian target yang masih dalam proses ditandai dengan warna kuning.

Secara garis besar, capaian kinerja Kota Lhokseumawe masih dibawah target sebesar 45%, hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendorong OPD untuk dapat mengejar ketertinggalan pembangunan daerah ditahun 2022 dan dengan menyusun rencana strategis baik secara kinerja maupun anggaran untuk perencanaan selanjutnya. Untuk lebih jelas capaian setiap Misi dapat dilihat pada penjelasan selanjutnya.



Gambar 2.30 Capaian Indikator Kinerja Utama

Misi 1 Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat

Misi 1 memiliki maksud yaitu membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai dasar dalam mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang islami, sedangkan tujuan dari misi ini adalah memperkuat pelaksanaan Syariat Islam, dengan sasaran meningkatkan pemahaman pelaksanaan Syariat Islam untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 ini tahun 2018 dan 2021 telah tercapai sedangkan indikator sasaran akan tercapai di tahun berikutnya.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Misi 1 antara lain :

1. Belum adanya formulasi yang konkret untuk mengukur indikator Indeks Pembangunan Syariat Islam;
2. Belum optimalnya jumlah penerimaan zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf);
3. Belum tersedianya data capaian cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; penyelenggaraan festival seni dan budaya; dan pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif;

4. Pembuatan/ Penyusunan Formulasi/Kriteria penerima bantuan zakat, infak dan sasaqah (ZIS);
5. Belum adanya Web/Media yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk dapat membayar secara online oleh masyarakat pembayara (Zis) penerima.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pencapaian sasaran Misi 1 antara lain:

1. Menyediakan formulasi yang konkret untuk mengukur indikator Indeks Pembangunan Syariat Islam;
2. Melakukan sosialisasi tentang zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf) kepada masyarakat serta meningkatkan peran aktif Baitul Mal Kota Lhokseumawe;
3. Menyelenggarakan event festival budaya dan pelestarian budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang lebih optimal;
4. Mendorong pengembangan indikator, instrumen dan metodologi indeks pembangunan syariat untuk mengukur penerapan syariat islam di Provinsi Aceh;
5. Memaksimalkan ketersediaan data dasar yang berkaitan dengan indikator budaya;
6. Pembuatan Qanun/Regulasi yang dipublikasikan tentang tata cara pemberian dan kriteria yang berhak menerima bantuan yang bersumber dana ZIS;
7. Menyediakan fasilitas yang mudah diakses masyarakat tentang jumlah penerima dan sasaran penyaluran bantuan ZIS;
8. Perlunya pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara sistematis bagi penerima bantuan modal usaha;
9. Adanya database penerima manfaat (bantuan) untuk memantau agar tidak terjadinya bantuan yang ganda;
10. Perlu Mapping potensi Zakat Infak dan sedekah untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan;
11. Perlu adanya pembinaan kualitas SDM untuk MTQ untuk mengikuti even baik berskala lokal, nasional dan internasional;
12. Mempersiapkan perangkat kebijakan dan aksi untuk penguatan pelaksanaan syariat islam.

Tabel 2. 166 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 1

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
1.	Misi 1, Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat.	1.1	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam	Indeks Syariat Islam	Indeks	50	54	54	57	56	0	0	0	81	DSI PD
				Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam	Persen	-	-	-	-	-	70		70	70	DSI PD
		1.1.1	Menguatnya Penegakan Syariat Islam dalam Bermasyarakat	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	69	58	59	37	0	0	0	0	DSI PD
				Persentase penurunan pelanggaran syariat islam	Persen	-	-	-	-	-	60	65	60	46	Satpol PP
				Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)	Rp (milyar)	8,79	8,88	7,43	8,97	8,80	14,00	7,65	8,80	6,86	B. MAL
				Persentase peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa	Persen	-	-	-	-	-	90		95		B. MAL
		1.1.2	Meningkatkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Cakupan pembinaan adat Gampong	Jumlah gampong	0	68	68	68	68	68	68	0	0	MAA

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Bulan	12	12	12	12	12	-	0	-	0	MAA
				Persentase pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh	Persen	-	-	-	-	-	50	0	50	0	MAA

Sumber: RPJMK 2017-2022 dan Realisasi

Misi 2 Meningkatkan Perekonomian Yang Bertitik Berat Pada Bidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Dan Perikanan

Misi 2 memiliki maksud mengembangkan dan mendorong perekonomian yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, membangun kerjasama perekonomian dengan berbagai pihak, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi dari dalam dan luar negeri, regulasi yang mendukung perkembangan perekonomian terutama usaha kecil dan menengah dan mensinergikan sektor-sektor lain berbasis potensi daerah yang mendukung perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan Tujuan Misi 2 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran-sasaran antara lain: 1) Menurunkan angka kemiskinan; 2) Meningkatnya pertumbuhan UMKM; 3) Meningkatnya iklim investasi; 4) Meningkatnya pertumbuhan pariwisata; 5) Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat; dan 6) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas.

Dilihat dari capaian indikator tujuan untuk tahun 2020 belum tercapai dan tahun 2021 masih menunggu data yang belum dirilis. Sedangkan untuk capaian indikator sasaran **menurunkan angka kemiskinan** untuk tahun 2020 dan 2021 dari 4 indikator sudah tercapai target sebanyak 2 indikator, untuk capaian indikator sasaran **meningkatnya pertumbuhan UMKM** terdapat 3 indikator dan yang telah mencapai target sebanyak 2 indikator, selanjutnya sasaran **meningkatnya iklim investasi** terdapat 5 indikator dan yang telah mencapai target hanya 1 indikator saja, kemudian sasaran **Meningkatnya pertumbuhan pariwisata** terdapat 2 indikator dan telah dapat dicapai pada tahun 2020 dan 2021 dan terakhir sasaran, untuk sasaran **Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat** terdapat 3 indikator yang harus dicapai pada tahun 2020 dan 2021 dan yang dapat dicapai sebanyak 2 indikator,

dan terakhir sasaran **Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas**, terdapat sebanyak 7 indikator yang harus dicapai, ditahun 2020 dan 2021 hanya sebanyak 4 indikator yang dapat dicapai di tahun 2020 dan 5 indikator yang dapat di capai di tahun 2021. Untuk dapat lebih jelasnya dilihat pada tabel 2.167

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Misi 2 (Meningkatkan Perekonomian Yang Bertitik Berat Pada Bidang Perindustrian, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Dan Perikanan) diantaranya adalah:

1. Belum tersedianya data pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum untuk fokus layanan wajib non dasar dan fokus layanan pilihan seperti pangan, pertanian, dan kelautan perikanan, sehingga belum dapat dianalisis tingkat pencapaiannya
2. Penetapan Qanun daerah tentang kawasan wisata (bahari, kuliner dan wisata alam).
3. Penentuan indikator/kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku industri wisata dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kebersihan, lokasi usaha, kenyamanan lingkungan usaha.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai Misi 2 (Pembangunan Ekonomi, Industri, dan Pariwisata) adalah:

1. Menyediakan data capaian indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum untuk fokus layanan wajib non dasar dan fokus layanan pilihan (pangan, pertanian, dan kelautan perikanan)
2. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata
3. Perlunya pembinaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah.

4. Edukasi pelaku usaha kecil dan menengah/industri kreatif dan memberikan kualitas produksi dan kewajiban membayar retribusi dari usaha yang dilakukan.
5. Pengembangan penampungan hasil pertanian, perikanan untuk upaya pengendalian harga pasar (pengendalian inflasi) oleh pemerintah atau badan usaha milik pemerintah.

Tabel 2.167 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 2

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
2.	Misi 2, Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan perikanan.	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen	1,18	6,50	3,84	6,80	3,97	4,00	-1,45	4,10	data belum di publis	BPS
				Pengendalian laju inflasi	Persen	5,60	2,80	2,05	2,60	1,20	1,50	3,55	1,40	1,97	BPS
		2.1.1	Menurunkan angka kemiskinan	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	11,98	9,50	11,81	9,30	11,18	11,00	10,80	10,80	11,16	BPS
				Tingkat pengangguran terbuka	Persen	10,51	10,40	12,52	10,33	11,06	11,05	11,99	11,04	11,16	BPS
				Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita	Rp (Juta)	1,01	1,04	10,86	1,08	11,42	11,82	22,57	1,16	*22,57	BPS
				Persentase pemberdayaan kelompok perempuan	Persen	20	20	NA	20	20	20	80	25	96	DP3A P2KB
		2.1.2	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan UMKM	Jumlah	2.314	2.314	3.850	2.323	5.084	2.333	5.623	2.342	5.739	Diskop
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	17,84	18,1968	NA	18,5607	NA	18,932	18,75	19,311	*18,75	BPS
				Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi	Persen	-	-	-	-	-	80	80	80	85	Set dako
		2.1.3	Meningkatnya iklim investasi	Jumlah Investor	PMDN / PMA	305,0	320,3	348,0	336,3	386,0	342,0	366,0	352,0	377,0	DPM PTSP
				Peningkatan investor	Persen	-	-	-	-	-	91	-	95	-	DPM PTSP
				Jumlah nilai investasi	Rp (Milyar)	3387	3556,35	3656	3734,17	3838,8	3,399	3403	3,409	3422	DPM PTSP
				Peningkatan nilai investasi	Persen	-	-	-	-	-	95,2	0	97	0	DPM PTSP

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan Pengendalian dan pembinaan BUMD dan BLUD	Persen	-	-	-	-	-	80	0	80	0	Setda
		2.1.4	Meningkatnya pertumbuhan pariwisata	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,09	1,12	NA	1,16	NA	1,19	10,90	1,23	20,50	Dis Pora
				Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	24	24	20	24	20	20	80	20	80	Dis Pora
		2.1.5	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31,49	31,49	80	32,12	80,00	32,76	87,61	33,42	96,10	Dinsos
				Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100	100	80	100	80	100	100	100	100	Dinsos
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	-	-	-	-	-	100	0	100	0	Dinsos
		2.1.6	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terwujudnya sektor kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peternakan dan pangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	DKPP

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
			efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;												
				Persentase peningkatan produksi perikanan	Persen	-	-	-	-	-	85	6,6	90	7,0	DKPP
				Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,77	DKPP
				Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	-	-	-	-	-	95	6,6	98	6,95	DKPP
				Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	6,48	6,54	6,61	6,61	6,68	6,75	6,75	6,81	6,81	DKPP
				Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	8,20	8,20	8,20	8,27	8,33	8,40	8,30	8,47	8,70	DKPP
				Persentase peningkatan produksi pertanian	Persen	-	-	-	-	-	100	100	100	100	DKPP

Sumber: RPJMK 2017-2022 dan Realisasi

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

Tujuan Misi 3 ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang, melibatkan segenap *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan dengan standar kualitas yang tinggi, pendidikan yang memiliki daya saing dan kompetensi yang tinggi mengupayakan sistem pendidikan yang unggul, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat, pendidikan yang menjunjung nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, sehingga dapat terbentuk manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai agama. Demikian pula, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Untuk Tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang dengan indikator IPM yang telah di targetkan dalam RPJMK tidak mencapai target namun secara nasional IPM Kota Lhokseumawe sudah baik, untuk tujuan dari Misi 3 terdapat sasaran yang harus dicapai diantaranya: 1) Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas; 2) Meningkatnya generasi yang berdaya saing; dan 3) Meningkatnya status tipe dayah. Bila dilihat dari target indikator yang telah ditentukan hampir semua tercapai hanya beberapa target yang belum dapat dicapai yaitu indikator rasio ketergantungan, jumlah prestasi olahraga dan jumlah dayah dengan Tipe A.

Sedangkan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan dari indikator yang telah ditetapkan telah mencapai target, untuk tujuan ini terdapat sasaran-sasaran antara lain : 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas; 1.a) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan; 2) Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 2.a) Meningkatnya pengendalian penyakit menular; serta 3) Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit PD3I; 3.a) Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular; dan 4) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia. Bila

dilihat dari indikator yang telah ditetapkan masih banyak indikator yang belum tercapai dari 21 indikator hanya 3 indikator yang dapat dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.168

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Misi 3 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing) diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya capaian prestasi cabang olahraga pada tingkat PORA
2. Masih belum optimalnya pencapaian target kinerja bidang Kepemudaan dan Olahraga.
3. Masih rendahnya pencapaian peningkatan jumlah dayah Tipe A

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai Misi 3 yang didukung oleh pencapaian Indikator Kinerja Prioritas 3 adalah:

1. Meningkatkan prestasi cabang olahraga pada event PORA.
2. Meningkatkan kinerja capaian pada sektor kepemudaan dan olahraga.
3. Mendorong dayah untuk dapat mencapai dayah Tipe A

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Misi 3 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing) yang didukung oleh Indikator Kinerja Prioritas 4 (Peningkatan Pelayanan Kesehatan) diantaranya adalah:

1. Masih banyak indikator kinerja bidang kesehatan yang perlu penyesuaian kembali, karena banyak yang belum bisa dicapai.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pencapaian Misi 3 yang didukung oleh pencapaian Indikator Kinerja Prioritas 4 (Peningkatan pelayanan kesehatan) adalah:

1. Melakukan penyesuaian kembali terhadap indikator kesehatan dalam Indikator Kinerja.

Tabel 2.168 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 3

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
3.	Misi 3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	3.1	Meningkatkan kualitas pendidikan pada semua jenjang.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	75,78	76,31	76,62	76,84	77,30	77,38	77,31	77,92	77,57	BPS
		3.1.1	Meningkatnya pendidikan dasar yang berkualitas.	Rerata nilai ujian nasional:											PK
				-Rerata nilai ujian nasional SD/MI	Nilai	87	90	NA	90	NA	95	NA	95	NA	PK
				-Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs	Nilai	56	75	NA	80	NA	95	NA	95	NA	PK
				Angka Partisipasi Kasar:											PK
				- APK SD/MI	Angka	105,6	105,6	95,1	105,6	94,4	100,0	108,5	100,0	108,6	PK
				- APK SMP/MTs	Angka	101,0	101,0	111,8	101,0	97,3	100,0	101,7	100,0	100,1	PK
				Angka Partisipasi Murni:											PK
				- APM SD/MI	Angka	93,66	96,47	81,81	99,36	84,47	90,00	99,60	90,00	100,00	PK
				- APM SMP/MTs	Angka	79,05	81,42	81,24	83,86	66,31	90,00	93,60	90,00	93,40	PK
				Angka Harapan lama Sekolah	Angka	15,16	15,28	NA	15,40	NA	15,53	15,53	15,65	15,65	PK

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		3.1.2	Meningkatnya generasi yang berdayasaing	Rasio ketergantungan	Rasio (Per 10.000)	51,90	51,38	NA	50,87	NA	50,61	45,20	0,00	0,30	PK
				Jumlah prestasi olahraga	Jumlah	18	28	20	30	NA	5	4	7	6	Dis Pora
		3.1.3	Meningkatnya status tipe Dayah	Jumlah dayah dengan Tipe "A"	Dayah	14	15	15	16	16	14	4	15	4	DSI PD
		3.2	Meningkatkan kualitas kesehatan.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,1	71,2	NA	71,3	NA	71,4	71,6	71,5	71,6	Dinkes
		3.2.1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	2	5	2	6	7	0	-	-	Dinkes
		3.2.1.a	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	-	-	-	-	-	-	7	0	Dinkes (Revisi)
		3.2.2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	50	60	NA	70	NA	80	32,95	-	51,00	Dinkes
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	NA	100	NA	100	100	-	-	Dinkes

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia	Persen	5,8	6,2	NA	6,6	NA	15,6	0,0	-	2,40	Dinkes
		3.2.2.a	Meningkatnya pengendalian penyakit menular	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	35	Dinkes (Revisi)
				persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	45	Dinkes (Revisi)
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	100	Dinkes (Revisi)
		3.2.3	Menurunnya angka kesakitan dan kematian karna penyakit PD3I	Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL)	Persen	82,2	91,5	NA	92,0	NA	92,5	59,4	-	48,50	Dinkes
		3.2.3.a	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	81,1	-	-	-	-	-	-	100	66	Dinkes (Revisi)
				Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	57,8	-	-	-	-	-	-	100	93	Dinkes (Revisi)

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
				Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	93	Dinkes (Revisi)
		3.2.4	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persen	95,8	-	-	-	-	-	-	100	96	Dinkes (Revisi)
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	persen	100	-	-	-	-	-	-	100	97,5	Dinkes (Revisi)
				Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	93,6	-	-	-	-	-	-	100	99	Dinkes (Revisi)
				Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	88,6	-	-	-	-	-	-	100	78,4	Dinkes (Revisi)
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	87,4	-	-	-	-	-	-	100	97,4	Dinkes (Revisi)
				Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	38	-	-	-	-	-	-	100	82,8	Dinkes (Revisi)

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	persen	85,4	-	-	-	-	-	-	100	94,5	Dinkes (Revisi)
				Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0,03	-	-	-	-	-	-	0,02	0,04	Dinkes (Revisi)
				Prevelensi Balita Gizi Kurang	persen	0,62	-	-	-	-	-	-	1,18	1,00	Dinkes (Revisi)
				Cakupan Desa Siaga	jumlah	82,35	-	-	-	-	-	-	88,24	100,00	Dinkes (Revisi)

Sumber: RPJMK 2017-2022 dan Realisasi

Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)

Misi 4 ini memiliki maksud yaitu meningkatkan kinerja serta peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat. Misi 4 ini memiliki tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran-sasaran yaitu 1) meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan; 2) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK; 3) Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan.

Pencapaian target Misi 4 yang berkaitan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.169

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Misi 4 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik) diantaranya adalah:

1. Masih ada beberapa data pencapaian Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai, sehingga belum dapat dianalisis pencapaiannya.
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang belum memiliki gedung sendiri, yang selama ini hanya berstatus sewa di ruko
3. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;
4. Belum adanya Bank Data sehingga sangat sulit dalam menganalisis semua informasi yang dibutuhkan oleh

pemerintah, sehingga sangat sulit mengukur semua sektor yang target capaian pemerintah.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pencapaian Misi 4 adalah:

1. Menyediakan data pencapaian yang berkaitan dengan indikator bidang komunikasi dan informatika
2. Penyediaan gedung kantor untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe secara bertahap
3. Mengusahakan sistem data dan statistik yang terintegrasi.
4. Penyediaan Bank data untuk pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga satu data.

Tabel 2.169 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 4

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
4.	Misi 4, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance).	4.1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Kategori Reformasi Birokrasi	Kategori	CC	CC	NA	C	NA	CC	C	B	sedang dlm prose	Setda
		4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Kategori hasil evaluasi SAKIP	Kategori	CC	CC	CC	C	CC	CC	CC	B	sedang dlm prose	Setda
				Kategori hasil evaluasi LPPD	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	sedang dlm prose	Setda
				Opini BPK	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam proses pemeriksaan BPK RI	BPKD
				Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	-	-	-	-	-	100	100	100	100	Inspektorat
				Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	persen	-	-	-	-	-	100	74,4	100	72.72	Inspektorat
				Level Kapabilitas APIP	level	-	-	-	-	-	3 level	Level 3	3 level	Level 3	Inspektorat

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
				Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	level	-	-	-	-	-	3 level	Level 2	3 level	Level 2	Inspektor at
		4.1.2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Cakupan pengelolaan Website pemerintah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kominfo
				Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	80	80	80	80	80	4.0	60	4.0	60	Kominfo
		4.1.3	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	40	-	-	-	-	-	0	-	0	Kesbang Pol

Sumber: RPJMK 2017-2022 dan Realisasi

Misi 5 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, serta Sarana dan Prasarana yang Memadai

Misi 5 memiliki maksud yaitu mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan pada masyarakat yang lemah, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial serta sarana dan prasarana dasar perkotaan, membangun sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas barang, jasa dan orang, meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.

Misi 5 (mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai) memiliki tujuan yaitu: 1) meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar; dan 2) meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal. Sasaran-sasaran pada Misi 5 ini adalah meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan; dan Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal.

Pencapaian target Misi 5 yang berkaitan dengan mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Misi 5 (mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai)

1. Rencana Kebutuhan dana Pembangunan infrsatructur yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2. Masih kurangnya kapasitas dan kompetensi dalam membangun infrastruktur .
3. Kurangnya kesadaran dalam memelihara/perawatan menjaga infrastruktur yang sudah dibangun.
4. Belum tersedianya fasilitas umum untuk penyandang disabilitas.
5. Permasalahan Air bersih air bersih untuk masyarakat.

6. Belum adanya jaringan jalan untuk desa di pedalaman.
7. Masih kurangnya jalan yang memiliki saluran drainase.
8. Masih belum terpenuhinya ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pencapaian Misi 5 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah direncanakan dalam RPJMK.
2. Menyediakan dana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.
3. Menyediakan tenaga-tenaga yang handal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.
4. Tersedianya dana pemeliharaan infrastruktur dan dilakukannya sosialisasi dalam perawatan/pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun.
5. Membangun beberapa fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, fasilitas olah raga, ruang terbuka hijau untuk masyarakat disabilitas.
6. Penyediaan air bersih untuk masyarakat.
7. Penyediaan akses jalan dan drainase untuk masyarakat pedalaman.
8. Penyediaan fasilitas keselamatan lalulintas.

Tabel 2. 170 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Berdasarkan Misi 5

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
5.	Misi 5, Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai.	5.1	Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan dasar	Pencapaian target nasional 100-0-100	Persen	3.89-81.3-71.4	4.01-76.4-73.5	NA	4.13-16.8-75-7	NA	4.25-13.8-75.7	4.00-13.79-70.40	4.38-11.3-80.4	4.89-11.3-74,3	PUPR
		5.1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih	Persen	3,89	4,96	NA	80,00	17,03	4,25	4,00	4,38	4,89	PUPR
				Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Wilayah (Ha)	81,30	76,42	2,44	16,81	0,79	13,79	13,79	11,30	11,30	PUPR
				Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	Persen	6,98	7,68	3,64	8,45	3,67	4,25	3,65	4,38	3,65	PUPR
		5.2	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang handal	Kategori capaian kinerja infrastruktur publik	Absolut	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	PUPR
		5.2.1	Meningkatnya pelayanan sistem jaringan jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	58,13	62,20	NA	66,55	NA	71,21	65,05	76,20	70,58	PUPR

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
		5.2.2	Terwujudnya sistem transportasi yang aman dan handal	Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas	Persen	36,80	40,11	0,14	43,72	1,00	47,66	46,95	51,95	46,72	Dishub

Sumber: RPJMK 2017-2022 dan Realisasi

Misi 6 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Sehat, Asri dan Lestari

Misi 6 memiliki maksud pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, dan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Sedangkan Misi 6 (mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari) memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran-sasaran yaitu : 1) terselenggaranya pemenuhan ruang terbuka hijau; dan 2) terselenggaranya manajemen sampah kota dan target Misi 6 yang berkaitan dengan mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam Misi 6 (mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari) diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya kapasitas dan kompetensi dalam pemeliharaan lingkungan.
2. Budaya membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran untuk hidup sehat dan bersih.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pencapaian Misi 6 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan dan menghimbau serta memberikan sosialisasi/terjun langsung kelilingkungan masyarakat bagaimana mewujudkan hidup bersih dan sehat serta membuat dan menindaklanjuti aturan-aturan yang berlaku.

Tabel 2.171 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019 Berdasarkan Misi 6

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
6.	Misi 6, Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari.	6.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,69	0,75	NA	0,82	NA	0,98	0,00	1,15	0,00	DLH
		6.1.1	Terselenggaranya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau	Luasan RTH Publik 20%	Ha	25,4	27,9	25,4	30,7	25,5	-	-	-	-	DLH
		6.1.2	Terselenggaranya manajemen sampah kota	Persentase sampah yang tertangani	Persen	71,4	75,0	81,5	78,7	81,0	82,7	79,5	86,8	81.86	DLH

Sumber: RPJMK 2017-2022 dan Realisasi

Misi 7 Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian, dan Persatuan

Maksud dari Misi 7 ini yaitu menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas.

Misi 7 memiliki tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, dengan sasaran-sasaran : 1) menguatnya penegakan penerapan Syariat Islam dalam bermasyarakat; 2) Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan; 3) Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pencapaian target Misi 7 yang berkaitan dengan mewujudkan ketentraman, ketertiban, kedamaian, dan persatuan.

Permasalahan dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Misi 7 yang didukung oleh Prioritas 7 (menjaga ketentraman dan ketertiban umum) diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Penegakan Perda/Qanun dalam hal ketentraman dan ketertiban walaupun secara kuantitatif telah tercapai sebagaimana yang ditargetkan, akan tetapi pada kondisi nyata masih belum dirasakan optimal. Hal ini terlihat masih terdapatnya para Pedagang K5 yang menggelar dagangan di tempat-tempat yang dilarang dan ruas jalan protokol.
2. Masih adanya pengutipan retribusi parkir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada tempat-tempat yang bukan lokasi pengutipan retribusi parkir.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pencapaian Misi 7 yang didukung oleh pencapaian Indikator Kinerja Prioritas 7 diantaranya adalah:

1. Melakukan optimalisasi pelaksanaan Penegakan Perda/Qanun terhadap Pedagang yang menggelar dagangan pada tempat-tempat yang dilarang dan jalan-jalan protokol.

2. Menyediakan lokasi yang representatif bagi para Pedagang K5 untuk melakukan usahanya, sehingga ketertiban dan kenyamanan dapat dijaga secara optimal.
3. Melakukan penertiban dan pembinaan yang mendalam terhadap para oknum-oknum pengutipan retribusi parkir pada tempat-tempat yang bukan tempat pengutipan parkir.

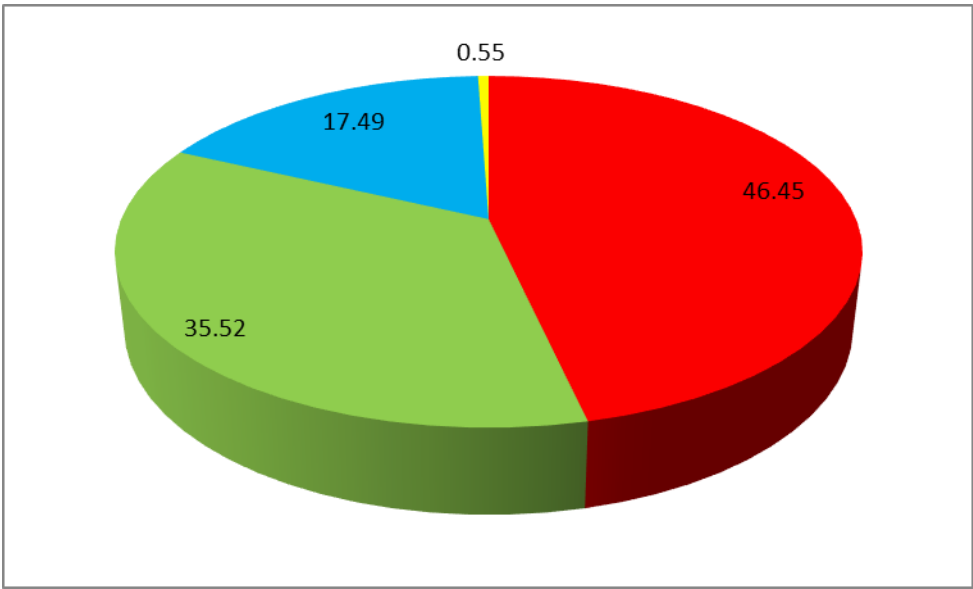
Tabel 2. 172 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019 Berdasarkan Misi 7

No	Misi	Tujuan/ Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		2020		2021		OPD
							Target	Capaian	Target	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	Revisi RPJM	Capaian	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)
7.	Misi 7, Mewujudkan ketentraman, ketertiban, kedamaian dan persatuan	7,1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundangan	Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000)	Rasio (Per 10.000)	58,76	52,88	NA	47,60	NA	42,84	0,00	38,55	0,00	PP WH
		7.1.1	Menguatnya penegakan Syariat Islam dalam bermasyarakat	Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Kasus	81	69	58	59	37	63	65	60	46	PP WH
		7.1.2	Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman terhadap wawasan kebangsaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	40	-	100	70	73	-	0	-	0	Kesbang Pol
		7.1.3	Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	-	50	80	80	90	80	80	90	90	PP WH
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18,39	18,39	18,39	18,39	18,39	45,00	24,85	47,00	28,71	BPBD
				Cakupan penanggulangan kebakaran	Persen	-	-	-	-	-	100	0	100	0	BPBD

Sumber: RPJMK 2017-2022 dan Realisasi

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Terhadap Aspek Pelayanan Umum

Dari capaian indikator kinerja utama per misi telah dijelaskan, untuk capaian indikator kinerja daerah terhadap Aspek Pelayanan Umum seluruh perangkat daerah secara keseluruhan telah dilakukan evaluasi terhadap target yang ditetapkan dan dapat dilihat pada Gambar 3.2. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan tingkatan status capaian diantaranya “belum tercapai”, “sesuai”, dan “melampaui”. Status belum tercapai (<) ditandai dengan warna merah ini artinya capaian masih kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 46,45%, pada Tahun 2021, kemudian status sesuai (=) ditandai dengan warna hijau artinya capaian kinerja sama dengan target yang telah ditentukan sebesar 35,52% pada Tahun 2021, kemudian status melampaui (>) ditandai dengan warna biru ini artinya capaian melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar 17,49% pada Tahun 2021, selain dari status diatas terdapat 0,55% capaian target yang masih dalam proses ditandai dengan warna kuning. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.31 berikut



Gambar 2.31 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Tabel 2.173
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2017-2022

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ASPEK PELAYANAN UMUM										
1,		Layanan Urusan Wajib Dasar										
1,1,		Pendidikan										
1,1,	1,	Persentase PAUD dengan Akreditasi B	Persen	10	NA	NA	50	70	70	=	PK	
1,1,	2,	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	30	NA	NA	60	75	75	=	PK	
1,1,	3,	Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI	Persen	93,66	81,81	84,47	99,60	100,00	90,00	>	PK	
1,1,	4,	Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs	Persen	79,05	81,24	66,31	93,60	93,40	90,00	>	PK	
1,1,	5,	Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidikan	Persen	10	NA	NA	50	60	60	=	PK	
1,1,	6,	Persentase Pengawas Sekolah yang telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah	Persen	10	NA	NA	85	90	90	=	PK	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,1,	7,	Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru	Persen	20	NA	NA	20	40	40	=	PK	
1,1,	8,	Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan	Persen	30	NA	NA	60	70	70	=	PK	
1,1,	9,	Persentase Guru Berijazah S1/D4	Persen	0	0	0	0	0	100	<	PK	
1,1,	10,	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persen	0	0	0	0	0	85	<	PK	
1,2,		Kesehatan										
2,	1,	Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	Dinkes	
2,	2,	Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas	Persen	100	90	90	100	100	100	=	Dinkes	
2,	3,	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Jumlah	2	3	1	0	0	0		Dinkes	
2,	4,	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	12,13	11,12	9,38	14,2	35,7	100	<	Dinkes	
2,	5,	Persentase Kecamatan/ desa sehat	Persen	5	0	0	0	0	5	<	Dinkes	
2,	6,	Persentase pasar sehat	Persen	2	0	0	0	0	2	<	Dinkes	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,	7,	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat	Jumlah	0	4	4	4	4	1	>	Dinkes	
2,	8,	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	=	Dinkes	
2,	9,	Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT	Persen	80	100	100	100	10	90	<	Dinkes	
2,	10,	Persentase desa yang melaksanakan STBM	Persen	20	4,4	26,5	0	96	100	<	Dinkes	
2,	11,	Persentase Desa ODF	Persen	20	1,5	7,4	18	18	15	>	Dinkes	
2,	12,	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis	Persen	50	75	75	50	70	85	<	Dinkes	
2,	13,	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	50	6,33	9,2	32,95	51	90	<	Dinkes	
2,	14,	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	=	Dinkes	
2,	15,	Cakupan Penderita diare yang ditangani	Persen	20	34,5	46,3	33,1	23,7	80	<	Dinkes	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,	16,	Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	36,2	12,9	100	100	100	=	Dinkes	
2,	17,	optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan	Persen	50	70	75	80	90	100	<	Dinkes	
2,	18,	Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus	Persen	50	1	0,5	40,9	60	80	<	Dinkes	
2,	19,	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	88	97,9	97,6	87,23	78	100	<	Dinkes	
2,	20,	Cakupan Desa dengan posyandu lansia	Persen	0	100	100	100	90	95	<	Dinkes	
2,	21,	Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia	Persen	0	100	100	75	80	95	<	Dinkes	
2,	22,	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Persen	1,8	119	142	161	344	0		Dinkes	
2,	23,	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Persen	5	4	5	0,9	5	0		Dinkes	
2,	24,	Cakupan pelayanan Informasi kesehatan	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	Dinkes	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,	25,	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	0	0	0	0	100	80	>	Dinkes	
1,3,		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1,3,	1,	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	58,13	NA	NA	65,05	65,05	76,20	<	PUPR	
1,3,	2,	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	2,11	0,54	1,37	1,99	2,16	4,38	<	PUPR	
1,3,	3,	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	8,89	70,74	73,92	3,65	3,65	15,60	<	PUPR	
1,3,	4,	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	53,15	70,74	73,92	65,05	79,21	77,81	>	PUPR	
1,3,	5,	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	41,27	71,27	81,27	65,05	65,05	81,27	<	PUPR	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,3,	6,	Persentase jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Persen	58,14	26,23	67,48	65,05	65,05	85,12	<	PUPR	
1,3,	7,	Persentase akses Air Minum/ air bersih	Persen	4,82	65,29	17,03	4,00	5,78	5,42	>	PUPR	
1,3,	8,	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	66,00	65,29	65,29	70,40	74,30	86,51	<	PUPR	
1,3,	9,	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	44,64	32,54	29,29	35,58	29,29	29,29	=	PUPR	
1,3,	10,	Cakupan dokumen perencanaan tata ruang	Dokumen	-	0	1	0	0	3	<	PUPR	
1,3,	11,	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Persen	0,08	0,08	0,08	0,06	0,06	0,08	>	PUPR	
1,3,	12,	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	25,40	33,80	37,20	30,30	32,40	37,20	<	PUPR	
1,3,	13,	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	3,28	3,30	3,40	3,28	3,35	3,40	<	PUPR	
1,4,		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1,4,	1,	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,22	0,17	0,17	0,17	0,45	0,32	>	PUPR	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,4,	2,	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,87	0,93	0,96	0,81	0,95	0,96	<	PUPR	
1,4,	3,	Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	Persen	1,89	0,97	0,77	0,95	0,82	0,77	<	PUPR	
1,4,	4,	Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh	Ha	81,30	2,44	0,79	13,79	11,30	11,30	=	PUPR	
1,4,	5,	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	2,82	0,67	0,53	0,95	0,73	0,68	<	PUPR	
1,4,	6,	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk	Persen	0,11	0,12	0,13	0,00	0,11	0,13	<	PUPR	
1,5,		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1,5,	1,	Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas	Persen	-	80	90	80	90	90	=	PP dan WH	
1,5,	2,	Persentase penegakan Perda/Qanun	Persen	25	80	90	80	90	90	=	PP dan WH	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,5,	3,	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat	Persen	27,88	27,88	27,88	50,91	50,91	50,91	=	PP dan WH	
1,5,	4,	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rasio	-	-	-	720	720	720	=	PP dan WH	
1,5,		Penanggulangan Bencana										
1,5,	1,	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	18,39	18,39	18,39	24,85	28,71	47,00	<	BPBD	
1,5,	2,	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Persen	100,00	100,00	100,00	4,08	16,00	45,00	<	BPBD	
1,5,	3,	Wilayah Terkena Bencana Alam Kota Lhokseumawe	Persen	-	-	-	0,00	0,00	45,00	<	BPBD	
1,6,		Sosial										
1,6,	1,	Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang menerima bantuan	Persen	69	100	100	67,96	0	80	<	Dinsos	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1,6,	2,	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	17,86	0	100	<	Dinsos	
1,6,	3,	Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	91,12	0	100	<	Dinsos	
2,		Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
2,4,		Pertanahan										
2,4,	1,	Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	M2 (Juta)	-	-	17,37	17,45	17,52	17,42	>	Per Tanahan	
2,4,	2,	Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe	M2 (Ribu)	-	-	255,169	158,16	218,85	257,5	<	Per Tanahan	
2,4,	3,	Jumlah Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan	Jumlah	-	-	3	2	3	4	<	Per Tanahan	
2,4,	4,	Jumlah Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Terdaftar	Jumlah	-	-	5	3	4	5	<	Per Tanahan	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,4,	5,	Luas Hak Guna Bangunan (HGB)	M2 (Ribu)	-	-	316,598	318,5	325,7	317,232	>	Per Tanah	
2,7,		Tenaga Kerja										
2,7,	1,	Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	-	50	60	90	90	60	>	DPMPTSP	
2,7,	2,	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	-	50	60	60	29	49	<	DPMPTSP	
2,7,	3,	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahunan	Rasio	1	20	20	1	1	1	=	DPMPTSP	
2,7,	4,	Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja	Persen	80	85	85	0	0	78	<	DPMPTSP	
2,8,		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,8,	1,	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100	67,5	>	DP3A P2KB	
2,8,	2,	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	75,30	24,00	25,00	99,60	70,00	80,00	<	DP3A P2KB	
2,8,	3,	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	8	8	8	100	100	8	>	DP3A P2KB	
2,8,	4,	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	24,70	14,00	14,00	99,00	70,72	30,00	>	DP3A P2KB	
2,9,		Pangan										
2,9,	1,	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persen	0	30	40	40	50	60	<	DKPPP	
2,9,	2,	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	516	100	100	100	100	100	=	DKPPP	
2,11,		Lingkungan Hidup										

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,11,	1,	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Persen	0	100	100	100	100	100	=	DLH	
2,11,	2,	Cakupan limbah B3 yang dikelola	Persen	0	NA	NA	100	100	100	=	DLH	
2,11,	3,	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Jumlah	0	75	123	1	1	1	=	DLH	
2,11,	4,	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Ha	25,40	33,80	37,20	33,80	37,50	37,50	=	DLH	
2,11,	5,	Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum	Jumlah	0	1	1	1	1	1	=	DLH	
2,11,	6,	Cakupan pelaksanaan keindahan dan kerasian kota	Kecamatan	1	2	3	2	3	3	=	DLH	
2,11,	7,	Penanganan Sampah	Persen	71,40	81,53	81,00	79,45	81,86	882,00	<	DLH	
2,12,		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
2,12,	1,	Rasio Penduduk ber KTP	Persen	858	878	956	0,96	0,97	0,97	=	Capil	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,12,	2,	Cakupan Penerbitan KTP	Persen	79	88	96	96	97	90	>	Capil	
2,12,	3,	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	85	93	95	83	99	90	>	Capil	
2,13,		Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong										
2,13,	1,	Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong	Gampong	68	68	68	68	68	68	=	DPMG	
2,13,	2,	Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	0	0	0		DPMG	
2,13,	3,	Jumlah Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	11,78	5,80	5,80	17,65	10,29	3,00	>	DPMG	
2,13,	4,	Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong	Unit	47	-	-	68	68	70	<	DPMG	
2,13,	5,	Cakupan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong	Gampong	68	-	-	0	25	68	<	DPMG	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,14,		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2,14,	1,	Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga	Rata-rata	1,64	1,40	2,16	142,00	166,00	2,00	>	DP3A P2KB	
2,14,	2,	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	2,00	1,94	2,16	103,00	204,00	2,00	>	DP3A P2KB	
2,14,	3,	Cakupan pelayanan reproduksi remaja	Persen	0	150	52	0	285	70	>	DP3A P2KB	
2,14,	4,	Rasio Akseptor KB	Persen	81,29	81,54	52,00	94,2	97,8	81,80	>	DP3A P2KB	
2,14,	5,	Cakupan Peserta KB aktif	Persen	81,29	81,54	52,00	94,4	97,8	81,80	>	DP3A P2KB	
2,15,		Perhubungan										
2,15,	1,	Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat	Persen	60	60	61	-	-	-		Dishub	
2,15,	2,	Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ	Bulan	12	12	12	-	-	-		Dishub	
2,15,	3,	Rasio Izin Trayek	Persen	0,01	0,01	0,01	0,008	0,007	0,01	>	Dishub	
2,15,	4,	Jumlah Uji Kir angkutan umum	Unit	1	2234	2230	2.006	3.078	2.589	>	Dishub	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,15,	5,	Cakupan sarana dan prasarana perhubungan public	Sarana	1	1	1	-	-	-		Dishub	
2,15,	6,	Cakupan pemasangan rambu-rambu	Unit	36,80	0,00	60,00	80,00	-	50,00	<	Dishub	
2,15,	7,	Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi	Persen	60	0	12	-	-	-		Dishub	
2,15,	8,	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Unit	-	-	-	13,21	64,33	130,23	<	Dishub	
2,15,	9,	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	-	-	-	3,00	2,00	3,00	<	Dishub	
2,15,	10,	Persentase layanan angkutan darat	%	-	-	-	-	46,72	26,04	>	Dishub	
2,15,	11,	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	-	-	-	52,00	96,00	98,00	<	Dishub	
2,15,	12,	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	-	-	-	0,009	0,008	0,009	<	Dishub	
2,15,	13,	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	ton	-	-	-	5,81	6,55	7,82	<	Dishub	
2,15,	14,	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	-	-	-	53,64	64,34	378,23	<	Dishub	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,16,		Komunikasi dan Informatika										
2,16,	1,	Cakupan kerjasama informasi dengan mass media	Bulan	12	12	12	20%	25%	70%	<	Kominfo	
2,16,	2,	Cakupan surat elektronik resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe bagi OPD dan ASN	Persen	30%	40%	40%	10%	10%	40%	<	Kominfo	
2,16,	3,	Cakupan jumlah Kelompok Informasi Gampong (KIG)	Jumlah	4	4	4	4	4	7	<	Kominfo	
2,16,	4,	Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Lhokseumawe	Persen	20%	20%	20%	50%	50%	60%	<	Kominfo	
2,16,	5,	Cakupan Jaringan Intranet dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Persen	10%	20%	20%	20%	20%	40%	<	Kominfo	
2,17,		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
2,17,	1,	Cakupan Penyediaan Dokumen DED	Persen	NA	100%	0	100%	100%	100%	=	Diskop	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,17,	2,	Cakupan pembinaan terhadap UKM	Persen	3	0	0	5	5	5	=	Diskop	
2,17,	3,	Persentase Koperasi Aktif	Persen	38,91	42,56	47,69	39,81	40,09	40,09	=	Diskop	
2,18,		Penanaman Modal										
2,18,	1,	Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jenis Media	3	3	5	-	-	5	<	DPMPTSP	
2,18,	2,	Lamanya proses perizinan	Hari	7	6	6	6	6	6	=	DPMPTSP	
2,19,		Kepemudaan dan Olahraga										
2,19,	1,	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	83	75	75	70	70	75	<	Disporapar	
2,19,	2,	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	12	10	10	12	13	14	<	Disporapar	
2,19,	3,	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	21	15	17	16	17	18	<	Disporapar	
2,19,	4,	Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA	Jumlah Cabor	18	11	11	10	11	12	<	Disporapar	
2,19,	5,	Persentase pembina pramuka yang dibina		0	0	0	0	50	100	<	Disporapar	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,20,		Statistik										
2,20,	1,	Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB	Ada / Tidak	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	=	Bappeda	
2,22,		Kebudayaan										
2,22,	1,	Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	24	NA	NA	35	40	-		PK	
2,22,	2,	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	-	NA	NA	3	3	-		PK	
2,22,	3,	Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif	Jumlah	2	NA	NA	2	2	-		PK	
2,22,	4,	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	Persen	-	-	-	90	90	90	=	PK	
2,22,	5,	Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisonal	Persen	-	-	-	80	80	80	=	PK	
2,22,	6,	Cakupan Pembinaan Sejarah	Persen	-	-	-	85	85	85	=	PK	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,22,	7,	Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persen	-	-	-	45,45	45,45	45,45	=	PK	
2,22,	8,	Cakupan Pengelolaan Museum	Persen	-	-	-	80	80	80	=	PK	
2,23,		Perpustakaan										
2,23,	1,	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Jumlah	3.159	4.774	5.719	2.962	2.037	3.245	<	ARPUS	
2,23,	2,	Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	Bulan	12	176	195	11	11	12	<	ARPUS	
2,24,		Kearsipan										
2,24,	1,	Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	15	25	35	15%	30%	100%	<	ARPUS	
2,24,	2,	Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	0	0	2	1	1	1	=	ARPUS	
3,		Layanan Urusan Pilihan										
3,26,		Pariwisata										

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3,26,	1,	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,09	NA	NA	1,19	1,23	1,23	=	Disporapar	
3,26,	2,	Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe	Persen	24,00	20,00	20,00	19,00	19,00	20,00	<	Disporapar	
3,27,		Pertanian										
3,27,	1,	Cakupan pembinaan Kelompok Tani	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	DKPPP	
3,27,	2,	Produktivitas Komoditas Pangan	Ton	15.873	15.873	15.905	15.937	16,097	15.969	>	DKPPP	
3,27,	3,	Kontribusi Kelompok Tani terhadap PDRB	Persen	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	>	DKPPP	
3,30,		Perdagangan										
3,30,	1,	Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang	Bulan	12	1	1	12	12	12	=	Diskop	
3,30,	2,	Cakupan pengembangan pasar rakyat	Kecamatan	4	2	1	1	1	4	<	Diskop	
3,31,		Perindustrian										

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3,31,	1,	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	17,84	7,27	7,32	18,76	18,65	19,31	<	Diskop	
3,31,	2,	Cakupan promosi perdagangan dan keikutsertaan dalam event pameran dagang	Jumlah	1	1	1	0	1	1	=	Diskop	
3,25,		Kelautan dan Perikanan										
3,25,	1,	Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	DKPPP	
3,25,	2,	Cakupan pembinaan dan penegakan hukum kelautan	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	DKPPP	
3,25,	3,	Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	DKPPP	
3,25,	4,	Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya)	Ton	1.704	1,704	1,721	1,738	2	2	=	DKPPP	
3,25,	5,	Cakupan sarana dan prasarana perikanan yang dikembangkan	Unit	5	5	5	5,0	7	7	=	DKPPP	
3,25,	6,	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah	30	30	30	30	30	30	=	DKPPP	
4,		Layanan Pendukung Urusan										
4,1,		Sekretariat Daerah									Setdako	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7,	1,	Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LPPD, IKK, dan EKPOD	Dokumen	-	4	4	4	4	4	=	Setdako	
7,	2,	Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah	Kali	12	12	2	2	2	4	<	Setdako	
7,	3,	Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi	Perda/Qan un	12	12	14	3	3	12	<	Setdako	
			Perwal	12	12	45	0	0	45	<		
7,	4,	Cakupan penyelesaian tapal batas daerah	Titik wilayah	12	12		10	20	20	=	Setdako	
7,	5,	Cakupan pelaksanaan Pengajian Gampong diwilayah Kota Lhokseumawe	Gampong	12	12	68	58	69	68	>	Setdako	
7,	6,	Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah	Hari Besar	8	8	8	8	8	8	=	Setdako	
4,1,	7,	Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	Setdako	
4,1,	8,	Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Bulan	12	12	12	12	0	0		Setdako	
4,2,		Sekretariat Dewan										

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4,2,	1,	Persentase Qanun yang ditetapkan	Persen	100	53,33	47,06	33	0	0		Sekwan	
4,2,	2,	Persentase Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	Persen	100	83,33	100	100	0	0		Sekwan	
4,2,	3,	Persentase Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi	Persen	0	0	0		41,18	100	<	Sekwan	
5,		Layanan Penunjang Urusan										
5,1,		Perencanaan Pembangunan										
5,1,	1,	Keterbukaan informasi publik melalui website	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	Bappeda	
5,1,	2,	Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan	Dok	5	3	3	0		-		Bappeda	
5,1,	3,	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Dok	1	1	0	0		-		Bappeda	
5,1,	4,	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar	Dok	1	1	1	1		-		Bappeda	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5,1,	5,	Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencanaan	Keg	0	1	1	0		-		Bappeda	
5,1,	6,	Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dok	9	9	6	9		-		Bappeda	
5,1,	7,	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	Bulan	12	12	12	12		-		Bappeda	
5,1,	8,	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	Bulan	12	12	12	12		-		Bappeda	
5,1,	9,	Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Bulan	12	12	12	12		-		Bappeda	
5,1,	10,	Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah	Laporan	4	4	4	-		-		Bappeda	
5,1,	11,	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Bulan	-	-	-		12	12	=	Bappeda	
5,1,	12,	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bulan	-	-	-		12	12	=	Bappeda	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5,1,	13,	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	Persen	-	-	-		90	90	=	Bappeda	
5,1,	14,	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	Persen	-	-	-		100	100	=	Bappeda	
5,1,	15,	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	-	-	-		30	60	<	Bappeda	
5,2,		Keuangan										
5,2,	1,	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	Bulan	12	12	12	12	0	12	<	BPKD	
5,2,	2,	Jumlah penerimaan PAD	Milyar	66,50	65,60	61,50	45,84	0,00	49,20	<	BPKD	
		Besaran penerimaan PAD	Milyar	-	-	-		44,60	49,20	<		
5,2,	3,	Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK	Dok	7	7	7	0	0	0		BPKD	
5,2,	4,	Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah	Dok	8	8	8	8	0	10	<	BPKD	
	5,	Cakupan laporan pengelolaan barang milik daerah	Laporan	-	-	-			64	<		

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5,2,	1,	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Bulan	12	12	12	12	0	12	<	BPKD	
5,2,	2,	Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Opini	-	-	-	WTP	Dalam proses pemeriksaan BPK RI	WTP	Dalam proses pemeriksaan BPK RI	BPKD	Dalam proses pemeriksaan BPK RI
5,3,		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
5,3,	1,	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	Persen	2,86	18.29	16.29	11,31	8,77	3,81	>	BKPSDM	
5,3,	2,	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	BKPSDM	
6,		Pengawasan										
6,1,	1,	Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP	LHP	65	205	348	220	250,00	-		Inspektorat	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6,1,	2,	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjurangan tenaga pemeriksa (auditor)	ASN	37	20	36	15	10,00	-		Inspektorat	
6,1,	3,	Jumlah laporan pengawasan ASN	Jumlah	4000	4000	4000	1000	1.000	-		Inspektorat	
6,1,	4,	Persentase Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SAKIP OPD	Persen	75	-	-	100	100	100	=	Inspektorat	
6,1,	5,	Persentase OPD dan Gampong yang dilakukan Pengawasan	Persen	80	-	-	75	75	100	<	Inspektorat	
6,1,	6,	Persentase Auditor yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	60	-	-	50	50	60	<	Inspektorat	
6,1,	7,	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Kategori	-	-	-	C		B	<	Inspektorat	
6,1,	8,	Indeks Integritas	Indeks	-	-	-	-		7,60	<	Inspektorat	
7,		Kecamatan										
7,1,	1,	Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	Kantor Camat	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7,1,	2,	Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam	Kegiatan	2	7	12	2	2	2	=	Kantor Camat	
7,1,	3,	Cakupan pelaksanaan <i>Saweue Gampong</i>	Gampong	68	51	52	68	68	68	=	Kantor Camat	
7,1,	4,	Cakupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	1	4	4	1	1	1	=	Kantor Camat	
8,1,		Kesatuan Bangsa dan Politik										
8,1,	1,	Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan	Persen	100	100	100	0	100	100	=	Kesbang Pol	
8,1,	2,	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100	0	50	100	<	Kesbang Pol	
8,1,	3,	Cakupan dukungan kelancaran Pemilu	Bulan	12	12	12	0	0	12	<	Kesbang Pol	
9,		Kekhususan										
9,7,	1,	Cakupan pelayanan kehidupan beragama	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	DSIPD	
9,7,	2,	Persentase penurunan pelanggaran syariat	Kasus	81	69	59			0		DSIPD	
9,7,	3,	Jumlah Hafiz/Hafizah	Jumlah	20	10	10	10	13	12	>	DSIPD	

KODE	NO	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJM (2017)	CAPAIAN KINERJA				TARGET TAHUN 2021	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	OPD	KET
					2018	2019	2020	2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9,7,	4,	Cakupan sosialisasi hukum Islam	Bulan	12	12	12			-		DSIPD	
9,8,	1,	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama	Bulan	12	12	12	12	12	12	=	MPU	
		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya ulama										
9,9,	1,	Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal	Kegiatan	1	-	-			-		Baitul Mal	
9,10,	1,	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola	Jumlah	-	1	1			1	<	MAA	
9,11,	1,	Cakupan pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan	Bulan	12	12	12	12		0		MPD	
9,11,	2,	Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	Persentase	-	-	-	-	-	65	<	MPD	

2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/ Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal, karena hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;

- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Adapun rincian penerapan dan pencapaian SPM Kota Lhokseumawe masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.174
Penerapan dan Pencapaian SPM Kota Lhokseumawe

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2021	PENANGGUNGJAWAB URUSAN
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar; Pendidikan Kesetaraan; Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	97.90%	Dinas PK
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Guru Berijazah S1/D4	86.02%	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berijazah S1/D4		
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan	94.10%	
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	96%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Persalinan			97.5%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2021	PENANGGUNGJAWAB URUSAN
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			99%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar			78.4%	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			97.4%	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			82.8%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			94.5%	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			65.8%	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			92.9%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			93%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2021	PENANGGUNGJAWAB URUSAN
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			35.2%	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficient Virus)			45%	
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Dinas PUPR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas PUPR
SPM PERUMAHAN RAKYAT					

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2021	PENANGGUNGJAWAB URUSAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas PUPR
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
SPM TRANTIBUMLINMAS					
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	SATPOL PP DAN WH
2	Pelayanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		5%	BPBD

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2021	PENANGGUNGJAWAB URUSAN
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		5%	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100%	
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL; PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		75.44%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			80.57%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			96.68%	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN 2021	PENANGGUNGJAWAB URUSAN
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			61.54%	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		0.00%	

Sumber : Hasil Evaluasi RPJMK 2017-2022.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Pemerintah Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terkait dengan hal tersebut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe. APBK merupakan suatu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBK maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBK Lhokseumawe dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Gambaran capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi belanja, capaian pembiayaan, serta analisis neraca daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisis, misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Lhokseumawe yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan rentang waktu 2017 sampai 2020, sedangkan Tahun 2021 merupakan realisasi realisasi yang belum diaudit.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBK dilaksanakan dengan mengukur perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efesiensi, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengetahui capaian kinerja APBK yang telah ditetapkan, terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Data struktur APBK Lhokseumawe diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2020

(*audited*) dan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021 (*unaudited*) yang bersumber dari BPKD Kota Lhokseumawe. Adapun secara umum struktur APBD Lhokseumawe terdiri dari :

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yagn Sah yang bersumber dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah Kota Lhokseumawe setiap tahunnya diupayakan terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang produktif. Pendapatan daerah merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian daerah harus tergambar dari semakin meningkatkannya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, penerimaan PAD terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer Pemerintah Provinsi terutama dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang memiliki jangka waktu terbatas.

B. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Lhokseumawe yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Desa, yang meliputi belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

C. Pembiayaan Daerah

Definsi pembiayaan daerah menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dan/atau Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pelaksanaan APBK Lhokseumawe selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*)	
1	PENDAPATAN DAERAH	901,721,200,897	749,405,667,507	864,499,598,943	835,667,970,983	793,150,537,641	(2.15)
	Pendapatan Asli Daerah	62,986,260,104	65,618,966,778	61,454,942,996	65,875,904,859	62,415,913,243	2.31
	Pajak Daerah	27,839,764,484	33,855,813,011	28,475,036,318	35,168,842,182	30,115,978,587	5.68
	Retribusi Daerah	4,050,483,522	3,088,925,300	3,758,646,496	3,405,689,671	3,073,325,409	(3.02)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,093,717,479	5,100,912,333	5,108,664,333	4,327,896,492	4,174,105,667	0.24
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26,002,294,619	23,573,316,134	24,112,595,849	22,973,476,514	25,052,503,580	1.34
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	707,123,972,821	639,369,731,383	675,462,239,754	628,914,528,526	607,680,159,000	(3.66)
	Dana Bagi Hasil (DBH)	49,265,986,598	32,678,980,018	34,791,220,312	43,303,103,998	28,117,593,050	(4.63)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	459,628,037,000	459,628,037,000	469,471,445,000	425,306,246,000	418,626,656,000	(2.12)
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	135,319,889,183	93,948,851,900	103,034,976,140	81,627,891,528	82,921,408,612	(12.78)
	Dana Insentif Daerah (DID)	2,624,241,040	-	7,878,779,302	18,391,468,000	16,156,027,000	4.26
	Dana Desa (DD)	60,285,819,000	53,113,862,465	60,285,819,000	60,285,819,000	61,858,474,338	5.55

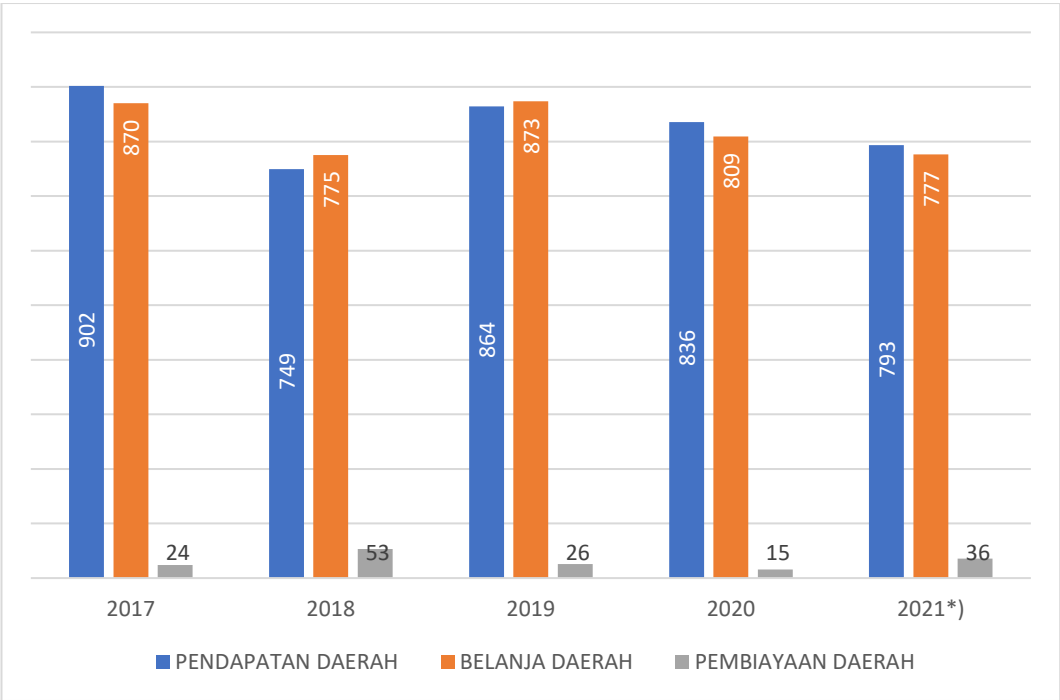
No.	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*)	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111,063,207,972	24,302,809,346	106,215,536,193	118,898,162,598	98,962,753,398	53.27
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	23,121,731,293	23,302,809,346	26,704,399,172	31,220,106,455	27,269,583,603	2.27
	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)	87,941,476,679	-	79,402,072,351	72,678,056,143	71,693,169,795	(0.05)
	Bantuan Keuangan Provinsi	-	1,000,000,000	109,064,670	15,000,000,000	-	2,692.84
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,547,760,000	20,114,160,000	21,366,880,000	21,979,375,000	24,091,712,000	8.31
	Pendapatan Hibah	20,547,760,000	20,114,160,000	21,366,880,000	21,979,375,000	24,091,712,000	3.32
2	BELANJA DAERAH	870,168,392,236	775,480,033,294	873,465,604,518	809,115,344,069	776,651,681,455	(2.38)
	Belanja Operasi	536,115,837,084	529,779,321,315	560,366,224,750	519,576,952,633	521,495,267,967	(1.46)
	Belanja Pegawai	345,445,392,215	331,577,842,590	348,841,484,123	283,796,919,084	283,308,654,473	(6.11)
	Belanja Barang dan Jasa	99,664,505,287	113,393,566,135	129,094,124,253	203,976,543,666	169,787,596,364	10.64
	Belanja Hibah	59,525,325,773	7,607,600,000	6,228,895,000	7,780,367,500	26,757,974,805	56.43
	Belanja Bantuan Sosial	31,480,613,809	77,200,312,590	76,201,721,374	24,023,122,383	41,641,042,325	38.38
	Belanja Modal	223,594,518,755	143,082,398,156	203,875,275,990	177,257,389,327	137,196,135,419	(6.89)
	Belanja Tak Terduga	206,399,000	308,425,085	127,952,364	10,823,441,265	3,720,021,430	1,648.52

No.	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*)	
	Belanja Transfer	110,251,637,397	102,309,888,738	109,096,151,414	101,457,560,844	114,240,256,639	5.56
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	928,342,379	973,164,381	-	-	1,794,068,948	(19.03)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	109,323,295,018	101,336,724,357	109,096,151,414	101,457,560,844	112,446,187,691	5.18
	SURPLUS / (DEFISIT)	31,552,808,661	(26,074,365,787)	(8,966,005,575)	26,552,626,914	16,498,856,185	(122.43)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	23,780,603,121	53,033,411,783	25,959,045,995	15,493,040,419	35,901,027,333	89.01
	Penerimaan Pembiayaan	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,995	16,993,040,419	42,045,667,333	96.04
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,995	16,993,040,419	42,045,667,333	96.04
	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	6,144,640,000	86.62
	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	6,144,640,000	86.62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	55,333,411,783	26,959,045,995	16,993,040,419	42,045,667,333	52,399,883,518	16.76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2017-2020 (Audited) dan 2021(Unaudited), BPKD Kota Lhokseumawe.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi APBK Lhokseumawe Tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yang mencapai Rp.901,721 Milyar, sedangkan realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe terendah terjadi pada Tahun 2018 yang hanya mencapai Rp.749,405 Milyar. Dari sisi belanja, realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yang mencapai Rp.873,465 Milyar, dan realisasi belanja terendah terjadi pada Tahun 2021 (*unaudited*) yang hanya mencapai Rp.776,651 Milyar. Selama periode Tahun 2017-2021, Tahun 2017, 2020, dan 2021 setiap terjadi surplus anggaran, sedangkan pada Tahun 2018 dan 2019 terjadi defisit anggaran. Surplus anggaran disebabkan karena realisasi belanja Kota Lhokseumawe lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan daerah Kota Lhokseumawe. Lebih jelasnya mengenai kinerja realiasi APBK Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2017-2021
(dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah).

3.1.2 Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe

Sumber utama pendapatan Kota Lhokseumawe berasal dari Pendapatan Transfer, baik transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari pemerintah provinsi; Pendapatan Asli Daerah; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang negatif sebesar minus (2,15%), terutama pada Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat minus (3,66%). Sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah menunjukkan angka yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 53,27%, dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 2,31%. Jika ditinjau dari capaian setiap tahunnya, dapat dilihat bahwa persentase realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe terhadap target yang tertinggi terjadi pada Tahun 2017 mencapai sebesar 97,10%, dan yang terendah terjadi pada Tahun 2018 yang mencapai sebesar 92,76%. Capaian realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	928,679,687,143	901,721,200,897	97.10	(0.79)
2018	807,871,157,381	749,405,667,507	92.76	(16.89)
2019	922,536,203,518	864,499,598,943	93.71	15.36
2020	882,717,271,430	835,667,970,983	94.67	(3.34)
2021	843,409,193,949	793,150,537,641	94.04	(5.09)
Rata-Rata Pertumbuhan				(2.15)

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (Audited) dan 2021 (Unaudited), BPKD Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari beberapa komponen penyusun pendapatan yang tidak dapat dipisahkan diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh daerah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

PAD Kota Lhokseumawe merupakan pendapatan yang dihimpun berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	64,251,583,646	62,986,260,104	98.03	11.78
2018	64,287,617,843	65,618,966,778	102.07	4.18
2019	76,178,941,193	61,454,942,996	80.67	(6.35)
2020	70,342,465,350	65,875,904,859	93.65	7.19
2021	91,165,667,619	62,415,913,243	68.46	(5.25)
Rata-Rata Pertumbuhan				2.31

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Capaian realisasi pada Tahun 2017 sebesar 98,03% atau setara Rp.62,986 Milyar dari target sebesar Rp.64,251 Milyar. Pada Tahun 2018 capaian realisasi melebihi dari anggaran yang ditarget hingga mencapai 102,07%. Pada Tahun 2019 capaian realiasi PAD turun menjadi 80,67%, dan pada Tahun 2020 capaian realisasi PAD kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 93,65%, namun pada Tahun 2021 capaian realisasi PAD

Kota Lhokseumawe kembali mengalami penurunan dengan capaian sebesar 68,46%.

a. Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu Tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang positif. Pada Tahun 2017 realisasi pajak daerah sebesar Rp.27,83 Milyar dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2021 menjadi Rp.30,11 Milyar. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan, capaian realisasi pajak daerah tertinggi terjadi pada Tahun 2018 mencapai 116,01%, dan capaian terendah terjadi pada Tahun 2021 hanya 61,72%, sedangkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	28,623,150,951	27,839,764,484	97.26	13.54
2018	29,182,500,000	33,855,813,011	116.01	21.61
2019	34,282,500,000	28,475,036,318	83.06	(15.89)
2020	35,237,500,000	35,168,842,182	99.81	23.51
2021	48,791,981,138	30,115,978,587	61.72	(14.37)
Rata-Rata Pertumbuhan				5.68

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen pembentuk PAD Kota Lhokseumawe. Penerimaan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pemungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Capaian penerimaan retribusi daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Persentase realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yang mencapai 95,25%, namun pada tahun-tahun berikutnya capaian realiasi retribusi daerah mengalami penurunan hingga 71,15% pada Tahun 2021. Secara

umum rata-rata pertumbuhan realisasi retribusi daerah Kota Lhokseumawe minus sebesar (3,02%). Capaian realisasi retribusi daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	4,252,300,000	4,050,483,522	95.25	6.12
2018	4,428,500,000	3,088,925,300	69.75	(23.74)
2019	4,719,823,350	3,758,646,496	79.64	21.68
2020	4,471,983,350	3,405,689,671	76.16	(9.39)
2021	4,319,500,000	3,073,325,409	71.15	(9.76)
Rata-Rata Pertumbuhan				(3.02)

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga merupakan komponen pembentuk PAD Kota Lhokseumawe. Capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2021 melebihi dari target yang telah direncanakan hingga mencapai 101,07%, namun pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga pada Tahun 2021 capaiannya sebesar 80,27%. Rata-rata pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan angka positif sebesar 0,24%.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	5,040,000,000	5,093,717,479	101.07	19.76
2018	5,200,000,000	5,100,912,333	98.09	0.14
2019	6,000,000,000	5,108,664,333	85.14	0.15
2020	5,200,000,000	4,327,896,492	83.23	(15.28)
2021	5,200,000,000	4,174,105,667	80.27	(3.55)
Rata-Rata Pertumbuhan				0.24

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe diterima dari jasa giro pada kas daerah, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan dana kapistasi JKN pada FKTP, dan pendapatan zakat. Kontribusi dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan penyumbang terbesar dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama kurun waktu 2017-2021 sangat berfluktuatif setiap tahunnya. Capaian tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 98,73%. Sedangkan capaian terendah terjadi pada Tahun 2021 yang hanya sebesar 76,25%. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir menunjukkan angka sebesar 1,34%. Perkembangan capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

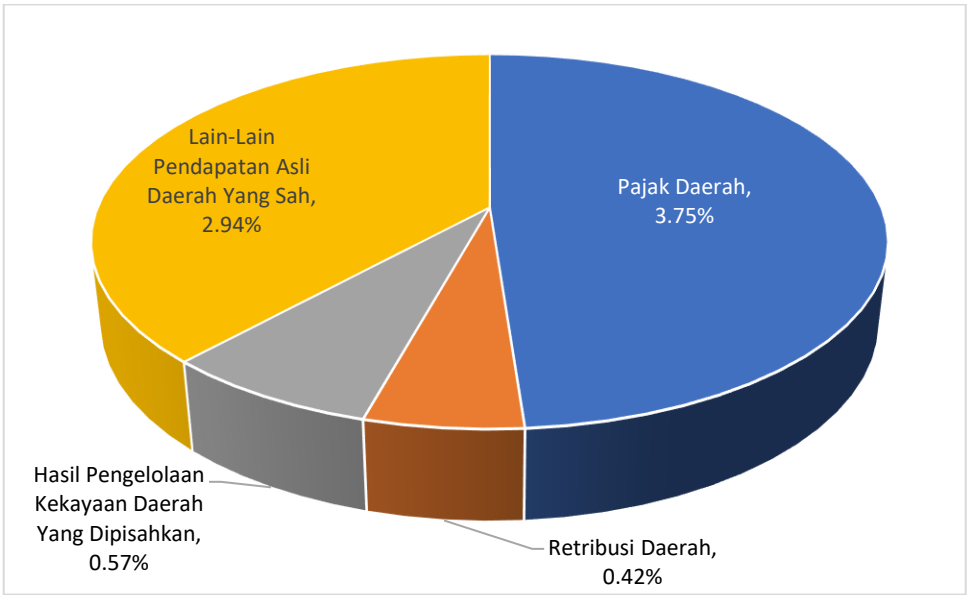
Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	26,336,132,695	26,002,294,619	98.73	9.44
2018	25,476,617,843	23,573,316,134	92.53	(9.34)
2019	31,176,617,843	24,112,595,849	77.34	2.29
2020	25,432,982,000	22,973,476,514	90.33	(4.72)
2021	32,854,186,481	25,052,503,580	76.25	9.05
Rata-Rata Pertumbuhan				1.34

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Secara keseluruhan selama periode 5 tahun terakhir (2017-2021) kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan tren yang positif yaitu sebesar 7,68%. Kontribusi terbesar diberikan oleh Pajak Daerah sebesar 3,75%, selanjutnya Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi sebesar 2,94%. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Retribusi Daerah masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,57% dan 0,42%. Untuk melihat kontribusi komponen Pendapatan Asli

Daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Kontribusi Komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah).

3.1.2.2 Pendapatan Transfer

3.1.2.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45, bahwa Pendapatan Transfer terdiri atas Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Bila dikelompokkan Pendapatan Transfer Kota Lhokseumawe yang berasal dari Pemerintah Pusat terdiri atas : a) Dana Perimbangan; b) Dana Insentif Daerah (DID); dan c) Dana Desa.

a. Dana Perimbangan

Kelompok dana perimbangan, secara umum capaian realisasi selama kurun waktu Tahun 2017-2021 terjadi fluktuasi. Realisasi dana perimbangan Tahun 2017 sebesar Rp.644,21 Milyar, selanjutnya Tahun 2018 realisasinya turun menjadi Rp.586,25 Milyar. Pada Tahun 2019 realisasi dana perimbangan meningkat

menjadi Rp.607,29 Milyar, namun pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi kembali terjadi penurunan menjadi Rp.550,23 Milyar dan Rp.529,66 Milyar. Secara garis besar rata-rata pertumbuhan dana perimbangan mengalami pertumbuhan minus selama kurun waktu 2017-2021, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus (4,99%). Untuk mengetahui perkembangan realisasi dana perimbangan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	657,119,886,340	644,213,912,781	98.04	(6.41)
2018	630,806,778,932	586,255,868,918	92.94	(9.00)
2019	641,275,568,101	607,297,641,452	94.70	3.59
2020	572,949,713,235	550,237,241,526	96.04	(9.40)
2021	536,388,806,449	529,665,657,662	98.75	(3.74)
Rata-Rata Pertumbuhan				(4.99)

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Besarnya proporsi dana perimbangan sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Realisasi DAU Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Capaian realisasi DAU Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir tercapai 100%, hanya pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 99,33%. Dari sisi realisasi anggaran selama dua tahun terakhir (2020 dan 2021) terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan erat dengan penurunan dana transfer Pemerintah Pusat melalui DAU karena besarnya peruntukan anggaran tersebut dalam menangani pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Dalam hal penanganan pandemi tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan *refocusing* anggaran. Secara umum rata-rata pertumbuhan DAU Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan minus, dengan rata-rata sebesar minus (2,12%). Untuk mengetahui perkembangan DAU Kota Lhokseumawe dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	459,628,037,000	459,628,037,000	100.00	(1.76)
2018	459,628,037,000	459,628,037,000	100.00	-
2019	469,471,445,000	469,471,445,000	100.00	2.14
2020	428,195,816,000	425,306,246,000	99.33	(9.41)
2021	418,626,656,000	418,626,656,000	100.00	(1.57)
Rata-Rata Pertumbuhan				(2.12)

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Dana perimbangan berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap proporsi Pendapatan Kota Lhokseumawe adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK yang diterima oleh Kota Lhokseumawe terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terdiri dari DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, dan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan DAK Non Fisik terdiri dari Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, BOP PAUD, BO Kesehatan, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, BOKB, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Capil), Pengawasan Obat dan Makanan, dan BOP Pendidikan Kesetaraan.

Alokasi DAK Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2017-2021 sangat berfluktuatif, baik dari target anggaran yang direncanakan maupun realisasi anggaran yang digunakan. Alokasi DAK tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar Rp.141,07 Milyar dengan realisasi mencapai Rp.135,31 Milyar atau 95,92%. Sedangkan alokasi DAK terendah pada Tahun 2020 sebesar Rp.83,47 Milyar dengan realisasi sebesar Rp.81,62 Milyar atau 97%. Secara garis besar pertumbuhan realisasi anggaran DAK Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan minus, dengan rata-rata pertumbuhan minus (12,78%). Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan DAK Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	141,073,122,586	135,319,889,183	95.92	(23.78)
2018	102,792,279,000	93,948,851,900	91.40	(30.57)
2019	115,030,278,000	103,034,976,140	89.57	9.67
2020	83,475,179,000	81,627,891,528	97.79	(20.78)
2021	89,958,488,000	82,921,408,612	92.18	1.58
Rata-Rata Pertumbuhan				(12.78)

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Komponen lainnya dalam dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak yang juga memberikan andil pada proporsi pendapatan daerah Kota Lhokseumawe. Realisasi DBH Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2017-2021 sangat berfluktuasi setiap tahunnya. Jika dilihat dari realisasi, yang tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.49,26 Milyar, dan yang terendah pada Tahun 2021 sebesar Rp.28,11 Milyar. Dari sisi capaian realisasi, pada Tahun 2021 persentase capaian DBH melebihi dari target yang telah direncanakan mencapai 101,13%. Sedangkan capaian realisasi terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 47,79%. Rata-rata pertumbuhan realisasi DBH Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 minus (4,63%).

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	56,418,726,754	49,265,986,598	87.32	14.66
2018	68,386,462,932	32,678,980,018	47.79	(33.67)
2019	56,773,845,101	34,791,220,312	61.28	6.46
2020	61,278,718,235	43,303,103,998	70.67	24.47
2021	27,803,662,449	28,117,593,050	101.13	(35.07)
Rata-Rata Pertumbuhan				(4.63)

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

b. Dana Desa (DD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Capaian realisasi dana desa Kota Lhokseumawe dapat dikategorikan sangat tinggi yang mencapai di atas 98% ke atas, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa dana desa di Kota Lhokseumawe dapat disalurkan seluruhnya kepada desa. Untuk mengetahui perkembangan dana desa Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Dana Desa (DD)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	60,910,060,040	60,285,819,000	98.98	23.55
2018	54,102,499,000	53,113,862,465	98.17	(11.90)
2019	60,285,819,000	60,285,819,000	100.00	13.50
2020	60,285,819,000	60,285,819,000	100.00	-
2021	61,983,149,000	61,858,474,338	99.80	2.61
Rata-Rata Pertumbuhan				5.55

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

3.1.2.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer antar daerah terdiri atas (a) pendapatan bagi hasil, dan (b) bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil dalam struktur pendapatan transfer antar daerah Kota Lhokseumawe bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi, dan transfer Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) porsi Kota Lhokseumawe, serta bantuan keuangan dari provinsi.

a. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Provinsi

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dalam struktur pendapatan Kota Lhokseumawe bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak rokok. Realisasi DBH pajak dari provinsi Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 capaian realisasi DBH pajak dari provinsi melebihi target yang direncanakan hingga mencapai 106,06%. Capaian terendah terjadi pada Tahun 2018 yang hanya mencapai 65,47%. Dari sisi pertumbuhan, DBH pajak dari provinsi menunjukkan tren yang positif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,27%. Untuk mengetahui perkembangan DBH pajak dari provinsi Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi DBH Pajak dari Provinsi
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	32,575,973,478	23,121,731,293	70.98	(8.28)
2018	35,594,341,606	23,302,809,346	65.47	0.78
2019	25,177,808,119	26,704,399,172	106.06	14.60
2020	34,763,380,046	31,220,106,455	89.81	16.91
2021	29,372,956,024	27,269,583,603	92.84	(12.65)
Rata-Rata Pertumbuhan				2.27

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

b. Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 183 ayat 1 mengamanatkan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dalam Qanun Aceh Nomor 2

Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, pada pasal 10 menyebutkan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otsus juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Dari data realisasi pendapatan yang bersumber DOKA selama kurun waktu 2017-2021, alokasi anggaran yang bersumber dari DOKA Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 sebesar Rp.87,941 Milyar dan terealisasi 100%. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya terus terjadi penurunan, hingga pada Tahun 2021 realisasi DOKA Kota Lhokseumawe sebesar Rp.71,693 Milyar. Rata-rata pertumbuhan DOKA Kota Lhokseumawe menunjukkan tren negatif yaitu minus (0,05%). Untuk melihat perkembangan DOKA Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	87,941,476,679	87,941,476,679	100.00	19.27
2019	79,412,072,351	79,402,072,351	99.99	(9.71)
2020	77,796,396,799	72,678,056,143	93.42	(8.47)
2021	74,560,843,857	71,693,169,795	96.15	(1.36)
Rata-Rata Pertumbuhan				(0.05)

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Terhitung Tahun 2023 sampai dengan 2027, sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa dana OTSUS akan menurun hingga 50% dan pada Tahun 2028 Aceh tidak akan lagi menerima dana OTSUS. Hal tersebut tentu akan berimbas pada penerimaan Kota Lhokseumawe.

3.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber utama lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama kurun waktu 5 tahun (2017-2021) menunjukkan tren yang positif yaitu sebesar 8,31%. Realisasi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar Rp.24,091 Milyar dari target yang direncanakan Rp.33,781 Milyar. Realisasi terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar Rp.20,114 Milyar dengan target yang direncanakan sebesar Rp.22,079 Milyar. Untuk mengetahui perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	23,622,800,000	20,547,760,000	86.98	24.94
2018	22,079,920,000	20,114,160,000	91.10	(2.11)
2019	31,591,560,000	21,366,880,000	67.63	6.23
2020	30,822,200,000	21,979,375,000	71.31	2.87
2021	33,781,744,000	24,091,712,000	71.32	9.61
Rata-Rata Pertumbuhan				8.31

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

3.1.3 Belanja Daerah Kota Lhokseumawe

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 49 sampai dengan pasal 54, pengelompokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja dikelompokkan atas : a) Belanja Operasi, b) Belanja Modal, c) Belanja Tak Terduga, dan d) Belanja Transfer.

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 rata-rata realisasi belanja daerah Kota Lhokseumawe mencapai 90,39%. Realisasi ini

terdiri dari belanja operasi sebesar 89,14%, belanja modal sebesar 91,95%, belanja tak terduga sebesar 58,36%, dan belanja transfer sebesar 94,70%.

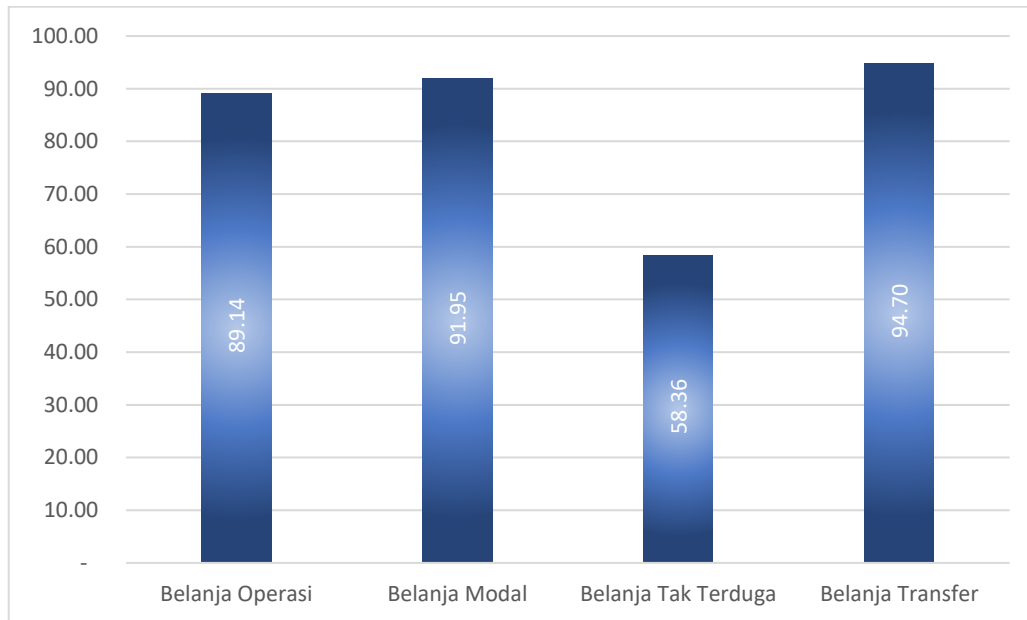
Dari keempat kelompok belanja di atas, rata-rata realisasi tertinggi berada pada kelompok belanja transfer, selanjutnya kelompok belanja modal, kelompok belanja operasi, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja transfer memuat tentang belanja bagi hasil kepada desa, dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Realisasi masing-masing kelompok belanja selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.16
Realisasi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

Uraian	Realisasi Tahun (%)					Rata-Rata (%)
	2017	2018	2019	2020	2021*)	
BELANJA DAERAH	91.36	90.08	92.09	90.08	88.33	90.39
Belanja Operasi	90.19	88.00	90.49	88.67	88.33	89.14
Belanja Pegawai	91.44	90.69	94.01	95.51	95.38	93.41
Belanja Barang dan Jasa	85.36	81.79	88.59	78.21	78.55	82.50
Belanja Hibah	93.04	78.58	34.86	46.08	89.39	68.39
Belanja Bantuan Sosial	87.71	87.65	90.05	216.32	88.15	113.97
Belanja Modal	93.32	96.58	94.38	94.00	81.48	91.95
Belanja Tak Terduga	41.28	61.69	25.59	80.60	82.67	58.36
Belanja Transfer	93.47	92.80	96.80	92.01	98.42	94.70
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	27.33	34.34			51.30	37.66
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	95.43	94.34	100.27	97.96	99.89	97.58

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah).

Gambar 3.3
Realisasi Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021 (dalam persen)



Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah).

3.1.3.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi tersebut antara lain meliputi Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah. Selama kurun waktu 5 tahun (2017-2021) pada kelompok belanja operasi, belanja pegawai mencapai realisasi rata-rata sebesar 93,41%. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan DPRK serta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota. Pengelompokan belanja pegawai diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya belanja barang dan jasa menyumbangkan realisasi sebesar 82,50%. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa tahun anggaran

operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Komponen lainnya pada belanja operasi yaitu belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang masing-masing menyumbangkan realisasi sebesar 68,39% dan 113,97% selama kurun waktu tahun 2017-2021. Penggunaan dana hibah, dan belanja bantuan sosial mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Lhokseumawe ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain untuk kegiatan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat, panti sosial, bantuan sosial dan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim, fakir miskin, bantuan lansia 70 tahun ke atas, santunan uang duka kematian, dan lain-lain.

3.1.3.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Lhokseumawe yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rata-rata realisasi belanja modal selama kurun waktu 2017-2021 sebesar 91,95%. Capaian realisasi belanja modal tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 96,58%, Tahun 2019 mencapai 94,38%, Tahun 2020 sebesar 94,00%, dan Tahun 2017 sebesar 93,32%. Sedangkan pada Tahun 2021 capaian realisasi belanja modal Kota Lhokseumawe sebesar 81,48%, yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok belanja modal, yaitu : 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan 5) Belanja modal Aset Tetap Lainnya.

3.1.3.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata realisasi belanja tak terduga selama kurun waktu 2017-2021 hanya mencapai 58,36%. Capaian realisasi tertinggi belanja tak terduga terjadi pada Tahun 2021 sebesar 82,67%, sedangkan untuk empat tahun sebelumnya capaian realisasi belanja tak terduga Kota Lhokseumawe berada pada capaian di bawah 80%.

3.1.3.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 45, pengelompokan Belanja Transfer dibagi ke dalam 2 belanja, yaitu belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan hasil pembagian pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, dan belanja bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk transfer dana desa. Dari 2 kelompok belanja tersebut komponen belanja bantuan keuangan memiliki proporsi paling besar. Realisasi belanja bantuan keuangan memiliki rata-rata realisasi paling besar mencapai 97,58%, sedangkan rata-rata realisasi belanja bagi hasil hanya mencapai 37,66% selama kurun waktu 2017-2021.

3.1.4 Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 70 sampai dengan pasal 82 menyebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri atas : a) penerimaan pembiayaan, dan b) pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama kurun waktu 2017-2021 penerimaan pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya. Selama 5 tahun terakhir (2017-2021) realisasi penerimaan pembiayaan tercapai 100% sebagaimana target yang direncanakan, dengan rata-rata pertumbuhan 96,04%. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	24,780,603,121	24,780,603,121	100.00	297.73
2018	55,333,411,784	55,333,411,783	100.00	123.29
2019	26,959,045,995	26,959,045,995	100.00	(51.28)
2020	16,993,040,419	16,993,040,419	100.00	(36.97)
2021	42,045,667,333	42,045,667,333	100.00	147.43
Rata-Rata Pertumbuhan				96.04

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk membiayai : pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe selama periode Tahun 2017-2021 digunakan untuk penyertaan modal pada

perusahaan. Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah mencapai 100% setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 86,62%.

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Rp.	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp.	%	
2017	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	-
2018	2,300,000,000	2,300,000,000	100.00	130.00
2019	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	(56.52)
2020	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	50.00
2021	6,144,640,000	6,144,640,000	100.00	309.64
Rata-Rata Pertumbuhan				86.62

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

3.1.5 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perkembangan neraca daerah Tahun 2017-2021, analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19
Tingkat Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi Tahun					Tingkat Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021*)	
1.	ASET	1,572,886,387,732	1,537,493,771,796	1,839,921,956,063	1,950,181,640,698	2,172,837,887,728	8.41%
1.1	Aset Lancar	71,454,452,845	47,891,068,771	38,830,128,674	90,577,269,577	163,479,881,618	22.99%
1.1.1	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
1.1.2	Kas / Setara Kas	55,346,327,231	27,275,911,337	17,049,566,271	42,060,940,060	115,118,423,036	20.09%
1.1.3	Piutang	11,293,394,937	15,916,884,289	16,790,825,843	20,477,189,298	17,736,843,617	11.95%
1.1.4	Biaya Dibayar Dimuka	276,112,517	209,640,654	245,789,573	376,197,464	414,508,565	10.69%
1.1.5	Persediaan	4,538,618,160	4,488,632,492	4,743,946,987	27,662,942,754	30,210,106,399	60.62%
1.2	Aset Tidak Lancar	1,501,431,934,887	1,489,602,703,025	1,801,091,827,389	1,859,604,371,122	2,009,358,006,110	7.56%
1.2.1	Investasi Jangka Panjang	32,137,605,063	30,184,570,715	27,964,491,845	23,315,741,521	29,460,381,521	-2.15%
1.2.2	Aset Tetap	1,443,566,365,752	1,431,639,929,567	1,732,652,094,359	1,796,197,608,551	1,934,375,915,234	7.59%
1.2.3	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
1.2.4	Aset Lainnya	25,727,964,072	27,778,202,743	40,475,241,185	40,091,021,050	45,521,709,355	15.33%
	JUMLAH ASET	1,572,886,387,732	1,537,493,771,796	1,839,921,956,063	1,950,181,640,698	2,172,837,887,728	8.41%
2.	KEWAJIBAN	94,234,177,887	24,211,073,407	16,071,470,938	44,902,677,743	92,534,107,220	-0.45%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	94,234,177,887	24,211,073,407	16,071,470,938	44,902,677,743	92,534,107,220	-0.45%
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
3.	EKUITAS DANA	1,478,652,209,845	1,513,282,698,388	1,823,850,485,125	1,905,278,962,956	2,080,303,780,508	8.91%
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,572,886,387,732	1,537,493,771,796	1,839,921,956,063	1,950,181,640,698	2,172,837,887,728	8.41%

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan penyajian data neraca diatas, dapat diketahui tentang jumlah aset, baik aset lancar maupun aset tidak lancar serta kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

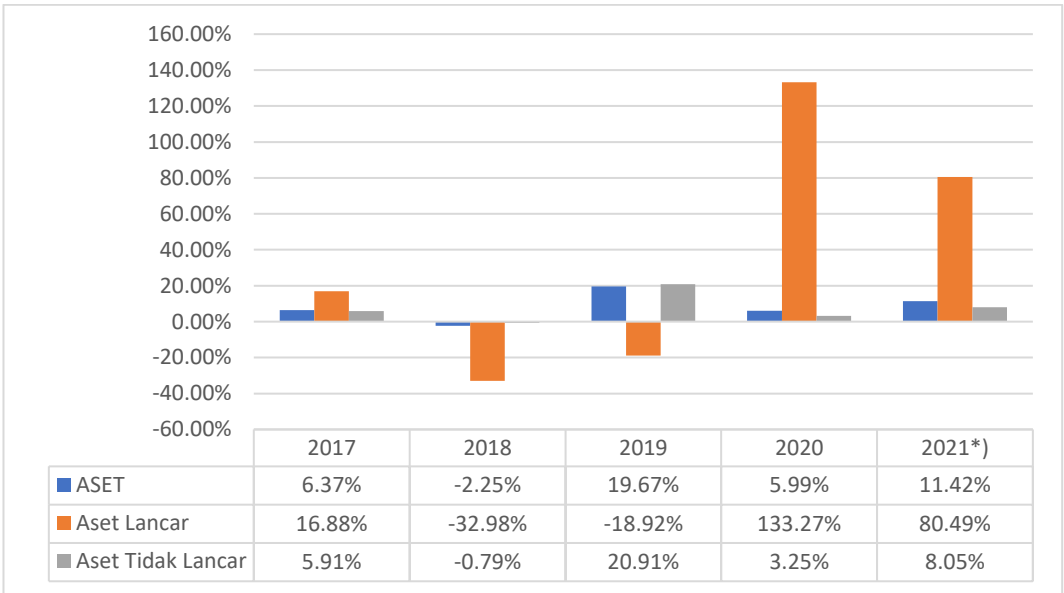
Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi dua jenis, yaitu : a) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang belanja; utang retensi; utang pendapatan diterima dimuka; dan utang jangka pendek lainnya; b) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri pemerintah pusat, dan utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya ekuitas dana menjelaskan tentang kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3.19 dapat dijelaskan bahwa kondisi Neraca Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan positif selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021) dengan capaian pertumbuhan mencapai 8,41%. Pada Tahun 2017 total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar Rp.1,572 Triliyun, pada Tahun 2018 sebesar Rp.1,537 Triliyun, pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp.1,839 Triliyun, dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp.1,950 Triliyun. Sedangkan pada Tahun 2021 berdasarkan neraca sementara yang belum diaudit total aset Pemerintah Kota Lhokseumawe mencapai Rp.2,172 Triliyun.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir tingkat pertumbuhan aset lancar dan aset tidak lancar menunjukkan pertumbuhan positif, dimana pertumbuhan aset lancar mencapai 22,99%, dan pertumbuhan aset tidak lancar sebesar 7,56%. Akan tetapi jika ditinjau pertumbuhan pertahunnya, pertumbuhan aset Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat berfluktuatif setiap tahunnya. Pada

Tahun 2017 pertumbuhan total aset sebesar 6,37%, pada Tahun 2018 pertumbuhannya mengalami penurunan mencapai minus (2,25%). Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe kembali mengalami pertumbuhan positif pada Tahun 2019 mencapai 19,67%, pada Tahun 2020 sebesar 5,99%, dan pada Tahun 2021 tumbuh mencapai 11,42%.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Aset Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe.

Dalam rangka memperoleh gambaran perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*) dan rasio solvabilitas (*solvability ratio*). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang Likuid.

Tingkat likuiditas dapat diukur dengan beberapa cara, diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat

digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (*Current Ratio*). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lama untuk diuangkan dibanding aset lain. Cara ini lebih dikenal dengan *Quick Ratio Analysis*. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio *lavarage* digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio *lavarage* adalah *total debt to equity ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas) dan *total debt to total asset ratio* (rasio hutang terhadap total aktiva). Rasio keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.20
Analisis Rasio Keuangan Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

Balance Sheet Ratios		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*)
Liquidity Ratio	Current Ratio	0.76	1.98	2.42	2.02	1.77
	Quick Ratio	0.71	1.79	2.12	1.40	1.44
Solvability Ratio	Debt to Assets Ratio	5.99	1.57	0.87	2.30	4.26
	Debt to Equity Ratio	0.06	0.02	0.01	0.02	0.04

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio lancar (*current ratio*) secara umum menunjukkan angka di atas satu, hal ini menunjukkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) jauh di atas jumlah hutang lancar, dengan kata lain kemampuan Kota Lhokseumawe dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya masih tinggi.

Selanjutnya *Quick Ratio* Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan angka di atas satu, yang berarti bahwa kemampuan aktiva lancar likuid mampu menutupi hutang lancar. Demikian juga dengan *total debt to total*

assets ratio dan *debt to equity ratio* secara umum menunjukkan batas aman (solvabel) dalam artian bahwa porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. Hal ini bermakna bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat mempunyai kemampuan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBK yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efesiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBK secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan agar memperoleh hasil yang optimal, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe.

Sementara untuk kebijakan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai semua program dan kegiatan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus merencanakan, melaksanakan, mengendalikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana keuangan pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan melalui pengelolaan APBD yang baik dapat menggapai cita-cita dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri.

Belanja aparatur menjadi perhatian yang serius dalam pengeluaran anggaran daerah tiap tahunnya. Dominasi belanja pegawai di APBK pada setiap tahun anggaran akan mengurangi

kesempatan belanja non aparatur yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran diketahui berkisar antara 35,07% - 41,78%, dengan rata-rata persentase mencapai 38,64%. Hal ini menunjukkan bahwa APBK Lhokseumawe relatif lebih baik dari sisi belanja, karena proporsi belanja aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBK Lhokseumawe, dan pengeluaran dalam APBK lebih banyak digunakan untuk belanja program pelayanan non aparatur.

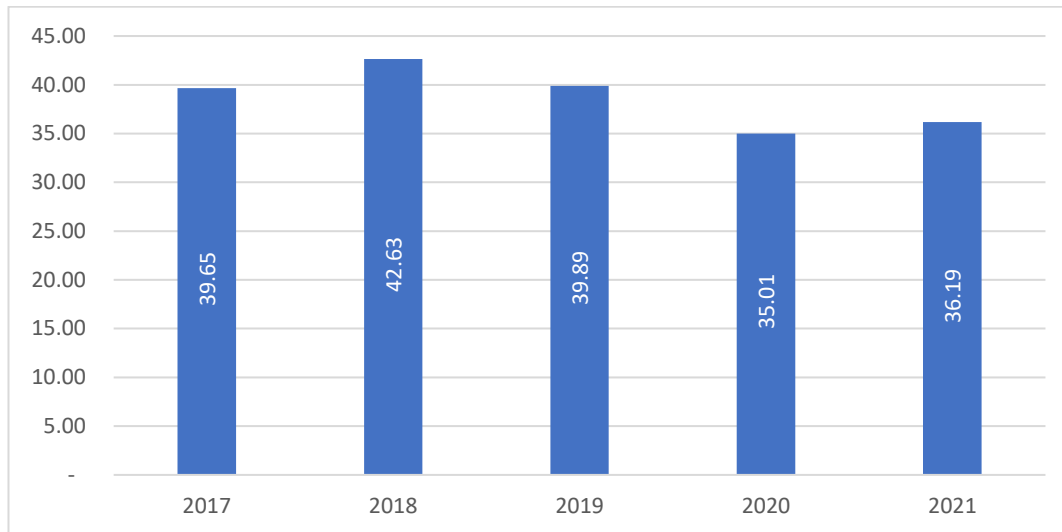
Tabel 3.21
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
2017	345,445,392,215	871,168,392,236	39.65%
2018	331,577,842,590	777,780,033,294	42.63%
2019	348,841,484,123	874,465,604,518	39.89%
2020	283,796,919,084	810,615,344,069	35.01%
2021	283,308,654,473	782,796,321,455	36.19%
Rata-Rata	318,594,058,497	823,365,139,115	38.69%

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah)

Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama kurun waktu Tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Dimana hanya pada Tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan mencapai 42,63% jika dibandingkan dengan Tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan yang signifikan dari gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya. Sedangkan Tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang signifikan mencapai 39,89% dan 35,01%. Penurunan ini dikarenakan adanya pengalihan belanja untuk penanganan Covid-19 di Kota Lhokseumawe. Realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Salah satu kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Defisit anggaran merupakan sekian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan di masa depan dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 kondisi surplus/(defisit) riil anggaran Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Surplus / (Defisit) Riil Anggaran Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	901,721,200,897	749,405,667,507	864,499,598,943	835,667,970,983	793,150,537,641
	<i>dikurangi realisasi :</i>					
2	Belanja Daerah	870,168,392,236	775,480,033,294	873,465,604,518	809,115,344,069	776,651,681,455
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,000,000,000	2,300,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	6,144,640,000
	Surplus / (Defisit) Riil	30,552,808,661	(28,374,365,787)	(9,966,005,575)	25,052,626,914	10,354,216,185

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah)

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, Kota Lhokseumawe dua tahun berturut-turut mengalami defisit yaitu pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, sedangkan anggaran Tahun 2017, 2020, dan 2021 mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada tahun-tahun tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan tahun-tahun berikutnya. Defisit anggaran yang terjadi selama dua tahun berturut-turut disebabkan karena meningkatnya kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan.

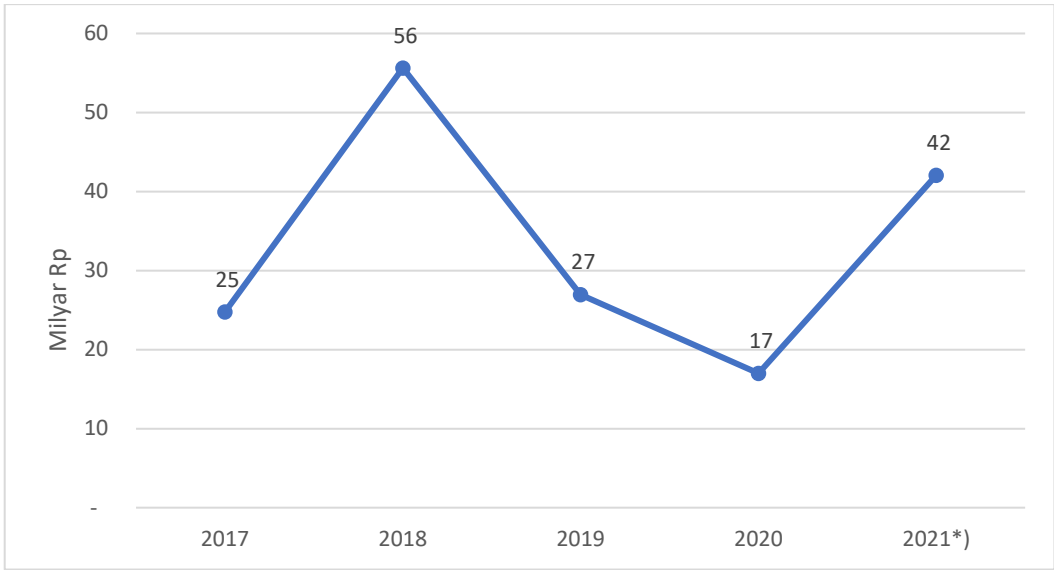
Dalam rangka menutupi defisit riil diperoleh dari sumber penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Gambaran realisasi SiLPA selama 5 tahun terakhir (2017-2021) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Realisasi SiLPA Tahun 2017-2021 Kota Lhokseumawe

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	24,780,603,121	55,333,411,783	26,959,045,995	16,993,040,419	42,045,667,333

Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah)

Gambar 3.6
Realisasi SiLPA Tahun 2017-2021 Kota Lhokseumawe



Sumber : Laporan Realisasi APBK 2017-2020 (*Audited*) dan 2021 (*Unaudited*), BPKD Kota Lhokseumawe, (diolah)

Analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dilakukan untuk memberikan gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBK tahun-tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa tren realisasi SiLPA selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. SiLPA tertinggi adalah pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.55,6 Milyar, dan SiLPA terendah adalah pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.16,9 Milyar.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Lhokseumawe dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan

4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMK Tahun 2017-2022, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) Isu-isu terkini yang mempengaruhi jalannya pembangunan

4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik lokasi dan wilayah

Dari sisi karakteristik lokasi dan wilayah, terutama berdasarkan kondisi hidrologi, kondisi air tanah di Kota Lhokseumawe secara umum merupakan air payau sehingga masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih, yang terlihat pada peta Hidrologi pada RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.

Permasalahan lain terkait aspek geografi yaitu kondisi ketinggian lahan di beberapa lokasi cukup rendah, sehingga rentan mengalami banjir pasang pada waktu-waktu tertentu. Pada RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Hal ini menyebabkan Kota Lhokseumawe rentan mengalami banjir genangan yaitu air buangan ataupun air hujan yang tidak dapat mengalir ke badan air terdekat sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang lebih rendah dalam suatu kawasan. Berdasarkan data Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021, masih terdapat luasan daerah yang tergenang pada tahun 2017 sebesar 8 Ha yang terus menurun hingga 2021 pada luasan sebesar 6.46 Ha. Namun demikian hal ini masih menjadi persoalan yang perlu di selesaikan oleh Kota Lhokseumawe, dimana Daerah yang tergenang akibat curah hujan yang tinggi dan terjadi genangan selama ± 6 jam adalah Gampong Hagu Teungoh (Komplek Pemda), Gampong Hagu Barat Laut, Gampong Tumpok Teungoh dan sebagian daerah Kota Lhokseumawe (Jalan Perdagangan Ujung sampai Jalan Sukaramai). Untuk Kecamatan Muara Satu pada Gampong Blang Pulo sepanjang Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Trieng, Batuphat dan untuk Kecamatan Muara Dua terdapat pada Gampong Blang Poroh dan Cunda.

B. Wilayah Rawan Bencana

Kota Lhokseumawe juga merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Berdasarkan catatan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Lhokseumawe Tahun 2022, selama kurun waktu 2017-2022 kejadian bencana di Kota Lhokseumawe tercatat paling banyak terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 13 kali antara lain banjir sebanyak 1 kali, putting beliung sebanyak 7 kali dan tanah longsor sebanyak 5 kali. Memang pada Tahun 2018-2022 terjadi penurunan jumlah bencana yang tercatat yaitu 2018 sebanyak 3 kali,

2019 sebanyak 2 kali, 2020 sebanyak 3 kali dan pada Tahun 2021 sebanyak 2 kali.

Banjir dan Puting beliung merupakan bencana yang dapat dikatakan terjadi setiap tahunnya. Sementara tanah longsor dan gelombang ekstrim/abrasi terjadi tidak setiap tahun, tetapi tetap menghantui masyarakat khususnya yang berada di tepian pantai dan perbukitan. Oleh karena itu upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam tetap harus mendapat perhatian penting dalam mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe.

Salah satu upaya pencegahan dan penanganan bencana yang telah dilakukan kota Lhokseumawe adalah dengan memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) pada bulan November 2021, yang diharapkan bisa mendorong masyarakat sadar bencana, sehingga bisa meminimalisir kerugian akibat bencana di daerah tersebut.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memberikan informasi tentang kategori bencana, yaitu: kategori rendah (<36), kategori sedang (36-144) dan kategori tinggi (>144). Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160.

Di samping itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 juga memberikan informasi beberapa kawasan rawan bencana dimana kota Lhokseumawe memiliki kerawanan bencana dalam hal kawasan gelombang pasang, kawasan rawan tsunami karena berhadapan dengan Selat Malaka, kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan angin badai karena berada di wilayah pesisir utara – timur Aceh.

C. Demografi

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kota Lhokseumawe mengalami koreksi yang sangat signifikan setelah dilaksanakannya sensus penduduk 2020, dimana pada Tahun 2021 berjumlah 188.713 jiwa sementara pada tahun sebelumnya berjumlah 207.202 jiwa.

Permasalahan distribusi kepadatan penduduk masih menjadi isu utama di bidang kependudukan kota Lhokseumawe, dimana Kecamatan Banda Sakti memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi dibandingkan 3 kecamatan lainnya. Namun, kewenangan di bidang pengendalian penduduk belum termasuk tupoksi di Pemerintah Kota Lhokseumawe

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan terkini antara lain:

A. Pertumbuhan Ekonomi

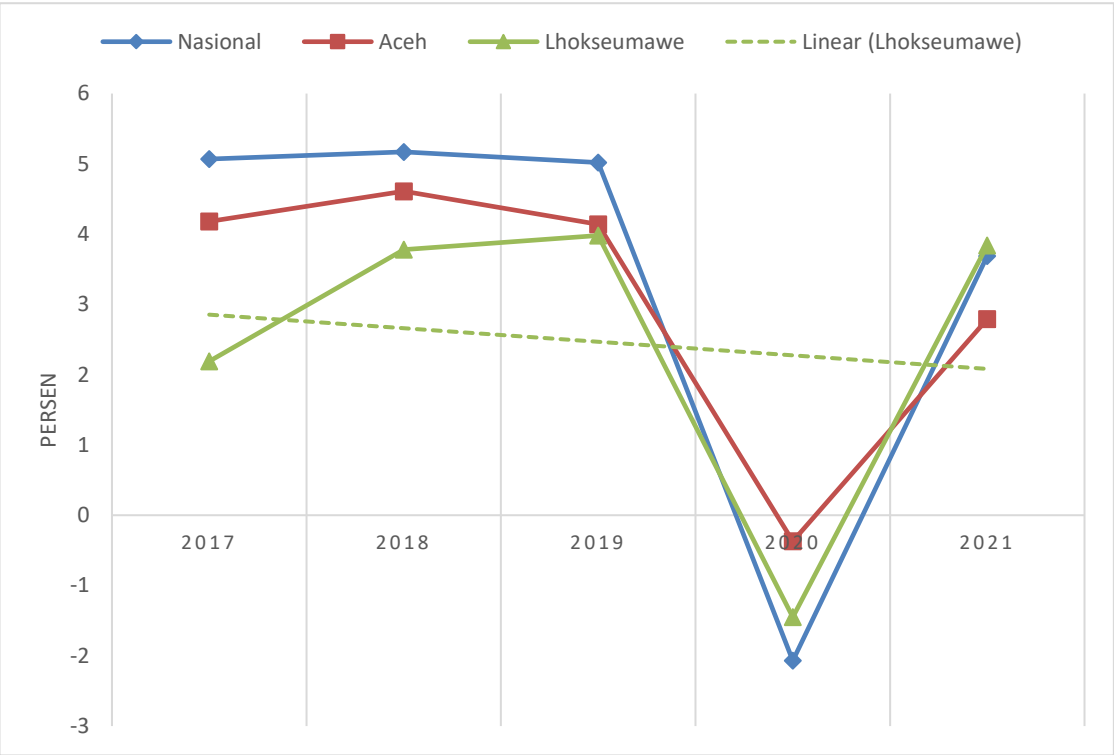
Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi nasional, capaian dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 juga terjadi pertumbuhan stagnan pada rentang Tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan angka pertumbuhan berturut-turut yaitu 5,07%, 5,17% dan 5,02%. Sementara pada Tahun 2020 juga terjadi pertumbuhan negatif pada angka -2,07% yang kemudian meningkat lagi menjadi 3,69% pada Tahun 2021.

Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Aceh, terjadi peningkatan yang tidak signifikan pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 diangka 4,18% dan 4,61%. Namun pada Tahun 2019 kembali menurun landai di angka 4,14% dan pada tahun 2020 turun drastis di angka -0,37%. Pada Tahun 2021, kembali terjadi pertumbuhan positif yaitu 2,79%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih rendah dan terjadi kontraksi pada Tahun 2020 yaitu pada angka -1,80%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid 19, dimana pada rentang waktu 2017–2019 sebenarnya pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe mengalami tren kenaikan yang cukup baik yaitu pada angka 2,19%, 3,78% dan 3,98%. Setelah menurun di Tahun 2020, pada Tahun 2021 terjadi pertumbuhan positif kembali pada angka 3.84%. Namun, secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada dibawah nasional dan Aceh, dan jika

ditarik secara linear, maka tergambar bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe mengalami penurunan meskipun tidak terlalu tajam.

Gambar 4.1
 Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

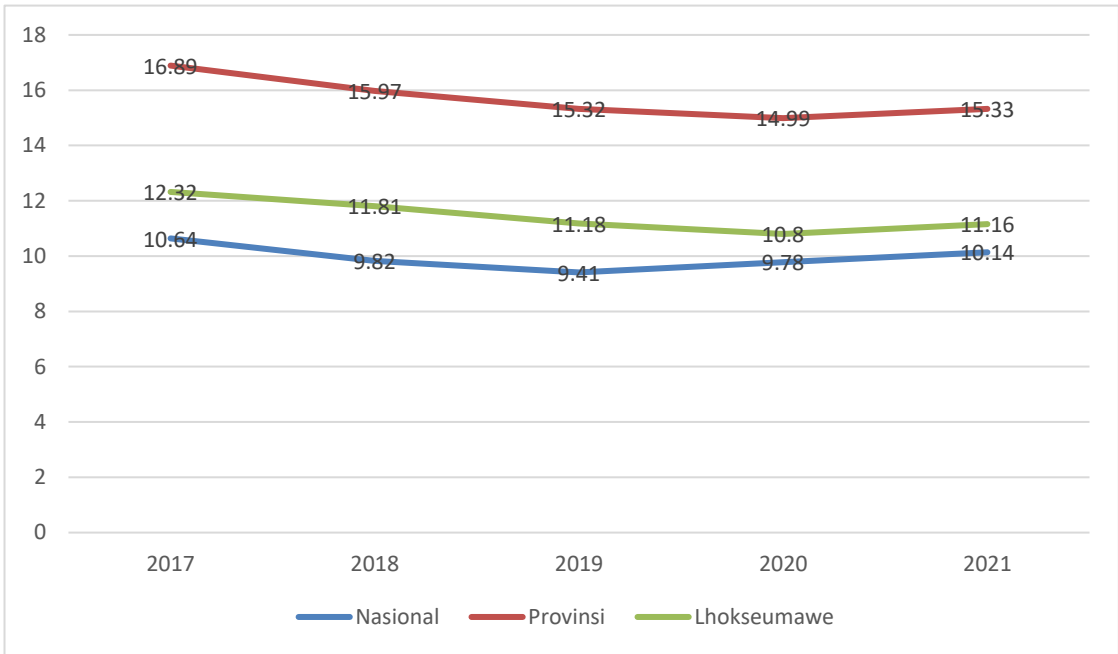


Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2022

B. Angka Kemiskinan

Serupa halnya dengan pertumbuhan ekonomi, Angka Kemiskinan Kota Lhokseumawe mengalami tren kenaikan di Tahun 2020 – 2021 setelah mengalami tren penurunan yang landai pada rentang waktu 2017-2019. Pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, angka kemiskinan Kota Lhokseumawe berturut turut adalah 12,32%, 11,81% dan 11,18%. Sedangkan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, angka kemiskinan Kota Lhokseumawe adalah 10,8% dan 11,16%. Angka kemiskinan ini memang berada pada peringkat ketiga terbaik se-Aceh, namun demikian masih lebih tinggi dengan angka target kemiskinan nasional. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 4.2 dibawah ini.

Gambar 4.2 Angka Kemiskinan Kota Lhokseumawe



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe Tahun 2022

C. Laju Inflasi

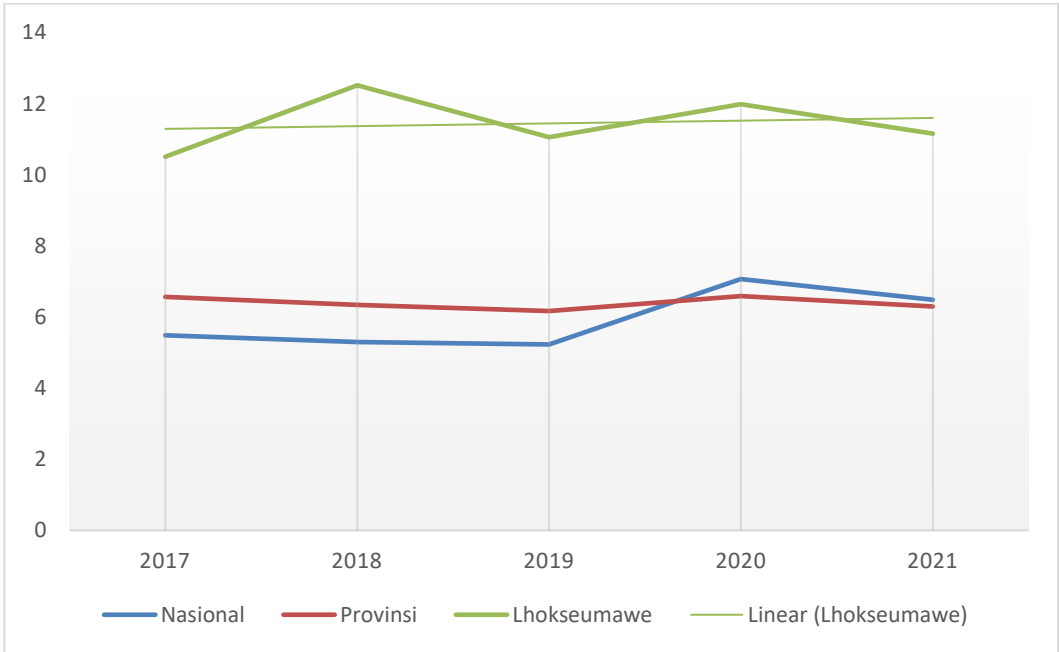
Laju Inflasi yang fluktuatif mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Inflasi di Kota Lhokseumawe juga sangat fluktuatif dimana pada Tahun 2017 senilai 2.87%, pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 2,05% dan 1,20%. Pada tahun 2020, inflasi Kota Lhokseumawe meningkat pesat menjadi 3.55% dan pada tahun 2021 turun lagi menjadi 1,97%. Kondisi laju inflasi Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional khususnya pada Tahun 2020 dan 2021 yang dapat dilihat pada grafik inflasi Kota Lhokseumawe sesuai data BPS Tahun 2022 pada BAB II.

D. Tingkat Pengangguran di Kota Lhokseumawe masih tinggi

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari 2017 hingga Tahun 2021 yaitu 10,51%, 12,52%, 11,06%, 11,99% dan 11,16%. Sementara itu angka pengangguran nasional dan provinsi pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021 berada dikisaran 5% sampai dengan 7%. Hal ini menunjukkan

permasalahan yang cukup serius dalam hal ketenagakerjaan dan trend menunjukkan angka pengangguran berpotensi terus meningkat.

**Gambar 4.3 Data Pengangguran
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2022

4.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pilihan. Untuk masing-masing permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

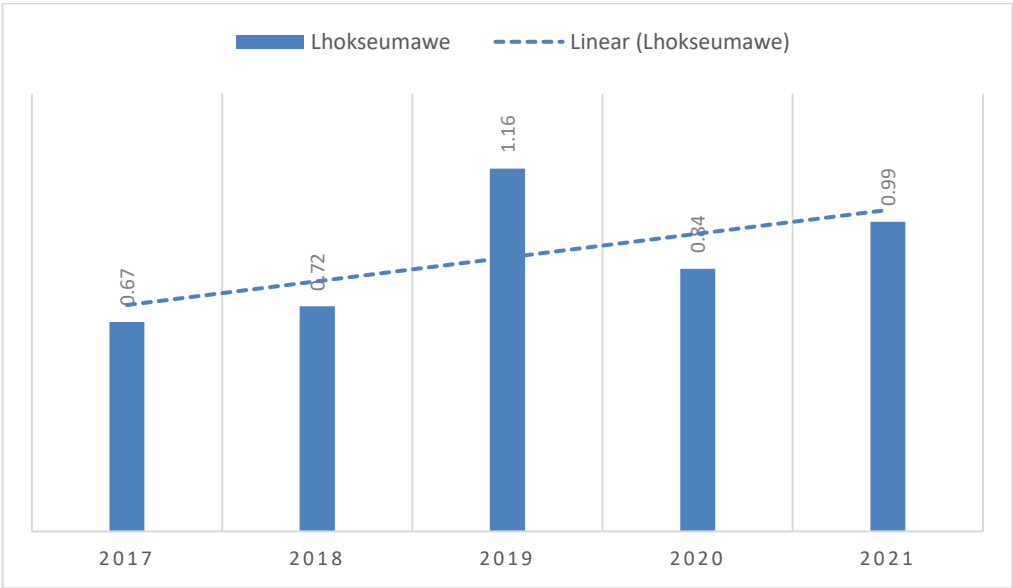
A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

- 1. belum optimalnya pengelolaan ZISWAF Kota Lhokseumawe

Data rasio ZIS yang disalurkan dan ZIS yang terkumpul pada Tahun 2017-2021, menunjunkan belum optimalnya pengelolaan ZISWAF dimana masih terjadi rasio penyaluran dibawah angka 1 yang berarti, masih terdapat dana ZIS yang belum disalurkan pada tahun bekenaan. Padahal data kemiskinan Kota Lhokseumawe yang masih tinggi sangat mengharapkan adanya penyaluran kepada masyarakat miskin. Tahun 2017 dan 2018, rasio penyaluran hanya 0,67 dan 0,72. Pada tahun 2018 memang rasio penyaluran sangat baik yaitu 1,16, namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan

menjadi 0.85 dan 0.99. Hal yang cukup positif adalah trend menunjukkan pengelolaan ZIS Kota Lhokseumawe semakin baik dari tahun ke tahun.

Gambar 4.4 Rasio Penyaluran ZIS Kota Lhokseumawe



Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2022

2. menurunnya akreditasi dayah di Kota Lhokseumawe.

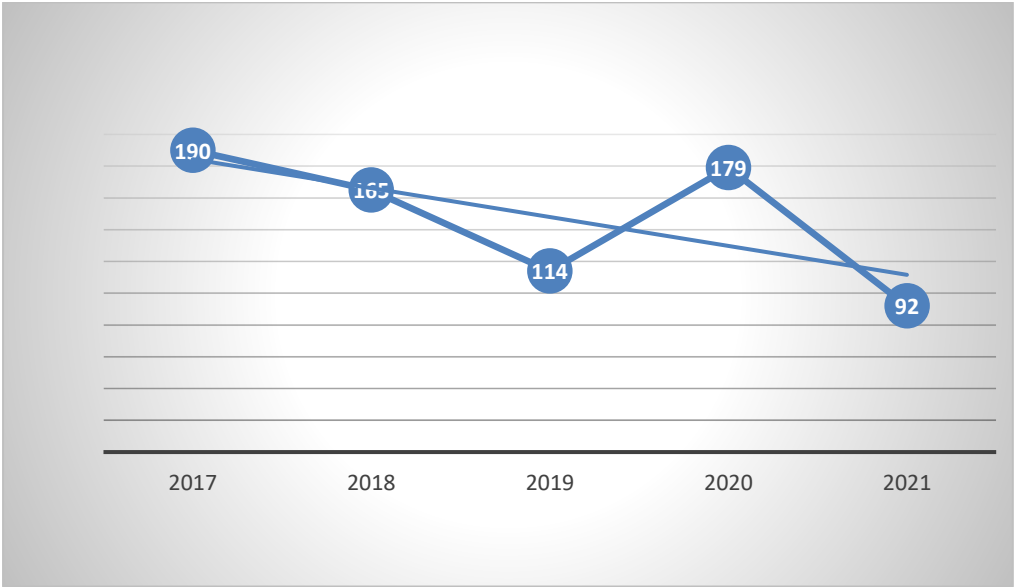
Sejumlah dayah di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan nilai akreditasi pada Tahun 2021. Jika kita lihat secara umum, jumlah dayah yang memiliki tipe A, B, C atau D pada Tahun 2019 dan 2020 sebanyak 43 dayah. Namun pada Tahun 2021, jumlah dayah yang memiliki tipe hanya tinggal 18 dayah. Terjadi penurunan yang sangat tajam lebih seratus 100%.

3. Masih tingginya pelanggaran syariat Islam di Kota Lhokseumawe

Masih tingginya pelanggaran syariat islam Kota Lhokseumawe, dapat kita lihat melalui data Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2022. Pada Tahun 2017 tercatat pelanggaran sebanyak 190 kasus, sedangkan pada Tahun 2018 dan 2019 tarjadi penurunan angka pelanggaran menjadi 165 dan 114. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus pelanggaran syariat Iskam menjadi 179 kasus dan pada Tahun 2021, penurunan pelanggaran menjadi 92 kasus. Angka-

angka ini masih cukup tinggi dimana pada tahun-tahun tertentu terdapat lebih 15 pelanggaran pada waktu satu bulan atau setiap dua hari terjadi pelanggaran syariat Islam. Kasus yang dominan adalah khalwat, ikhtilat dan zina. Namun demikian, jika dilihat tren maka jumlah pelanggaran syariat Islam cenderung menurun ke arah yang lebih baik.

**Gambar 4.5 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam
di Kota Lhokseumawe**



Sumnber: DSI Kota Lhokseumawe Tahun 2022

B. Layanan Urusan Wajib

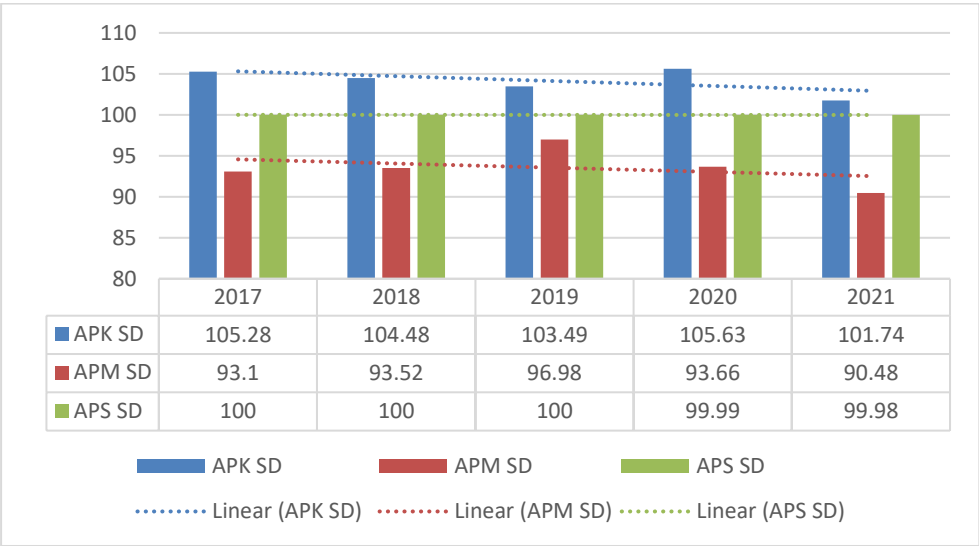
1) Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat SD mengalami trend penurunan yang ditunjukkan melalui grafik dibawah.

Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2017 sampai dengan 2019 cukup baik mencapai 100%. Artinya anak-anak di Kota Lhokseumawe mengikuti program wajib belajar yang telah dicanangkan pemerintah. Namun pada tahun 2020 dan 2021, Angka Partisipasi Sekolah SD menurun di bawah 100%, artinya masih ada anak usia sekolah dasar yang tidak ikut mengenyam pendidikan dasar sesuai program wajin belajar.

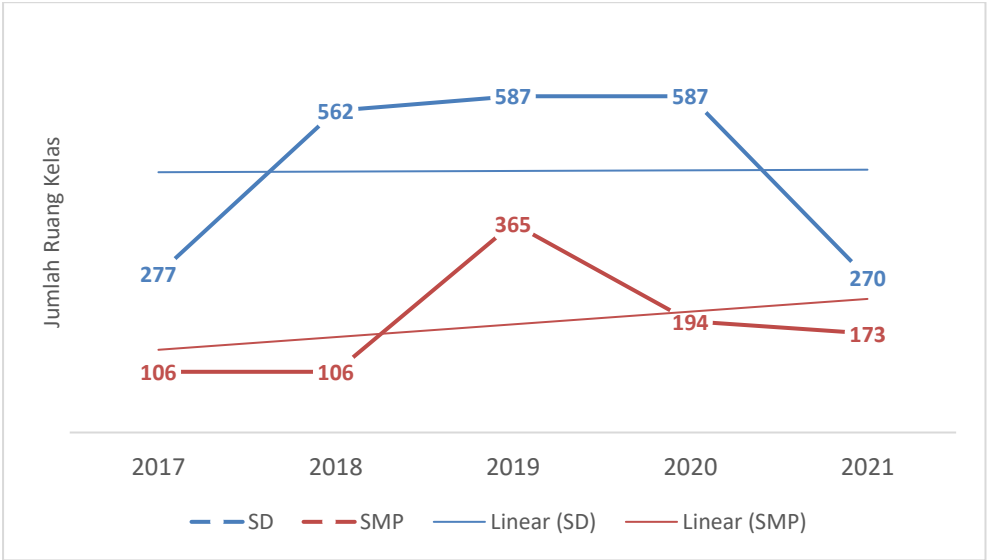
Gambar 4.6
Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe tingkat SD
Kota Lhokseumawe Tahu 2017-2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2022.

Menurunnya kondisi ruang kelas yang baik untuk tingkat SD dan SMP. Kondisi ruang kelas pada tahun 2017 untuk SD terdapat 277 ruang kelas dengan kondisi baik dan untuk SMP terdapat 106 ruang kelas. Pada rentang Tahun 2018-2020 untuk tingkat SD, jumlah kelas yang berada dalam kondisi baik meningkat cukup baik yaitu 587 ruang kelas pada Tahun 2020. Namun pada tahun 2021 menurun bahkan lebih rendah pada angka awal di tahun 2017 dimana hanya ada 270 ruang kelas yang berada dalam kondisi baik. Untuk tingkat SMP, pada tahun 2019 jumlah ruang kelas yang berkondisi baik meningkat cukup baik menjadi 365 ruang kelas dari 106 ruang kelas di tahun 2017. Namun pada tahun 2020 dan 2021, jumlah ruang kelas yang baik menurun ke angka 194 ruang kelas pada tahun 2020 dan 173 ruang kelas pada tahun 2021. Untuk tren kondisi ruang kelas tingkat SD dapat dikatakan landai, sedangkan untuk tingkat SMP, trend terlihat meningkat walaupun tidak terlalu signifikan.

**Gambar 4.7 Kondisi Ruang Kelas dengan Kondisi Baik
di Kota Lhokseumawe**



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2022.

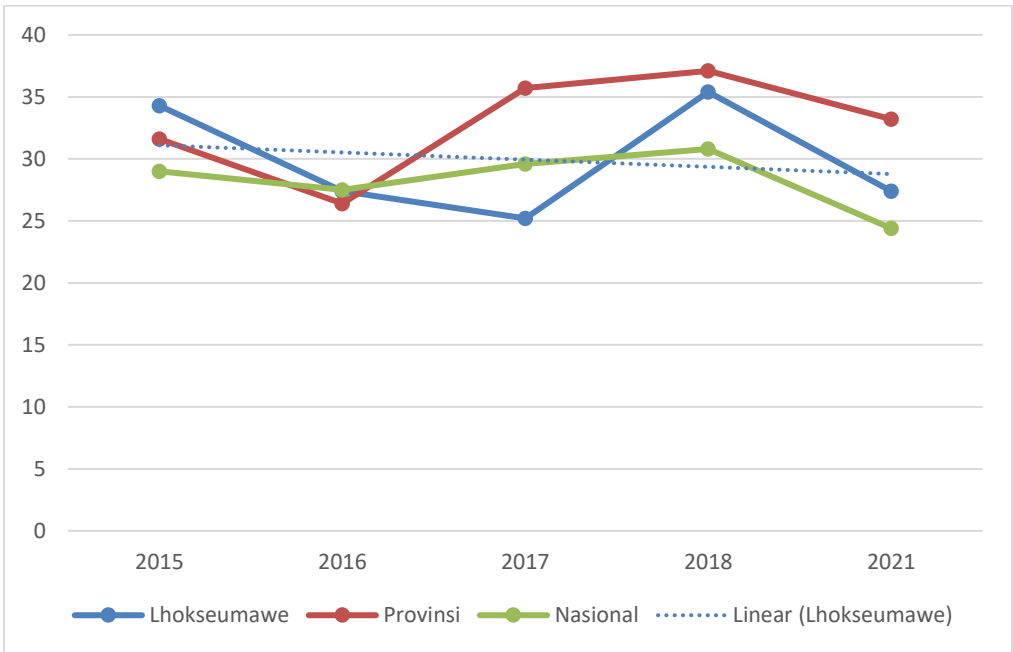
b. Kesehatan

- Masih tingginya angka kematian bayi (AKB) di Kota Lhokseumawe. Hal ini terlihat dari data Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022, dimana pada 2017 terdapat angka kematian bayi (AKB) sebesar 3,98%. Pada Tahun 2019, terjadi peningkatan AKB menjadi 4.74%. Pada tahun 2020, nilai AKB cukup baik di angka 0.23%, tetapi pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 3.93%. Idealnya AKB adalah 0% atau pun ditekan serendah mungkin karena ini terkait dengan nyawa.
- Jumlah puskesmas di Kota Lhokseumawe belum mencukupi rasio 28.000 penduduk per puskesmas, karena Kota Lhokseumawe hanya memiliki 7 puskesmas di tahun 2021 atau setara untuk pelayanan 196.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2021, penduduk Kota Lhokseumawe sudah berjumlah 210.179 jiwa.
- Prevelensi Stunting Kota Lhokseumawe yang masih fluktuatif;

Pada Tahun 2015 Stunting Kota Lhokseumawe mencapai 34,30% persen lebih tinggi dibanding Aceh sebesar 31.60 dan

Nasional sebesar 29.00%. Prevelensi Stunting Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27.40% dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 25.20% dan lebih baik dari Aceh sebesar 35.70% dan nasional 29.60%. Namun pada tahun 2018 Prevelensi Stunting Lhokseumawe kembali mengalami kenaikan menjadi 35.40% dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 27.40% lebih baik dari Aceh sebesar 33.20% tetapi lebih rendah dari nasional sebesar 24.40%. Jika dibandingkan pusat dan provinsi, berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa angka stunting Kota Lhokseumawe masih cukup tinggi karena masih di atas angka stunting nasional. Meskipun trend menunjukkan angka stunting Kota Lhokseumawe membaik, perlu tetap dilakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk penurunan angka stunting di Kota Lhokseumawe.

**Gambar 4.8 Prevalensi Stunting
Kota Lhokseumawe**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Jalan Kota Lhokseumawe dalam keadaan mantap 78,02 persen masih di bawah kondisi mantap jalan nasional sebesar 98,17 persen.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman ditandai dengan masih tingginya persentase luas kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe, dimana pada tahun 2017 terdapat kawasan kumuh seluas 22,3%, meningkat di tahun 2019 menjadi 61,29% dan menurun kembali pada Tahun 2021 menjadi 23,18%.
- Kota Lhokseumawe rentan mengalami banjir genangan yaitu air buangan ataupun air hujan yang tidak dapat mengalir ke badan air terdekat sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang lebih rendah dalam suatu kawasan. Berdasarkan data Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021, masih terdapat luasan daerah yang tergenang pada Tahun 2017 sebesar 8 Ha yang terus menurun hingga Tahun 2021 pada luasan sebesar 6.46 Ha.
- Kondisi drainase Kota Lhokseumawe dalam kondisi baik pada Tahun 2021 baru mencapai 68,58% atau sepanjang 79.829 Km dari total drainase Kota Lhokseumawe sepanjang 115.408 Km.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Jumlah pelanggaran qanun terus meningkat setiap tahunnya, pada Tahun 2017 tercatat hanya 141 pelanggaran, sedangkan pada Tahun 2021 sudah mencapai 4584 pelanggaran.
- Jumlah penertiban pelanggaran ketentramana untuk menjaga ketertiban dan ketentraman Kota Lhokseumawe dari tahun 2017–2021 terus meningkat, dimana pada tahun 2017 tercatat 141 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 501 kasus.

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Ketenagakerjaan

- Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di

tingkat nasional maupun provinsi. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari 2017 hingga tahun 2021 yaitu 10,51%, 12,52%, 11,06%, 11,99% dan 11,16%. Sementara itu angka pengangguran nasional dan provinsi pada tahun 2017 hingga tahun 2021 berada dikisaran 5% sampai dengan 7%.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks pemberdayaan gender Kota Lhokseumawe masih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2017, Indeks pemberdayaan gender Kota Lhokseumawe pada angka 50,79, sementara provinsi dan nasional berturut-turut pada angka 66,28 dan 71,74. Pada tahun 2021 indeks pemberdayaan gender Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 57,93, namun masih lebih rendah dari angka provinsi dan nasional berturut-turut diangka 63,47 dan 75,57.

c. Lingkungan Hidup

- Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk dibanding Aceh sebesar 78.99 dengan predikat baik dan Nasional sebesar 70.27 dengan predikat baik.
- Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36 dengan predikat baik namun tetap lebih rendah dari Aceh sebesar 89.48 dan Nasional sebesar 87.21
- Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 29.06 dengan predikat waspada dibanding Aceh sebesar 60.59 dan Nasional sebesar 59.54
- Masih terdapat persentase sampah yang tidak tertangani di tahun 2021 sejumlah 23,75% dari total timbunan sampah yang ada.

d. Perhubungan

- Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia di tahun 2020 sebanyak 195 titik, namun jumlah pemasangan yang telah dilakukan baru mencapai 80 titik atau hanya 41%.
- Fasilitas keselamatan jalan Kota Lhokseumawe tahun 2021 yang seharusnya ada sebanyak 8 fasilitas, namun yang telah

disediakan sejumlah 4 fasilitas atau baru 50% dari yang seharusnya.

e. Koperasi dan UKM

- Jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2021 hanya 51,4% atau 107 dari 208 Koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe. Angka ini memang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 41,83% atau 105 dari 251. Hal ini juga menunjukkan jumlah koperasi juga terus menurun.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Data indeks desa membangun menunjukkan penurunan jumlah desa mandiri di Kota Lhokseumawe yang pada tahun 2017 berjumlah 3 desa, namun pada tahun 2021 menjadi 2 desa

3) Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

- Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe yang dapat kita lihat berturut-turut di tahun 2017-2021 yaitu 1,49%, 1,84%, 2.20%, 2.38% dan 2.26%.

b. Kelautan dan perikanan

- Produksi perikanan budidaya Kota Lhokseumawe masih berada dibawah target dan jumlah produksi tidak meningkat seiring target yang diharapkan terus meningkat. Jumlah produksi ikan budidaya tahun 2017 sebanyak 3.182.490 ton dari target 3.900.420 atau tercapai sebesar 81,59%. Pada tahun 2021, jumlah produksi sebesar 3.400.000 dari target 5.384.500 atau hanya 63.14% dari target yang ditetapkan. Kelautan dan perikanan seharusnya menjadi andalan Kota Lhokseumawe karena didukung oleh alam serta sarana yang cukup memadai.

4) Penunjang Urusan Pilihan

a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Tingkat pejabat ASN yang harus mengikuti diklat struktural masih sangat rendah. Pada tahun 2017, presentasi pejabat yang mengikuti diklat struktural sebesar 21,43%. Tapi pada tahun

2021, hanya 8,7% pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat struktural.

b. Pengawasan

- Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 masih stagnan di level 3 sejak tahun 2018

c. Sekretaris Daerah

- Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe masih rendah dan stagnan di predikat CC
- Indeks reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 memperoleh nilai 41,23 atau (C/agak kurang) dari target nilai 50,1 atau (CC/cukup baik)

4.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dapat di lihat dari sisi kemampuan ekonomi daerah, sisi fasilitas wilayah/infrastruktur, sisi iklim investasi dan sisi sumber daya manusia, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

A. Kemampuan ekonomi daerah

- 1) Pendapatan per kapita Kota Lhokseumawe mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 22,57 Juta Rupiah dari yang sebelumnya terus meningkat yang terakhir di tahun 2019 adalah 22,98 Juta Rupiah. Pendapatan per Kapita Kota Lhokseumawe juga masih dibawah pendapatan per kapita provinsi misalnya di tahun 2020, pendapatan per kapita provinsi mencapai 31,63%.

B. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

- 1) masih sangat rendahnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, dimana pada tahun 2019 hanya 3,89% RT yang menggunakan air bersih, dan pada tahun 2021 hanya meningkat sedikit menjadi 4,09%.
- 2) Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Lhokseumawe masih rendah dan mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sempat terus meningkat

berturut-turut pada angka 67,05%, 68,23%, 73,04% dan 75,49%. Namun pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 67,47 pada tahun 2021

- 3) Persentase drainase Kota Lhokseumawe dalam keadaan baik pada tahun 2021 baru mencapai 68,58 atau masih terdapat 32% drainase yang perlu ditingkatkan kondisinya

C. Sumber Daya Manusia

- 1) IPM Kota Lhokseumawe memang masih berada di atas IPM Nasional dan Provinsi. Misalnya pada tahun 2021, IPM Kota Lhokseumawe berada di angka 77,57 sementara IPM Provinsi dan IPM Nasional berada di angka 72,18 dan 72,29. Namun Kota Lhokseumawe masih kalah dari Kota Banda Aceh yang memperoleh nilai IPM sebesar 85,71 pada Tahun 2021.

4.2. Isu- Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe; dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Lhokseumawe; serta Isu-isu strategis yang juga termaktub pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP.

Adapun Isu-Isu Strategis Internasional yang turut mempengaruhi isu strageis daerah meliputi:

1. globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. sumber energi alternatif; dan
5. perubahan iklim global;
6. perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4. memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6. memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. peningkatan Kualitas Demokrasi
2. peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
3. peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
4. peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
5. pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
6. peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
7. penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
8. peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
9. pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. optimalisasi Kemandirian Pangan
11. penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran
12. pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis

13. optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Berdasarkan uraian atas isu-isu strategis di tingkat nasional dan internasional dan permasalahan pembangunan di atas, maka ditetapkan isu-isu strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada dua agenda, yakni penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai dengan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya perlu diikuti dengan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit dan memakan waktu. Untuk itu perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Kota Lhokseumawe perlu terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasinya karena sampai saat ini pencapaian reformasi birokrasi di Kota Lhokseumawe terbilang masih rendah. Indikator capaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe masih rendah dan stagnan di predikat CC serta indeks reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 memperoleh nilai 41,23 atau (C/agak kurang) dari target nilai 50,1 atau (CC/cukup baik). Karena itu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan reformasi birokrasi di Indonesia.

2. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Kota Lhokseumawe sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menyiapkan pendanaan yang

mencukupi dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Kota Lhokseumawe perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas *money politic* dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demokrasi tersebut. Pada pilkada tahun 2019, proporsi kursi yang diduduki anggota dewan perempuan adalah 16% atau 4 kursi dari 25 kursi yang ada.

3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam

Peningkatan pelaksanaan syariat Islam melalui pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam menjadi isu strategis dimana perilaku kehidupan sehari-hari individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, implementasi Qanun tentang pelaksanaan Dinul Islam harus dilaksanakan secara optimal.

Kota Lhokseumawe perlu terus meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam khususnya dalam hal pengelolaan ZISWAF, peningkatan kualitas pendidikan dayah dan penegakan qanun syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Penyaluran ZISWAF di Kota Lhokseumawe perlu dioptimalkan agar dana zakat yang terkumpul dapat tersampaikan untuk menyampaikan amanah muzakki dan juga sekaligus sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Kualitas pendidikan dayah di Kota Lhokseumawe juga perlu terus ditingkatkan tidak hanya sekedar menambah jumlah dayah namun disertai dengan peningkatan akreditasi dayah. Masalah pelanggaran syariat Islam juga harus diterus ditertibkan agar tujuan penegakan syariat Islam di Kota Lhokseumawe dapat tercapai.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Kualitas SDM di Kota Lhokseumawe perlu terus ditingkatkan walaupun IPM Kota Lhokseumawe memang masih berada di atas IPM Nasional dan Provinsi. Misalnya pada tahun 2021, IPM Kota Lhokseumawe berada di angka 77,57 sementara IPM Provinsi dan IPM Nasional berada di angka 72,18 dan 72,29. Namun Kota

Lhokseumawe masih kalah dari Kota Banda Aceh yang memperoleh nilai IPM sebesar 85,71 pada Tahun 2021.

Angka partisipasi Sekolah di tingkat SD maupun SMP harus tetap dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan program wajib belajar yang merupakan program nasional. Selain itu, kualitas SDM juga sangat ditentukan oleh infrastruktur yang baik. Data ruang sekolah yang ber kondisi baik perlu terus ditingkatkan agar pendidikan juga dapat berkualitas. Selain SDM di pendidikan dasar, SDM aparatur di Kota Lhokseumawe juga perlu diperhatikan karena hal ini diharapkan juga turut mempengaruhi peningkatan kualitas birokrasi di Kota Lhokseumawe.

5. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kesehatan masyarakat juga merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe sehingga menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Lhokseumawe. Fokus dilakukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas di Kota Lhokseumawe belum mencukupi rasio 28.000 penduduk per puskesmas, karena Kota Lhokseumawe hanya memiliki 7 puskesmas di tahun 2021 atau setara untuk pelayanan 196.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2021, penduduk Kota Lhokseumawe sudah berjumlah 210.179 jiwa.

Selain itu, penanganan pada ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir juga perlu ditingkatkan dikarenakan angka kematian bayi idealnya adalah 0% atau pun ditekan serendah mungkin karena ini terkait dengan nyawa. Penanganan stunting yang lebih baik juga perlu terus ditingkatkan karena angka stunting di Kota Lhokseumawe tergolong cukup tinggi. Bahkan di tahun 2020, angka stunting di Kota Lhokseumawe mencapai 35%.

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada isu pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan dengan adanya dukungan serta partisipasi masyarakat. Pesatnya pembangunan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam

(pertambangan energi, mineral dan bebatuan) telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kegiatan tambang terbuka, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Data kualitas lingkungan hidup di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa

Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk dibanding Aceh sebesar 78.99 dengan predikat baik dan Nasional sebesar 70.27 dengan predikat baik. Sedangkan Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36 dengan predikat baik namun tetap lebih rendah dari Aceh sebesar 89.48 dan Nasional sebesar 87.21. Dan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 29.06 dengan predikat waspada dibanding Aceh sebesar 60.59 dan Nasional sebesar 59.54. Dari data tersebut, memang fokus peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Lhokseumawe sangat relevan untuk dilakukan.

Disamping itu juga penanganan sampah di Kota Lhokseumawe perlu terus ditingkatkan. Di Kota Lhokseumawe masih terdapat persentase sampah yang tidak tertangani di tahun 2021 sejumlah 23,75% dari total timbulan sampah yang ada. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius dengan manajemen limbah yang berkelanjutan (*sustainable waste management*).

7. Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa poin yang menjadi isu strategis dalam lingkup Ekonomi, Industri dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe meliputi:

➤ Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. Dengan adanya KEK ini diharapkan dapat menampung tenaga kerja untuk wilayah Kota Lhokseumawe.

➤ Pengembangan Industri.

Pengembangan industri di Kota Lhokseumawe difokuskan pada pengembangan industri jasa dan industri rumah tangga.

➤ Pengembangan Kawasan Pariwisata.

Terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikembangkan meliputi: Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, Pantai Meraksa, Bukit

Goa Jepang, dan Waduk Jeulikat serta kawasan sekitaran waterboom di Kecamatan Blang Mangat.

➤ Pusat Pelayanan Skala Regional.

Berdasarkan letak geografis, Kota Lhokseumawe dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan perdagangan barang/ jasa, pendidikan, kesehatan dengan skala regional yang meliputi Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.

➤ Peningkatan Investasi Sektor Riil dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan pembangunan tidak bisa diharapkan pada andalan APBD saja, perlu adanya Investasi yang mampu menumbuhkan perekonomian dengan cepat. Investasi yang dapat dipromosikan dan dilakukan di Kota Lhokseumawe antara lain Investasi bidang Perikanan, Kelautan, Industri, Pariwisata, Perhotelan dan bidang-bidang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe harus digenjot dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di berbasis kawasan dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Ke depan, para pelaku ekonomi di Kota Lhokseumawe tidak boleh lagi menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kota Lhokseumawe juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke ke pasar lintas daerah atau pasar internasional.

8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup

Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup masyarakat.

9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Dana Otonomi Khusus berkurang menjadi 1% dari DAU mulai Tahun 2023 dan akan menjadi nol pada Tahun 2027. Oleh karena itu perlu perjuangan untuk mendapatkan perpanjangan Dana Otonomi

Khusus tersebut mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah pembangunan Kota Lhokseumawe.

Di samping itu, efektivitas dari Dana Otsus juga perlu diperhatikan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program pembangunan, terutama:

- (1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
- (2) pemberdayaan ekonomi rakyat,
- (3) pengentasan kemiskinan,
- (4) pendanaan pendidikan,
- (5) sosial,
- (6) kesehatan,
- (7) keistimewaan Aceh dan
- (8) penguatan perdamaian.

Untuk mengatasi ketimpangan pendanaan menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melakukan upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan di Kota Lhokseumawe, diantaranya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan belanja pembangunan Non Pemerintah seperti CSR lewat Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

KOTA LHOKSEUMAWE

5.1 Tujuan dan Sasaran

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penentuan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap keempat serta didasarkan atas isu strategis yang aktual. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dimaksud untuk menjadi acuannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025.

Bila melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 maka Perencanaan pembangunan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 telah memasuki tahapan pembangunan keempat dan tahapan ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan pembangunan jangka panjang Kota Lhokseumawe, sehingga diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya Kota Lhokseumawe yang Bersyariat, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

Tujuan Pembangunan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, Tujuan Pembangunan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Rumusan Tujuan Pembangunan merupakan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah. Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator Tujuan dan Sasaran yang perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe periode 2023-2026.

Sasaran Pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan Pembangunan, berupa hasil Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sama halnya dengan Tujuan Pembangunan, perumusan Sasaran Pembangunan juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Daerah yang dapat diukur untuk pencapaian Tujuan Pembangunan.

Berdasarkan analisa sasaran pokok dan arah kebijakan tahap keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori/ Poin	Proses	CC 50.00	CC 50.50	CC 51.00	CC 51.50	CC 51.50	SETDAKO
1.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai LPPD Kota	Kategori/ Poin	Tinggi 3,4290	Tinggi 3,430	Sangat Tinggi 4,20	Sangat Tinggi 4,22	Sangat Tinggi 4,25	Sangat Tinggi 4,25	SETDAKO
		Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/ Poin	CC 55.50	B 60.00	B 60.50	B 61.00	B 61.50	B 61.50	SETDAKO BAPPEDA
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Proses	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD INSPEKTORAT
1.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	Kategori/ Poin	B 82.52	A 88.31	A 88.81	A 89.31	A 89.81	A 89.81	SETDAKO,BAPPEDA (LITBANG), DISDUKCAPIL,SETWAN, KOMINFO,BKPSDM, PERPUS,KESBANGPOL, 4 KEC,DPMG, PERTANAHAN,DP3AP2KB (PP), SATPOL PP DAN WH, BPBD
2.	Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Indeks Pembangunan syariat islam	Indeks	80.65	80.75	80.85	80.95	81.00	81.00	DSI MPU BAITUL MAL
2.1	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	DSI MPU
		Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0.74	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	BAITUL MAL
2.2	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	46.15	53.85	61.54	61.54	76.92	76.92	PK MAA
3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77.57	77.62	77.70	77.73	77.75	77.75	BPS PK PP DINKES

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	15.21	15.22	15.23	15.24	15.25	15.25	PK MPD
		Angka kelulusan	Persen	99.01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PK MPD
3.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPORAPAR
3.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71.64	71.66	71.68	71.72	71.75	71.75	BPS DINKES
4.	Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	63.7	64.9	65.35	65.80	66.25	66.25	DLH
4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase RTH Publik	Persen	1.62	1.67	2.49	2.69	2.79	2.79	DLH
5.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Persentase pertumbuhan ekonomi	Persen	1.98	3.50	3.60	3.65	3.70	3.70	BPS
5.1	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp. Miliar	3,403	3,471	3,541	3,612	3,684	3,684	DPMPSTSP NAKER
		Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Perusahaan	432	452	472	492	512	512	DPMPSTSP NAKER
5.2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kemiskinan	Persen	11.16	11.10	11.07	11.05	10.95	10.95	BPS DINSOS
5.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11.16	11.12	11.08	11.06	11.04	11.04	BPS DMPTSP
5.4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PDRB Perkapita	Rp. (Juta)	33.20	33.35	33.38	33.39	33.40	33.40	BPS, DKPPP, DISPORAPAR (PARIWISATA)
		Laju Inflasi	Persen	1.97	2.30	2.10	2.07	2.05	2.05	BPS; DISPERINDAGKOP&UKM
6.	Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas	Persen	32.74	34.32	35.98	37.73	39.56	39.56	PUPR
6.1	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65.05	68.26	71.64	75.19	78.91	78.91	PUPR

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
					2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0.43	0.38	0.32	0.27	0.21	0.21	PUPR
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47.80	54.47	61.13	67.80	74.47	74.47	PUPR
		Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan	Rasio	0.50	0.25	0.38	0.25	0.25	0.25	DISHUB

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penentuan strategi dan arah kebijakan akan menjadi panduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Adapun pilihan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini :

TABEL 6.1
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
		Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan sistem pelayanan publik
2.	Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Syariat Islam
			Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf
		Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan
3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan mutu infrastruktur dan proses pembelajaran pendidikan
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya kualitas generasi muda	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
			Meningkatkan budaya hidup sehat
			Meningkatkan pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4.	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah
5.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan invenstasi yang kondusif
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kompetensi, produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja
		Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatkan Usaha Perdagangan Industri UMKM yang kompetitif untuk penguatan Ekonomi
			Mewujudkan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal (syariat islam)
6.	Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana jalan dan jembatan
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
			Meningkatkan akses sanitasi
			Meningkatkan kapasitas saluran drainase
			Meningkatkan akses air minum
			Menguatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPK perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap tujuan dan sasaran. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan 4 tahun ke depan, yang tertuang dalam tabel berikut.

TABEL 6.2
CAPAIAN KINERJA TUJUAN 1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai LPPD Kota	Tinggi 3,4290
		Nilai Evaluasi SAKIP	CC 55.50
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	WTP
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	B 82.52

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran pada tujuan 1 dapat digambarkan bahwa pencapaian tujuan 1 dikategorikan baik terlihat dari nilai LPPD Kota yang mendapat predikat Tinggi (T) dengan point 3,4290, Opini BPK terhadap LKPD pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Indeks kepuasan masyarakat yang berada pada angka 82.52 dengan Kategori B, sedangkan capaian nilai

evaluasi SAKIP Kota yang masih mendapat predikat CC dengan point 55.50.

Melihat capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target tujuan 1 terkait tata kelola pemerintahan, perlu mendapat dukungan khususnya terkait pencapaian nilai evaluasi SAKIP sehingga hal ini **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 4 tahun ke depan.**

TABEL 6.3
CAPAIAN KINERJA TUJUAN 2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu	100%
		Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	0.72
	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya	Persentase kegiatan pengembangan budaya	46.15%

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran pada tujuan 2 dapat digambarkan bahwa pencapaian tujuan 2 dikategorikan baik terlihat dari Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu sebesar 100%, rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan sebesar 0,72, dan Persentase kegiatan pengembangan budaya sebesar 46.15%.

Melihat capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target tujuan 2 terkait pelaksanaan syariat islam, perlu mendapat dukungan khususnya terkait Persentase kegiatan pengembangan

budaya sehingga dalam hal ini menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 4 tahun ke depan.

TABEL 6.4
CAPAIAN KINERJA TUJUAN 3

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	15.21
		Angka kelulusan	99,01%
	Meningkatnya kualitas generasi muda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,64 Tahun

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran tujuan 3 dapat digambarkan bahwa pencapaian tujuan 3 dikategorikan baik terlihat dari capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai sebesar 15,21 Tahun, angka kelulusan sebesar 99,01%, dan Persentase organisasi pemuda aktif sebesar 100%, serta Usia Harapan Hidup yang mencapai 71,64 Tahun.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target tujuan 3 maka terkait pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 4 tahun ke depan.

TABEL 6.5
CAPAIAN KINERJA TUJUAN 4

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase RTH	1.62%

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran tujuan 4 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 4 dikategorikan kurang baik terlihat dari Persentase RTH sebesar 1.62%.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target tujuan 4 terkait permasalahan tata kelola lingkungan hidup, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 4 tahun ke depan.**

TABEL 6.6
CAPAIAN KINERJA TUJUAN 5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	3.4 triliun
		Jumlah investor (PMDN/ PMA)	432
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kemiskinan	11,16%
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,16%
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PDRB Perkapita	33,20 juta
		Laju Inflasi	1.97%

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran Tujuan 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian tujuan dikategorikan baik terlihat dari Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA) 3,4 triliun, Jumlah investor (PMDN/ PMA) 432 perusahaan, Laju Inflasi 1.97%, PDRB Perkapita 33,20 juta, dan tingkat pengangguran terbuka yang berada pada angka 11,16%, serta Tingkat kemiskinan yang mencapai 11,16%.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target tujuan 5 terkait peningkatan perekonomian kota, kesempatan kerja dan kemiskinan, perlu mendapat dukungan penuh khususnya terkait pengentasan kemiskinan sehingga hal ini harus **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 4 tahun ke depan.**

TABEL 6.7
CAPAIAN KINERJA TUJUAN 6

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	65,05%
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,43%
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	47,80
		Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan tersedia	0.50%

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran Tujuan 6 dapat digambarkan bahwa pencapaian tujuan dikategorikan baik terlihat dari Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap sebesar 65,05%, Persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 0.43%, dan Persentase ketaatan terhadap RTRW sebesar 47.80% serta Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan tersedia sebesar 0.50.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target tujuan 6 terkait Meningkatkan infrastruktur berkualitas, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 4 tahun ke depan.**

Berdasarkan hasil analisa atas capaian kinerja sasaran, maka dapat terlihat bahwa capaian sasaran Kota Lhokseumawe sudah dalam kondisi baik, sehingga masih memerlukan pencapaian penanganan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, serta waktu dan tahapan yang dibutuhkan harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan tabel berikut.

TABEL 6.8
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

SASARAN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN			
	2023	2024	2025	2026
SASARAN 1.1.1	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien			
SASARAN 1.1.2				
SASARAN 2.1.1	Memperkuat pelaksanaan syariat islam melalui penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan serta pengembangan budaya yang berazaskan nilai-nilai keislaman			
SASARAN 2.1.2				
SASARAN 3.1.1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Mutu Pendidikan dan dan Kesehatan			
SASARAN 3.1.2				
SASARAN 3.1.3				
SASARAN 3.1.4				
SASARAN 4.1.1	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup melalui Perencanaan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup			
SASARAN 5.1.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing melalui Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pangan, pertanian dan perikanan serta Peningkatkan kapasitas tenaga kerja , pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan			
SASARAN 5.1.2				
SASARAN 5.1.3				
SASARAN 5.1.4				
SASARAN 5.1.5				
SASARAN 6.1.1	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar melalui perbaikan kualitas infrastruktur			

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus tahunan pembangunan di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut

TABEL 6.9
FOKUS PEMBANGUNAN

FOKUS PEMBANGUNAN			
TAHUN I (2023)	TAHUN II (2024)	TAHUN III (2025)	TAHUN IV (2026)
1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Reformasi Birokrasi	1. Infrastruktur	1. Reformasi Birokrasi
2. Kesehatan	2. Pendidikan	2. Lingkungan Hidup	2. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya
3. Pendidikan	3. Pertumbuhan Ekonomi	3. Reformasi Birokrasi	3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Reformasi Birokrasi	4. Kesehatan	4. Kesehatan	4. Pendidikan
5. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	5. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	5. Pendidikan	5. Kesehatan
6. Infrastruktur	6. Infrastruktur	6. Pertumbuhan Ekonomi	6. Lingkungan Hidup
7. Lingkungan Hidup	7. Lingkungan Hidup	7. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	7. Infrastruktur

Berdasarkan fokus pembangunan tahunan tersebut, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 4 tahun (periode RPK) adalah sebagai berikut.

TABEL 6.10
TEMA PEMBANGUNAN

No	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
1	2023	Memacu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran Dalam Rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi Dari Covid-19
2	2024	Mewujudkan Kota Lhokseumawe Cerdas dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak
3	2025	Meningkatkan Infrastruktur Kota Lhokseumawe berkualitas dengan memperhatikan tata kelola lingkungan hidup yang baik serta peningkatan layanan publik melalui digitalisasi
4	2026	Memperkuat kemandirian ekonomi dan kapasitas fiskal dengan meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe serta pengoptimalan penerapan syariat islam

TABEL 6.11
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang terintegrasi	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
				Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	
				Penguatan sistem pengendalianintern pemerintah (SPIP)	
				Penguatan system pengelolaankeuangan daerah yang efektif dan efisien	
				Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	
		Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan sistem pelayanan publik	Meningkatkan manajemen pelayanan publik	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
				Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (open government)	
				Meningkatkan pembangunan demokrasi yang partisipatif	
				Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan	
				Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;	
				Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak.	
				Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban.	
				Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana.	
2.	Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Syariat Islam	Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai keislaman	Memperkuat pelaksanaan syariat islam melalui penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan serta pengembangan budaya yang
			Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan	Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat	berazaskan nilai-nilai keislaman
3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan mutu infrastruktur dan proses pembelajaran pendidikan	Peningkatan kuantitas dan kualitas mutu sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standarpelayanan minimal di bidang pendidikan.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan	Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas	
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar	
		Meningkatnya kualitas generasi muda	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda	Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
				Peningkatan Ketersediaan sumber daya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar	
			Meningkatkan budaya hidup sehat	Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan	
			Meningkatkan pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana	
4.	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup melalui Perencanaan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
5.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif	Peningkatan fasilitas dan promosi Investasi	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing melalui Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pangan, pertanian dan perikanan serta Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat	Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	
		Meningkatkan	Meningkatkan Kompetensi,	Peningkatkan kapasitas tenaga kerja,	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		Kesempatan Kerja	produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
		Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Usaha Perdagangan Industri UMKM yang kompetitif untuk penguatan Ekonomi	Peningkatan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, dan UMKM	
			Mewujudkan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pangan, pertanian dan perikanan	
			Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal (syariat islam)	Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata;	
6.	Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana jalan dan jembatan	Memastikan tersedianya kondisi jalan dan jembatan guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar melalui perbaikan kualitas infrastruktur
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu	
			Meningkatkan akses sanitasi	Meningkatkan cakupan sanitasi layak	
			Meningkatkan kapasitas saluran drainase	Meningkatkan Pengendalian dan kapasitas drainase	
			Meningkatkan akses air	Meningkatkan ketersediaan dan	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
			minum	pasokan sumber daya air minum	
			Menguatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung	
				Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
			Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.	

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis daerah pada periode RPK yang akan menjadi prioritas atau target selama empat tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 4 (lima) Tahun periode 2023-2026 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas :

1. Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Pertumbuhan Ekonomi
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Program pembangunan daerah merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mendukung program strategis nasional, provinsi, dan daerah.
2. Mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal
3. Menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;

2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
16. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
19. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
20. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. Pelayanan informasi rawan bencana;
22. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

29. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Penerapan SPM dalam RPK dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Lhokseumawe sebagai berikut :

TABEL 6.12
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM PENDIDIKAN						
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN;	Angaka partisipasi kasar	Dinas PK
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM;	Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan	
2.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN;	Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN;	Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%			
SPM KESEHATAN						
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	DINAS KESEHATAN
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usialanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%			
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100%			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan				
SPM PEKERJAAN UMUM						
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	DINAS PUPR
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	
SPM PERUMAHAN RAKYAT						
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%			DINAS PUPR
SPM TRANTIBUMLINMAS						
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketenteraman	SATPOL PP DAN WH
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN; PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	BPBD
SPM SOSIAL						
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL;	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	100%			

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	panti	rehabilitasi sosial di luar panti		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		DINAS SOSIAL
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota	100%	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab tujuan dan sasaran Kota Lhokseumawe ada pun target capaian program Kota Lhokseumawe diantaranya adalah, seperti yang disajikan pada tabel 6.13.

TABEL 6.13
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2023 - 2026

Kode	Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2			3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori/ Poin	Proses	CC 50.00		CC 50.50		CC 51.00		CC 51.50		CC 51.50		
		1.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai LPPD Kota	Kategori/ Poin	Tinggi 3,42	Tinggi 3,430		Sangat Tinggi 4,20		Sangat Tinggi 4,22		Sangat Tinggi 4,25		Sangat Tinggi 4,25		SETDAKO (pemerintahan)
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	98.53	98.70	11,803,225,020	98.70	11,809,889,923	98.70	11,838,461,791	98.70	11,871,120,484	98.70	47,322,697,217	SETDAKO
				Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/ Poin	CC 55.50	B 60.00		B 60.50		B 61.00		B 61.50		B 61.50		SETDAKO (organisasi), BAPPEDA
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	25,426,262,442	100	25,430,021,795	100	25,446,137,822	100	25,464,559,030	100	101,766,981,090	SETDAKO
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	6,450,267,996	100	6,452,074,071	100	6,459,816,560	100	6,468,666,509	100	25,830,825,136	BAPPEDA
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	620,006,618	Ada	620,180,220	Ada	620,924,436	Ada	621,775,103	Ada	2,482,886,377	BAPPEDA
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Persen	100	100	643,475,000	100	643,655,173	100	644,427,559	100	645,310,425	100	2,576,868,157	BAPPEDA
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Proses	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKD, INSPEKTORAT
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	13,090,306,814	100	13,093,972,100	100	13,109,684,866	100	13,127,645,135	100	52,421,608,915	BPKD
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	110,670,296,514	Tepat Waktu	110,701,284,197	Tepat Waktu	110,834,125,738	Tepat Waktu	110,985,968,490	Tepat Waktu	443,191,674,939	BPKD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	6,334,358,046	100.00	6,336,131,666	100.00	6,343,735,024	100.00	6,352,425,941	100.00	25,366,650,678	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PAD	Persen	68.50	100	1,464,500,000	100	1,464,910,060	100	1,466,667,952	100	1,468,677,287	100	5,864,755,299	BPKD
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	6,332,346,053	100	6,334,119,110	100	6,341,720,053	100	6,350,408,209	100	25,358,593,425	INSPEKTORAT

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	78.35	80.02	1,698,321,461	81.43	1,698,796,991	82.60	1,700,835,547	83.56	1,703,165,692	83.56	6,801,119,692	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBLJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Point / Kategori	Proses	CC 50.00	403,406,950	CC 50.50	403,519,904	CC 51.00	404,004,128	CC 51.50	404,557,613	CC 51.50	1,615,488,595	INSPEKTORAT
6	01	03		Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		INSPEKTORAT
6	01	03		Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	Level/Point	Level 2	Level 3 3.2		Level 3 3.2		Level 3 3.5		Level 3 3.5		Level 3 3.5		INSPEKTORAT
		1.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	Kategori/ Poin	B 82.52	A 88.31		A 88.81		A 89.31		A 89.81		A 89.81		SEDTAKO, BAPPEDA (litbang), DISDUK CAPIL, SETWAN, KOMINFO, BKPSDM, ARPUS, KESBANGPOL, 4 KEC, DPMG, PERTANAHAN, DP3A KB (PP), STPOL, BPBD
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	91.11	97.00	600,270,993	97.00	600,439,069	92.00	601,159,596	92.00	601,983,184	92.00	2,403,852,842	SETDAKO
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbang	Persen	50.00	85.71	467,000,000	75.00	432,250,000	75.00	532,900,000	67.86	479,380,625	100.00	1,911,530,625	BAPPEDA (litbang)
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,373,420,000	100	3,374,364,558	100	3,378,413,795	100	3,383,042,222	100	13,509,240,575	DISDUK CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	58.24	66.16	224,326,264	71.18	224,389,075	74.88	224,658,342	71.07	224,966,124	71.07	898,339,806	DISDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	84.77	86.42	200,000,000	87.77	200,056,000	88.85	200,296,067	89.60	200,570,473	89.60	800,922,540	DISDUK CAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	58.3	100	300,000,000	100	300,084,000	100	300,444,101	100	300,855,709	100	1,201,383,810	DISDUK CAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	Ada/Tidak	Tidak	Ada	50,000,000	Ada	50,014,000	Ada	50,074,017	Ada	50,142,618	Ada	200,230,635	DISDUK CAPIL
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	20,346,871,300	100	20,352,568,424	100	20,376,991,506	100	20,404,907,984	100	81,481,339,214	SETWAN
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan	Persen	41.18	70.00	5,953,220,447	72.73	5,954,887,349	81.82	5,962,033,214	83.33	5,970,201,199	83.33	23,840,342,208	SETWAN
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,133,945,004	100	2,134,574,709	100	2,137,614,189	100	2,140,775,621	100	8,546,909,523	KOMINFO

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Persen	26.67	26.25	55,258,190	23.68	55,273,662	26.32	45,000,000	30.00	45,000,000	30.00	200,531,852	KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	Persen	2.94	5.88	40,000,000	11.76	40,000,000	17.65	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	180,000,000	KOMINFO
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi	Persen	2.94	5.88	75,000,000	8.82	75,000,000	11.76	75,000,000	11.76	75,000,000	11.76	300,000,000	KOMINFO
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	10,346,473,419	100	10,349,370,432	100	10,361,789,676	100	10,375,985,328	100	41,433,618,855	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	Persen	50.60	52.19	2,492,916,181	53.10	2,493,614,198	54.02	2,496,606,535	54.94	2,500,026,886	54.94	9,983,163,799	BKPSDM
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural	Persen	8.77	9.36	810,000,000	9.75	810,226,800	10.14	811,199,072	10.33	812,310,415	10.33	3,243,736,287	BKPSDM
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,888,926,422	100	3,100,488,760	100	2,846,513,199	100	3,419,188,861	100	13,255,117,242	ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	Persen	4.34	6.85	447,957,235	9.02	800,000,000	11.10	482,627,352	13.09	506,758,821	13.09	2,237,343,408	ARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	Persen	3.77	7.41	120,000,000	10.91	126,000,000	14.29	132,300,000	17.54	138,915,000	17.54	517,215,000	ARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip	Persen	10.00	18.18	195,000,000	25.00	204,750,000	30.77	214,987,500	35.71	225,736,875	35.71	840,474,375	ARPUS
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,850,836,325	100	2,851,634,559	100	2,855,056,521	100	2,858,967,948	100	11,416,495,353	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0.82	1.44	150,000,000	1.91	150,000,000	2.20	150,000,000	2.21	150,000,000	2.21	600,000,000	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	Rasio	75.94	78.76	800,000,000	79.95	800,000,000	81.02	800,000,000	81.98	800,000,000	81.98	3,200,000,000	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	Persen	12.96	15.00	425,500,000	18.75	425,500,000	18.57	425,500,000	20.27	425,500,000	20.27	1,702,000,000	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama	Persen	NA	1.46	100,000,000	2.65	100,000,000	3.61	100,000,000	4.37	100,000,000	4.37	400,000,000	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	NA	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	480,000,000	KESBANGPOL

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,979,507,865	100	2,980,342,127	100	2,983,918,538	100	2,988,006,506	100	11,931,775,036	B. SAKTI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	5.56	33.33	187,606,386	44.44	187,658,916	55.56	187,884,106	55.56	188,141,508	55.56	751,290,916	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	100	100	110,250,000	100	110,280,870	100	110,413,207	100	110,564,473	100	441,508,550	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	75	100	21,315,000	100	21,320,968	100	21,346,553	100	21,375,798	100	85,358,320	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	28,664,370	100	28,672,396	100	28,706,803	100	28,746,131	100	114,789,700	B. SAKTI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,259,140,900	100	2,259,773,459	100	2,262,485,188	100	2,265,584,792	100	9,046,984,339	B. MANGAT
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Fasilitas Publik	Persen	40	40	5,000,000	60	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	B. MANGAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	86.36	86.36	150,398,430	86.36	150,440,542	90.91	150,621,070	90.91	150,827,421	90.91	602,287,463	B. MANGAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	80.00	80.00	15,000,000	80.00	15,004,200	100.00	15,022,205	100.00	15,042,785	100.00	60,069,191	B. MANGAT
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam		13.64	22.73	20,000,000	22.73	20,005,600	22.73	20,029,607	22.73	20,057,047	22.73	80,092,254	B. MANGAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	35,000,000	100	35,009,800	100	35,051,812	100	35,099,833	100	140,161,445	B. MANGAT
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,350,068,923	100	2,350,726,942	100	2,353,547,815	100	2,356,772,175	100	9,411,115,855	M. SATU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	100	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	480,000,000	M. SATU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	100	42.86	8,000,000	50.00	8,000,000	42.86	8,000,000	42.86	8,000,000	42.86	32,000,000	M. SATU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	60,000,000	M. SATU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	80,000,000	M. SATU
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,500,904,975	100	2,501,605,228	100	2,504,607,155	100	2,508,038,466	100	10,015,155,825	M. DUA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	17.65	17.65	100,000,000	17.65	100,000,000	17.65	100,000,000	17.65	100,000,000	17.65	400,000,000	M. DUA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	23.53	23.53	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	200,000,000	M. DUA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam		17.65	17.65	15,000,000	17.65	15,000,000	17.65	15,000,000	17.65	15,000,000	17.65	60,000,000	M. DUA

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong		100	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	72,000,000	M. DUA
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,756,553,827	100	2,757,327,902	100	2,760,636,696	100	2,764,418,768	100	11,038,937,192	DPMG
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik	Persen	94.12	95.59	5,000,000	95.59	5,000,000	95.59	5,000,000	100.00	3,472,875	100.00	18,472,875	DPMG
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Gampong	Persen	25.00	51.47	3,000,000	67.65	3,000,000	73.53	3,500,000	100.00	3,472,875	100.00	12,972,875	DPMG
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Persen	57.61	67.13	280,027,100	74.49	280,105,508	81.84	280,441,634	98.75	290,428,940	98.75	1,131,003,182	DPMG
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	51.84	81.25	280,715,044	86.03	280,793,644	91.54	280,640,197	91.54	272,987,468	97.79	1,115,136,353	DPMG
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,725,813,000	100	2,826,520,228	100	2,829,552,052	100	2,933,017,538	100	11,314,902,818	PERTANAHAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Santunan Persertifikatan	Persen	NA	66.67	200,000,000	80.00	200,000,000	83.33	200,000,000	86.67	200,000,000	86.67	800,000,000	PERTANAHAN
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penanganan Tanah Kosong	Persen	NA	15.00	100,000,000	20.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	400,000,000	PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	Persen	0.51	0.55	200,000,000	0.59	200,000,000	0.63	200,000,000	0.67	200,000,000	0.67	800,000,000	PERTANAHAN
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	Persen	33.88	44.87	150,000,000	45.64	150,000,000	46.42	150,000,000	46.42	150,000,000	46.42	600,000,000	PERTANAHAN
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Tanah yang Dipetakan	Persen	47.86	66.21	200,000,000	67.80	200,000,000	67.07	200,000,000	68.66	200,000,000	68.66	800,000,000	PERTANAHAN
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase Pembinaan SDM Pertanian	Persen	35.09	43.86	200,000,000	52.63	200,000,000	57.02	200,000,000	70.18	200,000,000	70.18	800,000,000	PERTANAHAN
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai	Persen	NA	54.17	150,000,000	58.33	150,000,000	62.50	150,000,000	66.67	150,000,000	66.67	600,000,000	PERTANAHAN
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Ketersediaan Sistem Informasi Pertanian	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	150,000,000	Tidak	150,000,000	Tidak	150,000,000	Tidak	150,000,000	Tidak	600,000,000	PERTANAHAN
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanian	Persen	50	66.67	100,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	80	100,000,000	80	400,000,000	PERTANAHAN
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,340,948,997	100	3,341,884,463	100	3,345,894,724	100	3,350,478,600	100	13,379,206,784	DINAS PPPA KB

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	Persen	59.58	59.39	80,000,000	62.02	80,022,400	58.58	80,118,427	60.68	80,228,189	60.68	320,369,016	DINAS PPPA KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	62.50	75.00	189,756,000	87.50	189,809,132	100.00	190,036,903	100.00	190,297,253	100.00	759,899,288	DINAS PPPA KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan	Persen	91.67	91.67	450,000,000	92.41	450,126,000	93.83	450,666,151	94.12	451,283,564	94.12	1,802,075,715	DINAS PPPA KB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Persen	29.41	29.41	19,000,000	32.35	19,005,320	32.35	19,028,126	35.29	19,054,195	35.29	76,087,641	DINAS PPPA KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Persen	30.49	33.46	137,000,000	37.18	137,038,360	39.86	137,202,806	43.38	137,390,774	43.38	548,631,940	DINAS PPPA KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	304,000,000	100	304,085,120	100	304,450,022	100	304,867,119	100	1,217,402,261	DINAS PPPA KB
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	8,534,116,230	100	8,536,505,783	100	8,546,749,589	100	8,558,458,636	100	34,175,830,238	SATPOL PP WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman	Persen	100	100	635,544,500	100	635,722,452	100	636,485,319	100	637,357,304	100	2,545,109,576	SATPOL PP WH
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	5,555,777,941	100	5,557,333,559	100	5,564,002,359	100	5,571,625,042	100	22,248,738,901	BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	4,047,300,000	100	4,048,433,244	100	4,053,291,364	100	4,058,844,373	100	16,207,868,981	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	230,000,000	100	230,064,400	100	230,340,477	100	230,656,044	100	921,060,921	BPBD
		2	Tujuan 2 Memperkuat pelaksanaan syariat islam	Indeks Pembangunan syariat islam	Indeks	80.65	80.75		80.85		80.95		81.00		81.00		
		2.1	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		DSI-PD, MPU
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,258,481,508	100	3,263,347,179	100	3,269,955,957	100	3,273,806,715	100	13,065,591,359	DSI-PD
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Cakupan Pembinaan Syariat Islam	Persen	43.70	48.50	12,993,450,000	53.88	12,997,088,166	53.88	13,001,677,998	59.43	13,017,931,018	59.43	52,010,147,182	DSI-PD
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Dayah dengan Type A	Dayah	5.56	8.11	6,997,140,587	7.89	6,999,099,786	10.26	7,007,498,706	12.50	7,017,098,979	12.50	28,020,838,059	DSI-PD

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,658,481,508	100	2,659,225,883	100	2,662,416,954	100	2,666,064,465	100	10,646,188,810	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa yang tersebarluaskan	Persen	58.33	71.43	573,784,317	71.43	573,944,977	71.43	574,633,711	71.43	575,420,959	71.43	2,297,783,963	MPU
				Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0.74	0.99		0.99		0.99		0.99		0.99		B. MAL
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1,754,184,455	100	1,754,675,627	100	1,756,781,237	100	1,759,188,028	100	7,024,829,347	B. MAL
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0.72	0.99	7,100,000,000	0.99	7,101,988,000	0.99	7,110,510,386	0.99	7,120,251,785	0.99	28,432,750,170	B. MAL
		2.2	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	46.15	53.85		61.54		61.54		76.92		76.92		PK, MAA
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	46.15	53.85	625,000,000	61.54	625,175,000	61.54	625,925,210	76.92	626,782,728	76.92	2,502,882,938	PK
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase pembinaan sanggar seni	Persen	3.45	3.45	80,000,000	3.45	80,022,400	6.90	80,118,427	6.90	80,228,189	6.90	320,369,016	PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase objek sejarah	Persen	50.00	50.00	165,000,000	56.25	165,046,200	56.25	165,244,255	68.75	165,470,640	68.75	660,761,096	PK
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	50.00	50.00	800,000,000	59.09	800,224,000	59.09	801,184,269	68.18	802,281,891	68.18	3,203,690,160	PK
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1,244,170,020	100	1,244,518,388	100	1,134,649,203	100	1,127,868,302	100	4,751,205,913	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Fasilitasi sengketa adat	Persen	100	100	59,952,522	100	59,969,309	100	171,403,878	100	179,974,072	100	471,299,781	MAA
		3.	Tujuan 3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77.57	77.62		77.70		77.73		77.75		77.75		
		3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	15.21	15.22		15.23		15.24		15.25		15.25		PK,MPD
				Angka kelulusan	Persen	99.01	100		100		100		100		100		PK,MPD
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	125,984,467,704	100	126,019,743,355	100	126,170,967,047	100	126,343,821,272	100	504,518,999,378	PK
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	Persen	99.4	98.00	65,460,000,000	98.40	65,478,328,800	98.80	65,556,902,795	99.00	65,646,715,751	99.00	262,141,947,346	PK
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan	Persen	98.36	100	630,000,000	100.00	630,176,400	100.00	630,932,612	100.00	631,796,989	100.00	2,522,906,001	PK
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	88.00	89.47	60,000,000	90.00	60,016,800	91.94	60,088,820	92.31	60,171,142	92.31	240,276,762	PK

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab															
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026																			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.													
1			2		3		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin	Persen	100	100	150,000,000	100	150,042,000	100	150,222,050	100	150,427,855	100	600,691,905	PK															
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1,299,585,998	100	1,299,949,882	100	1,301,509,822	100	1,303,292,890	100	5,204,338,592	MPD															
1	01	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Sekolah yang Menerapkan Asessment Kompetensi Minimum (AKM)	Persen	64.96	75.21	780,113,535	83.76	780,331,967	94.02	781,268,365	100.00	782,338,703	100.00	3,124,052,569	MPD															
		3.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		DISPORAPAR															
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,047,233,425	100	3,048,086,650	100	3,051,744,354	100	3,055,925,244	100	12,202,989,674	DISPORAPAR															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	100	100	625,000,000	100	625,175,000	100	625,925,210	100	626,782,728	100	2,502,882,938	DISPORAPAR															
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4	6	800,000,000	6	800,224,000	7	801,184,269	8	802,281,891	8	3,203,690,160	DISPORAPAR															
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pramuka	Persen	42.86	42.86	300,000,000	42.86	300,084,000	42.86	300,444,101	42.86	300,855,709	42.86	1,201,383,810	DISPORAPAR															
		3.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71.64	71.66		71.68		71.72		71.75		71.75		DINKES, DP3AKB (KB)															
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	63,178,537,000	100	63,196,226,990	100	63,272,062,463	100	63,358,745,188	100	253,005,571,641	DINKES															
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masvarakat	Persen	81.51	100.00	33,822,367,542	100.00	33,831,837,804	100.00	33,872,436,010	100.00	33,918,841,247	100.00	135,445,482,603	DINKES															
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persen	2.43	3.20	335,000,000	4.14	335,093,800	5.41	335,495,913	6.96	335,955,542	22.03	1,341,545,255	DINKES															
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	Persen	100.00	100.00	360,000,000	100.00	360,100,800	100.00	360,532,921	100.00	361,026,851	100.00	1,441,660,572	DINKES															
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	64.98	70.73	235,000,000	83.44	235,065,800	93.17	235,347,879	100.00	235,670,306	100.00	941,083,985	DINKES															
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	47.06	55.88	50,000,000	64.71	50,014,000	67.65	50,074,017	73.53	50,142,618	73.53	200,230,635	DP3AKB (KB)															
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	29.94	52.28	2,894,788,685	51.61	2,895,599,226	51.08	2,899,073,945	50.66	2,903,045,676	50.66	11,592,507,532	DP3AKB (KB)															
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	90.07	97.43	821,913,500	104.78	822,143,636	112.13	823,130,208	119.49	824,257,897	119.49	3,291,445,240	DP3AKB (KB)															
		4.	Tujuan 4 Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	63.7	64.9		65.35		65.8		66.25		66.25																	

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase RTH Publik	Persen	1.62	1.67		2.49		2.69		2.79		2.79		DLH
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	24,297,431,693	100	24,304,234,974	100	24,333,400,056	100	24,366,736,814	100	97,301,803,537	DLH
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunya RPPLH Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	210,000,000	Ada	210,058,800	Ada	220,500,000	Ada	220,802,085	Ada	861,360,885	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63.7	64.9	1,449,000,000	65.35	459,669,000	65.80	542,321,450	66.25	543,064,430	66.25	2,994,054,880	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan taman	Persen	28.91	48.97	3,872,050,000	61.95	3,873,134,174	76.70	3,925,185,125	88.50	3,930,562,629	88.50	15,600,931,928	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	persen	75.00	80.00	200,000,000	85.00	2,098,795,452	90.00	2,196,328,594	95.00	200,000,000	95.00	4,695,124,046	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota.	persen	75.00	80.00	460,000,000	85.00	400,000,000	90.00	400,000,000	95.00	460,000,000	95.00	1,720,000,000	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase aparatur desa yang terlatih	Persen	1.47	7.35	-	7.35	-	7.35	-	7.35	15,000,000	29.41	15,000,000	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	Ada	55,000,000	Ada	-	Ada	55,000,000	Ada	110,000,000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	11,576,250	100.00	11,576,250	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Persen	86.25	87.60	2,969,400,000	89.73	2,066,357,500	91.08	1,889,675,375	93.74	3,750,573,545	93.74	10,676,006,420	DLH
		5.	Tujuan 5 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Persentase pertumbuhan ekonomi	Persen	1.98	3.50		3.60		3.65		3.70		3.70		
		5.1	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp. Milyar	3,403	3,471		3,541		3,612		3,684		3,684		DPMTSP NAKER
				Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Perusahaan	432	452		472		492		512		512		DPMTSP NAKER
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	4,917,616,706	100	4,918,993,639	100	4,940,185,470	100	4,946,953,524	100	19,723,749,339	DPMTSP NAKER
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Persen	NA	33.33	67,620,000	40.00	71,001,000	40.00	74,551,050	46.67	78,278,603	46.67	291,450,653	DPMTSP NAKER
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal	Persen	10.00	20.00	21,000,000	20.00	22,050,000	30.00	23,152,500	20.00	24,310,125	20.00	90,512,625	DPMTSP NAKER

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab															
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026																			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.													
1			2		3		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks	87.02	87.34	191,205,000	87.66	200,765,250	87.98	201,006,168	88.30	190,719,063	88.30	783,695,481	DPMTSP NAKER															
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Indeks	80.56	77.75	548,786,700	76.83	525,408,506	75.98	500,000,000	75.19	500,000,000	75.19	2,074,195,206	DPMTSP NAKER															
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Database Perizinan	Ada/Tidak	Ada	10,920,000	Ada	11,466,000	Ada	12,039,617	Ada	12,641,265	Ada	47,066,882	DPMTSP NAKER																
		5.2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kemiskinan	Persen	11.16	11.1		11.07		11.05		10.95		10.95		DINSOS															
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,118,653,411	100	3,119,526,633	100	3,123,270,065	100	3,127,548,945	100	12,488,999,055	DINSOS															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu	Persen	71.31	73.09	528,463,613	74.92	528,611,583	76.80	529,245,917	78.72	529,970,984	78.72	2,116,292,096	DINSOS															
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	2,061,950,000	100	2,062,527,346	100	2,065,002,379	100	2,067,831,432	100	8,257,311,157	DINSOS															
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	38.61	40.76	2,049,375,000	43.76	2,049,948,825	47.00	2,052,408,764	50.56	2,055,220,564	50.56	8,206,953,152	DINSOS															
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	401,144,524	100	401,256,844	100	401,738,353	100	402,288,734	100	1,606,428,455	DINSOS															
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	Persen	100	100	215,800,000	100	215,860,424	100	216,119,457	100	216,415,540	100	864,195,421	DINSOS															
		5.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11.16	11.12		11.08		11.06		11.04		11.04		DPMTSP NAKER															
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Persen	19.71	13.33	72,292,500	14.29	75,907,125	15.00	75,998,214	15.56	76,102,331	15.56	300,300,170	DPMTSP NAKER															
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen	39.21	54.17	26,250,000	53.57	27,562,500	55.63	28,940,625	57.22	30,387,656	57.22	113,140,781	DPMTSP NAKER															
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	84,000,000	100	88,200,000	100.00	92,610,000	100	97,240,500	100	362,050,500	DPMTSP NAKER															
		5.4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PDRB Perkapita	Rp. (Juta)	33.20	33.35		33.38		33.39		33.40		33.4		DKPPP, DisPrindagkop & UKM															
				Laju Inflasi	Persen	1.97	2.30		2.10		2.07		2.05		2.05		DKPPP, DisPrindagkop & UKM															
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	7,742,624,632	100	7,744,792,567	100	7,754,086,318	100	7,764,709,416	100	31,006,212,933	DKPPP															
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	39.45	39.65	237,000,000	41.38	237,066,360	43.47	237,350,840	45.00	237,676,010	45.00	949,093,210	DKPPP															

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1			2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Persen	33.33	44.44	25,000,000	55.56	25,007,000	66.67	25,037,008	77.78	25,071,309	77.78	100,115,318	DKPPP	
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar	Persen	45.45	45.45	54,000,000	63.64	54,015,120	63.64	54,079,938	90.91	54,154,028	90.91	216,249,086	DKPPP	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	43.34	45.41	1,473,554,150	47.47	1,473,966,745	49.54	1,475,735,505	51.61	1,477,757,263	51.61	5,901,013,663	DKPPP	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok pembudidaya	Persen	43.22	46.52	4,223,689,950	49.83	4,224,872,583	53.14	4,229,942,430	56.45	4,235,737,451	56.45	16,914,242,415	DKPPP	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	41.67	44.17	83,283,845	46.67	83,307,164	49.17	83,407,133	51.67	83,521,401	51.67	333,519,543	DKPPP	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	100	100	86,000,000	100	86,024,080	100	86,127,309	100	86,245,303	100	344,396,692	DKPPP	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Sarana Kelompok Tani	Persen	17.68	25.57	476,000,000	33.46	476,133,280	41.35	476,704,640	49.24	477,357,725	49.24	1,906,195,645	DKPPP	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Kelompok Tani	Persen	17.68	26.10	3,624,066,180	34.51	3,625,080,919	42.93	3,629,431,016	51.34	3,634,403,336	51.34	14,512,981,450	DKPPP	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Persen	37.75	39.87	307,000,000	42.00	307,085,960	44.12	307,454,463	46.24	307,875,676	46.24	1,229,416,099	DKPPP	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	41.76	46.07	93,000,000	50.37	93,026,040	54.68	93,137,671	58.99	93,265,270	58.99	372,428,981	DKPPP	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani	Persen	38.74	38.88	1,640,410,145	40.93	1,640,869,460	42.93	1,642,838,503	44.87	1,645,089,192	44.87	6,569,207,300	DKPPP	
				PDRB Perkapita	Rp. (Juta)	33.20	33.35		33.38		33.39		33.4		33.4		DISPORAPAR (pariwisata)	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Persen	25.00	40.00	554,691,459	60.00	554,846,773	70.00	555,512,589	90.00	556,273,641	90.00	2,221,324,461	DISPORAPAR (pariwisata)	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatkan Kunjungan Wisata	Persen	75.15	95.00	350,000,000	96.88	350,098,000	96.97	350,518,118	97.06	350,998,327	97.06	1,401,614,445	DISPORAPAR (pariwisata)	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata	Persen	100.00	100.00	300,000,000	100.00	300,084,000	100.00	300,444,101	100.00	300,855,709	100.00	1,201,383,810	DISPORAPAR (pariwisata)	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	5,108,284,267	100	5,413,698,480	100	5,534,383,404	100	5,871,102,575	100	21,927,468,726	DISKOP	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki USP	Persen	0.48	0.94	34,650,000	0.93	36,382,500	1.36	38,201,624	1.34	40,111,704	1.34	149,345,828	DISKOP	

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	Persen	79.33	79.72	23,100,000	76.89	24,255,000	83.49	25,467,750	85.38	26,741,138	85.38	99,563,888	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen	4.33	5.66	23,100,000	6.48	24,255,000	7.27	25,467,750	8.04	26,741,138	8.04	99,563,888	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi UMKM	Persen	1.31	23.20	76,969,200	24.89	80,817,660	27.26	84,858,543	29.48	89,101,470	29.48	331,746,873	DISKOP
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Persen	6.08	6.72	531,300,000	7.31	557,865,000	7.87	585,758,250	8.40	615,046,163	8.40	2,289,969,413	DISKOP
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	0.37	0.44	1,500,000,000	0.22	1,600,000,000	0.40	1,500,000,000	0.48	1,500,000,000	0.92	6,100,000,000	DISKOP
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	61.11	59.97	473,000,000	60.01	496,650,000	59.98	521,482,500	59.98	547,556,625	59.98	2,038,689,125	DISKOP
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang	Persen	50.00	50.00	1,255,000,000	75.00	1,317,750,000	80.00	1,383,637,500	83.33	1,100,000,000	83.33	5,056,387,500	DISKOP
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tera Tera Ulang UTTP	Persen	63.47	71.25	1,968,921,600	71.35	2,067,367,680	74.07	2,170,736,064	77.71	1,500,000,000	77.71	7,707,025,344	DISKOP
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah	Persen	4.34	4.95	1,069,816,787	5.27	1,123,307,626	5.77	1,159,473,008	6.27	1,000,000,000	6.27	4,352,597,421	DISKOP
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang memiliki Izin	Persen	4.73	4.74	55,000,000	5.00	57,750,000	5.33	60,637,500	5.65	63,669,375	5.65	237,056,875	DISKOP
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan	Ada/Tidak	Ada	Ada	155,370,292	Ada	163,138,807	Ada	171,295,747	Ada	150,000,000	Ada	639,804,846	DISKOP
		6.	Tujuan 6 Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas	Persen	32.74	34.32		35.98		37.73		39.56		39.56		
		6.1	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Persen Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	65.05	68.26		71.64		75.19		78.91		78.91		PUPR
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	8,316,314,412	100	8,318,642,980	100	8,328,625,352	100	8,340,035,568	100	33,303,618,312	PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65.05	68.26	29,127,228,974	71.64	28,788,014,352	75.19	29,295,537,337	78.91	29,335,415,057	78.91	116,546,195,720	PUPR
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0.43	0.38		0.32		0.27		0.21		0.21		PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	92.29	81.38	3,312,000,000	70.42	3,312,927,360	59.46	3,316,902,873	48.50	3,321,447,030	48.50	13,263,277,263	PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	20.48	21.31	7,199,471,601	22.18	7,201,257,016	23.10	7,210,132,439	24.06	7,220,010,320	24.06	28,830,871,377	PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	67.47	69.61	3,542,841,850	71.86	3,543,833,846	74.21	3,548,086,446	76.69	3,552,947,325	76.69	14,187,709,467	PUPR

Kode			Tujuan, Sasaran, Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1			2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	68.58	71.64	3,087,206,000	74.85	3,088,070,418	78.22	3,091,776,102	81.77	3,096,011,835	81.77	12,363,064,355	PUPR	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan Rumah Lavak Huni	Persen	69.19	69.38	6,019,265,000	69.63	6,021,790,394	69.88	6,032,616,543	70.15	5,544,991,227	70.15	23,618,663,164	PUPR	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0.43	0.38	3,000,000,000	0.32	3,000,000,000	0.27	3,000,000,000	0.21	3,000,000,000	0.21	12,000,000,000	PUPR	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam kondisi baik	Rasio	0.093	0.093	5,069,650,000	0.117	5,071,300,646	0.143	5,077,152,293	0.206	5,084,107,991	0.206	20,302,210,930	PUPR	
				Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47.80	54.47		61.13		67.8		74.47		74.47		PUPR	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan Gedung	Persen	4.00	4.00	2,028,443,740	7.69	2,029,011,704	7.69	2,031,446,518	11.54	2,034,229,600	11.54	8,123,131,563	PUPR	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47.80	54.47	3,580,000,000	61.13	3,581,002,400	67.8	3,585,299,603	74.47	3,590,211,463	74.47	14,336,513,466	PUPR	
				Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan	Rasio	0.50	0.25		0.375		0.25		0.25		0.25		DISHUB	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	4,965,680,000	100	4,967,070,390	100	4,973,030,875	100	4,979,843,927	100	19,885,625,192	DISHUB	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	Persen	41.67	29.17	2,539,065,702	52.08	2,559,692,640	45.83	2,282,380,272	45.83	1,887,000,000	45.83	9,268,138,614	DISHUB	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Ada / Tidak	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-	Ada	1,000,000,000	Ada	1,000,000,000	DISHUB	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan pembangunan selama empat tahun ke depan (2023-2026).

Dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan Kota Lhokseumawe. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama empat tahun ke depan.

7.1.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

7.1.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungannya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan

yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir (2017-2021), pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya untuk dapat mencapainya. Demikian juga proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan operasional, serta kebutuhan belanja untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat kinerja pendapatan Kota Lhokseumawe selama kurun waktu lima tahun terakhir, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta peningkatan pendapatan transfer, baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah dengan kebijakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui:
 - a. Melakukan perhitungan potensi pajak daerah seakurat mungkin sehingga target PAD sama atau minimal mendekati potensi PAD;
 - b. Melakukan pemutakhiran data secara berkala didukung dengan teknologi informasi yang terintegrasi dan menetapkan wajib pajak berdasarkan skala prioritas dari potensi dan kontribusinya;
 - c. Melakukan pendataan usaha baru yang belum terdata sebagai wajib pajak daerah;
 - d. Melakukan pemanggilan secara terus menerus terhadap subjek pajak agar yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah;

- e. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu;
 - f. Melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi yang terlambat atau menunggak pembayaran, dan melakukan pengenaan sanksi;
 - g. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak daerah dan retribusi, bila perlu dilakukan “jemput bola” khususnya untuk wajib pajak potensial;
 - h. Memberlakukan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak daerah dan petugas pemungutan pajak daerah;
 - i. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada wajib pajak daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah;
 - j. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendataan, pemungutan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. Peningkatan pelayanan pajak melalui penetapan kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan secara *online*.
2. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD;
 3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan PAD;
 4. Pendapatan Transfer menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Proyeksi pendapatan daerah Kota Lhokseumawe untuk periode empat tahun mendatang (2023-2026) dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
1	PENDAPATAN DAERAH	751,760,546,834	756,285,409,243	760,774,720,275	765,308,924,419	0.60
	Pendapatan Asli Daerah	70,314,867,843	70,394,867,843	70,394,867,843	70,394,867,843	0.04
	Pajak Daerah	34,060,750,000	34,140,750,000	34,140,750,000	34,140,750,000	0.08
	Pajak Hotel	450,000,000	470,000,000	470,000,000	470,000,000	1.48
	Pajak Restoran	3,755,000,000	3,805,000,000	3,805,000,000	3,805,000,000	0.44
	Pajak Hiburan	170,000,000	170,000,000	170,000,000	170,000,000	-
	Pajak Reklame	686,250,000	696,250,000	696,250,000	696,250,000	0.49
	Pajak Penerangan Jalan	17,005,000,000	17,005,000,000	17,005,000,000	17,005,000,000	-
	Pajak Parkir	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-
	Pajak Air Tanah	67,000,000	67,000,000	67,000,000	67,000,000	-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,012,500,000	1,012,500,000	1,012,500,000	1,012,500,000	-
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	-
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,375,000,000	5,375,000,000	5,375,000,000	5,375,000,000	-
	Retribusi Daerah	4,087,500,000	4,087,500,000	4,087,500,000	4,087,500,000	-
	Retribusi Jasa Umum	3,601,000,000	3,601,000,000	3,601,000,000	3,601,000,000	-
	Retribusi Jasa Usaha	86,500,000	86,500,000	86,500,000	86,500,000	-

No.	Uraian	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
	Retribusi Perizinan Tertentu	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	-
	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000	-
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	26,966,617,843	26,966,617,843	26,966,617,843	26,966,617,843	-
	Jasa Giro	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-
	Pendapatan Bunga	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	-
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13,346,617,843	13,346,617,843	13,346,617,843	13,346,617,843	-
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	-
	Pendapatan Zakat, Infaq Shadaqah, dan Wakaf	8,900,000,000	8,900,000,000	8,900,000,000	8,900,000,000	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	610,978,796,870	615,423,659,279	619,912,970,311	624,447,174,455	0.73
	Dana Bagi Hasil (DBH)	21,673,318,310	21,890,051,493	22,108,952,008	22,330,041,528	1.00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	422,812,922,560	427,041,051,786	431,311,462,303	435,624,576,926	1.00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	109,057,386,000	109,057,386,000	109,057,386,000	109,057,386,000	-
	Dana Insentif Daerah (DID)	3,506,837,000	3,506,837,000	3,506,837,000	3,506,837,000	-
	Dana Desa (DD)	53,928,333,000	53,928,333,000	53,928,333,000	53,928,333,000	-

No.	Uraian	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70,466,882,121	70,466,882,121	70,466,882,121	70,466,882,121	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	31,220,106,455	31,220,106,455	31,220,106,455	31,220,106,455	-
	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)	39,246,775,666	39,246,775,666	39,246,775,666	39,246,775,666	-

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2022, Proyeksi.

Dari Tabel 7.1 di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Pemulihan aktivitas ekonomi diharapkan dapat terus bergerak naik seiring dengan semakin membaiknya dampak Covid-19 di Aceh umumnya dan Kota Lhokseumawe pada khususnya. Pada Tahun 2023 Pajak Daerah diproyeksikan sebesar Rp.34,060 Milyar, dan hingga akhir Tahun 2026 Pajak Daerah di Kota Lhokseumawe diproyeksikan mencapai Rp.34,140 Milyar.

Seiring dengan proyeksi pemulihan aktivitas ekonomi yang terus mengalami peningkatan diharapkan juga dapat memberikan dampak terhadap sektor usaha di Kota Lhokseumawe. Perbaikan aktivitas ekonomi akan sangat mempengaruhi peningkatan PAD dari sektor retribusi daerah. Tahun 2023 retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp.4,087 Milyar hingga akhir periode Tahun 2026 diharapkan dapat terus stabil.

Pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diprediksi meningkat dari realisasi Tahun 2021. Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diharapkan mencapai Rp.5,200 Milyar hingga akhir periode Tahun 2026.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diharapkan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. Proyeksi Lain-Lain PAD yang Sah diharapkan mencapai Rp.26,966 Milyar hingga akhir periode Tahun 2026.

Selanjutnya dari sektor Pendapatan Transfer proyeksi untuk empat tahun ke depan diperkirakan menurun signifikan, terutama dari Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah. Hal ini seiring dengan berkurangnya alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar 50% dari alokasi Tahun 2022. Dengan berkurangnya alokasi DOKA tersebut tentu saja memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan di Kota Lhokseumawe.

7.1.1.2 Proyeksi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe

Analisis proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan operasional, serta kebutuhan belanja untuk melaksanakan program kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu belanja daerah juga diarahkan untuk penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang belum pasti dapat dipastikan sampai kapan, walaupun kondisi saat ini dampak pandemi sudah mulai membaik.

Kebijakan belanja Kota Lhokseumawe untuk periode empat tahun ke depan diarahkan pada:

- a. Belanja daerah dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, dikelola secara tertib dan transparan dengan menerapkan basis akrual;
- b. Pengelolaan belanja daerah menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja, artinya pengalokasian anggaran berdasarkan pada tolok ukur yang jelas dan target kinerja yang terukur;
- c. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah;
- d. Belanja diutamakan untuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, belanja yang mengarah pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan program/kegiatan yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- e. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada peningkatan kinerja ASN.

Untuk mengetahui proyeksi belanja daerah Kota Lhokseumawe selama empat tahun ke depan (2023-2026) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.2
Proyeksi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
2	BELANJA DAERAH	785,785,715,420	786,009,688,717	786,955,593,105	788,033,093,186	0.10
	Belanja Operasi	537,581,444,030	537,040,543,991	537,224,052,659	537,533,563,573	(0.003)
	Belanja Pegawai	319,574,960,483	321,172,835,285	322,778,699,461	324,392,592,959	0.50
	Belanja Barang dan Jasa	170,127,171,557	170,382,362,314	171,234,274,126	172,090,445,496	0.383
	Belanja Hibah	18,730,582,364	17,794,053,245	16,904,350,583	16,059,133,054	(5.00)
	Belanja Bantuan Sosial	29,148,729,628	27,691,293,146	26,306,728,489	24,991,392,064	(5.00)
	Belanja Modal	137,470,527,690	138,227,401,026	138,989,796,746	139,757,785,913	0.55
	Belanja Tak Terduga	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-
	Belanja Transfer	107,733,743,700	107,741,743,700	107,741,743,700	107,741,743,700	0.002
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	3,814,825,000	3,822,825,000	3,822,825,000	3,822,825,000	0.07
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	103,918,918,700	103,918,918,700	103,918,918,700	103,918,918,700	-

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2022, Proyeksi.

Dari Tabel 7.2 di atas dapat dilihat bahwa belanja Kota Lhokseumawe secara umum terjadi peningkatan untuk empat tahun ke depan. Pada Belanja Pegawai diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil proyeksi, kelompok belanja pegawai pada Tahun 2026 mencapai Rp.324,392 Milyar dengan rata-rata pertumbuhan 0,10%. Pada komponen belanja barang dan jasa diperkirakan meningkat sebesar 0,38% pertahun untuk periode empat tahun ke depan. Pada akhir periode Tahun 2026 belanja barang dan jasa diperkirakan sebesar Rp.172,090 Milyar.

Pada belanja hibah, dan belanja bantuan sosial diharapkan dapat diperuntukkan sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Walaupun proyeksi belanja hibah, dan belanja bantuan sosial terjadi penurunan hingga Tahun 2026 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan tahun-tahun politik pada Tahun 2024 dan 2025.

Selanjutnya belanja modal diproyeksikan tumbuh rata-rata 0,50% per tahun, sehingga pada Tahun 2026 belanja modal diproyeksikan menjadi Rp.139,757 Milyar. Kelompok Belanja Tak Terduga diproyeksikan akan konstan setiap tahunnya, walaupun terjadi penurunan sebesar 19% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Alokasi Belanja Tak Terduga merupakan bentuk dana yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pada keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pada kelompok Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp.107,741 Milyar hingga akhir periode Tahun 2026.

7.1.1.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebagikan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan semua pengeluaran yang dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Tabel 7.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
3	PEMBIAYAAN DAERAH	34,025,168,586	29,724,279,474	26,180,872,830	22,724,168,767	(12.59)
	Penerimaan Pembiayaan	36,025,168,586	31,724,279,474	28,180,872,830	24,724,168,767	(11.79)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	36,025,168,586	31,724,279,474	28,180,872,830	24,724,168,767	(11.79)
	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
	Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2022, Proyeksi.

Pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe dari penerimaan pembiayaan diproyeksi mengalami penurunan selama periode empat tahun ke depan. Hal tersebut dicapai melalui penurunan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang ditargetkan terus mengalami penurunan hingga Tahun 2026. Penurunan penerimaan pembiayaan dikarenakan realisasi belanja pada setiap program perangkat daerah dapat direalisasikan dengan baik. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan konstan hingga akhir periode Tahun 2026.

7.1.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Lhokseumawe selama empat tahun ke depan. Perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang disajikan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi yang terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Perhitungan kerangka pendanaan merupakan kemampuan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk membiayai seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer, serta pengeluaran pembiayaan dengan memperhatikan kapasitas riil kemampuan pendanaan daerah.

Pengaturan agar tetap terarah, efektif dan efisien maka penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2023-2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif, dan efisien.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif ASN, belanja bagi hasil kepada gampong, dan belanja operasional kantor dengan prinsip efisien dan efektif.

Untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.4 dan 7.5 berikut.

Tabel 7.4
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
1	Pendapatan	751,760,546,834	756,285,409,243	760,774,720,275	765,308,924,419	0.60
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	36,025,168,586	31,724,279,474	28,180,872,830	24,724,168,767	(11.79)
	Total Penerimaan	787,785,715,420	788,009,688,717	788,955,593,105	790,033,093,186	0.10
	Dikurangi :					
3	Total Belanja Wajib Mengikat	430,308,704,183	431,914,578,985	433,520,443,161	435,134,336,659	0.37
	Belanja Pegawai	319,574,960,483	321,172,835,285	322,778,699,461	324,392,592,959	0.50
	Belanja Bagi Hasil	3,814,825,000	3,822,825,000	3,822,825,000	3,822,825,000	0.07
	Belanja Bantuan Keuangan	103,918,918,700	103,918,918,700	103,918,918,700	103,918,918,700	-
	Belanja Tak Terduga	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	-
4	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
	Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	355,477,011,237	354,095,109,732	353,435,149,943	352,898,756,527	(0.24)

Sumber : Proyeksi, 2022.

Tabel 7.5
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2023	2024	2025	2026	
I.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	355,477,011,237	354,095,109,732	353,435,149,943	352,898,756,527	(0.24)
	Penggunaan :	355,477,011,238	354,095,109,732	353,435,149,944	352,898,756,527	(0.24)
II.	Prioritas I	166,619,257,318	165,918,694,172	165,296,525,235	164,749,177,977	(0.38)
III.	Prioritas II	188,857,753,920	188,176,415,560	188,138,624,709	188,149,578,550	(0.13)

Sumber : Proyeksi, 2022.

7.2 Program Perangkat Daerah

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kota Lhokseumawe juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.4 di atas. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Melalui penyajian program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan aspek-aspek pembangunan dan urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPK Lhokseumawe guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detil program-program RPK Lhokseumawe yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.6 berikut:

Tabel 7.6
INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2023 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			TOTAL BELANJA DAERAH					785,785,715,420		786,009,688,717		786,955,593,105		788,033,093,185		3,146,784,090,426	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					400,952,759,161		400,717,656,395		401,671,494,951		401,721,527,732		1,605,063,438,238	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2,079,699,533		2,080,281,849		2,082,778,187		2,085,631,593		8,328,391,161	MPD
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1,299,585,998	100	1,299,949,882	100	1,301,509,822	100	1,303,292,890	100	5,204,338,592	MPD
1	01	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Sekolah yang Menerapkan Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	Persen	64.96	75.21	780,113,535	83.76	780,331,967	94.02	781,268,365	100.00	782,338,703	100.00	3,124,052,569	MPD
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					192,284,467,704		192,338,307,355		192,569,113,324		192,832,933,009		770,024,821,392	PK
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	133,984,467,704	100	134,019,743,355	100	134,170,967,047	100	134,343,821,272	100	536,518,999,378	PK
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	Persen	99.4	98.00	57,460,000,000	98.40	57,478,328,800	98.80	57,556,902,795	99.00	57,646,715,751	99.00	230,141,947,346	PK
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan	Persen	98.36	100	630,000,000	100.00	630,176,400	100.00	630,932,612	100.00	631,796,989	100.00	2,522,906,001	PK
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	88.00	89.47	60,000,000	90.00	60,016,800	91.94	60,088,820	92.31	60,171,142	92.31	240,276,762	PK
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin	Persen	100	100	150,000,000	100	150,042,000	100	150,222,050	100	150,427,855	100	600,691,905	PK
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					6,997,140,587		6,999,099,786		7,007,498,706		7,017,098,979		28,020,838,059	DSI-PD
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Dayah dengan Type A	Dayah	5.56	8.11	6,997,140,587	7.89	6,999,099,786	10.26	7,007,498,706	12.50	7,017,098,979	12.50	28,020,838,059	DSI-PD
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					97,930,904,542		97,958,325,195		98,075,875,185		98,210,239,134		392,175,344,055	DINKES
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	63,178,537,000	100	63,196,226,990	100	63,272,062,463	100	63,358,745,188	100	253,005,571,641	DINKES
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masvarakat	Persen	81.51	100.00	33,822,367,542	100.00	33,831,837,804	100.00	33,872,436,010	100.00	33,918,841,247	100.00	135,445,482,603	DINKES
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persen	2.43	3.20	335,000,000	4.14	335,093,800	5.41	335,495,913	6.96	335,955,542	22.03	1,341,545,255	DINKES
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	Persen	100.00	100.00	360,000,000	100.00	360,100,800	100.00	360,532,921	100.00	361,026,851	100.00	1,441,660,572	DINKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	64.98	70.73	235,000,000	83.44	235,065,800	93.17	235,347,879	100.00	235,670,306	100.00	941,083,985	DINKES
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				60,193,506,577		59,862,760,076		60,407,806,670		60,490,308,199		240,954,381,522	PUPR	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	8,316,314,412	100	8,318,642,980	100	8,328,625,352	100	8,340,035,568	100	33,303,618,312	PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	92.29	81.38	3,312,000,000	70.42	3,312,927,360	59.46	3,316,902,873	48.50	3,321,447,030	48.50	13,263,277,263	PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	20.48	21.31	7,199,471,601	22.18	7,201,257,016	23.10	7,210,132,439	24.06	7,220,010,320	24.06	28,830,871,377	PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	67.47	69.61	3,542,841,850	71.86	3,543,833,846	74.21	3,548,086,446	76.69	3,552,947,325	76.69	14,187,709,467	PUPR
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	68.58	71.64	3,087,206,000	74.85	3,088,070,418	78.22	3,091,776,102	81.77	3,096,011,835	81.77	12,363,064,355	PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	Persen	4.00	4.00	2,028,443,740	7.69	2,029,011,704	7.69	2,031,446,518	11.54	2,034,229,600	11.54	8,123,131,563	PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65.05	68.26	29,127,228,974	71.64	28,788,014,352	75.19	29,295,537,337	78.91	29,335,415,057	78.91	116,546,195,720	PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47.80	54.47	3,580,000,000	61.13	3,581,002,400	67.8	3,585,299,603	74.47	3,590,211,463	74.47	14,336,513,466	PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				14,088,915,000		14,093,091,040		14,109,768,835		13,629,099,219		55,920,874,094	PUPR	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	Persen	69.19	69.38	6,019,265,000	69.63	6,021,790,394	69.88	6,032,616,543	70.15	5,544,991,227	70.15	23,618,663,164	PUPR
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0.43	0.38	3,000,000,000	0.32	3,000,000,000	0.27	3,000,000,000	0.21	3,000,000,000	0.21	12,000,000,000	PUPR
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam kondisi baik	Rasio	0.093	0.093	5,069,650,000	0.117	5,071,300,646	0.143	5,077,152,293	0.206	5,084,107,991	0.206	20,302,210,930	PUPR
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9,833,077,941		9,835,831,203		9,847,634,200		9,861,125,459		39,377,668,803	BPBD	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	5,555,777,941	100	5,557,333,559	100	5,564,002,359	100	5,571,625,042	100	22,248,738,901	BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	4,047,300,000	100	4,048,433,244	100	4,053,291,364	100	4,058,844,373	100	16,207,868,981	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	230,000,000	100	230,064,400	100	230,340,477	100	230,656,044	100	921,060,921	BPBD
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9,169,660,730		9,172,228,235		9,183,234,909		9,195,815,941		36,720,939,815	SATPOL PP WH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	8,534,116,230	100	8,536,505,783	100	8,546,749,589	100	8,558,458,636	100	34,175,830,238	SATPOL PP WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketenteraman	Persen	100	100	635,544,500	100	635,722,452	100	636,485,319	100	637,357,304	100	2,545,109,576	SATPOL PP WH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8,375,386,548		8,377,731,656		8,387,784,934		8,399,276,199		33,540,179,336	DINSOS	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,118,653,411	100	3,119,526,633	100	3,123,270,065	100	3,127,548,945	100	12,488,999,055	DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu	Persen	71.31	73.09	528,463,613	74.92	528,611,583	76.80	529,245,917	78.72	529,970,984	78.72	2,116,292,096	DINSOS
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	2,061,950,000	100	2,062,527,346	100	2,065,002,379	100	2,067,831,432	100	8,257,311,157	DINSOS
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	38.61	40.76	2,049,375,000	43.76	2,049,948,825	47.00	2,052,408,764	50.56	2,055,220,564	50.56	8,206,953,152	DINSOS
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	401,144,524	100	401,256,844	100	401,738,353	100	402,288,734	100	1,606,428,455	DINSOS
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	Persen	100	100	215,800,000	100	215,860,424	100	216,119,457	100	216,415,540	100	864,195,421	DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				95,397,051,635		95,459,516,285		94,881,194,461		96,685,495,765		382,423,258,146		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5,100,159,206		5,110,663,264		5,137,734,309		5,150,684,011		20,499,240,790	DPMTSP NAKER	
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	4,917,616,706	100	4,918,993,639	100	4,940,185,470	100	4,946,953,524	100	19,723,749,339	DPMTSP NAKER
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Persen	19.71	13.33	72,292,500	14.29	75,907,125	15.00	75,998,214	15.56	76,102,331	15.56	300,300,170	DPMTSP NAKER
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen	39.21	54.17	26,250,000	53.57	27,562,500	55.63	28,940,625	57.22	30,387,656	57.22	113,140,781	DPMTSP NAKER
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	84,000,000	100	88,200,000	100.00	92,610,000	100	97,240,500	100	362,050,500	DPMTSP NAKER
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,520,704,997		4,521,970,794		4,527,397,159		4,533,599,693		18,103,672,644	DP3AP2 KB	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,340,948,997	100	3,341,884,463	100	3,345,894,724	100	3,350,478,600	100	13,379,206,784	DP3AP2 KB
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	Persen	59.58	59.39	80,000,000	62.02	80,022,400	58.58	80,118,427	60.68	80,228,189	60.68	320,369,016	DP3AP2 KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	62.50	75.00	189,756,000	87.50	189,809,132	100.00	190,036,903	100.00	190,297,253	100.00	759,899,288	DP3AP2 KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan	Persen	91.67	91.67	450,000,000	92.41	450,126,000	93.83	450,666,151	94.12	451,283,564	94.12	1,802,075,715	DP3AP2 KB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Persen	29.41	29.41	19,000,000	32.35	19,005,320	32.35	19,028,126	35.29	19,054,195	35.29	76,087,641	DP3AP2 KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Persen	30.49	33.46	137,000,000	37.18	137,038,360	39.86	137,202,806	43.38	137,390,774	43.38	548,631,940	DP3AP2 KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	304,000,000	100	304,085,120	100	304,450,022	100	304,867,119	100	1,217,402,261	DP3AP2 KB
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8,058,624,632		8,060,881,047		8,070,554,104		8,081,610,763		32,271,670,546	DKPPP
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	7,742,624,632	100	7,744,792,567	100	7,754,086,318	100	7,764,709,416	100	31,006,212,933	DKPPP
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	39.45	39.65	237,000,000	41.38	237,066,360	43.47	237,350,840	45.00	237,676,010	45.00	949,093,210	DKPPP
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Persen	33.33	44.44	25,000,000	55.56	25,007,000	66.67	25,037,008	77.78	25,071,309	77.78	100,115,318	DKPPP
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar	Persen	45.45	45.45	54,000,000	63.64	54,015,120	63.64	54,079,938	90.91	54,154,028	90.91	216,249,086	DKPPP
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					4,175,813,000		4,276,520,228		4,279,552,052		4,383,017,538		17,114,902,818	PERTANAHAN
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,725,813,000	100	2,826,520,228	100	2,829,552,052	100	2,933,017,538	100	11,314,902,818	PERTANAHAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Santunan Persertifikatan	Persen	NA	66.67	200,000,000	80.00	200,000,000	83.33	200,000,000	86.67	200,000,000	86.67	800,000,000	PERTANAHAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penanganan Tanah Kosong	Persen	NA	15.00	100,000,000	20.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	100,000,000	25.00	400,000,000	PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	Persen	0.51	0.55	200,000,000	0.59	200,000,000	0.63	200,000,000	0.67	200,000,000	0.67	800,000,000	PERTANAHAN
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	Persen	33.88	44.87	150,000,000	45.64	150,000,000	46.42	150,000,000	46.42	150,000,000	46.42	600,000,000	PERTANAHAN
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Tanah yang Dipetakan	Persen	47.86	66.21	200,000,000	67.80	200,000,000	67.07	200,000,000	68.66	200,000,000	68.66	800,000,000	PERTANAHAN
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase Pembinaan SDM Pertanian	Persen	35.09	43.86	200,000,000	52.63	200,000,000	57.02	200,000,000	70.18	200,000,000	70.18	800,000,000	PERTANAHAN
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai	Persen	NA	54.17	150,000,000	58.33	150,000,000	62.50	150,000,000	66.67	150,000,000	66.67	600,000,000	PERTANAHAN
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Ketersediaan Sistem Informasi Pertanian	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	150,000,000	Tidak	150,000,000	Tidak	150,000,000	Tidak	150,000,000	Tidak	600,000,000	PERTANAHAN
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanian	Persen	50	66.67	100,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	80	100,000,000	80	400,000,000	PERTANAHAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					33,457,881,693		33,467,249,900		33,507,410,600		33,553,315,753		133,985,857,946	DLH
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	24,297,431,693	100	24,304,234,974	100	24,333,400,056	100	24,366,736,814	100	97,301,803,537	DLH
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunya RPPLH Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	210,000,000	Ada	210,058,800	Ada	220,500,000	Ada	220,802,085	Ada	861,360,885	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63.7	64.9	1,449,000,000	65.35	459,669,000	65.80	542,321,450	66.25	543,064,430	66.25	2,994,054,880	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan taman	Persen	28.91	48.97	3,872,050,000	61.95	3,873,134,174	76.70	3,925,185,125	88.50	3,930,562,629	88.50	15,600,931,928	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	persen	75.00	80.00	200,000,000	85.00	2,098,795,452	90.00	2,196,328,594	95.00	200,000,000	95.00	4,695,124,046	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota.	persen	75.00	80.00	460,000,000	85.00	400,000,000	90.00	400,000,000	95.00	460,000,000	95.00	1,720,000,000	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase aparatur desa yang terlatih	Persen	1.47	7.35	-	7.35	-	7.35	-	7.35	15,000,000	29.41	15,000,000	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	Ada	55,000,000	Ada	-	Ada	55,000,000	Ada	110,000,000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	11,576,250	100.00	11,576,250	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Persen	86.25	87.60	2,969,400,000	89.73	2,066,357,500	91.08	1,889,675,375	93.74	3,750,573,545	93.74	10,676,006,420	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4,147,746,264		4,148,907,633		4,153,886,322		4,159,577,146		16,610,117,365	DISDUK CAPIL	
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,373,420,000	100	3,374,364,558	100	3,378,413,795	100	3,383,042,222	100	13,509,240,575	DISDUK CAPIL	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	58.24	66.16	224,326,264	71.18	224,389,075	74.88	224,658,342	71.07	224,966,124	71.07	898,339,806	DISDUK CAPIL	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	84.77	86.42	200,000,000	87.77	200,056,000	88.85	200,296,067	89.60	200,570,473	89.60	800,922,540	DISDUK CAPIL	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	58.3	100	300,000,000	100	300,084,000	100	300,444,101	100	300,855,709	100	1,201,383,810	DISDUK CAPIL	
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	Ada/Tidak	Tidak	Ada	50,000,000	Ada	50,014,000	Ada	50,074,017	Ada	50,142,618	Ada	200,230,635	DISDUK CAPIL	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3,325,295,971		3,326,227,054		3,330,218,526		3,334,780,926		13,316,522,477	DPMG	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,756,553,827	100	2,757,327,902	100	2,760,636,696	100	2,764,418,768	100	11,038,937,192	DPMG	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik	Persen	94.12	95.59	5,000,000	95.59	5,000,000	95.59	5,000,000	100.00	3,472,875	100.00	18,472,875	DPMG	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Gampong	Persen	25.00	51.47	3,000,000	67.65	3,000,000	73.53	3,500,000	100.00	3,472,875	100.00	12,972,875	DPMG	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Persen	57.61	67.13	280,027,100	74.49	280,105,508	81.84	280,441,634	98.75	290,428,940	98.75	1,131,003,182	DPMG	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	51.84	81.25	280,715,044	86.03	280,793,644	91.54	280,640,197	91.54	272,987,468	97.79	1,115,136,353	DPMG	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026																			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																
1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																													
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	47.06	55.88	50,000,000	64.71	50,014,000	67.65	50,074,017	73.53	50,142,618	73.53	200,230,635																
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	29.94	52.28	2,894,788,685	51.61	2,895,599,226	51.08	2,899,073,945	50.66	2,903,045,676	50.66	11,592,507,532																
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	90.07	97.43	821,913,500	104.78	822,143,636	112.13	823,130,208	119.49	824,257,897	119.49	3,291,445,240																
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7,504,745,702		7,526,763,031		7,255,411,146		7,866,843,927		30,153,763,806																
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	4,965,680,000	100	4,967,070,390	100	4,973,030,875	100	4,979,843,927	100	19,885,625,192																
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	Persen	41.67	29.17	2,539,065,702	52.08	2,559,692,640	45.83	2,282,380,272	45.83	1,887,000,000	45.83	9,268,138,614																
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Ada / Tidak	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	Tidak	-	Ada	1,000,000,000	Ada	1,000,000,000																
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					2,229,203,194		2,229,848,371		2,232,614,189		2,235,775,621		8,927,441,375																
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,133,945,004	100	2,134,574,709	100	2,137,614,189	100	2,140,775,621	100	8,546,909,523																
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Persen	26.67	26.25	55,258,190	23.68	55,273,662	26.32	45,000,000	30.00	45,000,000	30.00	200,531,852																
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	Persen	2.94	5.88	40,000,000	11.76	40,000,000	17.65	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	180,000,000																
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5,797,403,467		6,137,273,640		6,294,137,321		6,668,844,188		24,897,658,616																
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	5,108,284,267	100	5,413,698,480	100	5,534,383,404	100	5,871,102,575	100	21,927,468,726																
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki USP	Persen	0.48	0.94	34,650,000	0.93	36,382,500	1.36	38,201,624	1.34	40,111,704	1.34	149,345,828																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	Persen	79.33	79.72	23,100,000	76.89	24,255,000	83.49	25,467,750	85.38	26,741,138	85.38	99,563,888	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen	4.33	5.66	23,100,000	6.48	24,255,000	7.27	25,467,750	8.04	26,741,138	8.04	99,563,888	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi UMKM	Persen	1.31	23.20	76,969,200	24.89	80,817,660	27.26	84,858,543	29.48	89,101,470	29.48	331,746,873	DISKOP
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Persen	6.08	6.72	531,300,000	7.31	557,865,000	7.87	585,758,250	8.40	615,046,163	8.40	2,289,969,413	DISKOP
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				839,531,700		830,690,756		810,749,335		805,949,055		3,286,920,847	DPMTSP NAKER	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Persen	NA	33.33	67,620,000	40.00	71,001,000	40.00	74,551,050	46.67	78,278,603	46.67	291,450,653	DPMTSP NAKER
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal	Persen	10.00	20.00	21,000,000	20.00	22,050,000	30.00	23,152,500	20.00	24,310,125	20.00	90,512,625	DPMTSP NAKER
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks	87.02	87.34	191,205,000	87.66	200,765,250	87.98	201,006,168	88.30	190,719,063	88.30	783,695,481	DPMTSP NAKER
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Indeks	80.56	77.75	548,786,700	76.83	525,408,506	75.98	500,000,000	75.19	500,000,000	75.19	2,074,195,206	DPMTSP NAKER
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Database Perizinan	Ada/Tidak	Ada	Ada	10,920,000	Ada	11,466,000	Ada	12,039,617	Ada	12,641,265	Ada	47,066,882	DPMTSP NAKER
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,772,233,425		4,773,569,650		4,779,297,934		4,785,845,572		19,110,946,581	DISPORAPAR	
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,047,233,425	100	3,048,086,650	100	3,051,744,354	100	3,055,925,244	100	12,202,989,674	DISPORAPAR
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	100	100	625,000,000	100	625,175,000	100	625,925,210	100	626,782,728	100	2,502,882,938	DISPORAPAR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4	6	800,000,000	6	800,224,000	7	801,184,269	8	802,281,891	8	3,203,690,160	DISPORAPAR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pramuka	Persen	42.86	42.86	300,000,000	42.86	300,084,000	42.86	300,444,101	42.86	300,855,709	42.86	1,201,383,810	DISPORAPAR
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		300,000,000	KOMINFO	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi	Persen	2.94	5.88	75,000,000	8.82	75,000,000	11.76	75,000,000	11.76	75,000,000	11.76	300,000,000	KOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1,670,000,000		1,670,467,600		1,672,472,161		1,674,763,448		6,687,703,209	PK	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	46.15	53.85	625,000,000	61.54	625,175,000	61.54	625,925,210	76.92	626,782,728	76.92	2,502,882,938	PK
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pembinaan sanggar seni	Persen	3.45	3.45	80,000,000	3.45	80,022,400	6.90	80,118,427	6.90	80,228,189	6.90	320,369,016	PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase objek sejarah	Persen	50.00	50.00	165,000,000	56.25	165,046,200	56.25	165,244,255	68.75	165,470,640	68.75	660,761,096	PK
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	50.00	50.00	800,000,000	59.09	800,224,000	59.09	801,184,269	68.18	802,281,891	68.18	3,203,690,160	PK
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1,304,122,542		1,304,487,696		1,306,053,081		1,307,842,374		5,222,505,693	MAA
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1,244,170,020	100	1,244,518,388	100	1,134,649,203	100	1,127,868,302	100	4,751,205,913	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Fasilitasi sengketa adat	Persen	100	100	59,952,522	100	59,969,309	100	171,403,878	100	179,974,072	100	471,299,781	MAA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4,336,883,657		3,900,488,760		3,329,140,551		3,925,947,682		15,492,460,650	ARPUS
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,888,926,422	100	3,100,488,760	100	2,846,513,199	100	3,419,188,861	100	13,255,117,242	ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	Persen	4.34	6.85	447,957,235	9.02	800,000,000	11.10	482,627,352	13.09	506,758,821	13.09	2,237,343,408	ARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					315,000,000		330,750,000		347,287,500		364,651,875		1,357,689,375	ARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	Persen	3.77	7.41	120,000,000	10.91	126,000,000	14.29	132,300,000	17.54	138,915,000	17.54	517,215,000	ARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip	Persen	10.00	18.18	195,000,000	25.00	204,750,000	30.77	214,987,500	35.71	225,736,875	35.71	840,474,375	ARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					19,688,804,408		20,041,359,117		20,198,515,797		19,110,606,295		79,039,285,617	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5,866,527,945		5,868,170,573		5,875,212,378		5,883,261,418		23,493,172,314	DKPPP
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	43.34	45.41	1,473,554,150	47.47	1,473,966,745	49.54	1,475,735,505	51.61	1,477,757,263	51.61	5,901,013,663	DKPPP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok pembudidaya	Persen	43.22	46.52	4,223,689,950	49.83	4,224,872,583	53.14	4,229,942,430	56.45	4,235,737,451	56.45	16,914,242,415	DKPPP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	41.67	44.17	83,283,845	46.67	83,307,164	49.17	83,407,133	51.67	83,521,401	51.67	333,519,543	DKPPP
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	100	100	86,000,000	100	86,024,080	100	86,127,309	100	86,245,303	100	344,396,692	DKPPP
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1,204,691,459		1,205,028,773		1,206,474,807		1,208,127,678		4,824,322,716	DISPORAPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Persen	25.00	40.00	554,691,459	60.00	554,846,773	70.00	555,512,589	90.00	556,273,641	90.00	2,221,324,461	DISPORAPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatkan Kunjungan Wisata	Persen	75.15	95.00	350,000,000	96.88	350,098,000	96.97	350,518,118	97.06	350,998,327	97.06	1,401,614,445	DISPORAPAR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata	Persen	100.00	100.00	300,000,000	100.00	300,084,000	100.00	300,444,101	100.00	300,855,709	100.00	1,201,383,810	DISPORAPAR
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6,140,476,325		6,142,195,658		6,149,566,293		6,157,991,199		24,590,229,476	DKPPP
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Sarana Kelompok Tani	Persen	17.68	25.57	476,000,000	33.46	476,133,280	41.35	476,704,640	49.24	477,357,725	49.24	1,906,195,645	DKPPP
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Kelompok Tani	Persen	17.68	26.10	3,624,066,180	34.51	3,625,080,919	42.93	3,629,431,016	51.34	3,634,403,336	51.34	14,512,981,450	DKPPP
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Persen	37.75	39.87	307,000,000	42.00	307,085,960	44.12	307,454,463	46.24	307,875,676	46.24	1,229,416,099	DKPPP
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	41.76	46.07	93,000,000	50.37	93,026,040	54.68	93,137,671	58.99	93,265,270	58.99	372,428,981	DKPPP
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani	Persen	38.74	38.88	1,640,410,145	40.93	1,640,869,460	42.93	1,642,838,503	44.87	1,645,089,192	44.87	6,569,207,300	DKPPP
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5,196,921,600		5,481,767,680		5,575,856,064		4,647,556,625		20,902,101,969	DISKOP
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	0.37	0.44	1,500,000,000	0.22	1,600,000,000	0.40	1,500,000,000	0.48	1,500,000,000	0.92	6,100,000,000	DISKOP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	61.11	59.97	473,000,000	60.01	496,650,000	59.98	521,482,500	59.98	547,556,625	59.98	2,038,689,125	DISKOP
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang	Persen	50.00	50.00	1,255,000,000	75.00	1,317,750,000	80.00	1,383,637,500	83.33	1,100,000,000	83.33	5,056,387,500	DISKOP
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tera Tera Ulang UTTP	Persen	63.47	71.25	1,968,921,600	71.35	2,067,367,680	74.07	2,170,736,064	77.71	1,500,000,000	77.71	7,707,025,344	DISKOP
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1,280,187,079		1,344,196,433		1,391,406,255		1,213,669,375		5,229,459,142	DISKOP
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah	Persen	4.34	4.95	1,069,816,787	5.27	1,123,307,626	5.77	1,159,473,008	6.27	1,000,000,000	6.27	4,352,597,421	DISKOP
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase IKM yang memiliki Izin	Persen	4.73	4.74	55,000,000	5.00	57,750,000	5.33	60,637,500	5.65	63,669,375	5.65	237,056,875	DISKOP
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan	Ada/Tidak	Ada	Ada	155,370,292	Ada	163,138,807	Ada	171,295,747	Ada	150,000,000	Ada	639,804,846	DISKOP
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					64,129,850,202		64,147,806,560		64,224,783,928		64,312,771,882		256,815,212,572	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					37,829,758,455		37,840,350,787		37,885,759,208		37,937,662,698		151,493,531,149	SETDAKO
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	25,426,262,442	100	25,430,021,795	100	25,446,137,822	100	25,464,559,030	100	101,766,981,090	SETDAKO
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	98.53	98.70	11,803,225,020	98.70	11,809,889,923	98.70	11,838,461,791	98.70	11,871,120,484	98.70	47,322,697,217	SETDAKO
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	91.11	97.00	600,270,993	97.00	600,439,069	92.00	601,159,596	92.00	601,983,184	92.00	2,403,852,842	SETDAKO
4	02		SEKRETARIAT DPRD					26,300,091,747		26,307,455,773		26,339,024,720		26,375,109,183		105,321,681,423	SETWAN
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	20,346,871,300	100	20,352,568,424	100	20,376,991,506	100	20,404,907,984	100	81,481,339,214	SETWAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan	Persen	41.18	70.00	5,953,220,447	72.73	5,954,887,349	81.82	5,962,033,214	83.33	5,970,201,199	83.33	23,840,342,208	SETWAN	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					153,389,600,588		153,397,668,916			153,681,877,419		153,838,172,143		614,307,319,066	
5	01		PERENCANAAN					7,713,749,614		7,715,909,464			7,725,168,555		7,735,752,036		30,890,579,669	BAPPEDA
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	6,450,267,996	100	6,452,074,071	100	6,459,816,560	100	6,468,666,509	100	25,830,825,136	BAPPEDA	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	620,006,618	Ada	620,180,220	Ada	620,924,436	Ada	621,775,103	Ada	2,482,886,377	BAPPEDA	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Persen	100	100	643,475,000	100	643,655,173	100	644,427,559	100	645,310,425	100	2,576,868,157	BAPPEDA	
5	02		KEUANGAN					131,559,461,374		131,596,298,023			131,754,213,581		131,934,716,853		526,844,689,831	BPKD
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	13,090,306,814	100	13,093,972,100	100	13,109,684,866	100	13,127,645,135	100	52,421,608,915	BPKD	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	110,670,296,514	Tepat Waktu	110,701,284,197	Tepat Waktu	110,834,125,738	Tepat Waktu	110,985,968,490	Tepat Waktu	443,191,674,939	BPKD	
5	02	02		Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPKD	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	6,334,358,046	100.00	6,336,131,666	100.00	6,343,735,024	100.00	6,352,425,941	100.00	25,366,650,678	BPKD	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PAD	Persen	68.50	100	1,464,500,000	100	1,464,910,060	100	1,466,667,952	100	1,468,677,287	100	5,864,755,299	BPKD	
5	03		KEPEGAWAIAN					12,839,389,600		12,842,984,629			12,858,396,211		12,876,012,213		51,416,782,653	BKPSDM
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	10,346,473,419	100	10,349,370,432	100	10,361,789,676	100	10,375,985,328	100	41,433,618,855	BKPSDM	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	Persen	50.60	52.19	2,492,916,181	53.10	2,493,614,198	54.02	2,496,606,535	54.94	2,500,026,886	54.94	9,983,163,799	BKPSDM	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					810,000,000		810,226,800			811,199,072		812,310,415		3,243,736,287	BKPSDM
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural	Persen	8.77	9.36	810,000,000	9.75	810,226,800	10.14	811,199,072	10.33	812,310,415	10.33	3,243,736,287	BKPSDM	
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					467,000,000		432,250,000			532,900,000		479,380,625		1,911,530,625	BAPPEDA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	50.00	85.71	467,000,000	75.00	432,250,000	75.00	532,900,000	67.86	479,380,625	100.00	1,911,530,625	BAPPEDA	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				8,434,074,464		8,436,436,005		8,446,559,728		8,458,131,515		33,775,201,712		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				8,434,074,464		8,436,436,005		8,446,559,728		8,458,131,515		33,775,201,712	INSPEKTORAT	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	6,332,346,053	100	6,334,119,110	100	6,341,720,053	100	6,350,408,209	100	25,358,593,425	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	78.35	80.02	1,698,321,461	81.43	1,698,796,991	82.60	1,700,835,547	83.56	1,703,165,692	83.56	6,801,119,692	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Point / Kategori	Proses	CC 50.10	403,406,950	CC 50.50	403,519,904	CC 51.00	404,004,128	CC 51.50	404,557,613	CC 51.50	1,615,488,595	INSPEKTORAT
6	01	03		Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		INSPEKTORAT
6	01	03		Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	Level/Point	Level 2	Level 3 3.2		Level 3 3.2		Level 3 3.5		Level 3 3.5		Level 3 3.5		INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN				11,008,856,849		11,011,841,049		11,024,634,058		11,039,256,937		44,084,588,893		
7	01		KECAMATAN				3,327,343,621		3,328,275,277		3,332,269,208		3,336,834,416		13,324,722,522	B. SAKTI	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,979,507,865	100	2,980,342,127	100	2,983,918,538	100	2,988,006,506	100	11,931,775,036	B. SAKTI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	5.56	33.33	187,606,386	44.44	187,658,916	55.56	187,884,106	55.56	188,141,508	55.56	751,290,916	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	100	100	110,250,000	100	110,280,870	100	110,413,207	100	110,564,473	100	441,508,550	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	75	100	21,315,000	100	21,320,968	100	21,346,553	100	21,375,798	100	85,358,320	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	28,664,370	100	28,672,396	100	28,706,803	100	28,746,131	100	114,789,700	B. SAKTI
7	01		KECAMATAN				2,484,539,330		2,485,233,601		2,488,209,881		2,491,611,879		9,949,594,691	B. MANGAT	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,259,140,900	100	2,259,773,459	100	2,262,485,188	100	2,265,584,792	100	9,046,984,339	B. MANGAT
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Fasilitas Publik	Persen	40	40	5,000,000	60	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	20,000,000	B. MANGAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	86.36	86.36	150,398,430	86.36	150,440,542	90.91	150,621,070	90.91	150,827,421	90.91	602,287,463	B. MANGAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	80.00	80.00	15,000,000	80.00	15,004,200	100.00	15,022,205	100.00	15,042,785	100.00	60,069,191	B. MANGAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	13.64	22.73	20,000,000	22.73	20,005,600	22.73	20,029,607	22.73	20,057,047	22.73	80,092,254	B. MANGAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	35,000,000	100	35,009,800	100	35,051,812	100	35,099,833	100	140,161,445	B. MANGAT
7	01		KECAMATAN				2,513,068,923		2,513,726,942		2,516,547,815		2,519,772,175		10,063,115,855	M. SATU	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,350,068,923	100	2,350,726,942	100	2,353,547,815	100	2,356,772,175	100	9,411,115,855	M. SATU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	100	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	480,000,000	M. SATU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	100	42.86	8,000,000	50.00	8,000,000	42.86	8,000,000	42.86	8,000,000	42.86	32,000,000	M. SATU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	60,000,000	M. SATU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	80,000,000	M. SATU
7	01		KECAMATAN				2,683,904,975		2,684,605,228		2,687,607,155		2,691,038,466		10,747,155,825	M. DUA	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,500,904,975	100	2,501,605,228	100	2,504,607,155	100	2,508,038,466	100	10,015,155,825	M. DUA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	17.65	17.65	100,000,000	17.65	100,000,000	17.65	100,000,000	17.65	100,000,000	17.65	400,000,000	M. DUA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen	23.53	23.53	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	50,000,000	23.53	200,000,000	M. DUA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	17.65	17.65	15,000,000	17.65	15,000,000	17.65	15,000,000	17.65	15,000,000	17.65	60,000,000	M. DUA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	72,000,000	M. DUA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4,446,336,325		4,447,134,559		4,450,556,521		4,454,467,948		17,798,495,353		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4,446,336,325		4,447,134,559		4,450,556,521		4,454,467,948		17,798,495,353	KESBANGPOL	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,850,836,325	100	2,851,634,559	100	2,855,056,521	100	2,858,967,948	100	11,416,495,353	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0.82	1.44	150,000,000	1.91	150,000,000	2.20	150,000,000	2.21	150,000,000	2.21	600,000,000	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	Rasio	75.94	78.76	800,000,000	79.95	800,000,000	81.02	800,000,000	81.98	800,000,000	81.98	3,200,000,000	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	Persen	12.96	15.00	425,500,000	18.75	425,500,000	18.57	425,500,000	20.27	425,500,000	20.27	1,702,000,000	KESBANGPOL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama	Persen	NA	1.46	100,000,000	2.65	100,000,000	3.61	100,000,000	4.37	100,000,000	4.37	400,000,000	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	NA	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	480,000,000	KESBANGPOL
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN					28,338,381,788		28,350,269,831		28,375,976,242		28,412,662,969		113,477,290,830	
9	01		KEKHUSUSAN ACEH					3,232,265,825		3,233,170,859		3,237,050,664		3,241,485,424		12,943,972,773	MPU
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	2,658,481,508	100	2,659,225,883	100	2,662,416,954	100	2,666,064,465	100	10,646,188,810	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa yang tersebarluaskan	Persen	58.33	71.43	573,784,317	71.43	573,944,977	71.43	574,633,711	71.43	575,420,959	71.43	2,297,783,963	MPU
9	01		KEKHUSUSAN ACEH					8,854,184,455		8,856,663,627		8,867,291,623		8,879,439,813		35,457,579,517	B. MAL
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1,754,184,455	100	1,754,675,627	100	1,756,781,237	100	1,759,188,028	100	7,024,829,347	B. MAL
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0.72	0.99	7,100,000,000	0.99	7,101,988,000	0.99	7,110,510,386	0.99	7,120,251,785	0.99	28,432,750,170	B. MAL
9	01		KEKHUSUSAN ACEH					16,251,931,508		16,260,435,345		16,271,633,955		16,291,737,733		65,075,738,540	DSI-PD
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	3,258,481,508	100	3,263,347,179	100	3,269,955,957	100	3,273,806,715	100	13,065,591,359	DSI-PD
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Cakupan Pembinaan Syariat Islam	Persen	43.70	48.50	12,993,450,000	53.88	12,997,088,166	53.88	13,001,677,998	59.43	13,017,931,018	59.43	52,010,147,182	DSI-PD

Catatan : Untuk Mengetahui Cara Perhitungan Indikator dan Variabel yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran Metadata Tabel 7.6.

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran serta ukuran dalam mencapai keberhasilan Pemerintah Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Lhokseumawe diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kota Lhokseumawe. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
				2023	2024	2025	2026		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Poin	Proses	CC 50.00	CC 50.50	CC 51.00	CC 51.50	CC 51.50	SETDAKO
1.1	Nilai LPPD Kota	Kategori/ Poin	Tinggi 3,4290	Tinggi 3,430	Sangat Tinggi 4,20	Sangat Tinggi 4,22	Sangat Tinggi 4,25	Sangat Tinggi 4,25	SETDAKO
1.2	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/ Poin	CC 55.50	B 60.00	B 60.50	B 61.00	B 61.50	B 61.50	SETDAKO, BAPPEDA
1.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Proses	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD, INSPEKTORAT
1.4	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	Kategori/ Poin	B 82.52	A 88.31	A 88.81	A 89.31	A 89.81	A 89.81	SETDAKO, BAPPEDA (LITBANG), DISDUKCAPIL, SETWAN, KOMINFO, BKPSDM, PERPUS, KESBANGPOL, 4 KEC, DPMG, PERTANAHAN, DP3AP2KB (PP), SATPOL PP DAN WH, BPBD
2.	Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	80.65	80.75	80.85	80.95	81.00	81.00	DSI, MPU, BAITUL MAL
2.1	Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	DSI, MPU
2.2	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0.74	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	BAITUL MAL
2.3	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	46.15	53.85	61.54	61.54	76.92	76.92	PK, MAA

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
				2023	2024	2025	2026		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77.57	77.62	77.70	77.73	77.75	77.75	BPS, PK, PP, DINKES
3.1	Harapan lama sekolah	Tahun	15.21	15.22	15.23	15.24	15.25	15.25	PK, MPD
3.2	Angka kelulusan	Persen	99.01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PK, MPD
3.3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPORAPAR
3.4	Usia Harapan Hidup	Tahun	71.64	71.66	71.68	71.72	71.75	71.75	BPS, DINKES
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	63.7	64.9	65.35	65.80	66.25	66.25	DLH
4.1	Persentase RTH Publik	Persen	1.62	1.67	2.49	2.69	2.79	2.79	DLH
5.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1.98	3.50	3.60	3.65	3.70	3.70	BPS
5.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp. Miliar	3,403	3,471	3,541	3,612	3,684	3,684	DPMPTSP NAKER
5.2	Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Perusahaan	432	452	472	492	512	512	DPMPTSP NAKER
5.3	Tingkat kemiskinan	Persen	11.16	11.10	11.07	11.05	10.95	10.95	BPS, DINSOS

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
				2023	2024	2025	2026		
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11.16	11.12	11.08	11.06	11.04	11.04	BPS, DMPTSP
5.5	PDRB Perkapita	Rp. (Juta)	33.20	33.35	33.38	33.39	33.40	33.40	BPS, DKPPP, DISPORAPAR (PARIWISATA)
5.6	Laju Inflasi	Persen	1.97	2.30	2.10	2.07	2.05	2.05	BPS, DISPERINDAGKOP &UKM
6.	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Berkualitas	Persen	32.74	34.32	35.98	37.73	39.56	39.56	PUPR
6.1	Persen Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65.05	68.26	71.64	75.19	78.91	78.91	PUPR
6.2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0.43	0.38	0.32	0.27	0.21	0.21	PUPR
6.3	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47.80	54.47	61.13	67.80	74.47	74.47	PUPR
6.4	Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan	Rasio	0.50	0.25	0.38	0.25	0.25	0.25	DISHUB

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)			Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								MPD
1	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	MPD
1	01	08	Persentase Sekolah yang Menerapkan Asessment Kompetensi Minimum (AKM)	Persen	64.96	75.21	83.76	94.02	100.00	100.00	MPD
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								PK
1	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	PK
1	01	02	Angka Partisipasi Kasar	Persen	99.4	98.00	98.40	98.80	99.00	99.00	PK
1	01	03	Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan	Persen	98.36	100	100.00	100.00	100.00	100.00	PK
1	01	04	Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	88.00	89.47	90.00	91.94	92.31	92.31	PK
1	01	05	Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin	Persen	100	100	100	100	100	100	PK
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								DSI-PD
1	01	07	Persentase Dayah dengan Type A	Dayah	5.56	8.11	7.89	10.26	12.50	12.50	DSI-PD
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								DINKES
1	02	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DINKES
1	02	02	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Persen	81.51	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	02	03	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persen	2.43	3.20	4.14	5.41	6.96	22.03	DINKES
1	02	04	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	05	Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	64.98	70.73	83.44	93.17	100.00	100.00	DINKES
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								PUPR
1	03	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	PUPR
1	03	02	Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	92.29	81.38	70.42	59.46	48.50	48.50	PUPR
1	03	03	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	20.48	21.31	22.18	23.10	24.06	24.06	PUPR
1	03	05	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	67.47	69.61	71.86	74.21	76.69	76.69	PUPR
1	03	06	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	68.58	71.64	74.85	78.22	81.77	81.77	PUPR
1	03	08	Persentase penataan bangunan gedung	Persen	4.00	4.00	7.69	7.69	11.54	11.54	PUPR
1	03	10	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65.05	68.26	71.64	75.19	78.91	78.91	PUPR
1	03	12	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47.80	54.47	61.13	67.8	74.47	74.47	PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								PUPR
1	04	03	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	Persen	69.19	69.38	69.63	69.88	70.15	70.15	PUPR
1	04	04	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0.43	0.38	0.32	0.27	0.21	0.21	PUPR
1	04	05	Rasio PSU dalam kondisi baik	Rasio	0.093	0.093	0.117	0.143	0.206	0.206	PUPR
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								BPBD
1	05	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD
1	05	03	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	05	04	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								SATPOL PP WH
1	05	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP WH
1	05	02	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP WH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								DINSOS
1	06	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
1	06	02	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu	Persen	71.31	73.09	74.92	76.80	78.72	78.72	DINSOS
1	06	04	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
1	06	05	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	38.61	40.76	43.76	47.00	50.56	50.56	DINSOS
1	06	06	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
1	06	07	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								DPMTSP NAKER
2	07	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DPMTSP NAKER
2	07	03	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Persen	19.71	13.33	14.29	15.00	15.56	15.56	DPMTSP NAKER
2	07	04	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen	39.21	54.17	53.57	55.63	57.22	57.22	DPMTSP NAKER
2	07	05	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100	100	100	100.00	100	100	DPMTSP NAKER
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								DP3AP2 KB
2	08	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	08	02	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persen	59.58	59.39	62.02	58.58	60.68	60.68	DP3AP2 KB
2	08	03	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen	62.50	75.00	87.50	100.00	100.00	100.00	DP3AP2 KB
2	08	04	Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan	Persen	91.67	91.67	92.41	93.83	94.12	94.12	DP3AP2 KB
2	08	05	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Persen	29.41	29.41	32.35	32.35	35.29	35.29	DP3AP2 KB
2	08	06	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Persen	30.49	33.46	37.18	39.86	43.38	43.38	DP3AP2 KB
2	08	07	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								DKPPP
2	09	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DKPPP
2	09	03	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	39.45	39.65	41.38	43.47	45.00	45.00	DKPPP
2	09	04	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Persen	33.33	44.44	55.56	66.67	77.78	77.78	DKPPP
2	09	05	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar	Persen	45.45	45.45	63.64	63.64	90.91	90.91	DKPPP
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								PERTANAHAN
2	10	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	PERTANAHAN
2	10	05	Persentase Santunan Persertifikatan	Persen	NA	66.67	80.00	83.33	86.67	86.67	PERTANAHAN
2	10	08	Persentase Penanganan Tanah Kosong	Persen	NA	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	PERTANAHAN
2	10	10	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	Persen	0.51	0.55	0.59	0.63	0.67	0.67	PERTANAHAN
2	10	12	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	Persen	33.88	44.87	45.64	46.42	46.42	46.42	PERTANAHAN
2	10	13	Persentase Tanah yang Dipetakan	Persen	47.86	66.21	67.80	67.07	68.66	68.66	PERTANAHAN
2	10	14	Persentase Pembinaan SDM Pertanian	Persen	35.09	43.86	52.63	57.02	70.18	70.18	PERTANAHAN
2	10	15	Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai	Persen	NA	54.17	58.33	62.50	66.67	66.67	PERTANAHAN
2	10	16	Ketersediaan Sistem Informasi Pertanian	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	PERTANAHAN
2	10	17	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanian	Persen	50	66.67	60	60	80	80	PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)			Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								DLH
2	11	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DLH
2	11	02	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
2	11	03	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63.7	64.9	65.35	65.80	66.25	66.25	DLH
2	11	04	Persentase luasan taman	Persen	28.91	48.97	61.95	76.70	88.50	88.50	DLH
2	11	05	Persentase penanganan limbah B3	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	DLH
2	11	06	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota.	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	DLH
2	11	08	Persentase aparatur desa yang terlatih	Persen	1.47	7.35	7.35	7.35	7.35	29.41	DLH
2	11	09	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
2	11	10	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	100	100	100.00	DLH
2	11	11	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Persen	86.25	87.60	89.73	91.08	93.74	93.74	DLH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								DISDUK CAPIL
2	12	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
2	12	02	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	58.24	66.16	71.18	74.88	71.07	71.07	DISDUK CAPIL
2	12	03	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen	84.77	86.42	87.77	88.85	89.60	89.60	DISDUK CAPIL
2	12	04	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	58.3	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
2	12	05	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISDUK CAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								DPMG
2	13	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DPMG
2	13	02	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik	Persen	94.12	95.59	95.59	95.59	100.00	100.00	DPMG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	03	Persentase Kerjasama Gampong	Persen	25.00	51.47	67.65	73.53	100.00	100.00	DPMG
2	13	04	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	Persen	57.61	67.13	74.49	81.84	98.75	98.75	DPMG
2	13	05	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	51.84	81.25	86.03	91.54	91.54	97.79	DPMG
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								DP3AP2 KB
2	14	02	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	47.06	55.88	64.71	67.65	73.53	73.53	DP3AP2 KB
2	14	03	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen	29.94	52.28	51.61	51.08	50.66	50.66	DP3AP2 KB
2	14	04	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	90.07	97.43	104.78	112.13	119.49	119.49	DP3AP2 KB
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								DISHUB
2	15	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DISHUB
2	15	02	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	Persen	41.67	29.17	52.08	45.83	45.83	45.83	DISHUB
2	15	03	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Ada / Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	DISHUB
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								KOMINFO
2	16	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	KOMINFO
2	16	02	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Persen	26.67	26.25	23.68	26.32	30.00	30.00	KOMINFO
2	16	03	Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	Persen	2.94	5.88	11.76	17.65	23.53	23.53	KOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								DISKOP
2	17	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOP
2	17	02	Persentase Koperasi yang memiliki USP	Persen	0.48	0.94	0.93	1.36	1.34	1.34	DISKOP
2	17	03	Persentase Koperasi Mandiri	Persen	79.33	79.72	76.89	83.49	85.38	85.38	DISKOP
2	17	04	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen	4.33	5.66	6.48	7.27	8.04	8.04	DISKOP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)			Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	07	Persentase Fasilitasi UMKM	Persen	1.31	23.20	24.89	27.26	29.48	29.48	DISKOP
2	17	08	Persentase Pengembangan UMKM	Persen	6.08	6.72	7.31	7.87	8.40	8.40	DISKOP
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								DPMTSP NAKER
2	18	02	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Persen	NA	33.33	40.00	40.00	46.67	46.67	DPMTSP NAKER
2	18	03	Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal	Persen	10.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	DPMTSP NAKER
2	18	04	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks	87.02	87.34	87.66	87.98	88.30	88.30	DPMTSP NAKER
2	18	05	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Indeks	80.56	77.75	76.83	75.98	75.19	75.19	DPMTSP NAKER
2	18	06	Ketersediaan Database Perizinan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPMTSP NAKER
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								DISPORAPAR
2	19	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPORAPAR
2	19	02	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPORAPAR
2	19	03	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4	6	6	7	8	8	DISPORAPAR
2	19	04	Pembinaan Pramuka	Persen	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	DISPORAPAR
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								KOMINFO
2	21	02	Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi	Persen	2.94	5.88	8.82	11.76	11.76	11.76	KOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								PK
2	22	02	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen	46.15	53.85	61.54	61.54	76.92	76.92	PK
2	22	03	Persentase pembinaan sanggar seni	Persen	3.45	3.45	3.45	6.90	6.90	6.90	PK
2	22	04	Persentase objek sejarah	Persen	50.00	50.00	56.25	56.25	68.75	68.75	PK
2	22	05	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	50.00	50.00	59.09	59.09	68.18	68.18	PK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								MAA
2	22	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	MAA
2	22	07	Persentase Fasilitasi sengketa adat	Persen	100	100	100	100	100	100	MAA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								ARPUS
2	23	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	ARPUS
2	23	02	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	Persen	4.34	6.85	9.02	11.10	13.09	13.09	ARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								ARPUS
2	24	02	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	Persen	3.77	7.41	10.91	14.29	17.54	17.54	ARPUS
2	24	03	Persentase Penyelamatan Arsip	Persen	10.00	18.18	25.00	30.77	35.71	35.71	ARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								DKPPP
3	25	03	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	43.34	45.41	47.47	49.54	51.61	51.61	DKPPP
3	25	04	Cakupan bina kelompok pembudidaya	Persen	43.22	46.52	49.83	53.14	56.45	56.45	DKPPP
3	25	05	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen	41.67	44.17	46.67	49.17	51.67	51.67	DKPPP
3	25	06	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100	DKPPP
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								DISPORAPAR
3	26	02	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Persen	25.00	40.00	60.00	70.00	90.00	90.00	DISPORAPAR
3	26	03	Peningkatkan Kunjungan Wisata	Persen	75.15	95.00	96.88	96.97	97.06	97.06	DISPORAPAR
3	26	05	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISPORAPAR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								DKPPP
3	27	02	Cakupan Sarana Kelompok Tani	Persen	17.68	25.57	33.46	41.35	49.24	49.24	DKPPP
3	27	03	Cakupan Prasarana Kelompok Tani	Persen	17.68	26.10	34.51	42.93	51.34	51.34	DKPPP
3	27	04	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Persen	37.75	39.87	42.00	44.12	46.24	46.24	DKPPP
3	27	05	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen	41.76	46.07	50.37	54.68	58.99	58.99	DKPPP
3	27	07	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani	Persen	38.74	38.88	40.93	42.93	44.87	44.87	DKPPP
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								DISKOP
3	30	03	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	0.37	0.44	0.22	0.40	0.48	0.92	DISKOP
3	30	04	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	61.11	59.97	60.01	59.98	59.98	59.98	DISKOP
3	30	05	Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang	Persen	50.00	50.00	75.00	80.00	83.33	83.33	DISKOP
3	30	06	Persentase Tera Tera Ulang UTTP	Persen	63.47	71.25	71.35	74.07	77.71	77.71	DISKOP
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								DISKOP
3	31	02	Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah	Persen	4.34	4.95	5.27	5.77	6.27	6.27	DISKOP
3	31	03	Persentase IKM yang memiliki Izin	Persen	4.73	4.74	5.00	5.33	5.65	5.65	DISKOP
3	31	04	Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISKOP
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01		SEKRETARIAT DAERAH								SETDAKO
4	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	SETDAKO
4	01	02	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	98.53	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70	SETDAKO

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	03	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	91.11	97.00	97.00	92.00	92.00	92.00	SETDAKO
4	02		SEKRETARIAT DPRD								SETWAN
4	02	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	SETWAN
4	02	02	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan	Persen	41.18	70.00	72.73	81.82	83.33	83.33	SETWAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01		PERENCANAAN								BAPPEDA
5	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
5	01	02	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
5	01	03	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Persen	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA
5	02		KEUANGAN								BPKD
5	02	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	BPKD
5	02	02	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKD
5	02	02	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
5	02	03	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKD
5	02	04	Persentase penerimaan PAD	Persen	68.50	100	100	100	100	100	BPKD
5	03		KEPEGAWAIAN								BKPSDM
5	03	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	BKPSDM
5	03	02	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	Persen	50.60	52.19	53.10	54.02	54.94	54.94	BKPSDM
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								BKPSDM
5	04	02	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural	Persen	8.77	9.36	9.75	10.14	10.33	10.33	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)			Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								BAPPEDA
5	05	02	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	50.00	85.71	75.00	75.00	67.86	100.00	BAPPEDA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	01		INSPEKTORAT DAERAH								INSPEKTORAT
6	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
6	01	02	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	78.35	80.02	81.43	82.60	83.56	83.56	INSPEKTORAT
6	01	03	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Point / Kategori	Proses	CC 50.10	CC 50.50	CC 51.00	CC 51.50	CC 51.50	INSPEKTORAT
6	01	03	Level Kapabilitas APiP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	INSPEKTORAT
6	01	03	Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	Level/Point	Level 2	Level 3 3.2	Level 3 3.2	Level 3 3.5	Level 3 3.5	Level 3 3.5	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01		KECAMATAN								B. SAKTI
7	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01	03	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	5.56	33.33	44.44	55.56	55.56	55.56	B. SAKTI
7	01	04	Persentase Penertiban	Persen	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01	05	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	75	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01	06	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01		KECAMATAN								B. MANGAT
7	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	B. MANGAT
7	01	02	Persentase Peningkatan Fasilitas Publik	Persen	40	40	60	100	100	100	B. MANGAT
7	01	03	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	86.36	86.36	86.36	90.91	90.91	90.91	B. MANGAT
7	01	04	Persentase Penertiban	Persen	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	B. MANGAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	05	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	13.64	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	B. MANGAT
7	01	06	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	100	100	100	B. MANGAT
7	01		KECAMATAN								M. SATU
7	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01	03	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	100	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01	04	Persentase Penertiban	Persen	100	42.86	50.00	42.86	42.86	42.86	M. SATU
7	01	05	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	100	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01	06	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01		KECAMATAN								M. DUA
7	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	M. DUA
7	01	03	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65	M. DUA
7	01	04	Persentase Penertiban	Persen	23.53	23.53	23.53	23.53	23.53	23.53	M. DUA
7	01	05	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65	M. DUA
7	01	06	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen	100	100	100	100	100	100	M. DUA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								KESBANGPOL
8	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
8	01	02	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	0.82	1.44	1.91	2.20	2.21	2.21	KESBANGPOL
8	01	03	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	Rasio	75.94	78.76	79.95	81.02	81.98	81.98	KESBANGPOL
8	01	04	Persentase Pembinaan Ormas	Persen	12.96	15.00	18.75	18.57	20.27	20.27	KESBANGPOL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01	05	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama	Persen	NA	1.46	2.65	3.61	4.37	4.37	KESBANGPOL
8	01	06	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	NA	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN								
9	01		KEKHUSUSAN ACEH								MPU
9	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	MPU
9	01	03	Persentase Fatwa yang tersebarluaskan	Persen	58.33	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	MPU
9	01		KEKHUSUSAN ACEH								B. MAL
9	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	B. MAL
9	01	04	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	0.72	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	B. MAL
9	01		KEKHUSUSAN ACEH								DSI-PD
9	01	01	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	DSI-PD
9	01	02	Cakupan Pembinaan Syariat Islam	Persen	43.70	48.50	53.88	53.88	59.43	59.43	DSI-PD

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah 4 (empat) tahun kedepan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD), serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dengan berpedoman kepada RPK Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026;
- b. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023 – 2026.
- c. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9.2 Pedoman Transisi

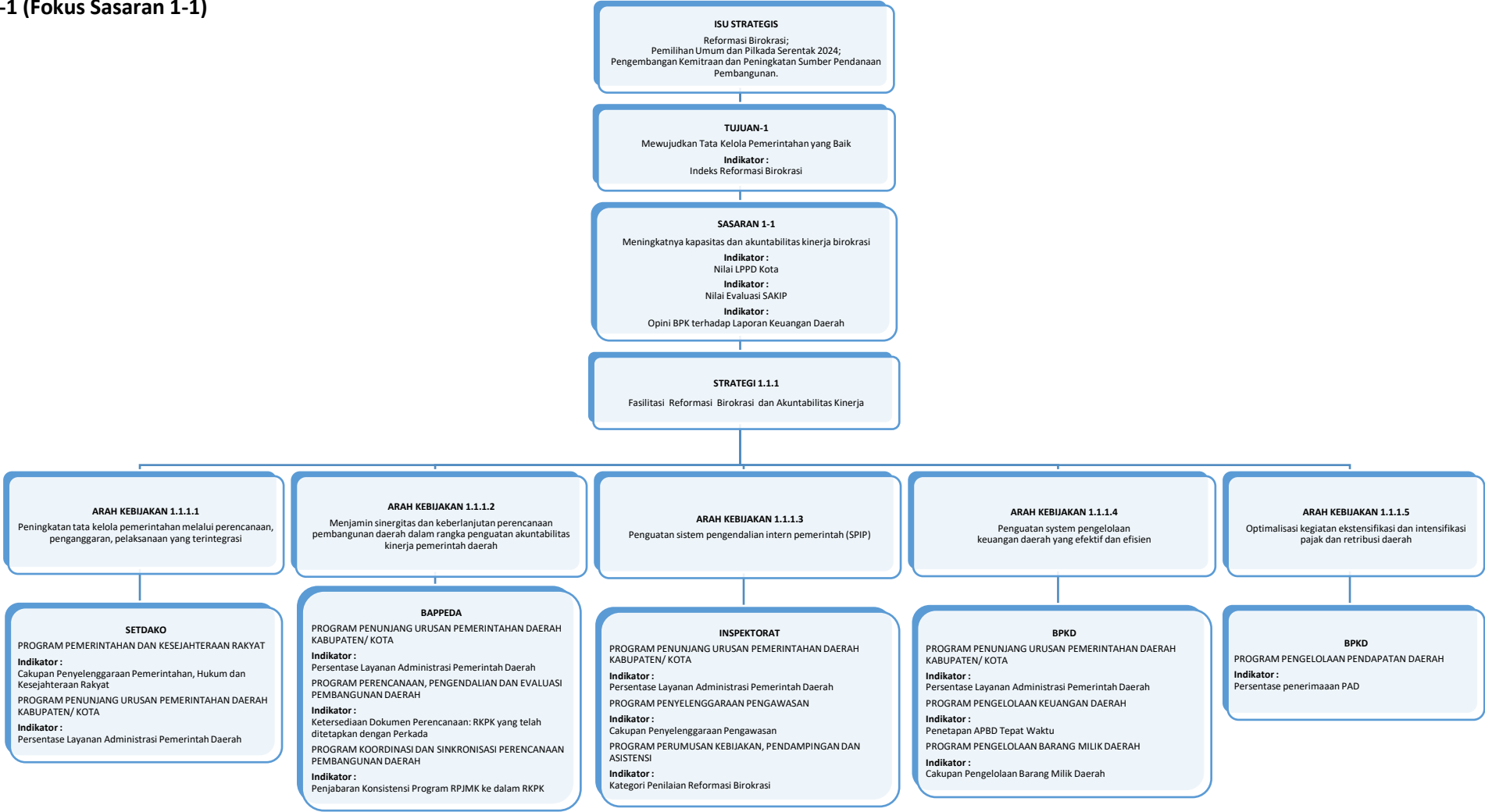
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPK setelah RPJMK berakhir, agar keberlanjutan pembangunan Kota Lhokseumawe, maka penyusunan RKPK Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ini.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA

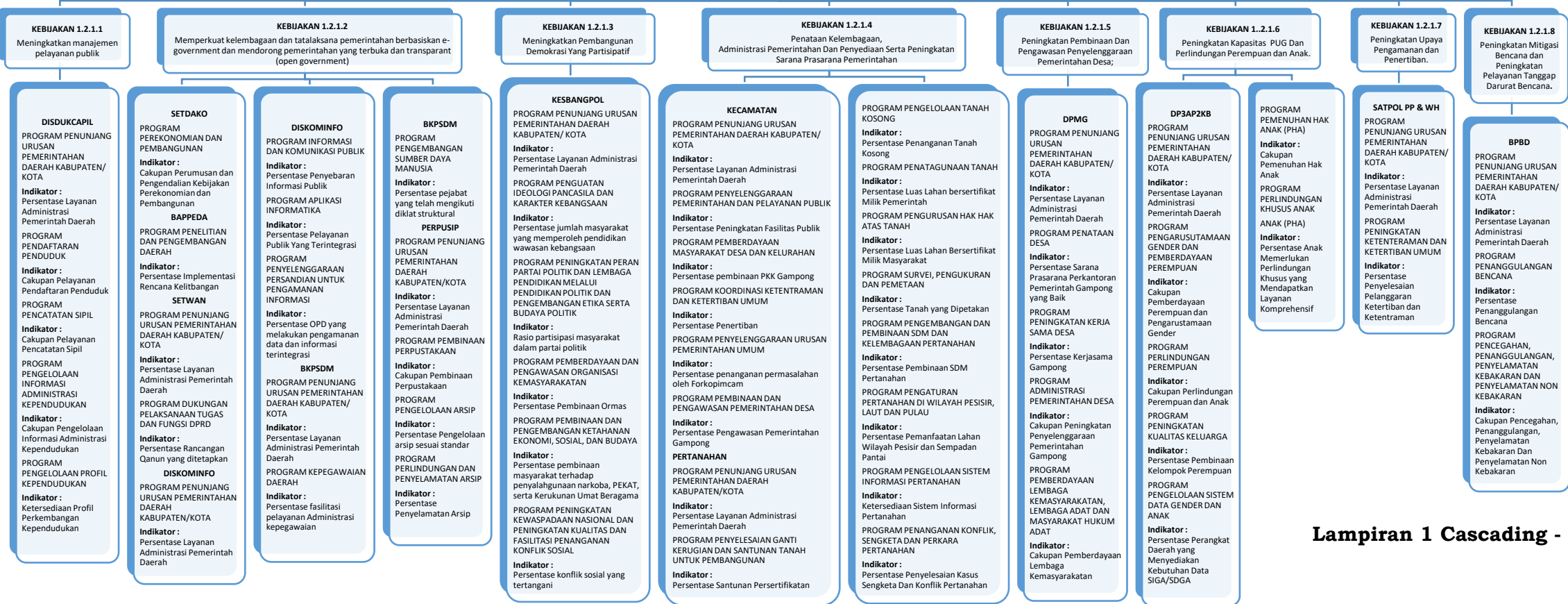
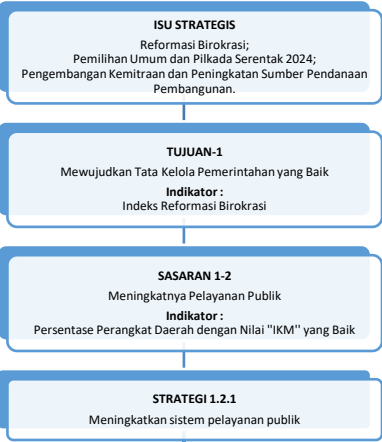
Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPK LHOKESEUMAWE 2023-2026
TUJUAN-1 (Fokus Sasaran 1-1)

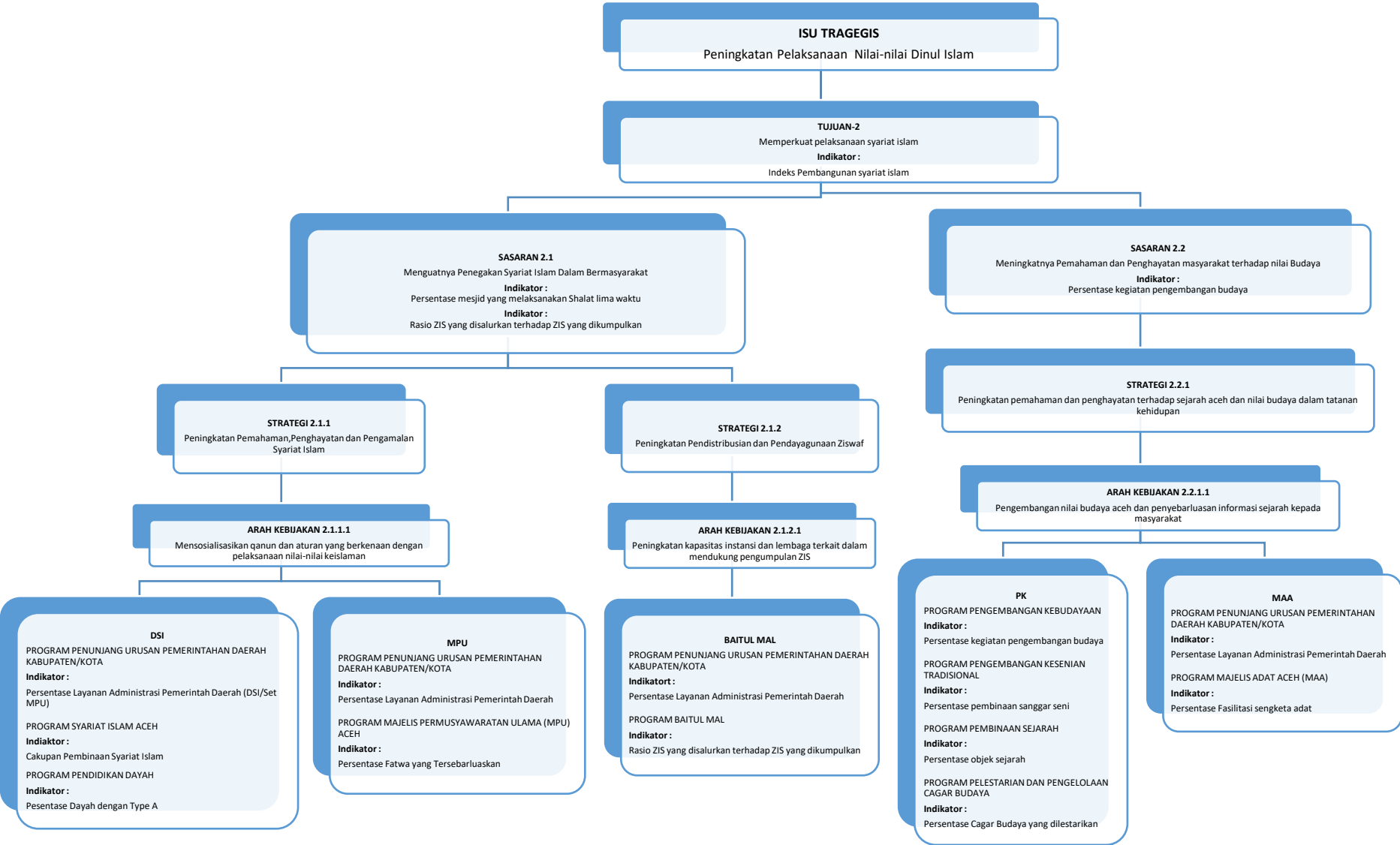


PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPK LHOKESEUMAWE 2023-2026
TUJUAN-1 (Fokus Sasaran 1-2)

Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026

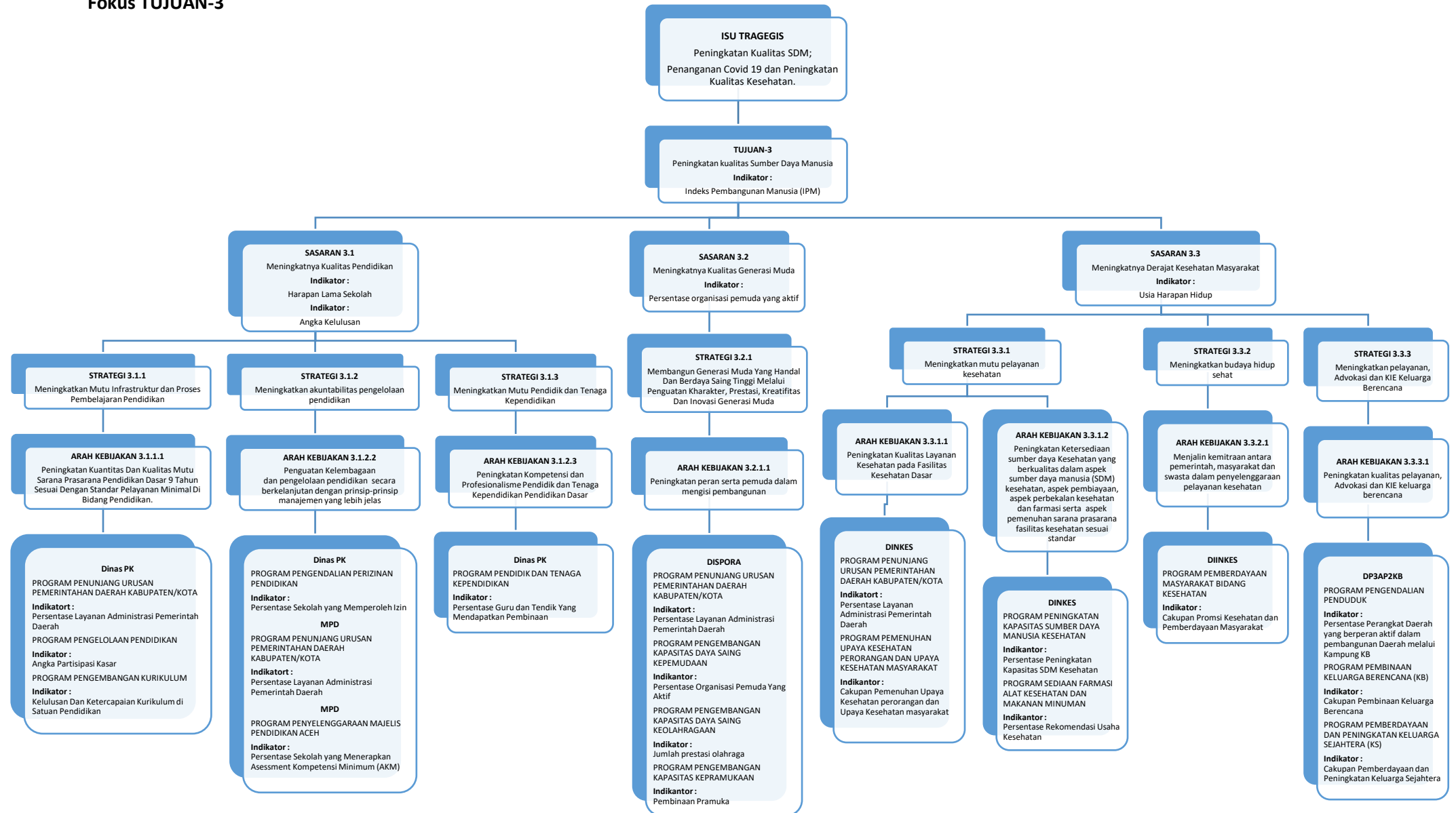


Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026



Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

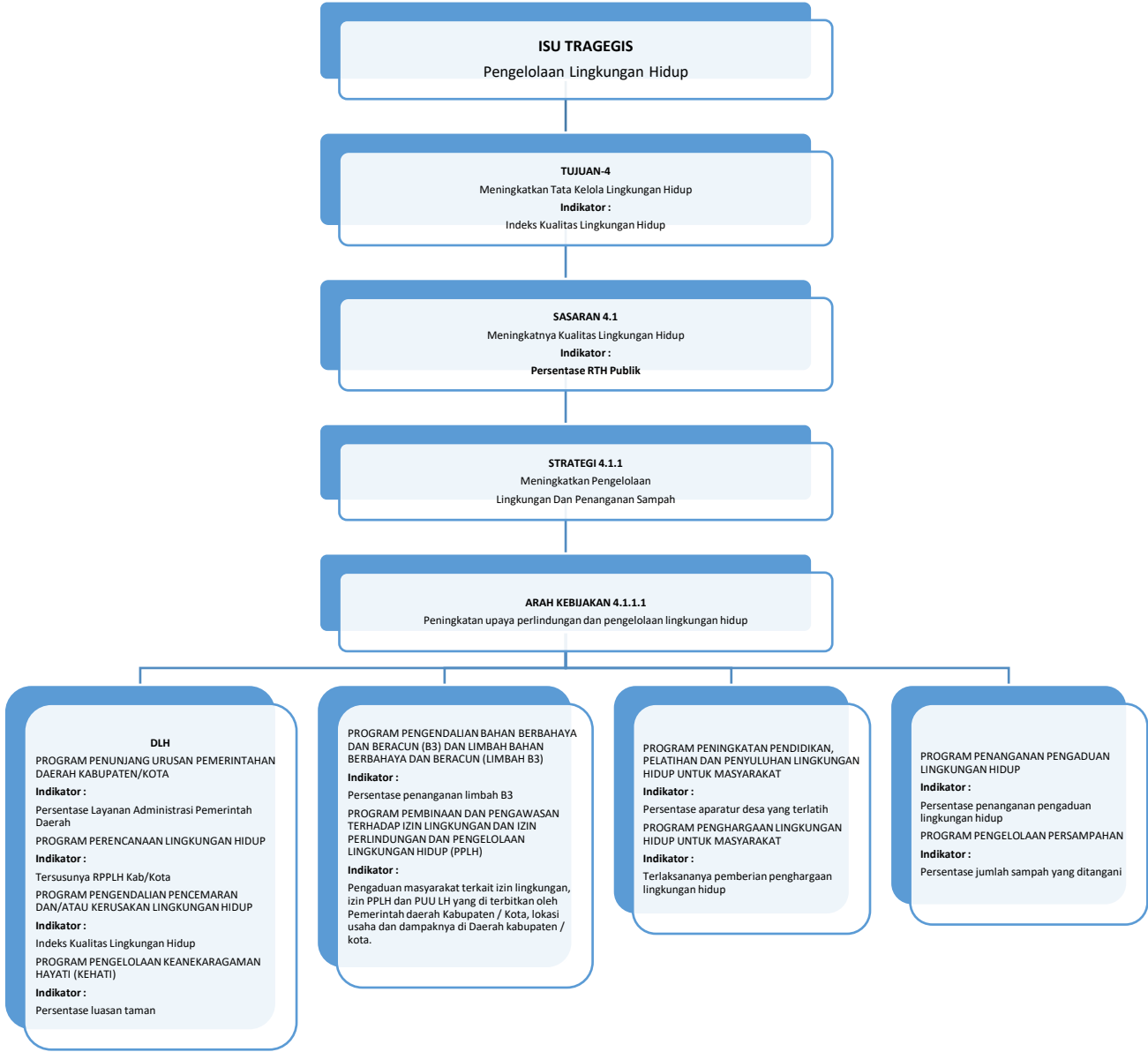
PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPK LHOKEUMAWE 2023-2026
Fokus TUJUAN-3



Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe

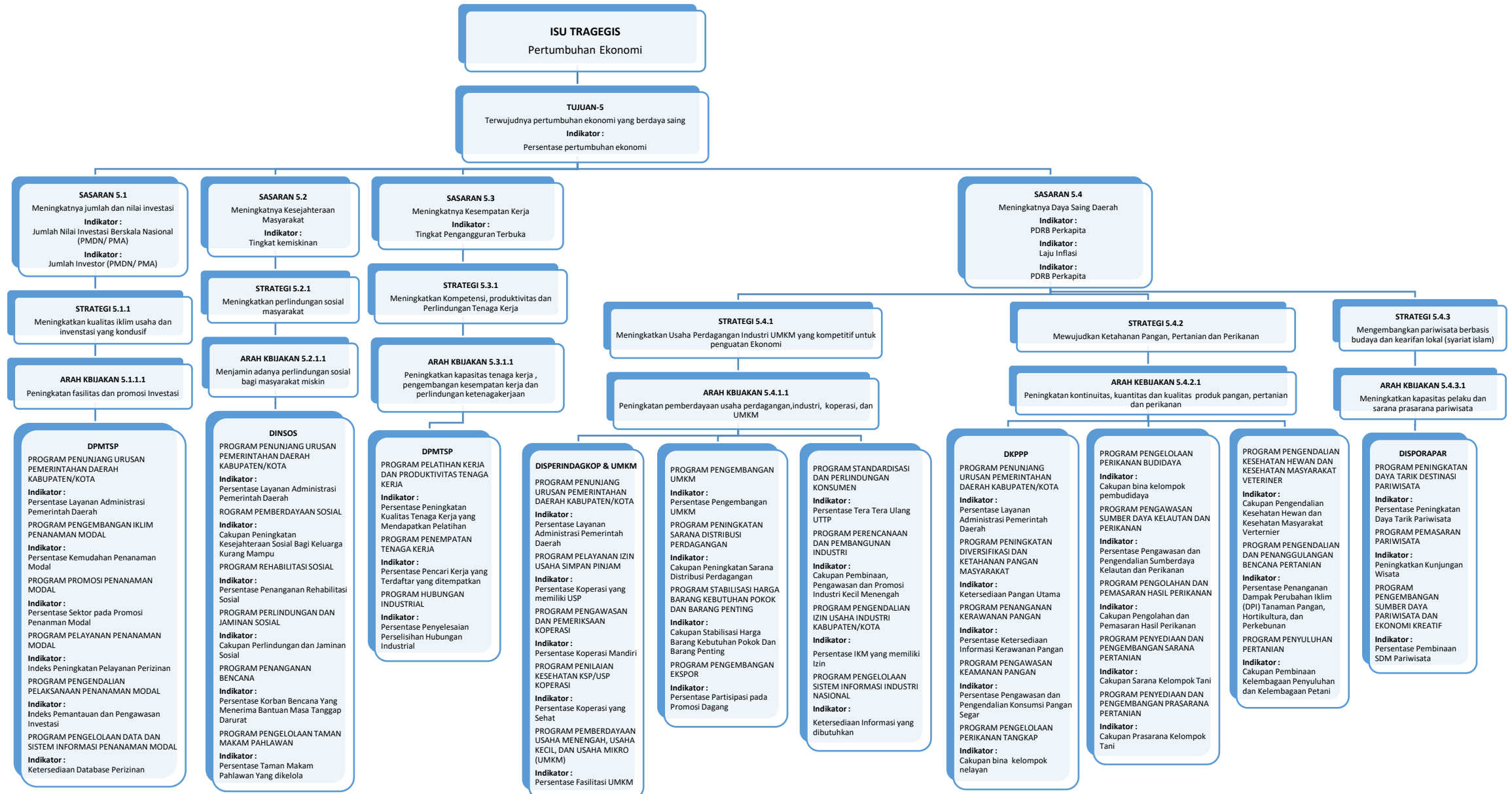
Tahun 2023-2026

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPK LHOKSEUMAWE 2023-2026
Fokus TUJUAN-4



Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

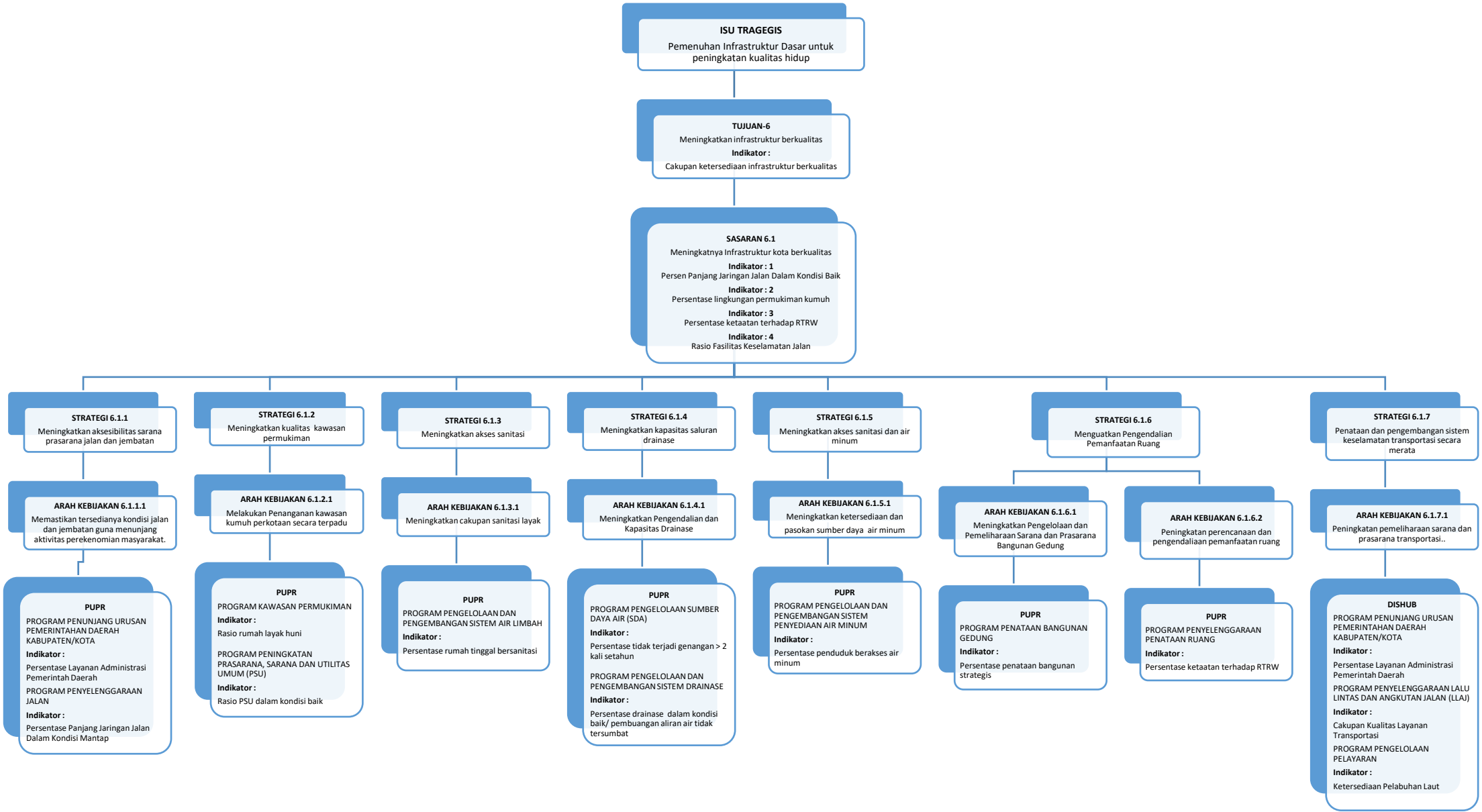
PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS RPK LHOXSEUMAWE 2023-2026 Fokus TUJUAN-5



Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe

Tahun 2023-2026

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPK LHOKEUMAWE 2023-2026
Fokus TUJUAN-6



LAMPIRAN METADATA - Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	<i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</i>	<i>Indeks reformasi birokrasi</i>	<i>Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB</i>	<i>Kategori/ Poin</i>	<i>Proses</i>	CC 50.00	CC 50.50	CC 51.00	CC 51.50	CC 51.50	SETDAKO
1.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai LPPD Kota	Berita Acara Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Validasi terhadap Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kab/Kota Se-Aceh dari Kemendagri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Kategori/ Poin	Tinggi 3,4290	Tinggi 3,430	Sangat Tinggi 4,20	Sangat Tinggi 4,22	Sangat Tinggi 4,25	Sangat Tinggi 4,25	SETDAKO
		Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kemenpan RB	Kategori/ Poin	CC 55.50	B 60.00	B 60.50	B 61.00	B 61.50	B 61.50	SETDAKO BAPPEDA
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Pernyataan Profesional BPK mengenai Kewajaran Informasi Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan	Opini	Proses	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD INSPEKTORAT
1.2	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi x Nilai Penyeimbang	Kategori/ Poin	B 82.52	A 88.31	A 88.81	A 89.31	A 89.81	A 89.81	SETDAKO,BAPPEDA (LITBANG), DISDUKCAPIL,SETWAN, KOMINFO,BKPSDM, PERPUS,KESBANGPOL, 4 KEC,DPMG, PERTANAHAN,DP3AP2KB (PP), SATPOL PP DAN WH, BPBD
2.	<i>Memperkuat pelaksanaan syariat islam</i>	<i>Indeks Pembangunan syariat islam</i>	<i>Dimensi Akidah, Dimensi Lembaga Keuangan Syariah, Dimensi Zakat, Dimensi Melek Al Quran, Dimensi Manajemen Masjid, Dimensi Hukum Jinayat, dan Dimensi Akhlak</i>	<i>Indeks</i>	80.65	80.75	80.85	80.95	81.00	81.00	DSI MPU BAITUL MAL
2.1	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu	Jumlah Mesjid yang melaksanakan Shalat lima Waktu/ Jumlah Total Mesjid*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DSI MPU
			Jumlah Mesjid yang melaksanakan Shalat lima Waktu	Mesjid	52	52	52	53	53	53	DSI MPU
			Jumlah Total Mesjid	Mesjid	52	52	52	53	53	53	DSI MPU
		Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Jumlah Zis yang disalurkan/jumlah Zis yang dikumpulkan	Rasio	0.74	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	BAITUL MAL
			Jumlah Zis yang disalurkan	Rp (Milyar)	4.92	6.93	7.18	7.43	7.67	29.21	BAITUL MAL
			jumlah Zis yang dikumpulkan	Rp (Milyar)	6.68	7	7.25	7.5	7.75	29.5	BAITUL MAL
2.2	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Jumlah kegiatan pengembangan budaya yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pengembangan budaya yg direncanakan * 100	Persen	46.15	53.85	61.54	61.54	76.92	76.92	PK MAA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah kegiatan pengembangan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	6	7	8	8	10	10	PK MAA
			Jumlah kegiatan pengembangan budaya yg direncanakan	Kegiatan	13	13	13	13	13	13	PK MAA
3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ $X(1)$: Indeks harapan hidup $X(2)$: Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah) $X(3)$: Indeks standar hidup layak	Indeks	77.57	77.62	77.70	77.73	77.75	77.75	BPS PK PP DINKES
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Tahun	15.21	15.22	15.23	15.24	15.25	15.25	PK MPD
		Angka kelulusan	(Jumlah lulusan pada jenjang SD/ Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya*100) + (Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya*100)/2	Persen	99.01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PK MPD
			Angka Kelulusan SD		99.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PK MPD
			Jumlah lulusan pada jenjang SD	Orang	3005	2854	2896	3114	2920	2920	PK MPD
			Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya	Orang	3015	2854	2896	3114	2920	2920	PK MPD
			Angka Kelulusan SMP		98.36	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PK MPD
			Jumlah lulusan pada jenjang SMP	Orang	2458	2605	2452	2577	2610	2610	PK MPD
			Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	Orang	2499	2605	2452	2577	2610	2610	PK MPD
3.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda *100	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPORAPAR
			Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	16	16	16	16	16	16	DISPORAPAR
			Jumlah seluruh organisasi pemuda	Organisasi	16	16	16	16	16	16	DISPORAPAR
3.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	71.64	71.66	71.68	71.72	71.75	71.75	BPS DINKES

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air *30% + (Indeks Pencemaran Udara * 30%)+(tutupan hutan*40%)	Persen	63.7	64.9	65.35	65.80	66.25	66.25	DLH
4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase RTH Publik	Luas RTH Publik tersedia/luas RTH Publik yang seharusnya tersedia*100%	Persen	1.62	1.67	2.49	2.69	2.79	2.79	DLH
			Luas RTH Publik Tersedia	Ha	59.92	61.67	91.96	99.34	103.03	103.03	DLH
			Luas RTH Publik yang Seharusnya	Ha	3,693	3,693	3,693	3693	3693	3693	DLH
5.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Persentase pertumbuhan ekonomi	PDRB tahun pengamatan - PDRB tahun sebelumnya/PDRB tahun sebelumnya*100%	Persen	1.98	3.50	3.60	3.65	3.70	3.70	BPS
5.1	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp. Miliar	3,403	3,471	3,541	3,612	3,684	3,684	DPMPTSP NAKER
		Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Jumlah Perusahaan (Investor)	Perusahaan	432	452	472	492	512	512	DPMPTSP NAKER
5.2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat kemiskinan	Mengikuti data BPS	Persen	11.16	11.10	11.07	11.05	10.95	10.95	BPS DINSOS
5.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Mengikuti data BPS	Persen	11.16	11.12	11.08	11.06	11.04	11.04	BPS DMPTSP
5.4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	PDRB Perkapita	PDRB/Penduduk Pertengahan Tahun	Rp. (Juta)	33.20	33.35	33.38	33.39	33.40	33.40	BPS, DKPPP, DISPORAPAR (PARIWISATA)
		Laju Inflasi	Mengikuti data BPS	Persen	1.97	2.30	2.10	2.07	2.05	2.05	BPS DISPERINDAGKOP&UKM
6.	Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas	(Persen Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik+Persentase lingkungan pemukiman kumuh +)/2	Persen	32.74	34.32	35.98	37.73	39.56	39.56	PUPR
6.1	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	panjang jaringan jalan kondisi mantap/panjang jalan seluruhnya*100%	Persen	65.05	68.26	71.64	75.19	78.91	78.91	PUPR
			panjang jaringan jalan kondisi mantap	km	268.297	281.567	295.502	310.133	325.496	325.496	PUPR
			panjang jalan seluruhnya	km	412.468	412.468	412.468	412.468	412.468	412.468	PUPR
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh / Luas wilayah *100	Persen	0.43	0.38	0.32	0.27	0.21	0.21	PUPR
			Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	78.10	68.10	58.10	48.10	38.10	38.10	PUPR
			Luas wilayah	Ha	18,106	18,106	18,106	18,106	18,106	18,106	PUPR
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW/Rencana peruntukkan *100%	Persen	47.80	54.47	61.13	67.80	74.47	74.47	PUPR
			Realisasi RTRW	Rekomendasi	717	817	917	1,017	1,117	1,117	PUPR
			Rencana Peruntukkan	Rekomendasi	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	PUPR
		Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Tersedia / Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Seharusnya Tersedia	Rasio	0.50	0.25	0.38	0.25	0.25	0.25	DISHUB

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Kinerja				Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Tersedia	Jenis	4	2	3	2	2	2	DISHUB
			Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Seharusnya Ada	Jenis	8	8	8	8	8	8	DISHUB

LAMPIRAN METADATA Tabel 7.6
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN KOTA LHOKESEUMAWE
TAHUN 2023 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
							Target	Target	Target	Target		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			TOTAL BELANJA DAERAH									
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									MPD
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	MPD
1	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	MPD
1	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	MPD
1	01	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Sekolah yang Menerapkan Asessment Kompetensi Minimum (AKM)	Jumlah Sekolah yang menerapkan AKM / Jumlah Seluruh Sekolah *100	Persen	64.96	75.21	83.76	94.02	100.00	MPD
1	01	08	Var		Jumlah sekolah yang menerapkan AKM (SD dan SMP)	Sekolah	76	88	98	110	117	MPD
1	01	08	Var		Jumlah seluruh sekolah (SD dan SMP)	Sekolah	117	117	117	117	117	MPD
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									PK
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	PK
1	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	PK
1	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	PK
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	Mengikuti Perhitungan Rumus Angka Partisipasi Kasar	Persen	99.4	98.00	98.40	98.80	99.00	PK
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa Lulus/Jumlah siswa yang mengikuti ujian x100	Persen	98.36	100	100.00	100.00	100.00	PK
1	01	03	Var		Jumlah Siswa Lulus	Siswa	2458	2605	2,452	2,577	2610	PK
1	01	03	Var		Jumlah siswa yang mengikuti ujian	Siswa	2499	2605	2,452	2,577	2610	PK
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan	Jumlah Guru dan Tendik yang dilakukan pembinaan/ total Jumlah guru yang ada *100	Persen	88.00	89.47	90.00	91.94	92.31	PK
1	01	04	Var		Jumlah guru dan Tendik yang dilakukan pembinaan	Orang	440	510	540	570	600	PK
1	01	04	Var		Jumlah guru yang ada	Orang	500	570	600	620	650	PK
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin	Jumlah sekolah swasta yang memperoleh Izin/Jumlah sekolah swasta mengajukan Izin *100	Persen	100	100	100	100	100	PK

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
									Target	Target	Target	Target	Target		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	01	05	Var			Jumlah sekolah swasta yang memperoleh Izin	Sekolah	7	2	2	2	2	2	2	PK
1	01	05	Var			Jumlah sekolah swasta mengajukan Izin	Sekolah	7	2	2	2	2	2	2	PK
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											DSI-PD
1	01	07		PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Dayah dengan Type A	Jumlah Dayah Type A/Jumlah Seluruh Dayah*100	Dayah	5.56	8.11	7.89	10.26	12.50	12.50		DSI-PD
1	01	07	Var			Jumlah Dayah Type A	Dayah	4	6	6	8	10	10		DSI-PD
1	01	07	Var			Jumlah seluruh Dayah	Dayah	72	74	76	78	80	80		DSI-PD
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											DINKES
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100		DINKES
1	02	01	Var			Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7		DINKES
1	02	01	Var			Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7		DINKES
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Capaian 12 Indikator SPM Kesehatan / 12	Persen	81.51	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		DINKES
1	02	02	Var			Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	95.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		DINKES
1	02	02	Var			Jumlah ibu hamil yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	4191	4159	4174	4195	4200			DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu yg sama	Orang	4366	4159	4174	4195	4200			DINKES
1	02	02	Var			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	97.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		DINKES
1	02	02	Var			Jumlah ibu bersalinyg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	4064	3980	3995	4015	4020			DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yg sama	Orang	4167	3980	3995	4015	4020			DINKES
1	02	02	Var			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	99.04	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		DINKES
1	02	02	Var			Jumlah bayi baru lahir yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	3931	3980	3995	4015	4020			DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran bayi baru lahir dalam kurun waktu yg sama	Orang	3969	3980	3995	4015	4020			DINKES
1	02	02	Var			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	78.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		DINKES
1	02	02	Var			Jumlah balita yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	15868	20309	20385	20488	20515			DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran balita dalam kurun waktu yg sama	Orang	20231	20309	20385	20488	20515			DINKES
1	02	02	Var			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persen	97.37	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		DINKES

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
									Target	Target	Target	Target	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	02	Var			Jumlah anak usia pendidikan dasar yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm kurun waktu satu tahun ajaran	Orang	22719	39350	39451	39514	39552		DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar dalam kurun waktu yg sama	Orang	23332	39350	39451	39514	39552		DINKES
1	02	02	Var			Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	82.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	02	Var			Jumlah orang usia 15-59 thn yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	119482	142975	145043	147247	149686		DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran orang usia 15-59 thndalam kurun waktu yg sama	Orang	144294	142975	145043	147247	149686		DINKES
1	02	02	Var			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	94.46	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	02	Var			Jumlah orang usia 60 thn atau lebih yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	15342	13386	14039	14729	15456		DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran orang usia 60 tahun atau lebih thn dalam kurun waktu yg sama	Orang	16241	13386	14039	14729	15456		DINKES
1	02	02	Var			Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	65.82	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	02	Var			Jumlah penderita hipertensi usia lebih 15 tahun yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	27515	42999	43747	44543	45414		DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran penderita hipertensi usia lebih 15 tahun atau lebih thn dalam kurun waktu yg sama	Orang	41804	42999	43747	44543	45414		DINKES
1	02	02	Var			Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	92.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	02	Var			Jumlah penderita diabetes melitus usia lebih 15 tahun yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	4235	4690	4772	4859	4954		DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran penderita diabetes melitus usia lebih 15 tahun atau lebih thn dalam kurun waktu yg sama	Orang	4561	4690	4772	4859	4954		DINKES
1	02	02	Var			Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	93.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	02	Var			Jumlah penderita ODGJ berat yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	413	453	459	466	473		DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran penderita ODGJ berat dalam kurun waktu yg sama	Orang	442	453	459	466	473		DINKES
1	02	02	Var			Persentase Orang Terduga TBC Mendapat Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	35.19	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	02	Var			Jumlah penderita Orang terduga TBC yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	1801	5411	5405	5400	5395		DINKES
1	02	02	Var			jumlah sasaran penderita Orang terduga TBC dalam kurun waktu yg sama	Orang	5118	5411	5405	5400	5395		DINKES
1	02	02	Var			Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi HIV Sesuai Standar	Persen	45.20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02	02	Var		Jumlah penderita orang engan resiko terinfeksi HIV yg mendapat pelayanan sesuai standar dlm waktu satu tahun	Orang	2413	5330	5320	5309	5297		DINKES
1	02	02	Var		jumlah sasaran penderita orang dengan resiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu yg sama	Orang	5339	5330	5320	5309	5297		DINKES
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih/Jumlah SDM Kesehatan	Persen	2.43	3.20	4.14	5.41	6.96	22.03	DINKES
1	02	03	Var		Jumlah SDM Kesehatan yang dilatih	orang	38	50	65	85	110	348	DINKES
1	02	03	Var		Jumlah SDM Kesehatan	orang	1561	1561	1,570	1,570	1580	1580	DINKES
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk Farmasi, I-PRT, PKRT dan TPM /Jumlah Permohonan Farmasi, I-PRT, PKRT dan TPM yang masuk * 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
1	02	04	Var		Jumlah rekomendasi yang terbit untuk Farmasi, I-PRT, PKRT dan TPM	Dokumen	74	75	80	90	95	340	DINKES
1	02	04	Var		Jumlah Permohonan Farmasi, I-PRT, PKRT dan TPM yang masuk	Dokumen	74	75	80	90	95	340	DINKES
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	(Jumlah Lembaga yang dilakukan promosi kesehatan/Jumlah Sasaran lembaga*100) + (Jumlah UKBM aktif/Jumlah seluruh UKBM*100) /2	Persen	64.98	70.73	83.44	93.17	100.00	100.00	DINKES
1	02	05	Var		Persentase Promosi Lembaga Adat	Persen	52.68	59.64	80.52	95.43	100.00	100.00	DINKES
1	02	05	Var		Jumlah Lembaga yang dilakukan promosi kesehatan	Lembaga	265	300	405	480	503	503	DINKES
1	02	05	Var		Jumlah Sasaran lembaga	Lembaga	503	503	503	503	503	503	DINKES
1	02	05	Var		Persentase UKBM Aktif	Persen	77.27	81.82	86.36	90.91	100.00	100.00	DINKES
1	02	05	Var		Jumlah UKBM aktif	Pos	68	72	76	80	88	88	DINKES
1	02	05	Var		Jumlah seluruh UKBM	Pos	88	88	88	88	88	88	DINKES
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										PUPR
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	PUPR
1	03	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	PUPR
1	03	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	luasan daerah yang tergenang / luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang *100	Persen	92.29	81.38	70.42	59.46	48.50	48.50	PUPR
1	03	02	Var		Luasan daerah yang tergenang	m2	6.46	5.70	4.93	4.16	3.40	3.40	PUPR
1	03	02	Var		Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	m2	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Penduduk berakses air minum/Jumlah penduduk *100%	Persen	20.48	21.31	22.18	23.10	24.06	24.06	PUPR
1	03	03	Var		Penduduk berakses air minum	Jiwa	38648	40217	41864	43593	45409	45409	PUPR
1	03	03	Var		Jumlah penduduk	Jiwa	188713	188713	188713	188713	188713	188713	PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal *100%	Persen	67.47	69.61	71.86	74.21	76.69	76.69	PUPR

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
									Target	Target	Target	Target	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	03	05	Var			Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	unit	34969	36077	37241	38463	39747	39747	PUPR
1	03	05	Var			Jumlah rumah tinggal	unit	51827	51827	51827	51827	51827	51827	PUPR
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)/Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) *100%	Persen	68.58	71.64	74.85	78.22	81.77	81.77	PUPR
1	03	06	Var			Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)	km	79.83	83.39	87.13	91.06	95.18	95.18	PUPR
1	03	06	Var			Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)	km	116.41	116.41	116.41	116.41	116.41	116.41	PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung		Jumlah bangunan gedung yang ditata/Jumlah keseluruhan bangunan gedung *100%	Persen	4.00	4.00	7.69	7.69	11.54	11.54	PUPR
1	03	08	Var			Jumlah bangunan gedung yang ditata	unit	1	1	2	2	3	3	PUPR
1	03	08	Var			Jumlah keseluruhan bangunan gedung	unit	25	25	26	26	26	26	PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap		panjang jaringan jalan kondisi mantap /panjang jalan seluruhnya	Persen	65.05	68.26	71.64	75.19	78.91	78.91	PUPR
1	03	10	Var			panjang jaringan jalan kondisi mantap	km	268.30	281.57	295.50	310.13	325.50	325.50	PUPR
1	03	10	Var			panjang jalan seluruhnya	km	412.47	412.47	412.47	412.47	412.47	412.47	PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW		Realisasi RTRW/Rencana peruntukkan *100%	Persen	47.80	54.47	61.13	67.8	74.47	74.47	PUPR
1	03	12	Var			Realisasi RTRW	Rekomendasi	717	817	917	1017	1117	1117	PUPR
1	03	12	Var			Rencana Peruntukkan	Rekomendasi	1500	1500	1500	1500	1500	1500	PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											PUPR
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan rumah layak huni		Jumlah rumah layak huni / jumlah rumah tinggal	Persen	69.19	69.38	69.63	69.88	70.15	70.15	PUPR
1	04	03	Var			Jumlah rumah layak huni	Unit	35858	35958	36085	36217	36356	36356	PUPR
1	04	03	Var			Jumlah rumah tinggal	Unit	51827	51827	51827	51827	51827	51827	PUPR
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh		Luas Lingkungan permukiman kumuh / luas wilayah * 100	Persen	0.43	0.38	0.32	0.27	0.21	0.21	PUPR
1	04	04	Var			Luas Lingkungan permukiman kumuh	Ha	78.1	68.1	58.1	48.1	38.1	38.1	PUPR
1	04	04	Var			luas wilayah	Ha	18106	18106	18106	18106	18106	18106	PUPR
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam kondisi baik		Jumlah PSU yang dibangun atau direhab dalam kurun waktu tertentu / jumlah PSU yang tersedia	Rasio	0.093	0.093	0.117	0.143	0.206	0.206	PUPR
1	04	05	Var			Jumlah PSU yang dibangun atau direhab dalam kurun waktu tertentu	unit	140	140	177	216	312	312	PUPR
1	04	05	Var			Jumlah PSU yang tersedia	unit	1512	1512	1512	1512	1512	1512	PUPR
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											BPBD
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD
1	05	01	Var			Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	BPBD
1	05	01	Var			Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	BPBD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi/jumlah kejadian bencana yg terjadi*100%	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD
1	05	03	Var		Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi	Kejadian	2	3	2	2	2	2	BPBD
1	05	03	Var		Jumlah kejadian bencana yg terjadi	Kejadian	2	3	2	2	2	2	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi/jumlah kejadian kebakaran yg terjadi*100%	Persen	100	100	100	100	100	100	BPBD
1	05	04	Var		Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi	Kejadian	75	80	64	51	40	235	BPBD
1	05	04	Var		Jumlah kejadian kebakaran yg terjadi	Kejadian	75	80	64	51	40	235	BPBD
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										SATPOL PP WH
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP WH
1	05	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	SATPOL PP WH
1	05	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	SATPOL PP WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentrman	Jumlah Pelanggaran Ketertiban dan Ketentrman yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran yang terdata*100	Persen	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP WH
1	05	02	Var		Jumlah Pelanggaran Ketertiban dan Ketentrman yang terselesaikan	Kasus	504	450	400	350	250	250	SATPOL PP WH
1	05	02	Var		Jumlah pelanggaran yang terdata	Kasus	504	450	400	350	250	250	SATPOL PP WH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										DINSOS
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
1	06	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	DINSOS
1	06	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu	Jumlah Keluarga yang Mendapat Bantuan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial / Jumlah Masyarakat Yang Terdata Dalam DTKS * 100	Persen	71.31	73.09	74.92	76.80	78.72	78.72	DINSOS
1	06	02	Var		Jumlah Keluarga yang Mendapat Bantuan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial	KK	17828	18274	18731	19199	19679	19679	DINSOS
1	06	02	Var		Jumlah Masyarakat Yang Terdata Dalam DTKS	KK	25000	25000	25000	25000	25000	25000	DINSOS
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	Jumlah jenis PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS * 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
1	06	04	Var		Jumlah jenis PMKS yang tertangani	Jenis	4	4	4	4	4	4	DINSOS
1	06	04	Var		Jumlah PMKS	Jenis	4	4	4	4	4	4	DINSOS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	(Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani/Anak Terlantar Yang Terdata * 100%) + (Jumlah Fakir Miskin yang Tertangani/Jumlah Fakir Miskin yang Terdata (DTKS) * 100)/2	Persen	38.61	40.76	43.76	47.00	50.56	50.56	DINSOS
1	06	05	Var		Persentase Penanganan Anak Terlantar	Persen	61.54	64.29	66.67	68.75	70.59	70.59	DINSOS
1	06	05	Var		Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	Orang	40	45	50	55	60	60	DINSOS
1	06	05	Var		Anak Terlantar Yang Terdata	Orang	65	70	75	80	85	85	DINSOS
1	06	05	Var		Persentase Penanganan Fakir Miskin	Persen	15.67	17.24	20.86	25.24	30.54	30.54	DINSOS
1	06	05	Var		Jumlah Fakir Miskin yang Tertangani	Orang	17828	19611	23729	28712	34742	34742	DINSOS
1	06	05	Var		Jumlah Fakir Miskin yang Terdata (DTKS)	Orang	113755	113755	113755	113755	113755	113755	DINSOS
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
1	06	06	Var		Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jiwa	50	60	70	70	75	75	DINSOS
1	06	06	Var		Jumlah korban bencana yang seharusnya bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Jiwa	50	60	70	70	75	75	DINSOS
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	Jumlah TMP yang dikelola/Jumlah TMP yang terdata*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
1	06	07	Var		Jumlah TMP yang dikelola	TMP	1	1	1	1	1	1	DINSOS
1	06	07	Var		Jumlah TMP yang terdata	TMP	1	1	1	1	1	1	DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										DPMTSP NAKER
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DPMTSP NAKER
2	07	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	DPMTSP NAKER
2	07	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	DPMTSP NAKER
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih / Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar * 100	Persen	19.71	13.33	14.29	15.00	15.56	15.56	DPMTSP NAKER
2	07	03	Var		Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	Orang	95	80	100	120	140	140	DPMTSP NAKER
2	07	03	Var		Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	Orang	482	600	700	800	900	900	DPMTSP NAKER
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan / Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar * 100	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan / Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar * 100	Persen	39.21	54.17	53.57	55.63	57.22	57.22	DPMTSP NAKER
2	07	04	Var		Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	189	325	375	445	515	515	DPMTSP NAKER
2	07	04	Var		Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	Orang	482	600	700	800	900	900	DPMTSP NAKER

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama / Jumlah Perkara Perselisihan yang dicatatkan * 100	Persen	100	100	100	100.00	100	100	DPMTSP NAKER
2	07	05	Var		Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Perkara	46	39	37	35	30	30	DPMTSP NAKER
2	07	05	Var		Jumlah Perkara Perselisihan yang dicatatkan	Perkara	46	39	37	35	30	30	DPMTSP NAKER
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										DP3AP2 KB
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB
2	08	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	DP3AP2 KB
2	08	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	DP3AP2 KB
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	((Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang Aktif / Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang Ada *100) + (Jumlah Pekerja Perempuan / Jumlah Angkatan Kerja Perempuan * 100) + (Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan PPRG dan ARG / Jumlah Perangkat Daerah * 100) / 3)	Persen	59.58	59.39	62.02	58.58	60.68	60.68	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Persentase Lembaga Perempuan dan Anak yang Aktif	Persen	34.62	34.07	41.94	46.32	52.63	52.63	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang Aktif	Lembaga	27	31	39	44	50	50	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang Ada	Lembaga	78	91	93	95	95	95	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Persentase Pekerja Perempuan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Jumlah Pekerja Perempuan	Orang	96091	96091	96095	97081	98095	98095	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	Orang	96091	96091	96095	97081	98095	98095	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Persentase PD yang melakukan PPRG dan ARG	Persen	44.12	44.12	44.12	29.41	29.41	29.41	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan PPRG dan ARG	PD	15	15	15	10	10	10	DP3AP2 KB
2	08	02	Var		Jumlah Perangkat Daerah	PD	34	34	34	34	34	34	DP3AP2 KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	((Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani secara Komprehensif / Jumlah Kasus Terhadap Perempuan dan Anak *100) + (Jumlah Kecamatan yang Ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak / Jumlah Kecamatan *100) / 2)	Persen	62.50	75.00	87.50	100.00	100.00	100.00	DP3AP2 KB
2	08	03	Var		Persentase Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB
2	08	03	Var		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani secara Komprehensif	Kasus	110	120	130	135	140	140	DP3AP2 KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	08	03	Var		Jumlah Kasus Terhadap Perempuan dan Anak	Kasus	110	120	130	135	140	140	DP3AP2 KB
2	08	03	Var		Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen	25	50	75	100	100	100	DP3AP2 KB
2	08	03	Var		Jumlah Kecamatan yang Ditetapkan sebagai Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	1	2	3	4	4	4	DP3AP2 KB
2	08	03	Var		Jumlah Kecamatan	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	DP3AP2 KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan	Jumlah Kelompok Perempuan yang Dibina / Jumlah Kelompok Perempuan *100	Persen	91.67	91.67	92.41	93.83	94.12	94.12	DP3AP2 KB
2	08	04	Var		Jumlah Kelompok Perempuan yang Dibina	Kelompok	55	66	73	76	80	80	DP3AP2 KB
2	08	04	Var		Jumlah Kelompok Perempuan	Kelompok	60	72	79	81	85	85	DP3AP2 KB
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyediakan Data SIGA SDGA / Jumlah Perangkat Daerah * 100	Persen	29.41	29.41	32.35	32.35	35.29	35.29	DP3AP2 KB
2	08	05	Var		Jumlah Perangkat Daerah Menyediakan Data SIGA/SDGA	PD	10	10	11	11	12	12	DP3AP2 KB
2	08	05	Var		Jumlah Perangkat Daerah	PD	34	34	34	34	34	34	DP3AP2 KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	((Jumlah Forum Anak yang Ada / Jumlah Forum Anak yang Harus Ada * 100) + (Jumlah Lembaga yang Berperan Dalam KLA / Jumlah Lembaga yang Harus Berperan Dalam KLA * 100)) / 2	Persen	30.49	33.46	37.18	39.86	43.38	43.38	DP3AP2 KB
2	08	06	Var		Persentase Ketersediaan Forum Anak	Persen	20.59	23.53	27.94	32.35	36.76	36.76	DP3AP2 KB
2	08	06	Var		Jumlah Forum Anak yang Ada	Forum	14	16	19	22	25	25	DP3AP2 KB
2	08	06	Var		Jumlah Forum Anak yang Harus Ada	Forum	68	68	68	68	68	68	DP3AP2 KB
2	08	06	Var		Persentase Peran Lembaga dalam KLA	Persen	40.38	43.40	46.43	47.37	50.00	50.00	DP3AP2 KB
2	08	06	Var		Jumlah Lembaga yang Berperan Dalam KLA	Lembaga	21	23	26	27	30	30	DP3AP2 KB
2	08	06	Var		Jumlah Lembaga yang Harus Berperan Dalam KLA	Lembaga	52	53	56	57	60	60	DP3AP2 KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Dilayani / Jumlah Keseluruhan Anak * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB
2	08	07	Var		Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Dilayani	Anak	90	85	80	75	75	75	DP3AP2 KB
2	08	07	Var		Jumlah Keseluruhan Anak	Anak	90	85	80	75	75	75	DP3AP2 KB
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										DKPPP
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DKPPP
2	09	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	DKPPP
2	09	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	DKPPP
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (kg) / Jumlah Penduduk * 100	Persen	39.45	39.65	41.38	43.47	45.00	45.00	DKPPP
2	09	03	Var		Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (kg)	Kg	74448	74821	78866	82849	86614	86614	DKPPP
2	09	03	Var		Jumlah Penduduk	Jiwa	188700	188700	190587	190587	192493	192493	DKPPP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Jumlah Informasi Kerawanan Pangan yang Ada / Jumlah Informasi Kerawanan Pangan yang Harus Ada *100	Persen	33.33	44.44	55.56	66.67	77.78	77.78	DKPPP
2	09	04	Var		Jumlah Informasi Kerawanan Pangan yang Ada	Dokumen	3	4	5	6	7	7	DKPPP
2	09	04	Var		Jumlah Informasi Kerawanan Pangan yang Harus Ada	Dokumen	9	9	9	9	9	9	DKPPP
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar	Jumlah Pangan Segar yang diawasi / Jumlah Produksi Pangan Segar *100	Persen	45.45	45.45	63.64	63.64	90.91	90.91	DKPPP
2	09	05	Var		Jumlah Pangan Segar yang diawasi	Jenis	5	5	7	7	10	10	DKPPP
2	09	05	Var		Jumlah Produksi Pangan Segar	Jenis	11	11	11	11	11	11	DKPPP
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										PERTANAHAN
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	PERTANAHAN
2	10	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	PERTANAHAN
2	10	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	PERTANAHAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Santunan Persertifikatan	Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Persertifikatan /Total Keseluruhan Masyarakat Penerima Santunan Persertifikatan * 100%	Persen	NA	66.67	80.00	83.33	86.67	86.67	PERTANAHAN
2	10	05	Var		Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Persertifikatan	Orang	NA	200	240	250	260	260	PERTANAHAN
2	10	05	Var		Total Keseluruhan Masyarakat Penerima Santunan Persertifikatan	Orang	NA	300	300	300	300	300	PERTANAHAN
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penanganan Tanah Kosong	Jumlah Persil Tanah Kosong yang ditangani/Total Persil Tanah Kosong * 100%	Persen	NA	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	PERTANAHAN
2	10	08	Var		Jumlah Persil Tanah Kosong yang ditangani	Persil	NA	3	4	5	5	5	PERTANAHAN
2	10	08	Var		Total Persil Tanah Kosong	Persil	NA	20	20	20	20	20	PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah / Total Lahan Milik Pemerintah * 100	Persen	0.51	0.55	0.59	0.63	0.67	0.67	PERTANAHAN
2	10	10	Var		Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah	m²	660,058	710,058	760,058	818,000	863,000	863,000	PERTANAHAN
2	10	10	Var		Total Lahan Milik Pemerintah	m²	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	PERTANAHAN
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat / Total Lahan Milik Masyarakat * 100	Persen	33.88	44.87	45.64	46.42	46.42	46.42	PERTANAHAN
2	10	12	Var		Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	m²	43,729,642	57,910,000	58,910,000	59,910,000	59,910,000	59,910,000	PERTANAHAN
2	10	12	Var		Total Lahan Milik Masyarakat	m²	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	PERTANAHAN
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Tanah yang Dipetakan	Jumlah Tanah Milik Pemerintah, HGU, HGB, dan Milik Masyarakat yang Dipetakan / Jumlah Keseluruhan Tanah Milik Pemerintah, HGU, HGB, dan Milik Masyarakat * 100%	Persen	47.86	66.21	67.80	67.07	68.66	68.66	PERTANAHAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10	13	Var		Jumlah Tanah Milik Pemerintah, HGU, HGB, dan Milik Masyarakat yang Dipetakan	m²	61,766,569	85,450,058	87,505,058	86,570,000	88,621,000	88,621,000	PERTANAHAN
2	10	13	Var		Jumlah Keseluruhan Tanah Milik Pemerintah, HGU, HGB, dan Milik Masyarakat	m²	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	129,067,057	PERTANAHAN
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase Pembinaan SDM Pertanahan	Jumlah SDM Pertanahan Yang Mendapat Pembinaan / Jumlah Keseluruhan SDM Pertanahan * 100%	Persen	35.09	43.86	52.63	57.02	70.18	70.18	PERTANAHAN
2	10	14	Var		Jumlah SDM Pertanahan Yang Mendapat Pembinaan	Orang	40	50	60	65	80	80	PERTANAHAN
2	10	14	Var		Jumlah Keseluruhan SDM Pertanahan	Orang	114	114	114	114	114	114	PERTANAHAN
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai	Luas Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai yang Dimanfaatkan / Total Luas Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai * 100%	Persen	NA	54.17	58.33	62.50	66.67	66.67	PERTANAHAN
2	10	15	Var		Luas Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai yang Dimanfaatkan	Ha	N/A	13	14	15	16	16	PERTANAHAN
2	10	15	Var		Total Luas Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai	Ha	N/A	24	24	24	24	24	PERTANAHAN
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Ketersediaan Sistem Informasi Pertanahan	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	PERTANAHAN
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan	Jumlah Kasus yang Diselesaikan / Jumlah Kasus yang Terdaftar * 100%	Persen	50	66.67	60	60	80	80	PERTANAHAN
2	10	17	Var		Jumlah Kasus yang Diselesaikan	Kasus	1	2	3	3	4	4	PERTANAHAN
2	10	17	Var		Jumlah Kasus yang Terdaftar	Kasus	2	3	5	5	5	5	PERTANAHAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										DLH
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DLH
2	11	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	DLH
2	11	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	DLH
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusnya RPPLH Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Pencemaran Air *30%) + (Indeks Pencemaran Udara * 30%)+(Indeks tutupan lahan*40%)	Nilai	63.7	64.9	65.35	65.80	66.25	66.25	DLH
2	11	03	Var		Indeks Pencemaran Air *30%	Nilai	58.83						DLH
2	11	03	Var		Indeks Pencemaran Udara * 30%	Nilai	90.80						DLH
2	11	03	Var		Indeks tutupan lahan*40%	Nilai	22.82						DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan taman	luas area taman yang ditangani / luas taman yang tersedia * 100%	Persen	28.91	48.97	61.95	76.70	88.50	88.50	DLH
2	11	04	Var		Luas Area Taman yang Ditangani	Ha	0.98	1.66	2.10	2.60	3.00	3.00	DLH
2	11	04	Var		Luas Taman yang tersedia	Ha	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	Jumlah pelaku usaha penghasil B3 yang dikelola/Seluruh pelaku usaha penghasil B3*100%	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	DLH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11	05	Var		Jumlah pelaku usaha penghasil B3 yang dikelola	Unit	15	16	17	18	19	19	DLH
2	11	05	Var		Seluruh pelaku usaha penghasil B3	Unit	20	20	20	20	20	20	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota.	Pengaduan masyarakat yang ditangani/Total Jumlah pengaduan yang teregistrasi *100%	persen	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	DLH
2	11	06	Var		Pengaduan masyarakat yang ditangani	Kasus	15	16	17	18	19	19	DLH
2	11	06	Var		Total Jumlah pengaduan yang teregistrasi	Kasus	20	20	20	20	20	20	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase aparatur desa yang terlatih	Jumlah aparatur desa yang mendapat pelatihan / Jumlah keseluruhan aparatur desa * 100	Persen	1.47	7.35	7.35	7.35	7.35	29.41	DLH
2	11	08	Var		Jumlah aparatur desa yang mendapat pelatihan	Orang	10	50	50	50	50	200	DLH
2	11	08	Var		Jumlah keseluruhan aparatur desa	Orang	680	680	680	680	680	680	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan yang tertangani/Jumlah pengaduan keseluruhan*100%	Persen	100	100	100	100	100	100.00	DLH
2	11	10	Var		Jumlah pengaduan yang tertangani	Kasus	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	DLH
2	11	10	Var		Jumlah pengaduan keseluruhan	Kasus	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang tertangani (ton)/total timbunan sampah di kab/kota *100%	Persen	86.25	87.60	89.73	91.08	93.74	93.74	DLH
2	11	11	Var		Jumlah sampah yang tertangani (ton)	Ton	29672	30704	31464	31948	32248	32248	DLH
2	11	11	Var		Total Timbunan sampah di kab/kota	Ton	34403	35051	35065	35077	34403	34403	DLH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										DISDUK CAPIL
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
2	12	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	DISDUK CAPIL
2	12	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	DISDUK CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	((Jumlah KTP yang diterbitkan / Jumlah penduduk wajib KTP *100) + (Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan / Jumlah Kepala Keluarga *100) + (Jumlah Penerbitan KIA / Jumlah Anak * 100) / 3	Persen	58.24	66.16	71.18	74.88	71.07	71.07	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Persentase Penerbitan KTP	Persen	97.88	99.65	98.15	95.51	88.29	88.29	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Jumlah KTP Yang Diterbitkan	Dokumen	127579	155853	184214	215118	254120	254120	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jiwa	130338	156406	187687	225224	287836	287836	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	47.56	65.74	81.73	95.93	92.09	92.09	DISDUK CAPIL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	Var		Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Dokumen	26473	39079	51673	64273	70791	70791	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Jumlah Kepala Keluarga	Jiwa	55661	59447	63221	67001	76873	76873	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Persentase Penerbitan KIA	Persen	29.27	33.09	33.67	33.20	32.82	32.82	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Jumlah Penerbitan KIA	Dokumen	17983	23379	26886	29574	32262	32262	DISDUK CAPIL
2	12	02	Var		Jumlah Anak	Jiwa	61429	70643	79857	89071	98285	98285	DISDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	((Jumlah bayi berakte kelahiran / Jumlah bayi * 100) + (Jumlah pasangan nikah berakte nikah / Jumlah keseluruhan pasangan nikah *100) + (Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan / Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan * 100) + (Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan / Jumlah Kematian *100) / 4)	Persen	84.77	86.42	87.77	88.85	89.60	89.60	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Persentase Bayi Berakte Kelahiran	Persen	94.29	97.15	99.68	98.99	94.16	94.16	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah bayi berakte kelahiran	Jiwa	5825	6408	6768	7280	8007	8007	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah bayi	Jiwa	6178	6596	6790	7354	8504	8504	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Persentase Pasangan Nikah Berakte Nikah	Persen	50.50	51.38	51.72	57.40	70.10	70.10	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	40731	41567	42369	47985	59805	59805	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	80652	80900	81921	83600	85312	85312	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	Persen	94.29	97.15	99.68	98.99	94.16	94.16	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	5825	6408	6768	7280	8007	8007	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	6178	6596	6790	7354	8504	8504	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Persentase Penerbitan Akte Kematian	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan	Dokumen	978	1027	1104	1181	1241	1241	DISDUK CAPIL
2	12	03	Var		Jumlah Kematian	Jiwa	978	1027	1104	1181	1241	1241	DISDUK CAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	{Jumlah Sarana SIAK yang terpelihara/Jumlah Sarana SIAK yang ada*100% +Jumlah Buku yang tersusun /Jumlah Buku yang seharusnya ada*100%}/2	Persen	58.3	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
2	12	04	Var		Persentase Pemeliharaan Sarana SIAK	Persen	100	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
2	12	04	Var		Jumlah Sarana SIAK yang terpelihara	unit	2	2	2	3	3	3	DISDUK CAPIL
2	12	04	Var		Jumlah Sarana SIAK yang ada	unit	2	2	2	3	3	3	DISDUK CAPIL
2	12	04	Var		Persentase Penyusunan Buku	Buku	16.67	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
2	12	04	Var		Jumlah Buku yang tersusun	Dokumen	2	4	4	4	4	4	DISDUK CAPIL
2	12	04	Var		Jumlah Buku yang seharusnya ada	Dokumen	12	4	4	4	4	4	DISDUK CAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISDUK CAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										DPMG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DPMG
2	13	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	DPMG
2	13	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	DPMG
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik	Jumlah Kantor Pemerintahan Gampong yang baik / Jumlah Seluruh Pemerintahan Gampong * 100	Persen	94.12	95.59	95.59	95.59	100.00	100.00	DPMG
2	13	02	Var		Jumlah Kantor Pemerintah Gampong yang baik	Unit	64	65	65	65	68	68	DPMG
2	13	02	Var		Jumlah Seluruh Pemerintah Gampong	Gampong	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Gampong	Jumlah Gampong yang Melakukan Kerjasama / Jumlah Seluruh Gampong	Persen	25.00	51.47	67.65	73.53	100.00	100.00	DPMG
2	13	03	Var		Jumlah Gampong yang Melakukan Kerjasama	Gampong	17	35	46	50	68	68	DPMG
2	13	03	Var		Jumlah Seluruh Gampong	Gampong	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	((Jumlah APBG yang ditetapkan tepat Waktu / Jumlah Gampong *100) + (Jumlah Realisasi Penyerapan ADG, DD, BHPD dan BHRD / Jumlah Dana ADG, DD, BHPD dan BHRD *100) + (Jumlah Gampong Tertib Aset / Jumlah Gampong *100) + (Jumlah Pengisian Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong / Jumlah Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong * 100)) / 4	Persen	57.61	67.13	74.49	81.84	98.75	98.75	DPMG
2	13	04	Var		Persentase APBG Tepat Waktu	Persen	14.71	29.41	44.12	58.82	100.00	100.00	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah APBG yang ditetapkan tepat Waktu	Gampong	10	20	30	40	68	68	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah Gampong	Gampong	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	04	Var		Persentasen Realisasi ADG	Persen	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah Realisasi Penyerapan ADG, DD, BHPD dan BHRD	Rp Milyar	97.49	96.66	106.32	116.96	128.65	128.65	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah Dana ADG, DD, BHPD dan BHRD	Rp Milyar	108.32	101.75	111.92	123.11	135.42	135.42	DPMG
2	13	04	Var		Persentase Gampong Tertib Aset	Persen	29.41	44.12	58.82	73.53	100.00	100.00	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah Gampong Tertib Aset	Gampong	20	30	40	50	68	68	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah Gampong	Gampong	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	04	Var		Persentase Keterisian Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong	Persen	96.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah Pengisian Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong	Orang	524	544	544	544	544	544	DPMG
2	13	04	Var		Jumlah Jabatan Aparatur Pemerintah Gampong	Orang	544	544	544	544	544	544	DPMG
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	((Jumlah kelompok binaan LPM / Jumlah LPM+100%)+ (Jumlah kelompok binaan PKK /Jumlah PKK *100%) +(Jumlah Posyandu aktif /Total Posyandu * 100) / 3)	Persen	51.84	81.25	86.03	91.54	91.54	97.79	DPMG
2	13	05	Var		Persentase Kelompok Binaan LPM	Persen	0.00	100	100	100	100	100	DPMG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	05	Var		Jumlah kelompok binaan LKMD / Tuha Lapan	Lembaga	0	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	05	Var		Jumlah LKMD/Tuha Lapan	Lembaga	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	05	Var		Persentase Kelompok Binaan Karang Taruna	Persen	36,76	51	66	81	81	100	DPMG
2	13	05	Var		Jumlah Kelompok Binaan Karang Taruna	Lembaga	25	35	45	55	55	68	DPMG
2	13	05	Var		Jumlah Karang Taruna Gampong	Lembaga	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	05	Var		Persentase Kelompok Binaan PKK	Persen	70.59	73.53	77.94	85.29	85.29	91	DPMG
2	13	05	Var		Jumlah kelompok binaan PKK	Lembaga	48	50	53	58	58	62	DPMG
2	13	05	Var		Jumlah PKK	Lembaga	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	05	Var		Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	DPMG
2	13	05	Var		Jumlah Posyandu aktif	Lembaga	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	13	05	Var		Total Posyandu	Lembaga	68	68	68	68	68	68	DPMG
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										DP3AP2 KB
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB / Jumlah semua perangkat daerah *100	Persen	47.06	55.88	64.71	67.65	73.53	73.53	DP3AP2 KB
2	14	02	Var		Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di Kampung KB	PD	16	19	22	23	25	25	DP3AP2 KB
2	14	02	Var		Jumlah Perangkat Daerah	PD	34	34	34	34	34	34	DP3AP2 KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana	((Jumlah Akseptor KB /Jumlah pasangan usia subur*100) + (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani /Jumlah pasangan usia subur * 100) + (Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP /Jumlah akseptor KB *100) / 3)	Persen	29.94	52.28	51.61	51.08	50.66	50.66	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Persentase Akseptor KB	Persen	63.06	64.23	65.43	66.66	67.90	67.90	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Jumlah Akseptor KB	Orang	14986	16334	17804	19406	21152	21152	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	23766	25429	27209	29113	31150	31150	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Persentase Pelayanan PUS ber KB	Persen	18.78	15.80	13.29	11.17	9.40	9.40	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Pasangan	4464	4017	3615	3253	2927	2927	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	23766	25429	27209	29113	31150	31150	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Persentase Penggunaan MKJP oleh Akseptor KB	Persen	7.97	76.80	76.10	75.40	74.69	74.69	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Orang	1538	1645	1809	1989	2187	2187	DP3AP2 KB
2	14	03	Var		Jumlah akseptor KB	Orang	19302	2142	2377	2638	2928	2928	DP3AP2 KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	((Jumlah kelompok BKB yang Terbentuk / Jumlah kelompok BKB yang seharusnya Ada *100) + (Jumlah kelompok BKR yang Terbentuk / Jumlah Kelompok BKR yang Seharusnya Ada * 100) + (Jumlah PIK R/M / Jumlah kecamatan * 100) + (Jumlah kelompok BKL yang Terbentuk / Jumlah Kelompok BKL yang Seharusnya Ada * 100) / 4	Persen	90.07	97.43	104.78	112.13	119.49	119.49	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Persentase Kelompok BKB	Persen	16.18	17.65	19.12	20.59	22.06	22.06	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah Kelompok BKB yang Terbentuk	Kelompok	11	12	13	14	15	15	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah kelompok BKB yang seharusnya Ada	Kelompok	68	68	68	68	68	68	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah Kelompok BKR yang Terbentuk	Persen	10.29	11.76	13.24	14.71	16.18	16.18	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah kelompok BKR yang Terbentuk	Kelompok	7	8	9	10	11	11	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah Kelompok BKR yang Seharusnya Ada	Kelompok	68	68	68	68	68	68	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Persentase PIK R/M Kecamatan	Persen	325	350	375	400	425	425	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah PIK R/M	Kelompok	13	14	15	16	17	17	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah kecamatan	Kecamatan	4	4	4	4	4	4	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Persentase Kelompok BKL yang terbentuk	Persen	8.82	10.29	11.76	13.24	14.71	14.71	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah kelompok BKL yang Terbentuk	Kelompok	6	7	8	9	10	10	DP3AP2 KB
2	14	04	Var		Jumlah Kelompok BKL yang Seharusnya Ada	Kelompok	68	68	68	68	68	68	DP3AP2 KB
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										DISHUB
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DISHUB
2	15	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	7	DISHUB
2	15	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	7	DISHUB
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA.J)	Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	((Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Disediakan / Jumlah Perlengkapan Jalan yang seharusnya Ada *100%) + (Jumlah Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik / Jumlah Prasarana Perhubungan yang Seharusnya Ada *100%)) / 2	Persen	41.67	29.17	52.08	45.83	45.83	45.83	DISHUB
2	15	02	Var		Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	50.00	25.00	37.50	25.00	25.00	25.00	DISHUB
2	15	02	Var		Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Telah Ada	Jenis	4	2	3	2	2	2	DISHUB
2	15	02	Var		Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Seharusnya Ada	Jenis	8	8	8	8	8	8	DISHUB
2	15	02	Var		Persentase Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	Persen	33.33	33.33	66.67	66.67	66.67	66.67	DISHUB
2	15	02	Var		Jumlah Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	Unit	1	1	2	2	2	2	DISHUB
2	15	02	Var		Jumlah Prasarana Perhubungan yang Seharusnya Ada	Unit	3	3	3	3	3	3	DISHUB
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Eksistensi Pelabuhan Laut	Ada / Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
							Target	Target	Target	Target	Target	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									KOMINFO
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	KOMINFO
2	16	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	KOMINFO
2	16	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	KOMINFO
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik Yang Tercatat/Jumlah Informasi Publik Yang Tersedia * 100	Persen	26.67	26.25	23.68	26.32	30.00	KOMINFO
2	16	02	Var		Jumlah Informasi Publik Yang Tercatat	Informasi	40	42	45	50	60	KOMINFO
2	16	02	Var		Jumlah Informasi Publik Yang Tersedia	Informasi	150	160	190	190	200	KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	Jumlah OPD Yang Terintergrasi /Jumlah seluruh OPD * 100	Persen	2.94	5.88	11.76	17.65	23.53	KOMINFO
2	16	03	Var		Jumlah PD Yang Terintergrasi	PD	1	2	4	6	8	KOMINFO
2	16	03	Var		Jumlah seluruh PD	PD	34	34	34	34	34	KOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									DISKOP
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	DISKOP
2	17	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	7	7	7	7	7	DISKOP
2	17	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	7	7	7	7	7	DISKOP
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki USP	Jumlah USP / Jumlah Seluruh Koperasi * 100	Persen	0.48	0.94	0.93	1.36	1.34	DISKOP
2	17	02	Var		Jumlah USP	Koperasi	1	2	2	3	3	DISKOP
2	17	02	Var		Jumlah Seluruh Koperasi	Koperasi	208	212	216	220	224	DISKOP
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	Jumlah Koperasi Mandiri / Jumlah Seluruh Koperasi * 100	Persen	79.33	79.72	76.89	83.49	85.38	DISKOP
2	17	03	Var		Jumlah Koperasi Mandiri	Koperasi	165	169	163	177	181	DISKOP
2	17	03	Var		Jumlah Seluruh Koperasi	Koperasi	208	212	212	212	212	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Jumlah Koperasi Sehat / Jumlah Koperasi yang Menyampaikan Laporan Keuangan * 100	Persen	4.33	5.66	6.48	7.27	8.04	DISKOP
2	17	04	Var		Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	9	12	14	16	18	DISKOP
2	17	04	Var		Jumlah Koperasi yang Menyampaikan Laporan Keuangan	Koperasi	208	212	216	220	224	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi UMKM	Jumlah UMKM yang Difasilitasi/ Seluruh jumlah UMKM *100	Persen	1.31	23.20	24.89	27.26	29.48	DISKOP
2	17	07	Var		Jumlah UMKM yang Difasilitasi	UMKM	75	1378	1,528	1,728	1928	DISKOP
2	17	07	Var		Seluruh jumlah UMKM	UMKM	5739	5939	6,139	6,339	6539	DISKOP
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil / Keseluruhan Usaha Mikro * 100	Persen	6.08	6.72	7.31	7.87	8.40	DISKOP
2	17	08	Var		Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil	UMKM	349	399	449	499	549	DISKOP
2	17	08	Var		Keseluruhan Usaha Mikro	UMKM	5739	5939	6139	6339	6539	DISKOP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026				
								Target	Target	Target	Target	Target			
1			2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												DPMTSP NAKER
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Insentif dan Penanaman Modal yang sudah diberikan / Keseluruhan Jenis Insentif * 100	Persen	NA	33.33	40.00	40.00	46.67	46.67			DPMTSP NAKER
2	18	02	Var		Insentif yang sudah diberikan	Jenis	NA	5	6	6	7	7			DPMTSP NAKER
2	18	02	Var		Keseluruhan Jenis Insentif dan Penanaman Modal yang ditetapkan	Jenis	NA	15	15	15	15	15			DPMTSP NAKER
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal	Sektor yang sudah dipromosi / Jumlah Keseluruhan Sektor * 100	Persen	10.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00			DPMTSP NAKER
2	18	03	Var		Jumlah Sektor yang telah dipromosi	Sektor	1	2	2	3	2	2			DPMTSP NAKER
2	18	03	Var		Jumlah Keseluruhan Sektor	Sektor	10	10	10	10	10	10			DPMTSP NAKER
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	((70% x Jumlah Perizinan yang diterbitkan) / (Jumlah Pengajuan Perizinan - Jumlah Pengajuan Perizinan yang tidak memenuhi syarat)*100) + ((Jumlah Aduan yang terselesaikan / Jumlah Aduan yang masuk x 30%)*100)	Indeks	87.02	87.34	87.66	87.98	88.30	88.30			DPMTSP NAKER
2	18	04	Var		Persentase Penerbitan Izin	Persen	81.46	81.92	82.37	82.83	83.29	83.29			DPMTSP NAKER
2	18	04	Var		Jumlah Perizinan yang diterbitkan	Izin	892	897	902	907	912	912			DPMTSP NAKER
2	18	04	Var		Jumlah Pengajuan Perizinan	Izin	1100	1105	1110	1115	1120	1120			DPMTSP NAKER
2	18	04	Var		Jumlah Pengajuan Perizinan yang tidak memenuhi syarat	Izin	5	10	15	20	25	25			DPMTSP NAKER
2	18	04	Var		Persentase Penyelesaian Pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	100.00			DPMTSP NAKER
2	18	04	Var		Jumlah Aduan yang terselesaikan	Aduan	25	30	35	41	48	48			DPMTSP NAKER
2	18	04	Var		Jumlah Aduan yang masuk	Aduan	25	30	35	41	48	48			DPMTSP NAKER
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi	((Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM / Jumlah Pemenuhan Komitmen dan Izin Usaha Yang Dikeluarkan) * 60%) + ((Jumlah Pelaku Usaha Penanaman Modal Yang Menindaklanjuti Hasil Pengendalian / Jumlah Pelaku Usaha Yang Dikendalikan) * 40%)	Indeks	80.56	77.75	76.83	75.98	75.19	75.19			DPMTSP NAKER
2	18	05	Var		Persentase Penyampian LKPM oleh Pelaku Usaha	Persen	67.59	62.92	61.38	59.96	58.65	58.65			DPMTSP NAKER
2	18	05	Var		Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Pelaku Usaha	292	297	302	307	312	312			DPMTSP NAKER
2	18	05	Var		Jumlah Pemenuhan Komitmen dan Izin Usaha Yang Dikeluarkan	Izin	432	472	492	512	532	532			DPMTSP NAKER
2	18	05	Var		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian oleh Pelaku Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100			DPMTSP NAKER
2	18	05	Var		Jumlah Pelaku Usaha Penanaman Modal Yang Menindaklanjuti Hasil Pengendalian	Pelaku Usaha	93	64	72	80	88	88			DPMTSP NAKER
2	18	05	Var		Jumlah Pelaku Usaha Yang Dikendalikan	Pelaku Usaha	93	64	72	80	88	88			DPMTSP NAKER
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Database Perizinan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			DPMTSP NAKER
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												DISPORAPAR
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100			DISPORAPAR
2	19	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6			DISPORAPAR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	19	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	DISPORAPAR
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif / Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda yang Ada * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	DISPORAPAR
2	19	02	Var		Jumlah Orqanisasi Pemuda yang Aktif	Organisasi	16	16	16	16	16	16	DISPORAPAR
2	19	02	Var		Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda yang Ada	Organisasi	16	16	16	16	16	16	DISPORAPAR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	Cabor	4	6	6	7	8	8	DISPORAPAR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pramuka	Jumlah GUDEP yang Aktif / Jumlah GUDEP Keseluruhan *100	Persen	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	DISPORAPAR
2	19	04	Var		Jumlah GUDEP yang Aktif	Gudep	63	63	63	63	63	63	DISPORAPAR
2	19	04	Var		Jumlah GUDEP Keseluruhan	Gudep	147	147	147	147	147	147	DISPORAPAR
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										KOMINFO
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi	Jumlah OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi /Jumlah Seluruh OPD * 100	Persen	2.94	5.88	8.82	11.76	11.76	11.76	KOMINFO
2	21	02	Var		Jumlah OPD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi	OPD	1	2	3	4	4	4	KOMINFO
2	21	02	Var		Jumlah Seluruh OPD	OPD	34	34	34	34	34	34	KOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										PK
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Jumlah kegiatan pengembangan budaya yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pengembangan budaya yg direncanakan * 100	Persen	46.15	53.85	61.54	61.54	76.92	76.92	PK
2	22	02	Var		Jumlah kegiatan pengembangan budaya yang dilaksanakan	Kegiatan	6	7	8	8	10	10	PK
2	22	02	Var		Jumlah kegiatan pengembangan budaya yg direncanakan	Kegiatan	13	13	13	13	13	13	PK
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pembinaan sanggar seni	Jumlah sanggar seni yang dibina / Jumlah keseluruhan sanggar seni *100	Persen	3.45	3.45	3.45	6.90	6.90	6.90	PK
2	22	03	Var		Jumlah sanggar seni yang dibina	Sanggar	1	1	1	2	2	2	PK
2	22	03	Var		Jumlah keseluruhan sanggar seni	Sanggar	29	29	29	29	29	29	PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase objek sejarah	Jumlah objek sejarah yang diinventarisir / Jumlah keseluruhan objek sejarah *100	Persen	50.00	50.00	56.25	56.25	68.75	68.75	PK
2	22	04	Var		Jumlah objek sejarah yang diinventarisir	Objek sejarah	8	8	9	9	11	11	PK
2	22	04	Var		Jumlah keseluruhan objek sejarah	Objek sejarah	16	16	16	16	16	16	PK
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan / Total situs cagar budaya yang dimiliki daerah * 100	Persen	50.00	50.00	59.09	59.09	68.18	68.18	PK
2	22	05	Var		Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	11	11	13	13	15	15	PK
2	22	05	Var		Total situs cagar budaya yang dimiliki daerah	Situs	22	22	22	22	22	22	PK
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										MAA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	MAA
2	22	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	MAA
2	22	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Fasilitasi sengketa adat	Jumlah sengketa adat yang diselesaikan / Jumlah sengketa adat yang diterima * 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	MAA
2	22	07	Var		Jumlah sengketa adat yang diselesaikan	Kasus	3	8	8	5	5	5	MAA
2	22	07	Var		Jumlah sengketa adat yang diterima	Kasus	3	8	8	5	5	5	MAA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										ARPUS
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	ARPUS
2	23	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	ARPUS
2	23	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	(Jumlah Pengunjung Perpustakaan /Jumlah Penduduk*100) + (Jumlah Perpustakaan yang dikelola /Jumlah keseluruhan perpustakaan*100) /2	Persen	4.34	6.85	9.02	11.10	13.09	13.09	ARPUS
2	23	02	Var		Jumlah Pengunjung Perpustakaan / Jumlah Penduduk*100	Persen	1.17	1.78	1.90	2.02	2.14	2.14	ARPUS
2	23	02	Var		Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	2037	3245	3550	3875	4200	4200	ARPUS
2	23	02	Var		Jumlah Penduduk 10 Tahun Keatas	Orang	173366	182143	186696	191364	196148	196148	ARPUS
2	23	02	Var		Jumlah Perpustakaan yang dikelola/Jumlah keseluruhan perpustakaan*100	Persen	7.51	11.93	16.14	20.18	24.03	24.03	ARPUS
2	23	02	Var		Jumlah Perpustakaan yang dikelola	Unit	16	26	36	46	56	56	ARPUS
2	23	02	Var		Jumlah keseluruhan perpustakaan	Unit	213	218	223	228	233	233	ARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										ARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	Jumlah Pengelola Arsip Sesuai Standar/Jumlah Keseluruhan Pengelola Arsip*100%	Persen	3.77	7.41	10.91	14.29	17.54	17.54	ARPUS
2	24	02	Var		Jumlah Pengelola Arsip Sesuai Standar	Dokumen	10	20	30	40	50	50	ARPUS
2	24	02	Var		Jumlah Keseluruhan Pengelola Arsip	Dokumen	265	270	275	280	285	285	ARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang dilindungi/Jumlah Arsip Keseluruhan*100%	Persen	10.00	18.18	25.00	30.77	35.71	35.71	ARPUS
2	24	03	Var		Jumlah Arsip yang dilindungi	Dokumen	10	20	30	40	50	50	ARPUS
2	24	03	Var		Jumlah Arsip Keseluruhan	Dokumen	100	110	120	130	140	140	ARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										DKPPP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan bina kelompok nelayan	((Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Tahun n / Jumlah kelompok nelayan * 100) + (Jumlah Nelayan yang difasilitasi / Jumlah Keseluruhan Nelayan *100) / 2)	Persen	43.34	45.41	47.47	49.54	51.61	51.61	DKPPP
3	25	03	Var		Persentase Pembinaan Kelompok Nelayan	Persen	80.00	82.86	85.71	88.57	91.43	91.43	DKPPP
3	25	03	Var		Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Tahun n	Kelompok	28	29	30	31	32	32	DKPPP
3	25	03	Var		Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	35	35	35	35	35	35	DKPPP
3	25	03	Var		Persentase Fasilitasi Kelompok Nelayan	Persen	6.69	7.96	9.24	10.51	11.78	11.78	DKPPP
3	25	03	Var		Jumlah Nelayan yang difasilitasi	Orang	42	50	58	66	74	74	DKPPP
3	25	03	Var		Jumlah Keseluruhan Nelayan	Orang	628	628	628	628	628	628	DKPPP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok pembudidaya	((Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan bantuan Tahun n / Jumlah kelompok pembudidaya * 100) + (Jumlah Pembudidaya yang difasilitasi / Jumlah Keseluruhan Pembudidaya *100) / 2)	Persen	43.22	46.52	49.83	53.14	56.45	56.45	DKPPP
3	25	04	Var		Persentase Pembinaan Kelompok Pembudidaya	Persen	40.00	45.45	50.91	56.36	61.82	61.82	DKPPP
3	25	04	Var		Jumlah kelompok Pembudidaya yang mendapatkan bantuan Tahun n	Kelompok	22	25	28	31	34	34	DKPPP
3	25	04	Var		Jumlah kelompok pembudidaya	Kelompok	55	55	55	55	55	55	DKPPP
3	25	04	Var		Persentase Fasilitasi Kelompok Pembudidaya	Persen	46.43	47.60	48.76	49.92	51.08	51.08	DKPPP
3	25	04	Var		Jumlah Pembudidaya yang difasilitasi	Orang	280	287	294	301	308	308	DKPPP
3	25	04	Var		Jumlah Keseluruhan Pembudidaya	Orang	603	603	603	603	603	603	DKPPP
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumberdaya KP yang diawasi / Jumlah Sumberdaya KP *100	Persen	41.67	44.17	46.67	49.17	51.67	51.67	DKPPP
3	25	05	Var		Jumlah Sumberdaya KP yang diawasi	Kelompok	250	265	280	295	310	310	DKPPP
3	25	05	Var		Jumlah Sumberdaya KP	Kelompok	600	600	600	600	600	600	DKPPP
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	((Jumlah Produksi Ikan (Ton) / Target Daerah (Ton) *100) + (Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan / Target Daerah Produksi Pengolahan Perikanan (ton) * 100) / 2)	Persen	100	100	100	100	100	100	DKPPP
3	25	06	Var		Persentase Realisasi Produksi Ikan	Persen	100	100	100	100	100	100	DKPPP
3	25	06	Var		Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Ton	1143098	1143098	1143098	1143098	1143098	1143098	DKPPP
3	25	06	Var		Target Daerah (Ton)	Ton	1143098	1143098	1143098	1143098	1143098	1143098	DKPPP
3	25	06	Var		Persentase Produksi Pengolahan Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100	DKPPP
3	25	06	Var		Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan	Ton	8300	8300	8300	8300	8300	8300	DKPPP
3	25	06	Var		Target Daerah Produksi Pengolahan Perikanan (ton)	Ton	8300	8300	8300	8300	8300	8300	DKPPP
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										DISPORAPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah Event yang Diselenggarakan / Jumlah Event Yang Direncanakan *100	Persen	25.00	40.00	60.00	70.00	90.00	90.00	DISPORAPAR
3	26	02	Var		Jumlah Event yang Diselenggarakan	Event	1	4	6	7	9	9	DISPORAPAR
3	26	02	Var		Jumlah Event Yang Direncanakan	Event	4	10	10	10	10	10	DISPORAPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatkan Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata / Target Kunjungan Wisata*100	Persen	75.15	95.00	96.88	96.97	97.06	97.06	DISPORAPAR

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																	
									Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026																																			
									Target	Target	Target	Target	Target																																		
1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
3	26	03	Var			Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	150297	285000	310000	320000	330000	330000	DISPORAPAR																																	
3	26	03	Var			Target Kunjungan Wisata	Orang	200000	300000	320000	330000	340000	340000	DISPORAPAR																																	
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Dibina / Jumlah Kelompok Sadar Wisata Seluruhnya * 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISPORAPAR																																	
3	26	05	Var			Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Dibina	Kelompok	6	6	6	6	6	6	DISPORAPAR																																	
3	26	05	Var			Jumlah Kelompok Sadar Wisata Seluruhnya	Kelompok	6	6	6	6	6	6	DISPORAPAR																																	
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										DKPPP																																	
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Sarana Kelompok Tani	((Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan Tahun n / Jumlah kelompok tani * 100) + (Jumlah Gapoktan yang mendapatkan bantuan Tahun n / Jumlah Gapoktan * 100) / 2)	Persen	17.68	25.57	33.46	41.35	49.24	49.24	DKPPP																																	
3	27	02	Var			Persentase Pembinaan Kelompok Tani	Persen	22.03	24.48	26.92	29.37	31.82	31.82	DKPPP																																	
3	27	02	Var			Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan Tahun n	Kelompok	63	70	77	84	91	91	DKPPP																																	
3	27	02	Var			Jumlah kelompok tani	Kelompok	286	286	286	286	286	286	DKPPP																																	
3	27	02	Var			Persentase Pembinaan Gapoktan	Persen	13.33	26.67	40.00	53.33	66.67	66.67	DKPPP																																	
3	27	02	Var			Jumlah Gapoktan yang mendapatkan bantuan Tahun n	Kelompok	6	12	18	24	30	30	DKPPP																																	
3	27	02	Var			Jumlah Gapoktan	Kelompok	45	45	45	45	45	45	DKPPP																																	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Kelompok Tani	((Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan Tahun n / Jumlah kelompok tani * 100) + (Jumlah Gapoktan yang mendapatkan bantuan Tahun n / Jumlah Gapoktan * 100) / 2)	Persen	17.68	26.10	34.51	42.93	51.34	51.34	DKPPP																																	
3	27	03	Var			Persentase Pembinaan Kelompok Tani	Persen	22.03	25.52	29.02	32.52	36.01	36.01	DKPPP																																	
3	27	03	Var			Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan Tahun n	Kelompok	63	73	83	93	103	103	DKPPP																																	
3	27	03	Var			Jumlah kelompok tani	Kelompok	286	286	286	286	286	286	DKPPP																																	
3	27	03	Var			Persentase Pembinaan Gapoktan	Persen	13.33	26.67	40.00	53.33	66.67	66.67	DKPPP																																	
3	27	03	Var			Jumlah Gapoktan yang mendapatkan bantuan Tahun n	Kelompok	6	12	18	24	30	30	DKPPP																																	
3	27	03	Var			Jumlah Gapoktan	Kelompok	45	45	45	45	45	45	DKPPP																																	
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	(Jumlah Hewan yang Divaksinasi / Jumlah Hewan yang Terdata * 100) + (Jumlah Unit Usaha Hewan yang diawasi / Jumlah Usaha Hewan yang Ada * 100) / 2	Persen	37.75	39.87	42.00	44.12	46.24	46.24	DKPPP																																	
3	27	04	Var			Persentase Vaksinasi Hewan	Persen	0.49	0.58	0.66	0.74	0.82	0.82	DKPPP																																	
3	27	04	Var			Jumlah Hewan yang Divaksinasi	Ekor	1500	1750	2,000	2,250	2500	2500	DKPPP																																	
3	27	04	Var			Jumlah Hewan yang Terdata	Ekor	303868	303868	303868	303868	303868	303868	DKPPP																																	
3	27	04	Var			Persentase Pengawasan Unit Usaha Hewan	Persen	75.00	79.17	83.33	87.50	91.67	91.67	DKPPP																																	
3	27	04	Var			Jumlah Unit Usaha Hewan yang diawasi	Unit	18	19	20	21	22	22	DKPPP																																	
3	27	04	Var			Jumlah Usaha Hewan yang Ada	Unit	24	24	24	24	24	24	DKPPP																																	
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim yang ditangani / Jumlah Area Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan * 100	Persen	41.76	46.07	50.37	54.68	58.99	58.99	DKPPP																																	
3	27	05	Var			Jumlah Area terdampak Perubahan Iklim yang ditangani	Ha	446	492	538	584	630	630	DKPPP																																	
3	27	05	Var			Jumlah Area Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	1068	1068	1068	1068	1068	1068	DKPPP																																	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani	((Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang difasilitasi / Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Ada *100) + (Jumlah Kelembagaan Petani yang Dibina / Jumlah Kelembagaan Petani yang Ada *100) / 2)	Persen	38.74	38.88	40.93	42.93	44.87	44.87	DKPPP
3	27	07	Var		Persentase Fasilitasi Kelembagaan Penyuluhan	Persen	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	DKPPP
3	27	07	Var		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang difasilitasi	Lembaga	3	3	3	3	3	3	DKPPP
3	27	07	Var		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang Ada	Lembaga	5	5	5	5	5	5	DKPPP
3	27	07	Var		Persentase Pembinaan Kelembagaan Petani	Persen	17.48	17.75	21.87	25.86	29.75	29.75	DKPPP
3	27	07	Var		Jumlah Kelembagaan Petani yang Dibina	Lembaga	50	60	75	90	105	105	DKPPP
3	27	07	Var		Jumlah Kelembagaan Petani yang Ada	Lembaga	286	338	343	348	353	353	DKPPP
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										DISKOP
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	((Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi / Jumlah Keseluruhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Sudah Ada * 100) + (Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun / Jumlah Keseluruhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Sudah Ada * 100))/2	Persen	0.37	0.44	0.22	0.40	0.48	0.92	DISKOP
3	30	03	Var		Persentase Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	0.73	0.73	0.15	0.37	0.37	0.37	DISKOP
3	30	03	Var		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi	Unit	10	10	2	5	5	5	DISKOP
3	30	03	Var		Jumlah Keseluruhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Ada	Unit	1361	1361	1361	1361	1361	1361	DISKOP
3	30	03	Var		Persentase Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	0	0.15	0.29	0.44	0.59	1.47	DISKOP
3	30	03	Var		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	Unit	0	2	4	6	8	20	DISKOP
3	30	03	Var		Jumlah Keseluruhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Ada	Unit	1361	1361	1361	1361	1361	1361	DISKOP
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	((Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya yang Dipantau / Jumlah Keseluruhan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya * 100)) + ((Harga Barang Pokok Sekarang - Harga Barang Pokok Sebelumnya) / Harga Barang Pokok Sebelumnya * 100%)) + (Jumlah Operasi Pasar / Operasi Pasar yang Seharusnya Dilaksanakan dalam Setahun * 100) / 3	Persen	61.11	59.97	60.01	59.98	59.98	59.98	DISKOP
3	30	04	Var		Persentase Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	100	DISKOP
3	30	04	Var		Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya yang Dipantau	Kali	16	16	16	16	16	16	DISKOP
3	30	04	Var		Jumlah Keseluruhan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	Kali	16	16	16	16	16	16	DISKOP
3	30	04	Var		Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok	Persen	33.33	29.90	30.04	29.93	29.95	29.95	DISKOP
3	30	04	Var		(Harga Barang Pokok Sekarang - Harga Barang Pokok Sebelumnya)	Rp (juta)	14.8	17.7	23.1	29.9	38.9	38.9	DISKOP
3	30	04	Var		Harga Barang Pokok Sebelumnya	Rp (juta)	44.4	59.2	76.9	99.9	129.9	129.9	DISKOP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	30	04	Var		Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar	Persen	50	50	50	50	50	50	DISKOP
3	30	04	Var		Jumlah Operasi Pasar	Kali	1	1	1	1	1	1	DISKOP
3	30	04	Var		Operasi Pasar yang Seharusnya Dilaksanakan dalam Setahun	Kali	2	2	2	2	2	2	DISKOP
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang	Promosi Dagang yang Diikuti / Jumlah Keseluruhan Promosi Dagang dalam Setahun * 100	Persen	50.00	50.00	75.00	80.00	83.33	83.33	DISKOP
3	30	05	Var		Pameran Dagang yang Diikuti	Even	1	2	3	4	5	5	DISKOP
3	30	05	Var		Jumlah Keseluruhan Pameran Dagang dalam Setahun	Even	2	4	4	5	6	6	DISKOP
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tera Tera Ulang UTTP	Jumlah Tera Tera Ulang UTTP / Jumlah Yang Seharusnya Ditera Tera Ulang dalam Setahun* 100	Persen	63.47	71.25	71.35	74.07	77.71	77.71	DISKOP
3	30	06	Var		Jumlah Tera Tera Ulang UTTP	Unit	1522	1710	1723	1800	1900	1900	DISKOP
3	30	06	Var		Jumlah yang Seharusnya di Tera Tera Ulang dalam Setahun	Unit	2398	2400	2415	2430	2445	2445	DISKOP
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										DISKOP
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah	((Jumlah IKM yang dibina / Jumlah Keseluruhan IKM * 100%) + (Jumlah Pengawasan / Jumlah Keseluruhan Pengawasan IKM *100) + (Jumlah Promosi Produk IKM / Jumlah Keseluruhan Produk IKM * 100)) / 3	Persen	4.34	4.95	5.27	5.77	6.27	6.27	DISKOP
3	31	02	Var		Persentase Pembinaan IKM	Persen	9.53	10.44	10.45	10.67	10.87	10.87	DISKOP
3	31	02	Var		Jumlah IKM yang dibina	IKM	200	220	230	240	250	250	DISKOP
3	31	02	Var		Jumlah Keseluruhan IKM	IKM	2098	2108	2,202	2,250	2300	2300	DISKOP
3	31	02	Var		Persentase Pengawasan IKM	Persen	1.36	1.61	1.67	2.05	2.45	2.45	DISKOP
3	31	02	Var		Jumlah Pengawasan IKM	IKM	15	18	20	25	30	30	DISKOP
3	31	02	Var		Jumlah Keseluruhan Pengawasan IKM	IKM	1107	1117	1,200	1,220	1225	1225	DISKOP
3	31	02	Var		Persentase Promosi Produk IKM	Persen	2.14	2.80	3.70	4.60	5.48	5.48	DISKOP
3	31	02	Var		Jumlah Promosi Produk IKM	Produk	45	60	80	100	120	120	DISKOP
3	31	02	Var		Jumlah Keseluruhan Produk IKM	Produk	2098	2145	2,165	2,175	2190	2190	DISKOP
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang memiliki Izin	Jumlah IKM yang memiliki Izin / Jumlah Keseluruhan IKM * 100	Persen	4.73	4.74	5.00	5.33	5.65	5.65	DISKOP
3	31	03	Var		Jumlah IKM yang memiliki Izin	IKM	90	100	110	120	130	130	DISKOP
3	31	03	Var		Jumlah Keseluruhan IKM	IKM	1901	2108	2202	2250	2300	2300	DISKOP
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DISKOP
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	01		SEKRETARIAT DAERAH										SETDAKO
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	SETDAKO
4	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	SETDAKO
4	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	SETDAKO

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	((Jumlah Rancangan Produk Hukum yang ditetapkan / Keseluruhan Produk Hukum dalam Satu Tahun * 100) + (Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang Disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah _LKPJ, LPPD, ILPPD_ * 100) / 2)	Persen	98.53	98.70	98.70	98.70	98.70	98.70	SETDAKO
4	01	02	Var		Persentase Penetapan Rancangan Produk Hukum	Persen	97.06	97.40	97.40	97.40	97.40	97.40	SETDAKO
4	01	02	Var		Jumlah Rancangan Produk Hukum yang ditetapkan	Qanun, Perwal, SK	595	674	674	674	674	674	SETDAKO
4	01	02	Var		Keseluruhan Produk Hukum dalam Satu Tahun	Qanun, Perwal, SK	613	692	692	692	692	692	SETDAKO
4	01	02	Var		Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	SETDAKO
4	01	02	Var		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang Disampaikan Tepat Waktu	Laporan	4	4	4	4	4	4	SETDAKO
4	01	02	Var		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LKPJ, LPPD, ILPPD)	Laporan	4	4	4	4	4	4	SETDAKO
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	((Jumlah Dokumen Kebijakan yang Disusun / Jumlah Dokumen Kebijakan yang Seharusnya Disusun * 100) + (Jumlah Kebijakan yang Dievaluasi / Jumlah Kebijakan yang Seharusnya Dievaluasi * 100) / 2)	Persen	91.11	97.00	97.00	92.00	92.00	92.00	SETDAKO
4	01	03	Var		Persentase Penyusunan Dokumen Kebijakan	Persen	91.30	94.00	94.00	84.00	84.00	84.00	SETDAKO
4	01	03	Var		Jumlah Dokumen Kebijakan yang Disusun (Ekonomi, PBJ, Pembangunan)	Dokumen	42	47	47	42	42	42	SETDAKO
4	01	03	Var		Jumlah Dokumen Kebijakan yang Seharusnya Disusun (Ekonomi, PBJ, Pembangunan)	Dokumen	46	50	50	50	50	50	SETDAKO
4	01	03	Var		Persentase Evaluasi Kebijakan	Persen	90.91	100	100	100	100	100	SETDAKO
4	01	03	Var		Jumlah Kebijakan yang Dievaluasi (Ekonomi, PBJ, Pembangunan)	Kebijakan	10	33	20	20	15	15	SETDAKO
4	01	03	Var		Jumlah Kebijakan yang Seharusnya Dievaluasi (Ekonomi, PBJ, Pembangunan)	Kebijakan	11	33	20	20	15	15	SETDAKO
4	02		SEKRETARIAT DPRD										SETWAN
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	SETWAN
4	02	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	SETWAN
4	02	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	SETWAN
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan	Jumlah rancangan qanun yang ditetapkan/jumlah prolegda x 100%	Persen	41.18	70.00	72.73	81.82	83.33	83.33	SETWAN
4	02	02	Var		Jumlah rancangan qanun yang ditetapkan	Ragan	7	7	8	9	10	10	SETWAN
4	02	02	Var		Jumlah Prolegda	Ragan	17	10	11	11	12	12	SETWAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
							Target	Target	Target	Target	Target	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	01		PERENCANAAN									BAPPEDA
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	BAPPEDA
5	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	BAPPEDA
5	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	BAPPEDA
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RPKP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RPKP	Jumlah Program RPKP Tahun Berkenaan / Jumlah Program RPJMK Yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan * 100	Persen	100	100	100	100	100	BAPPEDA
5	02		KEUANGAN									BPKD
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	BPKD
5	02	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	BPKD
5	02	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	BPKD
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKD
5	02	02		Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	(Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud / Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan / Jumlah Perangkat *100%) + (Jumlah Penghapusan Aset / Jumlah Permohonan Penghapusan Aset *100%) / 3	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKD
5	02	03	Var		Persentase Perangkat Daerah Tertib Aset	Persen	100	100	100	100	100	BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Asset Tetap dan Tak Berwujud	PD	34	34	34	34	34	BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah	PD	34	34	34	34	34	BPKD
5	02	03	Var		Persentase Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan	Persen	100	100	100	100	100	BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah Tertib Administrasi Persediaan	PD	34	34	34	34	34	BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Perangkat Daerah	PD	34	34	34	34	34	BPKD
5	02	03	Var		Persentase Penghapusan Aset Daerah	Persen	100	100	100	100	100	BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Penghapusan Aset	PD	13	15	17	18	20	BPKD
5	02	03	Var		Jumlah Permohonan Penghapusan Aset	PD	13	15	17	18	20	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PAD	Jumlah realisasi PAD /target PAD * 100%	Persen	68.50	100	100	100	100	BPKD
5	02	04	Var		Jumlah realisasi PAD	Rp (M)	62.45	70.31	70.39	70.39	70.39	BPKD
5	02	04	Var		Target PAD	Rp (M)	91.17	70.31	70.39	70.39	70.39	BPKD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	03		KEPEGAWAIAN										BKPSDM
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan /Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	BKPSDM
5	03	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	BKPSDM
5	03	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian /Jumlah ASN Kota Lhokseumawe *100%	Persen	50.60	52.19	53.10	54.02	54.94	54.94	BKPSDM
5	03	02	Var		Jumlah layanan kepegawaian	Orang	1655	1707	1737	1767	1797	1797	BKPSDM
5	03	02	Var		Jumlah ASN Kota Lhokseumawe	Orang	3271	3271	3271	3271	3271	3271	BKPSDM
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										BKPSDM
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural /Jumlah total jabatan *100%	Persen	8.77	9.36	9.75	10.14	10.33	10.33	BKPSDM
5	04	02	Var		Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	45	48	50	52	53	53	BKPSDM
5	04	02	Var		Jumlah total jabatan	Jabatan	513	513	513	513	513	513	BKPSDM
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										BAPPEDA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Jumlah Kelitbangan dalam RKPK / Jumlah Kelitbangan dalam Renstra * 100	Persen	50.00	85.71	75.00	75.00	67.86	100.00	BAPPEDA
5	05	02	Var		Jumlah Kelitbangan dalam RKPK	Subkeg	3	24	21	21	19	28	BAPPEDA
5	05	02	Var		Jumlah Kelitbangan dalam Renstra	Subkeg	6	28	28	28	28	28	BAPPEDA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	01		INSPEKTORAT DAERAH										INSPEKTORAT
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan /Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
6	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	INSPEKTORAT
6	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	INSPEKTORAT
6													
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	(Jumlah Hasil Evaluasi Sakip yang ditindak lanjuti / Jumlah Evaluasi * 100) + (Jumlah OPD, Sekolah, Puskesmas dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan /Jumlah OPD, Sekolah, Puskesmas dan Gampoeng * 100) + (Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan * 100) + (Jumlah Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Pengaduan Yang dilaporkan * 100) / 4	Persen	78.35	80.02	81.43	82.60	83.56	83.56	INSPEKTORAT
6	01	02	Var		Persentase Evaluasi SAKIP	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
									Target	Target	Target	Target	Target	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	01	02	Var			Jumlah Hasil Evaluasi Sakip yang ditindak lanjuti	Laporan	12	12	12	12	12	48	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Jumlah Evaluasi	Laporan	12	12	12	12	12	48	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Persentase Pengawasan OBRIK	Persen	40.67	43.06	44.98	46.41	47.37	47.37	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Jumlah OPD, Sekolah, Puskesmas dan Gampoeng yang dilakukan pengawasan	Obrik	85	90	94	97	99	99	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Jumlah OPD, Sekolah, Puskesmas dan Gampoeng	Obrik	209	209	209	209	209	209	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persen	72.72	77.00	80.73	83.99	86.87	86.87	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan	573	653	733	813	893	893	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan	Laporan	788	848	908	968	1028	1028	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Persentase Tindak Lanjut Kasus Pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Jumlah Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	Kasus	7	10	10	12	12	44	INSPEKTORAT
6	01	02	Var			Jumlah Pengaduan Yang dilaporkan	Kasus	7	10	10	12	12	44	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Kemenpan RB (Diisi dengan Point dan Kategori)	Point / Kategori	Proses	CC 50.10	CC 50.50	CC 51.00	CC 51.50	CC 51.50	INSPEKTORAT	
6	01	03		Level Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian BPKP Perwakilan Aceh	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	INSPEKTORAT	
6	01	03		Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	Hasil Penilaian BPKP Perwakilan Aceh	Level	Level 2	Level 3 3.2	Level 3 3.2	Level 3 3.5	Level 3 3.5	Level 3 3.5	INSPEKTORAT	
7			UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01		KECAMATAN											B. SAKTI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	6	B. SAKTI
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	6	B. SAKTI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Jumlah PKK gampong yang dibina/jumlah Gampong dalam kecamatan*100%	Persen	5.56	33.33	44.44	55.56	55.56	55.56	55.56	B. SAKTI
7	01	03	Var		Jumlah PKK gampong yang dibina	PKK	1	6	8	10	10	10	10	B. SAKTI
7	01	03	Var		jumlah Gampong dalam kecamatan	Gampong	18	18	18	18	18	18	18	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Jumlah penertiban yang dilaksanakan/jumlah yang direncanakan*100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01	04	Var		Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kali	20	25	30	35	40	40	40	B. SAKTI
7	01	04	Var		jumlah yang direncanakan	Kali	20	25	30	35	40	40	40	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	jumlah penanganan di Kec/Jumlah permasalahan di kec *100%	Persen	75	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01	05	Var		Jumlah penanganan di Kec	Kasus	3	5	7	8	9	9	9	B. SAKTI
7	01	05	Var		Jumlah permasalahan di kec	Kasus	4	5	7	8	9	9	9	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong/Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
7	01	06	Var		Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Dokumen	18	18	18	18	18	18	18	B. SAKTI
7	01	06	Var		Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gampong	18	18	18	18	18	18	18	B. SAKTI
7	01		KECAMATAN											B. MANGAT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	B. MANGAT
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	B. MANGAT
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	B. MANGAT
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Fasilitas Publik	Jumlah Fasilitas Publik yang Dipelihara / Jumlah Fasilitas Publik yang Ada * 100	Persen	40	40	60	100	100	100	B. MANGAT
7	01	02	Var		Jumlah Fasilitas Publik yang Dipelihara	Unit	2	2	3	5	5	5	B. MANGAT
7	01	02	Var		Jumlah Fasilitas Publik yang Ada	Unit	5	5	5	5	5	5	B. MANGAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Jumlah PKK gampong yang dibina/jumlah Gampong dalam kecamatan*100%	Persen	86.36	86.36	86.36	90.91	90.91	90.91	B. MANGAT
7	01	03	Var		Jumlah PKK gampong yang dibina	PKK	19	19	19	20	20	20	B. MANGAT
7	01	03	Var		Jumlah Gampong dalam kecamatan	Gampong	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Jumlah penertiban yang dilaksanakan/jumlah yang direncanakan*100%	Persen	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	B. MANGAT
7	01	04	Var		Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	5	5	5	B. MANGAT
7	01	04	Var		jumlah yang direncanakan	Kali	5	5	5	5	5	5	B. MANGAT
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Jumlah penanganan di Kec/Jumlah permasalahan di kec *100%	Persen	13.64	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	B. MANGAT
7	01	05	Var		Jumlah penanganan di Kec	Kasus	3	5	5	5	5	5	B. MANGAT
7	01	05	Var		Jumlah permasalahan di kec	Kasus	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong/Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	B. MANGAT
7	01	06	Var		Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Dokumen	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
7	01	06	Var		Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gampong	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
7	01		KECAMATAN										M. SATU
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	M. SATU
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	M. SATU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Jumlah PKK gampong yang dibina/Jumlah Gampong dalam kecamatan*100%	Persen	100	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01	03	Var		Jumlah PKK gampong yang dibina	PKK	11	11	11	11	11	11	M. SATU
7	01	03	Var		Jumlah Gampong dalam kecamatan	Gampong	11	11	11	11	11	11	M. SATU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Jumlah penertiban yang dilaksanakan/Jumlah yang direncanakan*100%	Persen	100	42.86	50.00	42.86	42.86	42.86	M. SATU
7	01	04	Var		Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kali	7	3	4	3	3	3	M. SATU
7	01	04	Var		Jumlah yang direncanakan	Kali	7	7	8	7	7	7	M. SATU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	jumlah penanganan di Kec/Jumlah permasalahan di kec *100%	Persen	100	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01	05	Var		Jumlah penanganan di Kec	Kasus	5	6	7	8	9	9	M. SATU
7	01	05	Var		Jumlah permasalahan di kec	Kasus	5	6	7	8	9	9	M. SATU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
							Target	Target	Target	Target	Target	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong/Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	M. SATU
7	01	06	Var		Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Dokumen	11	11	11	11	11	M. SATU
7	01	06	Var		Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gampong	11	11	11	11	11	M. SATU
7	01		KECAMATAN									M. DUA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	M. DUA
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	M. DUA
7	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	M. DUA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Jumlah PKK gampong yang dibina/Jumlah Gampong dalam kecamatan*100%	Persen	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65	M. DUA
7	01	03	Var		Jumlah PKK gampong yang dibina	PKK	3	3	3	3	3	M. DUA
7	01	03	Var		Jumlah Gampong dalam kecamatan	Gampong	17	17	17	17	17	M. DUA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Jumlah penertiban yang dilaksanakan/Jumlah yang direncanakan*100%	Persen	23.53	23.53	23.53	23.53	23.53	M. DUA
7	01	04	Var		Jumlah penertiban yang dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	M. DUA
7	01	04	Var		Jumlah yang direncanakan	Kali	17	17	17	17	17	M. DUA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	jumlah penanganan di Kec/Jumlah permasalahan di kec *100%	Persen	17.65	17.65	17.65	17.65	17.65	M. DUA
7	01	05	Var		Jumlah penanganan di Kec	Kasus	3	3	3	3	3	M. DUA
7	01	05	Var		Jumlah permasalahan di kec	Kasus	17	17	17	17	17	M. DUA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong/Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	M. DUA
7	01	06	Var		Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Dokumen	17	17	17	17	17	M. DUA
7	01	06	Var		Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gampong	17	17	17	17	17	M. DUA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									KESBANGPOL
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
8	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	KESBANGPOL
8	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah Pelajar Menengah Atas yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan/jumlah penduduk * 100	Persen	0.82	1.44	1.91	2.20	2.21	KESBANGPOL
8	01	02	Var		Jumlah Pelajar Menengah Atas yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	Orang	106	206	300	380	420	KESBANGPOL
8	01	02	Var		Jumlah penduduk	Orang	12991	14290	15719	17291	19020	KESBANGPOL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	Jumlah Pengguna Hak Pilih /Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih (DPT) x 100%	Rasio	75.94	78.76	79.95	81.02	81.98	81.98	KESBANGPOL
8	01	03	Var		Jumlah Pengguna Hak Pilih	Orang	113083	132107	141619	151131	160643	160643	KESBANGPOL
8	01	03	Var		Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih (DPT)	Orang	148916	167728	177134	186539	195945	195945	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	Jumlah ormas yang mendapat bantuan /Jumlah ormas yang terdaftar * 100%	Persen	12.96	15.00	18.75	18.57	20.27	20.27	KESBANGPOL
8	01	04	Var		Jumlah ormas yang mendapat bantuan	Ormas	7	9	12	13	15	15	KESBANGPOL
8	01	04	Var		Jumlah ormas yang terdaftar	Ormas	54	60	64	70	74	74	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama	Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan dan sosialisasi/Jumlah penduduk usia 15-40 tahun *100%	Persen	NA	1.46	2.65	3.61	4.37	4.37	KESBANGPOL
8	01	05	Var		Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan dan sosialisasi	Orang	NA	1360	2720	4080	5440	5440	KESBANGPOL
8	01	05	Var		Jumlah penduduk usia 15-40 tahun	Orang	NA	93447	102792	113071	124378	124378	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Jumlah konflik sosial yang diselesaikan /Jumlah konflik yang dilaporkan *100%	Persen	NA	100	100	100	100	100	KESBANGPOL
8	01	06	Var		Jumlah konflik sosial yang diselesaikan	Konflik	NA	4	3	2	1	1	KESBANGPOL
8	01	06	Var		Jumlah konflik yang dilaporkan	Konflik	NA	4	3	2	1	1	KESBANGPOL
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN										
9	01		KEKHUSUSAN ACEH										MPU
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	MPU
9	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	MPU
9	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa yang tersebarluaskan	Jumlah Fatwa yang tersampaikan/Jumlah fatwa keseluruhan * 100	Persen	58.33	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	MPU
9	01	03	Var		Jumlah Fatwa yang tersampaikan	Fatwa	7	5	5	5	5	20	MPU
9	01	03	Var		Jumlah fatwa keseluruhan	Fatwa	12	7	7	7	7	28	MPU
9	01		KEKHUSUSAN ACEH										B. MAL
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	B. MAL
9	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	B. MAL
9	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	B. MAL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2021	Target Kinerja Program				Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
								Target	Target	Target	Target	Target	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Jumlah Zis yang disalurkan/jumlah Zis yang dikumpulkan	Rasio	0.72	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	B. MAL
9	01	04	Var		Jumlah Zis yang disalurkan	Milyar Rp	4.92	6.93	7.18	7.43	7.67	7.67	B. MAL
9	01	04	Var		Jumlah Zis yang dikumpulkan	Milyar Rp	6.86	7.00	7.25	7.50	7.75	7.75	B. MAL
9	01		KEKHUSUSAN ACEH										DSI-PD
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia*100	Persen	100	100	100	100	100	100	DSI-PD
9	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Jenis	6	6	6	6	6	6	DSI-PD
9	01	01	Var		Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintah Daerah yang seharusnya tersedia	Jenis	6	6	6	6	6	6	DSI-PD
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Cakupan Pembinaan Syariat Islam	(Jumlah Mesjid yang memiliki Imam Hafidz yang dibina/Jumlah Mesjid*100)+(Jumlah Cabang Tilawah Quran yang dibina/Jumlah seluruh Cabang Tilawah Quran)/2	Persen	43.70	48.50	53.88	53.88	59.43	59.43	DSI-PD
9	01	02	Var		Jumlah Mesjid yang memiliki Imam Hafidz yang dibina/Jumlah Mesjid*100	Persen	9.62	19.23	18.87	18.87	18.87	18.87	DSI-PD
9	01	02	Var		Jumlah Mesjid yang memiliki Imam Hafidz yang dibina	Mesjid	5	10	10	10	10	10	DSI-PD
9	01	02	Var		Jumlah Mesjid	Mesjid	52	52	53	53	53	53	DSI-PD
9	01	02	Var		Jumlah Cabang Tilawah Quran yang dibina/Jumlah seluruh Cabang Tilawah Quran	Persen	77.78	77.78	88.89	88.89	100.00	100.00	DSI-PD
9	01	02	Var		Jumlah Cabang Tilawah Quran yang dibina	Cabang	7	7	8	8	9	9	DSI-PD
9	01	02	Var		Jumlah seluruh Cabang Tilawah Quran	Cabang	9	9	9	9	9	9	DSI-PD

Keterangan :
Var = Variabel



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022**